

MENDALAMI SUARA DI BAWAH PERMUKAAN

Kumpulan Liputan Mendalam Hak Asasi Manusia

Langgam.id, Roehanaproject.com dan Interes.id

**LBH Padang
2023**

PENGANTAR

***Public Interest Media,* Menorehkan Sejarah Mereka yang Termarginalkan**

**Oleh: Indira Suryani
Direktur LBH Padang**

Perkembangan teknologi digital memberikan transformasi baru dalam mengakses informasi dan berita di publik. Menguatnya teknologi digital berkontribusi pada menjamurnya media digital baik berbasis lokal ataupun nasional. Media local berbasis digital menjadi trend baru bagi publik untuk mendapatkan informasi yang terjadi sesegera mungkin. Kehadiran media lokal akan memberikan manfaat berupa media informasi, pendidikan,

hiburan dan kontrol sosial. Salah satu peran penting media lokal digital menjadi alat kontrol sosial bagi rakyat perlu digalakkan. Banyak kasus-kasus yang viral kemudian tertangani dengan baik karena dukungan dari media lokal digital.

Media lokal digital dapat berdampak bagi korban pelanggaran HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang diangkat oleh media lokal digital dapat memberikan dukungan publik yang luas. Bahkan pemberitaan media lokal berpengaruh untuk menekan pemerintah agar melakukan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Misalnya saja [harstage](#) [#sumbardaruratkekerasanseksual](#) mendorong lahirnya surat edaran Gubernur bagi Bupati/Wali kota untuk menangani dan menganggarkan pembiayaan untuk korban kekerasan seksual di Sumatera Barat. Fakta ini mendeskripsikan media lokal digital sebagai media informasi dan kontrol sosial.

Di Sumatera Barat, media lokal digital berkembang pesat yang ditandai banyaknya media lokal dan hiperlokal yang eksis. Terdapat 82 media lokal digital di Sumatera Barat. Sebut saja ada [langgam ID](#), [roehana project](#), dan [interest](#) yang juga dalam bentuk konten video. Perkembangan media

lokal digital mestilah dibarengi dengan penguatan isu HAM dan demokrasi di tingkat lokal. Namun, model pemberitaan strike news tidak mampu mengangkat isu HAM dan demokrasi secara baik ke publik. Strike news masih terbatas terkait kedalaman informasi masih minim karena cenderung pemberitaan singkat dan sederhana. Metode liputan mendalam yang sinkron dan cocok untuk mengangkat cerita-cerita pelanggaran HAM ke publik. Selain itu, pengelolaan media juga mengalami perkembangan terbaru karena lahirnya jurnalis ataupun media yang mengusung konsep public interest media. Namun tantangannya, liputan mendalam butuh sumber daya pengetahuan, waktu, data dan narasumber yang tidak mudah dicapai. Dalam pengalaman kami bersama media lokal, mereka butuh waktu yang panjang bagi jurnalis untuk menghasilkan satu liputan mendalam.

Jika sebelumnya, media atau jurnalisme lebih banyak memberitakan proyek-proyek pemerintah namun saat ini juga berkembang public interest media yang menjadi antitesis dari sisi gelap media yang cenderung mendukung pemberitaan pemerintah dan pelaku usaha. Media mainstream, jarang mengangkat cerita rakyat yang termarginalkan akibat kuatnya arus industrialisasi dan

ekstraksi. Alhasil cerita itu tenggelam serta luput dari pencatatan sejarah atas peristiwa pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Kehadiran public interest media lebih memainkan fungsi kontrol sosial dalam pemberian informasi ke publik. Sehingga mendorong proses-proses advokasi atas situasi yang terjadi. Pemberitaan yang ditulis oleh public interest media dapat berdampak pada perubahan sosial. Tentu saja kekuatan publik di digital saat ini berkontribusi mempengaruhi pemerintah dan pelaku usaha untuk tidak semena-mena kepada masyarakat yang termarginalkan. Walaupun dalam situasi tertentu, dunia digital juga memunculkan fenomena yang buruk seperti buzzer dan akun palsu yang dibayar oleh kapital atau kekuasaan tertentu. Namun pembela HAM tetaplah bisa menjadikan digital sebagai media perjuangan yang baru untuk korban pelanggaran HAM. Kolaborasi antara public interest media dan pembela HAM adalah suatu keniscayaan dalam iklim digital saat ini.

6 bulan melaksanakan kerja sama dengan media lokal di Sumatera Barat untuk mendorong *public interest media*. Mereka di antaranya Langgam.id, Roehana Project dan Interes mengangkat isu-isu publik yang jarang tersuarakan. Beberapa isu yang diangkat seperti krisis air dan ruang hidup

di Mentawai, konflik agraria akibat sawit dan pengusulan PSN, bencana dan pemulihan hak, ruang hidup pedagang kaki lima, hak atas beribadah, kekerasan seksual terhadap disabilitas, hak-hak transpuan dan kriminalisasi masyarakat akibat industri ekstraktif. Liputan-liputan mendalam ini tentunya menjadi salah satu cara untuk mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Sumatera Barat. Kita boleh katakan, media digital dapat dipergunakan oleh korban pelanggaran HAM sebagai sejarah kelam dan perjuangan yang dicatatkan bagi generasi kedepan.

Kehadiran *public interest media* adalah semangat baru dalam mengembangkan advokasi HAM kedepan. Public interest media pastinya memberikan spirit bagi pembela-pembela HAM untuk selalu menyuarakan kepentingan kaum marginal ke publik. Kehadiran public interest media wajib dikuatkan dan diberdayakan seiring sejalan dengan perjuangan HAM para korban. Penindasan dan perjuangan harus dicatatkan dalam sejarah peradaban agar anak muda dan generasi berikutnya tidak melakukan kesalahan dan kekonyolan yang sama di kemudian hari. (*)

Padang, Senin (17/7/2023).

CATATAN PEMBUKA

Jurnalisme Mendalam dalam Riuhan Disrupsi Digital

**Oleh: Hendra Makmur
Jurnalis/ Editor**

Di tengah disrupsi digital yang masih melanda seluruh media massa di dunia, efektivitas jurnalisme masih jadi topik bahasan yang hangat. Terus meningkatnya pengguna internet disertai makin menguatnya media sosial sebagai simpul sumber informasi, menggoyahkan fungsi pers sebagai sumber informasi publik selama lebih dari satu abad.

Apakah jurnalisme masih diperlukan dalam berbagai kemudahan akses itu? Topik ini terus beriringan dengan bertumbuhannya media pers cetak di berbagai negara,

termasuk Indonesia. Sejalan pula dengan berkurangnya penonton televisi secara signifikan yang dalam puluhan tahun menjadi media paling efektif bagi jurnalisme video.

Bila sekedar untuk mengetahui apa peristiwa terkini yang terjadi, semua pihak telah bisa mengabarkan dengan cepat ketimbang wartawan yang jumlahnya terbatas.

Namun, banyaknya informasi yang beredar juga jadi masalah baru. Dalam disrupsi itu juga ada keriuhan informasi. Kepiawaian memilah dan memilih informasi yang akurat tak tersebar merata di tengah publik. Pada titik itu, keriuhan itu terkadang memicu kehebohan.

Kesempatan melalui pintu-pintu digital yang terbuka lebar bukan tanpa risiko. Di Indonesia contohnya, penguasa masih terus mempertahankan ancaman hukum untuk mereka yang "terpeleset" di dunia digital. Terkadang, hukuman itu bertambah dengan ancaman digital sejak dari intimidasi massal hingga peretasan.

Jurnalisme perlu mengambil tempat dalam kehebohan itu. Reposisi dari sekedar memberi informasi pada titik menjelaskan dan terkadang perlu meluruskan. Pada posisi ini, jurnalisme dengan jurus peliputan mendalam (in depth

reporting) menjadi solusi yang bisa disumbangkan oleh kalangan jurnalis.

Ini tentu bukan hal baru dalam jurnalisme. Peliputan mendalam telah dipraktekkan sejak jurnalisme "bermain" di media cetak, radio hingga televisi. Namun, teks, audio hingga video tersebut perlu mendapat format baru dalam berbagai platform yang mudah untuk diakses publik. Salah satunya, melalui media digital yang berjaringan secara multiplatform dengan media sosial.

Program peliputan mendalam dalam isu hak-hak asasi manusia yang diadakan LBH Padang dan Kurawal bersama Laggam.id, Roehanaproject.com dan Interes.id dengan kanal liputan videonya di Youtube menjadi penting dalam suasana disrupsi yang membawa banyak pengaruh dan perubahan itu. Dalam peliputan mendalam, jurnalis perlu mendalami suara di bawah permukaan: menyelam lebih dalam ke bawah fakta permukaan, mendengarkan dan menyuarakan suara dari bawah permukaan yang sering terdengar tak jelas.

Inisiatif LBH Padang bersama Kurawal, merupakan dukungan berarti bagi jurnalisme untuk media lokal dalam kegamangan

akibat dampak disrupsi. Salah satunya, karena "rimba raya" digital tak menempatkan penghargaan pada kualitas karya jurnalistik, tapi pada selera pengguna internet yang diombang-ambingkan aspek non jurnalisme.

Pada tingkat itu, media massa, terutama di tingkat lokal, kehilangan tempat bergantung untuk mendukung karya jurnalistik yang berkualitas. Sebagian yang lain mengikuti arus, mengikuti selera pasar yang terkadang jadi jebakan tak bertepi.

Dukungan dari LBH Padang dan Kurawal ini diharapkan juga adalah dorongan agar media massa terus menggali hal-hal penting yang tak tersuarakan di tengah keriuhan remeh-temeh.

Sebanyak 12 karya jurnalistik yang dihasilkan para jurnalis di Roehanaprojects.com, 12 karya di Laggam.id dan enam karya di Interes.id, telah memenuhi kriteria peliputan mendalam di bidang hak-hak asasi manusia di Sumatra Barat.

Liputan para jurnalis menyentuh berbagai hak-hak mendasar manusia, antara lain sejak dari hak untuk hidup, hak tanpa diskriminasi, hak terbebas dari penyiksaan, hak atas kesetaraan di depan hukum, hak perlindungan hukum, hak

dari penangkapan sewenang-wenang, hak untuk audiensi publik, hak untuk mencari tempat yang aman untuk hidup, hak untuk kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak berdemokrasi serta hak untuk bekerja.

Karya-karya tersebut dikerjakan dengan teknik liputan mendalam dan sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. Hal-hal penting berhasil diidentifikasi, kemudian digali untuk dijelaskan dengan gamblang dalam karya jurnalistik.

Namun masih perlu diuji dan digarisbawahi, sejauh mana karya-karya tersebut berdampak lebih luas, setidaknya untuk mewujudkan literasi yang lebih baik di tengah keriuhan publik digital tadi. Dengan kata lain, perlu upaya yang lebih untuk bisa meraih lebih banyak perhatian publik: membuat hal penting jadi lebih menarik. (*)

01

Wajah Muram

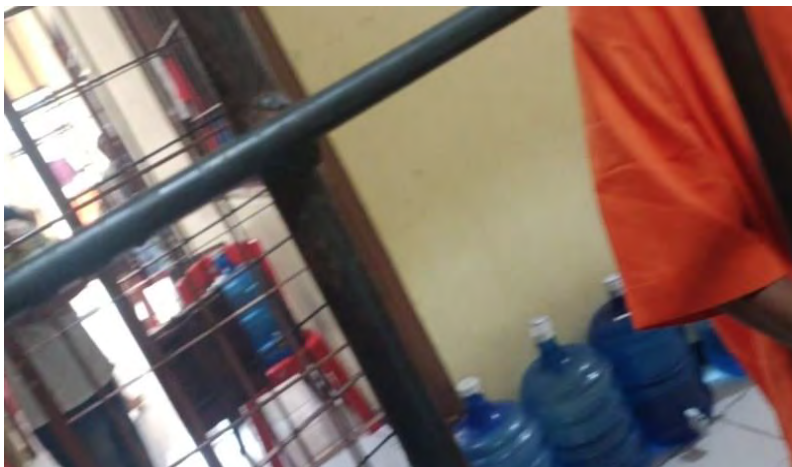
Penanganan Kasus

Dugaan Pidana Anak

Oleh: Dharma Harisa
Editor: Yose Hendra

Sabak tak beranjak dari wajah Dewi Sartika (36), tatkala menguraikan kembali kegetiran yang dialami adik kandungnya, RK (16), bulan Maret lalu. RK, seorang remaja kencur yang diduga mengalami penyiksaan oleh aparat kepolisian atas tuduhan terlibat pencurian sepeda motor di Padang Panjang.

"Adik saya dipukul, ditampar pakai sendal, kepalanya dimasukkan ke tong sampah. Padahal dari awal, ia telah mengatakan tidak melakukan pencurian," tutur Dewi yang



Usaha pertama kali pengacara Fadhilah Tsani menemui RK di sel tahanan Mapolres Padang Panjang, Selasa (7/3/2023). PH hanya diperbolehkan menemui RK di balik jeruji besi dan berbicara dengan berbisik-bisik dan tak leluasa. (Foto: Dok. Fadhila Tsani)

didampingi sang ibu, Asna Rubnita (60), dalam suasana terisak-isak kepada *Langgam.id*, Senin (17/7/2023).

RK ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Padang Panjang, Senin (6/3/2023). Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/20/III/2023/Reskrim Polres Padang Panjang, tertanggal 6 Maret 2023, RK dituduh melakukan dua kali pencurian sepanjang tahun 2021 dan 2022.

Pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, sekira pukul 05.00 WIB. Bertempat di Garase Rumah Jalan M. Nazir Dt. Pamuncak Rt. 21, Kelurahan Silaing Bawah,

Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Barang yang dilaporkan hilang adalah sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam putih.

Tuduhan kedua perihal hilangnya sepeda motor bermerek Honda Beat pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022, sekira pukul 07.30 WIB. Bertempat di parkir teras rumah Jalan Sutan Syahrir, gang Manunggal Rt. 010, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang.

Belakangan RK di vonis bebas oleh pengadilan, karena tidak terbukti bersalah melakukan pencurian sepeda motor. Namun, dugaan kekerasan yang ia dapati selama proses penyidikan mewariskan trauma yang tak berkesudahan, dan juga merusak nama baik keluarga.

Nestapa keluarga ini sampai ke telinga Fadhilah Tsani, seorang pengacara yang berdomisili di Kota Padang Panjang. Fadhilah dikenal sering mengadvokasi kasus hukum yang membelit masyarakat kecil.

"Untuk RK, sifatnya pro bono, dengan melampirkan surat keterangan miskin oleh ibu RK. Bagi saya ini amar makruf nahi mungkar. Karena iba orang tua RK, (orang) ndak berpunya,

dan tersentuh mendengar anak di bawah umur kena siksa," bilang Fadhilah, saat bersua *Langgam.id* di kantornya di jalan Abdul Hamid Hakim Nomor 12, Rt. 13, Kelurahan Pasa Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Minggu (16/7/2023) malam.

Pada 5 Juli lalu, Fadhila mendampingi Dewi dan keluarganya ke Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar). Intinya, Dewi meminta perlindungan kepada Komnas HAM Sumbar atas kasus dugaan penganiayaan yang dialami adiknya, RK (16) oleh penyidik Polres Padang Panjang. Selain ke Komnas HAM, Fadhila juga mengirim laporan terkait dugaan penyiksaan kepada Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Semua ini adalah ikhtiar bagi keluarga RK untuk mendapatkan keadilan yang layak.

Dan terpenting lagi, pengaduan ke Karo Provos Divpropam Polri pada 22 Mei 2023. Fadhilah memperlihatkan berkas aduan kepada *Dharma Harisa* dari *Langgam.id*. Dalam dokumen itu disebutkan ada enam orang anggota Polres Padang Panjang yang diduga melakukan penganiayaan. Masing-masing berinisial "IB" berpangkat Briptu, "FY" berpangkat Aipda, "T.B.S" berpangkat Briпка. Lalu, "NK"

berpangkat Bripda, "E.C.M berpangkat Brigadir, dan "AG" berpangkat brigadir.

Dalam surat yang ditujukan pada Karo Provos Divpropam Polri, Fadhilah mengatakan ada pemaksaan pembatalan kuasa. "Bahwa pada dini hari sekira pukul 00.30 tanggal 14 Maret 2023 kami Penasihat Hukum didatangi oleh ayah dari anak RF dan mengatakan bahwa ia telah dipaksa untuk menandatangani surat yang menurut pihak Polres adalah surat cabut kuasa yang telah diketik oleh pihak Polres Padang Panjang. Dan disuruh menandatangani beberapa dokumen yang ia sendiri tidak tahu dokumen apa saja," tulis Fadhilah. Lanjutnya, dikarenakan ayah RF ini adalah seorang yang buta huruf, bahwa ketika dini hari itu ayah RF tampak sangat ketakutan hingga menggigil tidak bisa berkata-kata lagi. Pada saat itu ayah RF hanya mengatakan bahwa ia telah diancam oleh pihak kepolisian tersebut namun tidak menyebutkan ancaman apa yang disampaikan oleh pihak polres."

Sebelumnya Fadhilah sebagai kuasa hukum keluarga RK, telah beberapa kali mengirimkan surat pengaduan dan pelaporan serta mohon perlindungan hukum. Pertama

tanggal 18 Maret ke Kapolda Sumbar. Dan yang kedua tanggal 18 April ke Kapolri.

Dalam surat tersebut Fadhilah menyampaikan, trauma yang dialami RK belum hilang sampai saat ini. "Klien kami dan juga keluarga besarnya telah mengalami hal yang kembali menakutkan yaitu beberapa kali didatangi oleh orang yang



Jejak dugaan penyiksaan yang dialami oleh RK dalam proses penyidikan kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor di Mapolres Padang Panjang. Kolase foto bersumber dari pengacara keluarga, Fadhilah Tsani.

mengaku utusan Polres Padang Panjang. Dengan tujuan

meminta dan/atau menghasut klien kami agar mencabut laporannya dan utusan pihak Polres tersebut menanyakan berapa (kebutuhan) yang diminta," kata Fadhilah.

Ia juga menyatakan saat ini RK dan keluarga besarnya merasa ketakutan dengan hal-hal yang dilakukan Polres Padang Panjang. Itu semua membuat kliennya beserta keluarga tidak nyaman dalam berkegiatan sehari-hari. Dalam surat tersebut juga dikatakan, pihak Polres selalu mengembalikan semua memori ketakutan dengan selalu mendatangi kliennya untuk mencabut laporan.

Kasat Reskrim Padang Panjang Iptu Istiqlal Istiqlal mengatakan pihaknya tidak akan mempersalahkan pernyataan dalam surat tersebut,. Namun ia membenarkan bahwa RF sudah mencabut laporan. Saat ini diketahui, RF sendiri sudah pindah ke Jambi. Fadhilah mengatakan, RF pindah karena merasa tidak nyaman lagi tinggal di Padang Panjang.

Penggeledahan

Sabtu (4/3/2023) dinihari, Asna Rubnita akan memberi makan kucing-kucingnya. Perempuan yang biasa dipanggil Uni/Ni Rub ini merupakan ibu dari RK. Ia bekerja sehari-hari sebagai

ibu rumah tangga. Ni Rub memiliki sembilan orang anak. RK adalah yang paling kecil (bungsu). RK merupakan anak yatim. Menurut penuturan Ni Rub, ayahnya sudah meninggal kurang lebih tiga tahun yang lalu.

Sekira pukul 02.00, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Belakangan diketahui yang mengetok itu adalah Sekretaris RT setempat. Sembari mengetok pintu, Sekretaris RT bertanya, "Di mana RK Nirub? Ini ada polisi mau memeriksa barang-barang" kata Rubnita mengingat kembali kejadian itu saat *Langgam.id* datang ke rumahnya, Senin (17/07/2023).

"Saya namanya hari malam, tentu linglung, terkejut, menggeledah apa? Permissi buk katanya, dia langsung masuk ke dalam. Tak ada pakai surat," katanya dengan ekspresi heran.

Rubnita menceritakan, saat itu polisi datang dengan dua buah mobil. Jumlahnya lebih kurang ada delapan orang. Kedatangan polisi itu juga turut membawa AD (19). AD diketahui salah seorang yang turut menjadi tersangka pencurian sepeda motor di Kota Padang Panjang. Saat itu RK, sejak bulan Februari 2023, tinggal bersama kakaknya yang memiliki warung nasi di Bengkulu.

Dengan tangan terikat kabel, polisi lalu menanyakan dimana ia (AD) meletakkan barang-barang yang digunakan untuk mencuri motor. AD kemudian menuju ke dalam rumahnya. Tepatnya ke bawah tangga yang terletak di tengah-tengah rumah. AD lalu mengacak-ngacak barang yang ada di bawah tangga.

Lalu ia mengambil sejumlah perkakas, seperti gergaji dan palu. "AD mengatakan itu adalah barang yang dipakai RK. Padahal perkakas-perkakas tersebut adalah milik suami saya, ayah tiri RK. Mulanya di sini saya belum tau maksudnya apa," ungkap Ni Rub.



Perempuan berbaju biru Dewi Sartika (kakak RK), sementara berbaju merah adalah Asna Rubnita (ibu RK), saat diwawancarai Dharma Harisa dari Langgam.id, Senin (17/7/2023), di kediamannya di Kota Padang Panjang.

Kemudian baru ia paham, tatkala polisi menyampaikan, RK anaknya bekerja sama dengan AD mencuri motor. "Dalam hati ketek wak, ndak marasa wak do, raso wak ndak iko karajo anak wak do. ndak ado, ndak yakin. (Dalam hati kecil, saya ndak merasa, rasanya bukan ini pekerjaan anak saya. Tidak ada, ndak yakin saya)," ucap Ni Rub.

Setelah itu polisi menggeledah kembali tiap sudut rumah, termasuk rumah Dewi yang ada di sebelahnya. Pada kesempatan yang sama, Dewi menceritakan kepada *Langgam.id*, bahwa polisi juga menyakan surat-surat motor RK. Memeriksa lemari baju RK, dan mengambil fotonya yang tertempel di dinding.

Polisi berinisial "FY" juga meminta nomor telepon genggam (pintar) adik Dewi di Bengkulu, tempat RK tinggal. "Saat saya membuka Hp, polisi yang bernama "FY" mengambil Hp dari tangan saya dan mencatatnya. Ia juga berkata pada saya, 'jan ibuk cubo-cubo menyembunyian, beko ibuk kanai pidana beko' (jangan ibuk coba-coba menyembunyikan, nanti ibuk kena pidana nanti)," kata Fadli dengan suara keras, sebagaimana ditirukan kembali oleh Dewi.

Lantas Dewi menjawab, "Saya tidak ada menyembunyikan apapun". Dan mereka pergi meninggalkan rumah saya."

Ia melanjutkan, sehabis kedatangan polisi malam itu, ibunya (Ni Rub) langsung menelepon RK yang tengah berada di Bengkulu. RK merantau di Bengkulu sejak bulan Februari 2023. Penuturan keluarga, karena ia tidak sedang bersekolah, sebab terlambat mendaftar masuk SMA. Oleh sebab itu, RK pergi ke tempat kakaknya di Bengkulu yang mempunyai warung nasi.

Dewi menceritakan, adiknya marah saat ibunya menceritakan kalau AD mengatakan ia ikut dalam kasus curanmor (pencurian kendaraan bermotor). RK meminta keluarga membelikan tiket untuk pulang agar bisa memberi keterangan ke kepolisian atas tuduhan AD tersebut. "Saya tidak ikut-ikutan bu. Tidak pernah ikut mencuri. Kenapa saya ia bawa-bawa. Bialah RK pulang," tutur Ni Rub menirukan apa yang RK katakan malam itu.

Adik laki-laki saya juga mencoba bicara dengan RK dan mengatakan bahwa minta dia berkata jujur. RK tetap berkata kalau dia tidak salah dan berani pulang. "Dia berkata, 'kalau kalau tidak salah ngapain takut,' kata adik saya," ucap Dewi.

Sabtu (04/03/2023), jam 11.00 WIB siang, RK berangkat dari Bengkulu menggunakan bus. Sampai di Padang Panjang hari Minggu (05/03/2023) Subuh jam 04.00 WIB pagi. Keluarga berpikiran karena hari Minggu, kantor polisi tidak terlalu aktif. Oleh karena itu di hari tersebut, keluarga mencoba menenangkan RK dulu untuk berkata jujur. Barulah Senin (06/03/2023), RK dibawa ke Polres Padang Panjang.

Sekitar pukul 10.30 WIB, RK dan keluarga, ditemani Bintara Pembina (Babin) kelurahan setempat, menuju Polres Padang Panjang. Mulanya kata Dewi, Babin kembali meyakinkan RK bahwasannya ia tidak mencuri. "RK ditanyai langsung oleh Babin terkait kasus curanmor tersebut. Adik saya tetap kukuh kalau dia tidak ada kaitannya dengan si AD itu. Dia berkata 'saya tidak salah, apa yang saya takutkan pak'," tutur Dewi, menceritakan lagi jelang adiknya ditahan.

Akhirnya Babin menelepon pihak polres Padang Panjang. Dan mengatakan, RK sudah bersamanya. Pihak Polres ingin menjemput, namun Dewi langsung memotong pembicaraan, dengan mengatakan tak perlu dijemput, karena mau mengantar langsung ke Mapolres Padang Panjang. Dalam proses pengantaran ke Mapolres itu, keluarga RK ditemani oleh Babin.

RK Diantar Langsung ke Mapolres

Senin (6/3/2023), RK tiba Polres Padang Panjang bersama keluarga. Ia langsung diantar ke ruangan Kasat Reskrim. Saat itu kata Ni Rub, anaknya ditanyai soal foto dan rekaman CCTV. Kasat Reskrim Polres Padang Panjang, Istiqlal, bertanya ke RK, 'Ini kamu?' RK menjawab tidak, sambil memeriksa pergelangan tangan RK. Menurut Ni Rub orang dalam foto/video yang diperlihatkan oleh polisi memiliki tato dipergelangan tangan. Anaknya tidak memiliki tato serupa.

Ketika itu papar Ni Rub, anaknya dengan pede menyatakan dirinya tidak bersalah. "Kalau saya salah, hukum saya dua lipat pak, kata RK," ucap Ni Rub menirukan kembali yang dikatakan RK. Tidak lama, RK dibawa oleh penyidik keluar dari ruang Kasat, menuju ruang bagian belakang Polres.

Waktu hendak menuju ruangan itu, Ni Rub bertanya kepada penyidik apakah boleh mendampingi anaknya? Penyidik tidak membolehkan. Ia lalu meminta Babinsa mendampingi RK, namun tetap tidak bisa. Kakak RK, Dewi, takut adiknya akan dikasari. Tapi Babin yang menemani saat itu meyakinkan hal itu tidak akan terjadi. Dan kalau memang terjadi, Babin tersebut meminta Dewi untuk menghubunginya.

Sekitar pukul 11.30 WIB, Dewi tidak sengaja bertemu RF yang baru keluar dari ruang penyidik. Pada saat itu, jelas Dewi, RF membisikkan agar berhati-hati. Kata RF, ia telah dihajar oleh polisi untuk mengakui hal-hal yang tidak diperbuatnya.

Sekira jam 15.00 WIB, Dewi pergi ke kantin Polres Padang Panjang untuk membeli nasi buat RK. Sebab khawatir adiknya belum makan. Di sana Wakapolres Padang Panjang saat itu, Kopol Alvira, sedang di kantin dengan Kasat Reskrim Istiqlal.

"Kasat bertanya, 'beli apa buk', saya menjawab 'beli nasi pak untuk RK.' Waka bertanya 'kasus apa pak Kasat' katanya. Kasat menjawab 'curanmor'. Waka bertanya 'gimana pengembangan penyidikannya?' Kasat menelpon penyidik dan saya disuruh duduk oleh pak Wakapolres," papar Dewi.

Setelah Kasat menelpon, Dewi dapat berita kalau adiknya telah mengakui melakukan curanmor di empat titik. Dengan ekspresi terheran, ia menceritakan kepada Langgam.id, kekagetannya. "Air mata saya sudah tidak terbendung lagi," ucap Dewi.

Ia bercerita pada Kasat dan Wakapolres, bahwa keluarga sudah berulang kali bertanya pada RK, dan mengaku tidak

bersalah. Kasat merespons kata Dewi, bahwa itukan pengakuannya pada keluarga. Toh disini ia telah mengaku melakukannya. Mendengar itu, Dewi mengatakan, kalau memang itu yang terjadi, maka adiknya harus dihukum. Hanya saja ia mewanti-wanti agar polisi tidak bersikap kasar kepada RK.

"Tapi pak kan, ndak main tangankan pak?, Adik saya tidak akan tertindas adik saya pak?. Lalu pak Waka menjawab, 'adik ibuk sudah diantarkan ke sini, jangan kan kena tangan kena sentil saja tidak boleh. Apalagi dia anak di bawah umur. Kalau ada apa-apa sampaikan sama saya, kata Pak Waka," tutur Dewi.

Setelah itu dia disuruh mengantarkan nasi yang sudah dipesan kepada RK. Waktu Dewi mengantarkan nasi, RK saya sudah berada di ruangan reserse umum (resum) dan dikelilingi oleh penyidik. "Sekitar 7-8 orang, dia sedang di kasih minum. Dia melihat ke saya dengan wajah sedih dan ketakutan setelah itu saya meninggalkan ruangan itu," katanya.

Pukul 17.00 WIB, suami Dewi menelepon dan mengatakan anak mereka FZ (15) dijemput polisi yang berjumlah sekitar

7-8 orang dengan dua mobil. Saat itu polisi tidak memperlihatkan surat-surat dan HP FZ diambil. Sesampainya FZ di Polres, ternyata ada dua temannya yang juga berada didalam mobil tersebut. Mereka adalah TF (16) dan HF (16). Ketiganya dibawa ke ruangan penyidik, tanpa ada yang mendampingi. Dewi juga tidak diperbolehkan masuk.

FZ diperiksa kurang lebih 2-3 jam. Sekitar jam 08.00 WIB malam, FZ diantar penyidik keluar menemui Dewi dan suaminya. Penyidik berkata kalau FZ tidak terlibat dalam kasus ini. "Lalu anak saya diantar ayahnya pulang ke rumah, dan saya tetap menunggu di Polres dengan harapan adik saya bisa pulang bersama saya," harap Dewi.

Tak berselang lama, suaminya menelepon dan mengatakan bahwa RK mengalami tindak penganiayaan yang dilakukan oknum polisi ketika dia berada di dalam ruang penyidik. Hal itu diceritakan oleh FZ, TF, dan HF.

Perasaan Remaja Kencur

"Dari awal saya ngantar adik saya, saya sudah bilang sama bapak, proses lah kalau memang benar adik saya bersalah. Hukum lah sesuai dengan apa yang dia lakukan, ternyata yang terjadi begini pak! Adik saya dipukuli, dihajar mentalnya

untuk bisa mengakui itu. Padahal bapak sendiri yang bilang, tidak akan ada tindak kekerasan dalam proses penyelidikan."

Kepada *Langgam.id*, Dewi Sartika mengulang lagi kekecewaan yang pernah ia sampaikan secara langsung kepada Wakapolres Padang Panjang Komisaris Polisi Alvira (Red: sekarang Ps Kasubbdit Provos Bid Propam Polda Sumbar) dan Kepala Satuan (Kasat) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang, Inspektur Polisi Satu (Iptu) Istiqlal, pada Rabu (8/3/2023).

Dewi mengaku melihat sendiri adiknya babak belur dalam sel tahanan Polres Padang Panjang. "Saya melihat matanya ketakutan sambil menggigit-gigit jari. Suatu isyarat permintaan tolong," ucap Dewi.

"Dewi, anak kita (FZ) bercerita, RK sudah kayak urang bodoh di dalam itu," kata Dewi menirukan suaminya yang menelepon malam itu, Senin (6/3/2023).

FZ anaknya bercerita, RK mengakui menjual motor ke pengepul besi ke Pariaman. Tapi anehnya, motor yang ia akui sebagai hasil pencurian tersebut adalah motor pribadi milik RK sendiri. Padahal ungkap Dewi, surat-surat motor tersebut masih ada di rumah.

"Motor itu memang sempat ia jual dalam bentuk tukar salam (ganti motor). Hanya saja saat itu, karena pemilik motor yang melakukan tukar salam dengan RK tidak memiliki BPKB, mereka hanya bertukar dengan bukti STNK. Jadi BPKB-nya masih ada oleh keluarga.

Selain itu FZ juga bercerita bahwa RK disiksa oleh polisi. Dalam surat keterangan yang diberikan oleh penasehat hukum RK kepada *langgam.id*, tertanggal 09 Maret 2023, FZ menulis kesaksian di atas materai dan diketahui orang tua. Selain FZ, dua anak lainnya, TF dan HF juga menulis kesaksian.

Bahwasannya, sekitar pukul 17.00 WIB Senin (06/03/2023), saat berada di rumah, FZ dijemput oleh dua mobil polisi. Di dalam mobil sudah ada tujuh orang polisi. Mereka membawa FZ menuju ketempat TF dan HF.

Dalam keterangannya, saksi anak HF mengatakan waktu itu ia sedang bersama TF. Kakaknya HF lalu menelpon dan meminta agar ia segera pulang ke rumah. Setibanya di dekat rumah HF dan TF sudah melihat FZ berada di dalam mobil polisi. "Lalu saya didatangi oleh bapak berpakaian warna biru. Bapak itu memegang krah baju TF dan saya. Bapak itu berkata, 'nama kamu siapa?', dan saya berkata HF dan saya

pun disuruh memakirkan motor saya di depan rumah tetangga," tulis HF.

Mereka berdua dibawa lalu dibawa ke Polres Padang Panjang, setelah sebelumnya polisi menanyakan keberadaan sebuah gerinda kepada HF. Penasehat Hukum RK Fadilah Tsani, mengatakan, tiga orang anak dibawa tanpa memperlihatkan surat-surat dan diketahui oleh orang tua. Serta tanpa adanya pendamping anak.

Saat sampai di kantor polisi, mereka dibawa ke ruang resum. TF menulis, di ruangan itu, polisi menanyakan "lai ado ang manjua onda maliang jo RK ko?" (kamu ada menjual motor curian sama si RK ini). TF menjawab tidak ada. Sebab, baik TF dan HF mengetahui sepeda motor yang ditanyakan oleh polisi adalah milik pribadi RK. Mereka berdua heran, mengapa polisi menuduh RK menjual motor pribadinya sendiri.

"Lalu pak 'IB' (penyidik, inisial) bilang pada RK 'ang jalehan lah ka kawan ang ko ha' (kamu jelaskan lah sama teman kamu ini). Dan RK bilang 'ang kecek selah iyo beko kanai pres wak di dalam ko' (kamu bilang saja lah iya, nanti kita kena pres di

dalam ini)," tulis TF dalam kesaksiannya, tertanggal 9 Maret 2023.

Karena RK sudah berkata demikian, TF lalu mengiyakan apa yang ditanyakan polisi setelah itu. Begitupun dengan HF. Setelah kejadian itulah, ketiga anak tersebut, secara konsisten dalam kesaksian mereka, melihat RK mendapat tindak kekerasan oleh penyidik.

Ketiganya melihat polisi dengan inisial IB menendang RK dengan keras. Kepalanya berulang kali ditekek (dipukul dengan sendi jari) oleh IB. "Saya pun mendengar bapak berpakaian biru dan berkata kepada RK, 'sudah makan kamu?' dan RK menjawab, 'sudah pak'. Tapi RK dipaksa bapak itu untuk makan," kata HF.

RK disuruh makan dengan posisi tangan diborgol. Saat sedang makan, ketiga anak itu melihat IB membenturkan kepala RK ke meja. Hal itu membuat wajah RK belepotan, kotor terkena nasi dan minyak sambal. Dengan tangan terborgol, mereka menceritakan RK mengelap wajahnya.

Melihat hal itu, IB lalu melepaskan/meregangkan, ikatan borgol ditangan RK. "Dan pas IB melepaskan borgol RK, terkenalah minyak ke tangan IB. Karena itu, IB menepuk

Setelah mendengar cerita tersebut dari anaknya FZ, Dewi merasa mulai was-was dengan keadaan adiknya di dalam ruangan penyidik. Dewi dan ibunya baru diizinkan bertemu RK jam 22.00 WIB. Setelah TF dan HF diperbolehkan pulang dan wajib lapor.

Saat itu Dewi menceritakan RK meminta untuk bisa berbicara berdua dengan ibunya. "Penyidik mengatakan 'kalau mau bicara berdua di rumah bukan di sini'," tutur Dewi.

Lanjutnya, RK lalu pindah duduk di dekat kaki Dewi. Ia menyuruh RK agak mendekat ke ibu mereka. Dewi lalu merangkul RK. Sambil menangis, RK berkata, "Bagaimana lagi kak, terima saja lagi, kak."

"Ketika ibu saya sedang menunduk adik saya berbisik ke telinga ibu saya, 'Saya seperti ini karena tersiksa bu,' kata adik saya," ujar Dewi. Saat itu juga perasaan ibu mereka mulai tidak enak.

Kemudian anak itu dimasukkan kembali ke dalam sel tahanan. Ni Rub dan Dewi menerima surat penangkapan dari penyidik. Mereka juga diberi diberi barang-barang yang di bawa dari rumah sewaktu penggerebekan malam

sebelumnya. Sebab, benda-benda itu tidak terbukti sebagai alat atau hasil curian seperti yang diungkapkan AD.

Rubnita (ibu RK) dan Dewi kemudian keluar dari Polres. Keluarga yang mendengar RK mendapat tindak kekerasan saat penyidikan lalu berupaya mencarikan pendamping hukum. Malam hari itu juga, Senin (6/3/2023), keluarga RK memberikan kuasa pada advokat Fadilah Tsani.

Sehari setelah penangkapan, Selasa (7/3/2023), Ni Rub (ibu RK) dan kakaknya Dewi kembali ke Polres Padang Panjang bersama penasehat hukum. Kebetulan hari itu adalah jam besuk tahanan. Dewi kemudian meyakinkan RK lebih berani untuk jujur kedepannya. Sebab, saat ini RK telah ditemani penasehat hukum. Ia juga sempat memeriksa keadaan tubuh adiknya.

"Saya memegang dada bagian kanannya dan dia mengeluh sakit. Saya bertanya 'kenapa dadamu?' 'Sakit kak,' katanya. Kamu kena hajar? tanya saya ulang. 'Iya kak,' kata adik saya," ucap Dewi. Saat itu RK juga menceritakan, kepalanya sempat dimasukkan ke tong sampah oleh oknum penyidik.

Siang itu di Polres, keluarga melalui penasehat hukum lalu meminta RK untuk di visum. Tapi tak diizinkan. Hanya

didatangkan petugas kesehatan dari Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang. Saat diperiksa kesehatannya, Dewi menceritakan telah terdapat beberapa luka ditubuh adiknya.

"Saya berdiri di pintu dan saya melihat kalau ada bengkak di belakang telinga kiri, bahu kiri memar, paha kanan, itu yang saya lihat waktu itu. Lalu saya diusir dengan suara keras oleh penyidik, dan saya pun pergi dari situ," kata Dewi.

Hari itu, Dewi berkata juga menemui Wakapolres (saat itu), Kopol Alvira, lalu menceritakan perlakuan yang diterima adiknya. Ia melanjutkan, bahwasannya Wakapolres akan memanggil oknum penyidik yang terlibat. Sebab sambung Dewi, apabila memang ada tindakan kekerasan, apa yang dilakukan oleh penyidik itu salah. Wakapolres juga berjanji kata Dewi, bahwa tidak akan ada lagi tindakan kekerasan yang dialami adiknya.

Saat di Polres, penasehat hukum RK, Fadhilah Tsani juga telah bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Padang Panjang, Iptu Istiqlal. Kepada [Langgam.id](https://www.langgam.id) Minggu (16/7/2023), saat itu ia menanyakan kepada perihal penangkapan anak RK yang diduga menyalahi prosedur dan bertindak semena-mena.

Hadir juga saat itu kata Fadilah, Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasi Satreskrim (KBO Reskrim) Irnal, Kasat Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti), dan Kasat Narkoba Polres Padang Panjang. Lanjutnya, saat itu Kasat Reskrim mengatakan bahwa ia menyayangkan kejadian kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh anggotanya terhadap RK.

"Ia berjanji akan segera mengatasi permasalahan tersebut dengan bijak dan akan memperlakukan RK dengan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Fadhilah.

Sehabis maghrib, Selasa (7/3/2023), ketika ingin pulang dari Polres Padang Panjang, Dewi mengingat RF mengatakan untuk mendoakan AD agar bisa berkata jujur. Akhirnya, ia meminta anaknya FZ untuk melihat RF dirumahnya. RF kemudian datang berdua dengan kakaknya ke rumah Dewi.

"Saya kemudian meminta RF berkata jujur, apa benar adik saya mencuri. Lalu dimana saja ia mencuri," pungkas Dewi. RF kemudian dengan perasaan bersalah, ingin jujur kepada keluarga RK. Bahwasannya RK tidak pernah melakukan pencurian sepeda motor. Ia juga terpaksa berbohong di

Polres Padang Panjang dan memberi kesaksian bahwa RK mencuri.

"Saya bilang sama tante semuanya, saya dipukul, disentrum, ditendang, disuruh makan makanan ikan, disuruh bukap celana kalau saya tidak mengiyakan apa yang dibilang si AD, kata RF," papar Dewi menceritakan kejadian malam itu.

"Jadi saya sekarang merasa bersalah saya. Mau mengungkap semuanya sampai ke pengadilan karena pasti saya nanti akan disumpah pakai Al-qur'an. Saya takut berbohong, di dunia saya selamat gimana di akhirat," lanjutnya. Rafli juga mengatakan kalau keluarga mendukung nya untuk jujur.

Hanya saja kata Dewi, kakak RF yang turut hadir malam itu takut dengan keselamatan adiknya. Keluarga RF juga tidak memiliki uang untuk meminta perlindungan hukum. Dewi menyarankan agar mereka menemui penasehat hukum RK. Sekitar jam 08.00 WIB, pergilah mereka menemui advokat Fadhilah Tsani.

Disana, RF mengatakan kejadian yang dia alami dan meminta Fadhilah mau melindungi dia untuk memberikan kesaksian. RF takut kejadian yang dialaminya terulang lagi. Dalam kesaksian yang ia buat dibantu penasehat hukum, tertanggal

9 Maret 2023, RF menceritakan apa yang ia alami saat dibawa ke Polres Padang Panjang, Jum'at (3/3/2023). Kesaksian tersebut juga ia sampaikan dalam persidangan RK.

Jum'at (3/3/2023), pukul 17.00 WIB, RF sedang di rumahnya lalu dijemput oleh satu unit mobil kijang inova dan beberapa petugas. Ia mengatakan, penjemputan itu tanpa bukti dan surat dari kepolisian.

"Saya langsung diseret ke dalam mobil tanpa bukti yang kuat bahwa saya melakukan curanmor. Satu unit motor milik pribadi saya langsung di bawa oleh petugas tersebut, dan di dalam mobil saya melihat orang yang saya sekedar kenal. Ternyata orang tersebut menuduh saya ikut serta melakukan curanmor," tulis RF.

Saat itu RF mengatakan ia tidak pernah mencuri. Orang yang sekedar ia kenal itu adalah AD. Salah satu petugas berkata bahwa AD mengatakan ia ikut terlibat. RF bersikeras mengatakan bahwa ia tidak terlibat, lalu salah satu petugas tersebut langsung memukul kepalanya. Ia masih saja kekeh mengatakan tidak terlibat.

Sesampainya di Polres Padang Panjang, RF disuruh turun dari mobil dan berjalan jongkok sampai ruang interogasi. Disana

katanya, telah banyak petugas menunggu dan ia disuruh duduk dilantai. Salah seorang petugas lalu mengulangi pertanyaan yang sama. RF kembali mengatakan ia tidak pernah mencuri motor seumur hidup. Ia langsung dihajar kembali oleh petugas.

"Dia berkata kamu itu jelas-jelas, jangan berbelit-belit. Saya berkata saya memang tidak pernah melakukan curanmor tersebut, lalu saya dihajar lagi di petugas yang bernama "IB". Kepala saya dipukul dengan sandal. Ditampar pipi saya dengan sandal tersebut," tulis RF menceritakan.

Saat itu terang RF, AD mengatakan bahwa ia telah terlibat dalam tiga aksi curanmor. Tugas RF menurut AD adalah mengantarkannya ke lokasi pencurian. Sampai saat ini RF masih bersikeras tidak ikut. Ia kemudian ditendang, dipukul dibagian pipi kanan dan kepala.

"Saya tidak kuat lagi menahan pukulan dari beberapa petugas. Lalu saya terpaksa berkata iya karena saya tidak kuat lagi dengan pukulan petugas tersebut. Waktu saya terpaksa berkata iya, lalu salah satu petugas menendang saya dan menampar saya dengan sandal petugas tersebut," ungkapnya.

Setelah itu kata RF, petugas membawa AD keluar. Tinggalah ia bersama tiga orang petugas di ruangan tersebut. Ia kembali ditanya apakah pernah mencuri. RF berkata tidak pernah. Petugas tersebut lalu mengarahkan alat sentrum kepadanya. Ia mengaku takut. Karena terpaksa, lalu RF mengiyakan kata petugas. Walaupun telah berkata iya, RF masih saja disentrum. Ia disentrum dibagin telapak tangan.

Tidak hanya itu, RF juga diberi makanan ikan. Ia mengatakan, kalau dirinya tidak memakan makanan ikan tersebut, maka petugas akan menyentrumnya. Ia lantas memberanikan diri untuk menelan makanan ikan tersebut. Setelah itu, RF kembali ditanyakan hal yang sama, apakah dia pernah ikut melakukan curanmor. RF kembali menjawab tidak, petugas kembali memukulnya.

"Saya takut, saya menjawab iya kemudian, lalu disentrum bagian kaki saya. Lalu tidak beberapa lama dari itu saya ditanya lagi kamu mau mencoba sentrum ini sedikit saja? Saya menjawab tidak pak. 'Petugas berkata iya lah sedikit aja' lalu saya di sentrum lagi dibagian tangan saya," kata RF.

Sekitar jam 12 malam kata RF, petugas kembali datang bersama AD. Ia kemudian ditanya, apakah RK ikut serta dalam

pencurian. Sebab kata AD, RK adalah pelaku utamanya. RF menjawab tidak. Ia kemudian dihantam dari belakang oleh petugas. Karena tubuhnya tidak sanggup kena pukul lagi oleh petugas, RF hanya bisa berkata iya setelahnya.

Petugas berkata kepada RF, karena dia masih berumur 16 tahun, ia akan jadi saksi dan wajib lapor. Kemudian RF disuruh menelpon orang tuanya untuk datang besok menjemput ke Polres. Kemudian RF dipersilahkan tidur.

Sebelum petugas pergi, RF bercerita bahwa ia dipaksa untuk membuka celana dan memperlihatkan kemaluannya. "Sebelum petugas pergi dari tempat interogasi, saya ditanya ada besar punya kamu lalu saya menjawab ndak besar pak kecil. Coba lihat kata petugas, saya jawab tidak pak, diarahkan sentrum lagi kepada saya. Lalu saya terpaksa membukak dan memperlihatkan punya saya dan semua petugas ketawa lalu baru mereka pulang," tutur RF.

Besoknya, Sabtu (4/3/2023), setelah bangun, RF kembali diberi makanan ikan. Ia tidak mau memakan makanan ikan itu. "Petugas lalu memukul saya beberapa kali dengan pukulan besi seperti tongkat besi yang lumayan keras," tulisnya.

Pukul 11.00 WIB orang tua RF datang untuk menjemputnya. Ayahnya disuruh tanda tangan sebagai penjamin, seandainya RF lari. RF mengatakan, ayahnya waktu itu belum tau apa yang sebenarnya terjadi. Ayahnya lantas menandatangani surat wajib lapor dan penjamin. Kemudian mereka pulang.

Visum dan Laporan Penganiayaan

Sehabis RF menceritakan apa yang ia alami saat dibawa ke Polres Padang Panjang, keesokannya, Rabu (8/0/2023), Dewi didampingi penasehat hukum menemui Kasat Reskrim, Iptu Istiqlal. Dewi mengatakan kepada Langgam.id, bahwa Istiqlal sudah menindak anggotanya yang terlibat.

"Saya main fisik malah, mudah-mudahan kejadian ini membuat dan memperkuat tali silaturahmi kita. Istilahnya, jadi saudara kita karena kejadian ini," ucap Dewi mengingat kata Istiqlal.

Dewi dan penasehat hukum mereka Fadhilah Tsani, mencoba melaporkan masalah ini ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat. Siang harinya, mereka kemudian berangkat menuju Padang. Mereka tiba di Polda sekira pukul 16.00 WIB.

Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumbar, Fadhilah dan kliennya diarahkan untuk membuat dua laporan. Pertama ke bagian Reskrim untuk dugaan penganiayaan. Kedua ke bagian Pengamanan Internal Polri (Paminal) terkait dugaan kesalahan prosedur.

Fadhilah menuturkan, sebis maghrib, Ipda Edi Julianto dari bagian Reskrim Polda Sumbar datang dan berbincang dengannya. Mendengar keluhan dari kliennya (Dewi Sartika), kemudian petugas tersebut menelpon Kasat Reskrim Polres Padang Panjang. "Saat kembali ke ruangan SPKT, Ipda Edi Julianto mengatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat diterima di Polda Sumbar dikarenakan dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana ringan (Tipiring). Sedang menurut Ipda Edi Julianto tidak ada pilihan Tipiring tersebut dalam sistem penerimaan laporan Polda Sumbar sehingga tidak bisa diproses," ucap Fadhilah saat Langgam.id datang ke kantornya, Minggu (16/07/2023).

Petugas di Polda Sumbar lalu mengarahkan mereka untuk kembali membuat laporan di Padang Panjang. Ungkap Fadhilah, petugas tersebut juga menjamin laporannya akan diterima tanpa kekerasan dan intimidasi.



Kuasa

hukum keluarga RK, Fadhilah Tsani.

Fadhilah menceritakan bahwa kliennya (Dewi) dengan menangis-nangis, memohon, dan mengatakan tidak percaya lagi dengan pihak Polres Padang Panjang dikarenakan sudah trauma. Terpisah, Dewi juga menceritakan hal yang sama. "Saya sudah hilang kepercayaan pak pada Polres Padang Panjang. Saya tidak yakin akan dilakukan prosesnya dengan hukum-hukum yang berlaku. "Tapi tetap tidak diterima tetap diarahkan ke SPKT Polres Padang Panjang," tutur Dewi.

Tidak lama setelah itu, RF juga datang ke Polda. Disana kata Fadhilah, RF mengatakan apa yang telah dilakukan petugas

kepadanya. Ia mengatakan bahwa dia tidak terima diperlakukan seperti itu oleh petugas. Terlebih ia dipaksa untuk berkata bohong dan mengakui apa yang tidak ia perbuat.

Sampai pada pukul 22.30 WIB, permintaan mereka agar laporan bisa diterima Polda, tidak juga diindahkan petugas. Baik oleh Reskrim maupun Propam Polda. Akhirnya Fadhilah dan kliennya dengan terpaksa kembali ke Polres Padang Panjang. Mereka baru tiba disana pukul 01.30 WIB, Kamis (9/3/2023).

Sesampainya di Polres Padang Panjang, untuk bisa mendapatkan laporan polisi, anak RK terlebih dahulu harus di visum. Tengah malam itu juga, dengan didampingi beberapa petugas, RK dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Dia mempertimbangkan, karena kejadian sudah tiga hari lewat, ia takut bekas dugaan penyiksannya hilang. Dewi juga mengatakan, saat di RS, ia menduga petugas yang menemani adiknya adalah orang yang melakukan penganiayaan.

"Saat akan naik mobil, polisi yang bernama 'FY' juga berteriak lagi 'tahanan dampingi nanti dia kabur' dengan suara keras. Dia menghajar mental adik saya habis-habisan. Saya bilang

sama pendamping dari SPKT, kalau mau kabur udah dari kemaren pak'. Kan bisa ngomong baik-baik pak, kan ini kasar pak," ucap Dewi.

Selain itu, RK dibawa ke rumah sakit dengan tangan terborgol. "Dokter yang memeriksa menanyakan siapa yang melakukan penganiayaan tersebut. RK menjawab polisi. Dalam pemeriksaan tampak Dokter kesulitan memeriksa bekas luka anak RK dikarenakan tangannya terborgol. Namun pihak Polres Padang Panjang tidak membuka borgol itu hingga kami meminta dibukakan borgolnya. Meski borgol dibuka namun perilaku serta bahasa yang kami terima dari oknum polisi tersebut sangat tidak menyenangkan," kata Fadhilah menceritakan kejadian saat visum.

Sehabis visum, mereka kembali ke Polres untuk membuat laporan polisi. Namun, dikarenakan petugas SPKT sudah tidak ditempat (hari sudah pukul 04.00 WIB pagi), mereka tidak menerima Surat Tanda Terima Laporan (STTL). STTL baru diberikan keesokan harinya. Hingga saat ini kata Fadhilah, laporan kliennya tersebut masih berbentuk Laporan Pengaduan dan belum berbentuk Laporan Polisi.

la menyangkan kejadian malam. Sebab sebelumnya pihak Polda menyampaikan dan menjamin laporannya akan diterima dengan baik dan proporsional oleh Polres Padang Panjang. "Namun hal yang kami dapatkan adalah sebaliknya, laporan kami masih berbentuk Pengaduan dan belum menjadi Laporan Polisi. Kami PH juga klien dibentak-bentak seakan kami telah melakukan kesalahan terhadap pihak Polres Padang Panjang," ujarnya.

Hasil visum kemudian keluar dua hari setelahnya. Yakni, Sabtu (11/03/2023). Anehnya, hasil visum yang diterima keluarga dari rumah sakit mengatakan, penganiayaan dilakukan oleh penghuni tahanan. Bukan oleh polisi.

Pihak RK Dipersilahkan Bikin Laporan Polisi

Kapolres Padang Panjang AKBP Donny Bramanto, secara terbuka menjawab tuduhan yang menyebutkan jajarannya menyalahi prosedur atau salah tangkap, dalam kasus ini.

Ditemui sehabis memimpin upacara di Polres Padang Panjang, Senin (17/7/2023), Donny menyebut kasus itu sudah terjadi cukup lama. Sekitar bulan Maret tahun ini. Dan sudah terdapat putusan pengadilan. Namun dalam lingkup

kepolisian, ia bicara soal mekanisme penangkapan orang dan bukan vonis dari hakim.

Soal upaya penyelidikan dan pelimpahan barang bukti ke kejaksaan, Donny menilai hal tersebut telah lengkap. "Sebab kalau berkas tidak cukup, kasus tidak akan naik ke pengadilan," ujar Donny yang didampingi Kasat Reskrim Padang Panjang Iptu Istiqlal dan Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasi Satreskrim (KBO Reskrim) Irnal.

Kasat Reskrim Padang Panjang Iptu Istiqlal kemudian menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum yang menjerat RK. "Waktu itu, (6/3/2023), Fadhilah (penasehat hukum RK) tengah malam telepon saya. Dimana ia mengatakan ada indikasi penganiayaan. Saya persilakan untuk melapor," kata Istiqlal.

Ia mengklaim pihaknya tidak pernah menutup-nutupi dan terbuka. Pihaknya sudah membuka ruang pada penasehat hukum. Sebab itu, sambung Istiqlal, merupakan hak daripada korban.

"Apapun prosedur jika memang tidak terbukti akan kami hadapi. Itulah konsekuensi daripada kami sebagai penyidik dan penegak hukum," kata Istiqlal menegaskan.



Kasat Reskrim Polres Padang Panjang Iptu Istiqlal. Foto: Dharma Harisa/Langgam.id

Ia melanjutkan, pihak RK telah pergi melapor ke Polda Sumbar, Rabu (8/3/2023). Karena RK sedang menjalani masa penahanan, maka pihak piket Polda lalu mengarahkan kembali ke Polres Padang Panjang. Sebab, terang Istiqlal, permintaan visum tidak memungkinkan tahanan dibawa ke Polda.

Sewaktu keluarga RK dan penasehat hokum sampai di Polres tengah malam, Kamis (9/3/2023), kebetulan dirinya saat itu tidak sedang di kantor. Dia telah mengatakan kepada penasehat hukum RK, bahwa istrinya sedang sakit. "Dia

meminta, harus saya untuk menunggu. Padahal piket ada. Hari sudah larut malam. Karena akibat ketidakhadiran saya, apa si Fadilah bilang, ini seakan-akan tidak menghargai dia," ujar Istiqlal.

Padahal, terangnya, laporan malam itu tetap diterima. Visum malam itu langsung dilaksanakan. Bahkan klaim patah gigi, dipukul, ditendang, dan lainnya tetap diproses oleh jajarannya.

Terkait dugaan penyiksaan atau penganiayaan, Istiqlal telah mengkonfirmasi hal tersebut terhadap jajarannya. Dengan asumsi, jika itu benar, maka ia tidak akan segan-segan menindak jajarannya.

"Anggota saya menyatakan tidak ada, sampai saya tindak secara ke dalam/fisik. Secara internal telah konfirmasi. Ndak ada kata mereka. Kalau ndak kalian, si pelapor akan buat laporan. Silahkan pak kata anggota, kami hadapi," ucap Istiqlal.

Polres Padang Panjang juga sudah mengirim Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada keluarga RK. Istiqlal menyatakan, peristiwa tersebut memang merupakan tindak pidana. Pihaknya telah meminta

keluarga RK untuk membuat laporan polisi guna dilaksanakan penyidikan lebih dalam.

Namun sejak SP2HP dilayangkan bulan April lalu, sampai sekarang pihak RK kata Istiqlal, belum melapor kembali. Itu yang membuat pihaknya belum melakukan upaya pendalaman lebih jauh. "Kita tunggu-tunggu, ndak datang-datang. *Ndak ado lapor kembali*. Kita masih menunggu dari pihak kliennya (Fadhilah Tsani -red)," ujar Istiqlal.

Bahkan kata Istiqlal, pihaknya telah dipanggil oleh Polda Sumbar untuk pemaparan masalah ini. Ia mengatakan, penasehat hukum RK menyampaikan laporan ke Polda terkait keterlambatan penanganan kasus RK sebagai korban penganiayaan. Saat itu kata Istiqlal hadir Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda), Propam, Reserse Kriminal Umum (Krimum) Polda Sumbar. Hadir juga penyidik Polres Padang Panjang dan pihak RK. Gelar perkara atau pemaparan tersebut dilakukan sekitar awal Juli.

Kesimpulan dari pemaparan tersebut mempersilahkan pihak RK membuat laporan polisi. Agar penanganannya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun hal itu belum dilakukan pihak RK.

"Permintaan keluarga korban kan, buka seterang-terangnya. Si pelapor saat ini ndak mau membuat laporan polisi. Ditanya alasannya karena takut, takut diintimidasi. Siapa yang intimidasi? Dia bilang polisi, karena trauma," tutur Istiqlal.

Dia menambahkan, kalau trauma, ada Propam, Polisi Militer, dan pihak lainnya untuk melindungi. Walakin, Polres Padang Panjang saat ini belum melanjutkan perkara tersebut karena harus menunggu laporan polisi dibuat korban.

Terkait SP2HP gelar perkara di Polda Sumbar, ia juga mengatakan sampai saat ini belum menerima laporan tersebut.

Selain itu, dalam kesempatannya yang sama, Istiqlal juga menjawab beberapa hal terkait penanganan perkara RK. Contohnya untuk prosedur penanganan anak. Ia mengklaim pihaknya telah melaksanakan pemeriksaan sesuai SOP anak. Misal soal pendamping anak. Dalam berkas yang dilimpahkan ke kejaksaan, tertulis anak didampingi orang tua dan penasehat hukum. "Kalau tidak dilaksanakan, ndak mungkin lah jaksa menerima," tukasnya.

Soal tuduhan dipaksa mengaku, Istiqlal juga mengatakan semuanya sesuai prosedur. Namun ia mengamini

bahwasannya pada awalnya RK tidak mengaku melakukan pencurian. "Tapi kita tetap melakukan penyelidikan sesuai SOP yang ada. Kita tidak butuh pengakuan dari seorang tersangka. apalagi anak ini masih di bawah umur. Tidak ada upaya penganiayaan," katanya.

Tim yang ditugaskan dalam menangani kasus anak ini juga telah di SK-kan oleh Kapolres jawabnya. Pihaknya juga tidak pernah mengoper-oper penyelesaian masalah ini. "Malah perlu saya tegaskan, di dalam pemeriksaan RK sebagai korban penganiayaan, sudah berapa kali kami melaksanakan pemanggilan meminta keterangan, untuk mendatangkan saksi-saksi terkait hal ini. Beberapa kali pihak Fadhilah Tsani tidak bisa memenuhi. Dengan alasan beliau sibuk dengan kasus-kasus yang dia tangani," pungkas Istiqlal. (*/Yh)

02

Jalan Berliku Keluarga RK Mencari Keadilan

Oleh: Dharma Harisa
Editor: Yose Hendra

Fadhilah Tsani membolak-balikkan berkas pengaduan kasus yang menerpa RK (16) ke pelbagai lembaga berwenang, saat disambangi di kantornya di Padang Panjang, Minggu (16/7/2023). Ia memperlihatkan lembaran pengaduan demi meraih rasa keadilan bagi RK, anak yang dituduh mencuri kendaraan bermotor, namun diduga mengalami penyiksaan oleh

penyidik. Ia optimistis ikhtiar demikian menjadi jalan keadilan bagi RK.



*Sidang Praperadilan RK di Pengadilan Negeri Padang Panjang, 27 Maret 2023.
(Foto: Dok. Fadhilah Tsani)*

RK ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Padang Panjang, Senin (6/3/2023). Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/20/III/2023/Reskrim Polres Padang Panjang, tertanggal 6 Maret 2023, RK dituduh melakukan dua kali pencurian sepanjang tahun 2021 dan 2022.

Pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, sekira pukul 05.00 WIB. Bertempat di Garase Rumah Jalan M. Nazir Dt. Pamuncak Rt. 21, Kelurahan

Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Barang yang dilaporkan hilang adalah sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam putih.

Tuduhan kedua perihal hilangnya sepeda motor bermerek Honda Beat pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022, sekira pukul 07.30 WIB. Bertempat di parkir teras rumah Jalan Sutan Syahrir, gang Manunggal Rt. 010, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang.

Belakangan RK di vonis bebas oleh pengadilan, karena tidak terbukti bersalah melakukan pencurian sepeda motor. Namun, dugaan kekerasan yang ia dapati selama proses penyidikan mewariskan trauma yang tak berkesudahan, dan juga merusak nama baik keluarga.

Selain ber kirim surat ke Karo Provos Divpropam Polri, Fadhilah juga mendampingi keluarga RK mengadu ke Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) di Padang.

Intinya, mereka meminta perlindungan kepada Komnas HAM Sumbar atas kasus dugaan penganiayaan yang dialami adiknya, RK (16) oleh penyidik Polres Padang Panjang. Selain ke Komnas HAM, Fadhilah juga mengirim laporan terkait dugaan penyiksaan kepada Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Semua ini adalah ikhtiar bagi keluarga RK untuk mendapatkan keadilan yang layak.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat (Sumbar) Yefri Heriani, mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terkait laporan tersebut. Utamanya perihal pengabaian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan indikasi dugaan keterlambatan penanganan.

"Pertama, kita kirimkan ke Provos untuk minta tolong dilakukan pemeriksaan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan langsung kepada pihak-pihak terkait. Baik itu reskrim yang ado di Polres Padang Panjang atau pun klarifikasi kepada Propam," ucap Yefri

kepada *Langgam.id* di kantor Ombudsman perwakilan Sumbar, Selasa (18/7/2023).

Ombudsman dalam hal ini belum bisa menyampaikan apakah ada pelanggaran atau tidak. Sebab, laporan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan. Pihaknya masih dalam upaya pembuktian untuk bisa menyampaikan hasilnya.

Ombudsman masih menunggu temuan dan surat dari Divisi Propam Polda Sumbar. Sampai saat ini terangnya, belum ada balasan terkait kasus tersebut. "Kalau Divisi Propam Polda masih memang tidak ada balasan, nanti kami akan mintakan klarifikasi kedua," ucap Yefri.

Terpisah, Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumbar Sultanul, mengatakan, pihaknya sudah menerima surat tersebut sejak bulan Maret lalu. Pelapor (Keluarga RK) menyampaikan kepada Komnas HAM, bahwa ada indikasi penyiksaan terhadap anak. "Hal itu sudah dilaporkan ke Polres Padang Panjang tapi belum ditindak langsung. kemudian pengadu dan keluarga mengalami intimidasi agar mencabut laporan dan lain-

lain," kata Sultanul kepada *Langgam.id*, Selasa (18/7/2023).

Saat ini Komnas HAM telah meminta Polda Sumbar untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyiksaan tersebut. Komnas HAM juga meminta agar Polres menindaklanjuti laporan penyiksaan oleh keluarga. Lalu, agar terlapor melakukan pemeriksaan kepada oknum anggota yang dilaporkan memakai tindak kekerasan.

Sultanul menjelaskan, permintaan tersebut telah dilayangkan langsung oleh Komnas HAM pusat pada tanggal 3 Juli 2023 kemarin. Hanya saja sampai saat ini belum ada balasan dari kepolisian. Pihaknya sedang menunggu balasan tersebut agar bisa melangkah lebih jauh. Ia juga menjelaskan, setelah ada balasan dari Polda, Komnas HAM Perwakilan Sumbar harus menunggu terlebih dahulu petunjuk dari pusat.

Dua laporan yang dilayangkan penasehat hukum RK di atas memiliki kendala yang sama. Yakni, pendalaman

lebih lanjut belum bisa dilakukan, sebab masih menunggu jawaban dari Polda Sumbar.

Mengenai hal itu, *Langgam.id* kemudian menemui Pelaksana tugas (Plt) Kasi Propam Polres Padang Panjang Hutry Sony. Perihal tindak lanjut dari laporan tersebut. Hutry menjelaskan, laporan tersebut awalnya ditujukan ke Polda Sumbar. Kemudian lewat unit Pengamanan Internal (Paminal) Polda, memberikan surat kepadanya untuk ditindaklanjuti.

Hutry mengatakan pihaknya telah melakukan proses penyelidikan. "Saat ini penanganan laporan masih dalam tahap berjalan," ujarnya saat ditemui di ruangan Seksi Propam Polres Padang Panjang, Senin (17/07/2023).

Sampai saat ini baru dua anggota yang diindikasikan terlibat penganiayaan yang telah diperiksa. Selain itu, bilang Hutry, RK dan kakaknya juga telah dimintai keterangan. "Masih ada beberapa orang lagi yang nantinya akan diperiksa," katanya.

Dewi Sartika (kakak RK) saat melapor ke Propam Polda Sumbar. Pihak keluarga diarahkan membuat laporan secara tertulis.

Ditanyai kendala terkait penyelidikan, Hutry menyebut ada beberapa orang yang belum hadir. "Mungkin karena orang itu sibuk,"

ujarnya. Selain itu, Propam Polres Padang Panjang juga belum menerima aduan masyarakat (dumas) dari pihak RK.

"Kalau ke Propam itu pengaduan dumas. Sementara laporannya masih laporan pengaduan di Reskrim. Ini terkendalanya, laporan pengaduannya masih ke



Reskrim, belum dumas ke Propam. Mereka belum ke sini. Cuma karena sudah perintah dari Polda, itu perlu juga ditindaklanjuti, maka kita melakukan penyidikan," ucapnya.

Saat ini, pihaknya belum bisa menyampaikan temuan penyelidikan. Itu semua karena laporan masih dalam proses. Ia mengatakan pihaknya selalu terbuka dan akan menindak setiap anggota yang bermasalah.

Ada Pengabaian Penegakan Hukum Berperspektif Anak

Guru Besar hukum pidana Universitas Andalas Elwi Danil mengatakan terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap penanganan perkara anak jika dibandingkan dengan orang dewasa. Baik dari sisi prosedur maupun dari aspek aparat yang terlibat di dalam penanganannya.

Ia menyebutkan, paling tidak secara khusus terdapat dua undang-undang yang mengatur soal perlindungan dan proses peradilan anak. Pertama Undang-Undang

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Di samping itu terdapat pula berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan memberikan perhatian terhadap hak-hak anak.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang SPPA mewajibkan dalam setiap pemeriksaan anak didampingi oleh penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Atau oleh pembimbing lain yakni orang tua atau keluarga yang dipercaya si anak. "Dalam hal proses pemeriksaan yang tidak didampingi oleh PH/Keluarga, maka hasil pemeriksaan itu dapat dianggap tidak sah dan keterangan yang diberikan tidak dapat diterima hakim sebagai alat bukti yang sah," kata Prof. Elwi, Jum'at (21/7/2023).

Mantan Dekan Fakultas Hukum Unand itu juga menjelaskan, bahwa penegak hukum wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan

mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Hal itu berkaitan dengan proses penyidikan yang dialami RK.

SERBA SERBI KASUS

<p>Anak Yang Diduga Menjadi Korban Penyiksaan</p> <p>RK (16) RF (16)</p>	<p>Anak Yang Diduga Menjadi Korban Penyiksaan</p> <p>FZ (15) TF (16) HF (16)</p>
---	--

<p>Keluarga Korban dan Penasehat Hukum</p> <p>Dewi Sartika (38) Kakak RK Fadhilah Tsani Penasehat Hukum RK</p>		<p>Penyidik Yang Diduga Terlibat Penganiayaan</p> <p>"IB" berpangkat Briptu "FY" berpangkat Aipda "T.B.S" berpangkat Bripta "NK" berpangkat Bripta "E.C.M" berpangkat Brigadir "AG" berpangkat brigadir</p>
---	---	--

Dihawah Pimpinan

Kapolres Panjang **AKBP Donny Bramanto**
Kasat Reskrim Palres Padang Panjang **Iptu Istiklal**
Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satreskrim
Palres Padang Panjang **Ipta Inai Syamsu**

Indikasi Dugaan Pelanggaran HAM dan Prosedur Yang Terjadi

<ul style="list-style-type: none"> • Penggeledahan tanpa menunjukkan surat resmi • Mengambil handphone secara paksa • Tidak mempersilahkan anak didampingi orang tua • Tidak diberi pengacaraan saat pemeriksaan awal • Memukul • Menendang • Membenturkan kepala ke meja saat makan • Dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Disetrum • Disuruh memakan makanan ikan • Disuruh memperlihatkan kemaluan • Dimatukkan kepala dalam tong sampah • Dimaki-maki • Anak diborgol dan diberi baju tahanan • Tidak sesuai prosedur dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan juga penyitaan. • Sengaja memperlambat penanganan perkara
--	---

* Dugaan berdasarkan keterangan saudara hukum RK Fadhilah Tsani
* Dugaan berdasarkan hasil olah data komputer dan wawancara para narasumber

Elwi mengatakan pemborgolan atau pemakaian baju tahanan terhadap anak dapat dikategorikan sebagai tindakan penegak hukum yang tidak memperhatikan kepentingan anak dan tidak memelihara suasana kekeluargaan.

Kewajiban seperti ini menurut ketentuan Pasal 18 UU SPPA, terangya, tidak saja bagi penegak hukum, tapi juga bagi pihak-pihak terkait lainnya dalam proses perkara anak.

"Anak yang diperiksa tidak boleh mendapatkan ditekan, baik secara fisik maupun psikis. Kalau tekanan itu dilakukan oleh penyidik itu berarti telah melanggar hak anak yang harus dilindungi," tuturnya.

Dalam konteks ini, lebih dari itu, secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 huruf e UU SPPA yang menentukan, "setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya."

Oleh sebab itu lanjutnya, penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik khusus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolri, atau pejabat lain yang ditunjuk. Untuk dapat ditetapkan menjadi penyidik perkara anak, UU menentukan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (3) UU SPPA. Tapi dalam hal tidak ada penyidik khusus yang memenuhi syarat-syarat tersebut, maka penyidik dalam perkara orang dewasa boleh melakukan penyidikan dalam perkara anak.

Ditanya soal upaya kekerasan yang dilakukan polisi dalam pengungkapan suatu tindak pidana, Prof. Elwi mengatakan hal itu harus diukur secara proporsional.

"Menurut saya, dalam batas-batas tertentu, kadang-kadang petugas polisi itu harus keras, khususnya dalam menghadapi penjahat-penjahat yang berbahaya. Kita tidak bisa membayangkan kalau dalam menghadapi penjahat yang kejam, seorang petugas polisi itu ramah dan lemah lembut. Bisa-bisa itu bisa berbahaya bagi

keselamatan polisi itu sendiri dan masyarakat pada umumnya," tuturnya.

"Hal semacam itulah yang disebut sebagai police hazard," lanjutnya menuturkan. Tapi jelas Prof. Elwi, itu semua tentunya tetap memperhatikan perlindungan HAM sebagai sesuatu yang diamankan. Dan kekerasan polisi itu tidak boleh terjadi dalam menangani perkara anak.

Ia berharap polisi dapat meningkatkan profesionalismenya dalam menangani setiap perkara pidana sebagai aparat penegak hukum dan sebagai penegak ketertiban. Ia menambahkan agar warga masyarakat secara bersama-sama turut membantu tugas-tugas kepolisian secara procedural. Serta menghargai polisi dalam melaksanakan tugas.

Terkait modus penggunaan kekerasan oleh aparat, Ketua Komnas HAM perwakilan Sumbar Sultanul, mengatakan, hal itu sering terjadi di pemeriksaan. Hal itu kata Sultanul dalam pengalamannya, digunakan untuk mendapat pengakuan lebih cepat saat.

"Hal itu tidak sesuai dengan prosedur. Masak memperoleh pengakuan orang dengan proses penyiksaan. Korban takut dan kemudian disiksa. Karena takut disiksa, akhirnya mereka mengaku. Nah itu yang ada terjadi biasanya," katanya.

Yefri Heriani mengatakan sebenarnya telah ada Undang-Undang yang mengatur terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Hanya saja, ia menemukan catatan, apakah aturan itu dipahami oleh penyelenggara negara (kepolisian) atau tidak.

Namun dari beberapa laporan yang ada ungkap Yefri, indikasi kesalahan yang sering muncul di Ombudsman antara lain: pelanggaran prosedur, dugaan penundaan (penyelesaiannya) berlarut, atau tidak diberikan layanan.

"Tidak diberikan layanan itu bisa di indikasi bahwa, disuruh tu dulu. Langsung diselesaikan di keluarga (mediasi -red). Itu ada beberapa laporan-laporannya," ujarnya, Selasa (18/07/2023).

Yefri yakin bahwasannya aparat pasti memiliki pengetahuan terhadap prosedur yang diatur Undang-Undang. Sebab aturannya telah lama ada. Namun yang jadi titik tekan Ombudsman bukanlah soal kompetensi aparat. Melainkan, apakah penegak hukum taat terhadap prosedur yang ada. Atau apakah aparat tidak menyalahgunakan wewenang?

Tidak menyelenggarakan pelayanan sesuai aturannya. Atau abai atas standar layanan yang telah ditetapkan. Yefri mengatakan itu semua akan merugikan masyarakat.

“Jadi yang kita perhatikan itu bukan hanya pada soal dia tidak mengerti. Tapi keabaian. Intinya tidak patuh pada standar pelayanan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Nanti hal itu bisa dikaitkan dengan kompetensinya,” tandasnya. (*)

03

Pembangunan Kota Padang Tak Selaras dengan Drainase dan Sungai,

***Warga Menderita Banjir Kala Hujan
Lebih dari Satu Jam***

**Oleh: Putri 'Je' Wanggay, Daffa Benny
Editor: Jaka HB**

Pertengahan Juli lalu Kota Padang dihantam badai. Hujan sehari semalam merendam 22 titik dan membanjiri daerah yang sebelumnya jarang terdampak. Video-video penderitaan warga kota berseliweran. Mereka seperti merayakan duka, mulai dari berenang, berperahu di tengah kota dan berselancar.



Tanggal 14 Juli itu menjadi bencana bagi Yuda. Pria 32 tahun ini tinggal di Kompleks PGRI kawasan Belimbing. Rumahnya terendam setinggi kurang lebih 30 centi meter. Buku-buku, karpet hingga kasur pun basah.

Rumah Yuda berdiri sejak 1996. Pada medio 2000-an pemukiman-pemukiman menjamur. Posisi lahannya lebih tinggi. Tak jarang rumah yang berdiri di atas aliran sungai. Tentu saja ujung sungai semakin mengecil karena pembangunan itu. Dampaknya semakin terasa sejak 2010. "Banjir kemarin yang terparah," kata lulusan sekolah musik ini.

Saya berkunjung ke rumahnya keesokan harinya. Tepat di samping rumah Yuda terdapat sungai kecil yang dulunya mengalirkan air ke sawah-sawah terdekat. Hanya saja sekarang sungai itu sudah tertutupi 2 rumah. Ya, dua rumah tersebut dibangun tepat di atas sungai yang berfungsi sebagai drainase alam.



Salah satu sungai alam yang menyempit karena pembangunan. (Foto oleh: Je Wanggay).



Salah satu sungai alam di Kota Padang yang menyempit karena pembangunan. Foto oleh Je Wanggay.

Pembangunan dan Drainase Tak Selaras

Selain Yuda, saya bertemu Hendra (82). Keluarga dan tetangganya yang tinggal di Perumdak Kurao juga terdampak banjir. Daerah itu memang dekat dengan Batang Kurao sehingga sudah menjadi langganan banjir sejak dulu. Mereka juga masih menyimpan kenangan banjir di tahun 1986.

Hendra bercerita soal banjir yang memang berkurang semenjak adanya proyek Pengendalian Banjir Area Padang pada 1998. Hanya saja semakin ke sini, selokan atau aliran air semakin sedikit karena maraknya pembangunan pemukiman. Menurutnya sekarang sudah ada pembuatan drainase, hanya saja lahan perumahan warga menjadi kendala; ada yang terlalu mendekati jalan ada juga yang menutup aliran air di depan rumah mereka.

Rumah Hendra merupakan rumah yang termasuk tinggi di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi, ketika hujan dan rumahnya mulai masuk luapan air mungkin rumah tetangganya sudah selutut bahkan semakin mendekat ke arah sungai semakin tinggi terendam. Aat (38), menantu

Hendra, juga ikut menceritakan kemalangan tetangga mereka.

Saat banjir banyak tetangganya yang saling mengingatkan dan berteriak soal banjir karena saat itu dini hari. Opi yang sedang pulang kampung dan rumahnya terendam banjir jadi kesusahan, basah kasur, karpet, kursi dan pakaian yang letaknya rendah sehingga terendam air. Opi pun segera kembali ke Padang dan membersihkan rumahnya beberapa barang dijemur dan beberapa lagi dibuang seperti; kasur dan karpet kain.

Hendra sangat menyayangkan musibah ini, berapa tetangganya terpaksa membuang kasur dan beberapa pakaian mereka yang terendam banjir karena kesulitan membersihkan. Kegiatan beribadah menjadi terganggu apa lagi hari itu Jumat, Masjid di lingkungan mereka tidak dapat digunakan untuk salat Jumat.

Sementara itu, masyarakat di daerah Tarandam, Kecamatan Padang Timur tidak mengira daerah mereka kembali dilanda banjir setelah sekian lama aman dari musibah tersebut. Hal itu antara lain diceritakan oleh Tures, seorang warga Tarandam.

Rumah, Kafe dan Peralatan Terendam Air

Pada malam hari Sabtu 15 Juli 2023, Tures terlihat sedikit lelah kala datang ke kolektif musik Menace Space, Tarandam. Suaranya lebih pelan daripada biasanya. Tapi nyala matanya tetap memunculkan semangat untuk tampil memainkan gitar untuk band *hardcore* yang ia gawangi pada acara malam minggu itu,

“Rumah *awak* kebanjiran. Sampai setinggi dada kemarin. Kami baru habis beres-beres,” kisahnya. Air di lingkungan rumahnya baru menyusut sekitar pukul 11 siang, Jumat 14 Juli. Ia beserta keluarga dan tetangganya terpaksa begadang, tidak tahu harus tidur di mana.

Kemudian ia bersama keluarganya banyak menghabiskan waktu untuk menata kembali barang-barang dan perabotan yang sebelumnya dinaikkan ke atas lemari. Apa lagi anak band seperti dirinya, gitar elektrik beserta perangkat pelengkapnyanya harus tetap ia pertahankan dari genangan air. “Supaya tidak *nyetrum* ketika dipakai,” ungkapnya sembari nyengir.

Pemuda 20-an tahun itu tinggal tidak jauh dari rel kereta api, hanya hitungan meter. Untuk ke jalan raya pun hanya butuh

waktu kurang dari 5 menit berjalan kaki. Lingkungan rumahnya memang tergolong dataran rendah, namun ia tidak menyangka akan banjir sedalam itu.

“Namanya saja yang Tarandam, tapi di sini tidak biasa banjir,” ungkap Tures. Ia bahkan menyebut banjir terakhir kali ia alami pada sekitar tahun 2017 atau 2018, itu pun hanya setinggi lutut atau paha. Sehingga musibah yang ia alami pada pertengahan Juli tahun ini benar-benar tidak terantisipasi. “Ada rumah orang di kawasan Tarandam ini yang terendam sampai hamper menyentuh atap, posisi tanahnya memang lebih rendah,” kata dia.

Tarandam secara umum memang terendam pada malam dengan hujan ekstrim itu. Tak terkecuali tempat Tures akan manggung yaitu Menace Space yang berjarak hanya ratusan meter dari rumahnya. Kendati pada malam minggu 15 Juli 2023 akan diadakan gig band-band *underground*, sisa-sisa genangan air tampak masih membekas di lokasi yang punya studio band dan arena *skateboard* itu.

Rengga salah satu pengelola Menace Space bercerita betapa terkejutnya ia mendapati air sudah menjajah studio tempat ia tertidur. “Untung kita punya panggung, *sound system* dan

barang-barang lain langsung kita selamatkan ke sana,” ungkapnya. Sebelumnya bunyi hujan mengantarkannya tertidur pulas. Ia juga tidak menyangka genangan air akan menyambangi studio.

“Orang tua saya bercerita, dulu Tarandam ini memang rawa-rawa. Makanya namanya Tarandam. Tapi sudah lama tidak ada banjir seperti kemarin,” ujar pria yang gemar memakai topi tersebut. Untung saja ia bersama rekan-rekannya masih sempat menyelamatkan asset-aset studio untuk kemudian menyiapkan helatan musik di lokasi yang masih lembab tersebut.

Titik-Titik Banjir

Setidaknya BPBD mencatatkan banjir terjadi di 6 dari 11 Kecamatan di Kota Padang menyusul cuaca ekstrem pada 14 Juli 2023, antara lain Kecamatan Nanggalo, Padang Selatan, Padang Utara, Padang Timur, Padang Barat, dan Koto Tangah. Ketinggian air tercatat hingga mencapai sekitar 100 m, tepatnya di Jalan Raya Jondul Rawang, Kecamatan Padang Selatan dan di Jalan Jati Rawang Kelurahan Jati.

Selain itu di Perumahan Griya Kubu Utama Kelurahan Tabing Banda Gadang ketinggian air terdata mencapai sekitar 60 cm.

Sedangkan di Jalan Kampung Nias 1 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, jalan di depan SDN 03 Alai Kelurahan Alai Parak Kopi dan kawasan Gantiang Parak Gadang RW 06 ketinggian air mencapai sekitar 50 cm. Puluhan titik lainnya di Kota Padang juga terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi.

Selain bencana banjir, longsor juga terjadi menyusul cuaca ekstrim di jalan baru menuju Pantai Aia Manih dan di Bukit Gado-Gado. Akibat longsor, 2 orang tercatat meninggal dunia. Sementara pohon tumbang di Jalan Raya By Pass Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji hingga mengganggu lalu lintas. Bahkan longsor membuat beberapa jenazah terbawa keluar dari liangnya dan warga butuh dua hari untuk memastikan jenazah kembali ke liangnya. Ada yang dikubur massal dan ada yang dikubur sendirian jika masih dikenali. (*)

04

Melihat Potret Banjir Kota Padang di Masa Lalu dan Ancaman Krisis Iklim

Oleh: Putri 'Je' Wanggay, Daffa Benny, &
Fachri Hamzah
Editor: Jaka HB

Banjir melanda sebagian besar wilayah Kota Padang pada Jumat, 14 Juli 2023 lalu. Sejak tanggal 13 Juli, hujan besar melanda kota yang dikelilingi perbukitan ini. Pertanyaan muncul, apakah musibah tersebut muncul semata karena cuaca ekstrem atau langkah mitigasi yang kurang.

Oleh karena itu, Roehana Project menelusuri penyebab risiko banjir di Kota Padang melalui sudut pandang seorang akademisi yang fokus meriset daerah aliran sungai (DAS) sebagai salah satu aspek penting penanggulangan banjir.

Siang 22 Juli 2023 itu Roehana Project bertemu Istril Bert. Seorang akademisi yang telah bertahun-tahun mengajar di Universitas Andalas dan baru saja mengisi siaran radio pemerintah membahas fenomena banjir. Pria berusia 70 tahun lebih itu bercerita pernah mengunjungi Kota Amsterdam dan Rotterdam. Menurutnya Indonesia bisa mencontoh potret-potret baik dari negeri kincir air itu terkait penanganan drainase dan tata kotanya.

Pada dasarnya orang-orang di pojok utara Eropa itu pernah menerapkan suatu sistem drainase di wilayah jajahan mereka. Antara lain pembangunan *Banda Bakali* yang memanjang dari kawasan Ujung Tanah menuju Pantai Padang. Kanal itu melalui perbatasan antara Marapalam dan Lubuak Bagaluang (Lubeg), Andalas, Jati, Rimbo Kaluang, hingga berakhir di Pantai Padang.

Selanjutnya seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Padang pasca kemerdekaan Republik Indonesia, apakah sistem drainase buatan itu masih cukup memadai?

Sisi Lain Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan di Kota Padang

Isril mengatakan Kota Padang telah mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan fisik yang pesat. Banyak ruang terbuka hijau (RTH) tertimbun oleh beton, misalnya di Jalan Khatib Sulaiman. Dahulunya, di tengah-tengah jalan dengan dua jalur itu terdapat taman yang memanjang yang kini sudah tergantikan oleh pembatas jalan dari beton. Sementara daerah resapan seperti itu sangat penting dalam mencegah banjir.

“Jalan Khatib Sulaiman kok jadi Sungai Khatib Sulaiman,” ungkapnya sembari berseloroh. Kendati Isril melontarkan lelucon, banjir di Khatib Sulaiman memang terjadi pada 14 Juli 2023. Demikian juga sebagian wilayah Kota Padang yang umumnya dataran rendah.

Ia bahkan mengkritik almamater tempat ia pernah menuntut ilmu sebagai mahasiswa serta mengajar sebagai dosen. “Daerah resapan kita juga banyak yang hilang. Di daerah kampus ini saya juga protes. Banyak daerah resapan yang dijadikan lapangan parkir, sehingga dicor. Misalnya di dekat gedung A Unand.”

“Ini berisiko. Air tidak masuk ke dalam tanah sehingga tanah menjadi kering, Kalau misalnya terjadi gempa bumi, tanah

yang kering itu bisa meluncur ke bawah. Alasannya, tanah yang kering menjadi labil ketika tanah-tanah di sekitarnya meresap air," jelasnya.

Dalam wawancaranya dengan Roehana Project, Isril kemudian lebih banyak membicarakan soal DAS, kajian yang sedang gandrung ia geluti. Menurutnya, semakin banyak rumah atau bangunan lain yang dibuat di sekitar DAS di Kota Padang ini. Idealnya, dalam radius 50 meter dari kawasan sungai tidak terdapat bangunan, sehingga drainase bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Dia mengatakan hanya kurang lebih 30% wilayah Kota Padang yang layak dihuni, dijadikan perkantoran, atau kegiatan lainnya. Setelah gempa 2009, terjadi pola perpindahan permukiman ke arah timur yang notabene lebih aman dari risiko tsunami karena lebih jauh dari laut serta posisinya lebih tinggi.

Topografi Kota Padang sendiri memiliki ketinggian mulai dari 0 mdpl sampai sekitar 300 mdpl. Dengan demikian, terjadi kelerengan sampai ke laut. Selebihnya, daerah Kota Padang adalah kaki bukit, bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. "Itu

mulai dari lereng, sampai curam dan sangat curam. Yang relatif datar itu wilayah sekitar Jalan By Pass.”

Dengan kondisi seperti itu, Padang memang rawan banjir. Belum lagi terdapat daerah-daerah yang ketinggiannya hampir sama dengan permukaan air laut, misalnya daerah Dadok dan Rawang. “Kalau sudah tergenang, airnya *ngetem*, diam di sana.”

Apakah Drainase di Padang Sudah Cukup?

Isril menjelaskan drainase di Kota Padang cukup untuk menampung curah hujan 60 mm per hari. Sebagai informasi, 1 mm hujan berarti air hujan yang turun di sebuah area seluas satu meter persegi akan membentuk genangan air setinggi 1 mm jika air hujan tersebut tidak meresap, mengalir, atau menguap.

Sementara itu, hujan yang terjadi di Kota Padang hingga menyebabkan banjir di beberapa kawasan pada 13 dan 14 Juli 2023 kemarin diperkirakan memiliki curah hujan lebih dari 150 mm, tergolong ekstrim. Sementara saluran drainase yang tersedia tidak cukup untuk mempercepat aliran air.

“Kalau itu terjadi, air bisa ngetem sekitar 5 jam, 10 jam, hingga 12 jam. Kemudian hilang, ke mana? Paling sekitar 20% air masuk ke dalam tanah. Yang 70% atau 80% lagi tentu mereka mengalir ke daerah yang lebih rendah.”

“Di Padang, ada *outlet* (jalan/saluran keluar, red.) yang bisa dituju oleh air-air tersebut. Drainase memang ada, tapi cukup untuk Kota Padang. Karena dia dibuat hanya untuk curah hujan sekitar 60 mm, sedangkan curah hujan di Kota Padang bisa mencapai 3500 mm sampai 4000 mm per tahun.”

Di satu sisi, Kota Padang memiliki banyak sungai yang bermanfaat sebagai drainase alami. Isril mengutarakan, ada ribuan sungai di Sumatera Barat. Setidaknya terdapat sekitar 23 sungai di Kota Padang, lima di antaranya sungai besar antara lain Batang Arau, Batang Bungus, Batang Kuranji, Aia Dingin, dan Batang Kandis.

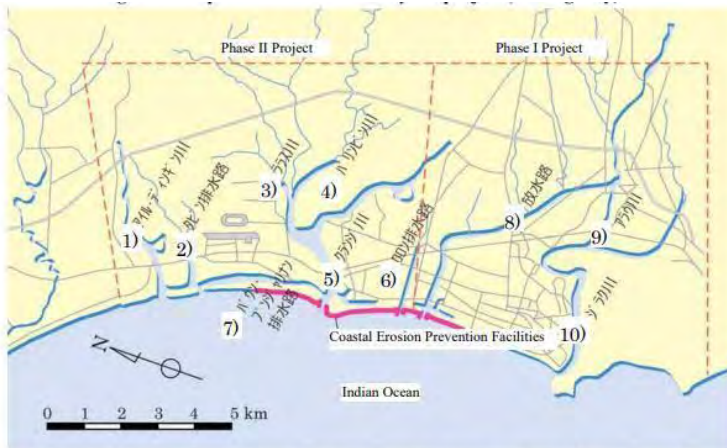
“Mungkin Kota Padang salah satu kota dengan banyak sungai. Jakarta hanya punya satu, Ciliwung. Sayangnya kita kurang memanfaatkan drainase alam itu dengan baik,” sebutnya.

Lima tahun yang lalu, Isril mengaku pernah memberi saran Kota Padang membangun 24 embung, waduk kecil dengan

luas sekitar 1 Ha supaya air yang berlebih bisa tertampung di sana. Ia memperkirakan, kalau seandainya luasnya 1 Ha dengan kedalaman 1 m, satu embung bisa menampung 10 ribu meter kubik air, sehingga daerah di sekitarnya bisa kering.

"Padang punya sekitar 16 daerah aliran sungai (DAS). Sayangnya Pemerintah Kota belum mewujudkannya. Padahal pada masa pemerintahan Jokowi ada ribuan embung dibangun di Indonesia," ungkapnya.

Belajar dari Masa Lalu



1) Air Dingin River, 2) Tabing Drainage Channel, 3) Laras River, 4) Balingbing River, 5) Krunge River, 6) Lolong Drainage Channel, 7) Baung-Penjalinan Drainage Channel, 8) Flood Relief Channel, 9) Arau River, 10) Jirak River

Sumber: <https://www.jica.go.jp>

Berdasarkan catatan Koran Belanda Algemeen Handelsblad, banjir pernah melanda Kota Padang pada tahun 1907 di wilayah sekitar Batang Arau. Satu orang tewas dan banyak binatang ternak tenggelam menyusul banjir ini. Tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membangun kanal yang kelak dikenal masyarakat sebagai 'Banda Bakali' sebagai salah satu upaya mengantisipasi risiko banjir.

"Banda Bakali itu dibuat pada 1911 supaya Pasa Gadang, Alang Laweh, dan Sawahan tidak banjir. Aliran Batang Arau di Lubuk Begalung terbagi dua, satu dialirkan ke Banda Bakali, muaranya di Muara Lasak. Terbukti, banjir berkurang. Bahkan Tarandam jadi tinggal nama," ungkapnya.

Nama daerah 'Tarandam' di Kecamatan Padang Timur secara harfiah memang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia 'terendam'. Kendati intensitas banjir di sana sempat berkurang. Wilayah itu turut terendam banjir menyusul hujan ekstrim pada 14 Juli 2023.

"Pembangunan Banda Bakali sudah jadi contoh bagi kita. Tidak cukup drainase yang kecil-kecil saja. Permasalahan banjir di Kota Padang ini memang soal drainase. Drainase yang dibangun belakangan terlalu kecil," paparnya.

Kendati beberapa kawasan perumahan memiliki drainase, namun outlet atau jalur keluarnya terputus, tidak sampai mengalir ke sungai atau laut sehingga rawan banjir. Belum lagi risiko banjir meningkat ketika banyak sampah di saluran drainase.

Selain itu beberapa sungai juga mengalami sedimentasi atau pengendapan yang menyebabkan air meluap, sehingga harus dikeruk.

Berdasarkan pengalamannya menelusuri DAS di Kota Padang, ia menilai daerah-daerah yang rawan banjir di Kota Padang antara lain Dadok Tunggul Hitam, Ulak Karang, Rawang, Kuranji, dan banyak daerah lainnya.

“Risiko banjir sekarang ini meningkat karena tidak berpedoman ke masa lalu,” katanya.

Banjir di Sumbar dalam Kacamata Alam Takambang Jadi Guru

Kamis 13 Juli 2023 sore langit Kota Padang sudah mulai dirundung awan kelam. Air hujan tidak lagi terbendung sepanjang malam hingga menyebabkan sebagian besar wilayah Kota Padang, terutama yang berada di dataran

rendah mengalami banjir pada Jumat 14 Juli. Hujan di hari itu memang ekstrim, Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) mengakui itu.

“Curah hujan dalam jangka waktu 24 jam yang kita ukur sebesar 385,3 mm di Teluk Bayur, sedangkan di Bandara Internasional Minangkabau 258 mm. Curah hujan yang lebih dari 150 mm per 24 jam tergolong ekstrim,” jelas Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Desindra Dedy Kurniawan kala ditemui di kantornya yang hanya berjarak sekitar 2 KM dari Bandara Internasional Minangkabau, Jumat 29 Juli 2023.

Sebagai informasi, 1 mm curah hujan berarti air yang turun dapat mengisi kedalaman 1 mm pada kotak seluas 1 meter kubik. Curah hujan 50 mm sampai 100 mm tergolong hujan lebat, lalu 100 mm hingga 150 mm tergolong hujan sangat berat. Lebih daripada itu tergolong ekstrim. “Hujan yang terjadi kemarin itu ibarat curah hujan dalam satu bulan yang ditumpahkan dalam sehari,” ungkap Desindra.

Sambar Nyaris Tidak Pernah Kemarau

Menurutnya hujan seekstrim itu tidak terjadi setiap tahun, terakhir terjadi sekitar 3 atau tahun lalu. Antara tahun 2019

akhir atau 2020 awal sebelum pandemi Corona pernah terjadi curah hujan yang mencapai angka 400 mm.

Namun, Sumatera Barat memang selalu akrab dengan hujan, nyaris tidak pernah mengalami cuaca kering dalam waktu yang lama. "Berdasarkan data kita dalam 30 tahun terkait cuaca di Sumbar, itu memang di wilayah barat tipenya sama: tidak mengenal musim kemarau. Dalam satu bulan itu curah hujan yang terjadi lebih dari 150 mm," jelasnya.

"Sumatera Barat itu kondisi cuacanya memang unik. Di Indonesia termasuk Sumatera sebagian besar tengah memasuki musim kemarau. Bahkan di beberapa wilayah sudah masuk puncak musim kemarau. Tapi di Sumbar ini malah kebanjiran," sambung Desindra.

Perlu diketahui, membicarakan cuaca memang perlu mengingat 3 dimensi, yakni faktor global, regional, dan lokal. Terkait faktor global, ia menjelaskan, sekarang malah El Nino dalam kategori yang masih lemah. Di Samudera Pasifik ekuator bagian tengah suhunya menghangat. El Nino pada dasarnya justru membuat curah hujan berkurang.

Namun karakter cuaca lokal di Sumbar lebih kuat pengaruhnya. Sedangkan terkait pengaruh regional, terdapat

pertemuan massa udara di Sumatera Barat yang memicu pertumbuhan awan-awan yang membawa hujan, seperti yang terjadi pada tanggal 18 Juli silam. Itu namanya konvergensi, pertemuan massa udara yang membawa uap air.

Pembentukan awan itu berpengaruh juga terhadap angin kencang yang berlangsung dalam hitungan menit. "Oleh karena itu masyarakat Sumbar perlu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim," tegasnya.

Potensi Banjir di Pesisir

Selain terancam oleh cuacanya yang cenderung ekstrim dan persoalan drainase, menurut akademisi risiko banjir di Sumatera Barat juga dipengaruhi oleh potensi penurunan muka tanah atau bisa disebut *land subsidence*. Fenomena itu dipengaruhi oleh pembangunan fisik signifikan yang tidak terkendali serta penyedotan air tanah yang berlebihan.

"Secara teoritis seperti itu, namun kondisi di lapangan perlu dilakukan pengukuran dan riset mendalam," imbuah pakar oseanografi Ulung Jantama kepada Roehana Project.

Dia mengatakan faktor iklim yang berkaitan dengan cuaca di samudera juga turut meningkatkan ketinggian muka air laut atau *sea level*, sehingga berpotensi membuat kawasan pesisir barat Sumatera ini terancam banjir.

Hal ini dapat dilihat pada kondisi geografis Sumbar yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Sehingga terdapat banyak faktor interaksi laut dengan atmosfer sehingga turut mempengaruhi cuaca.

"Antara faktor iklim dalam beberapa periode tertentu memiliki hubungan yang logis dengan fenomena banjir, khususnya banjir di kawasan pesisir. Karena pada fase puncak atau pasang tinggi, dengan diikuti adanya peningkatan muka air laut dapat memicu banjir pasang di kawasan pesisir. Fenomena ini juga sering disebut banjir rob," jelasnya.

Empat Dimensi Penyebab Risiko Banjir di Sumbar

Sementara itu akademisi yang aktif di Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Unand Ardinis Arbain memaparkan setidaknya terdapat empat aspek yang menjadi penyebab risiko banjir di Sumatera Barat. Faktor-faktornya adalah perubahan iklim, pembukaan hutan lindung, pembangunan di daerah aliran sungai dan sampah yang menyumbat drainase.

"Pertama, sudah ada perubahan iklim. Berdasarkan data dari 1980 sampai tahun 2020 kemarin, memperlihatkan bahwa curah hujan rata-rata tahunan di beberapa daerah Sumatera Barat meningkat," jelasnya.

Kedua, sebagian hutan lindung sudah dibuka untuk permukiman, perkebunan, maupun infrastruktur jalan. Akibatnya sebagian besar tanah tidak lagi ditutupi pohon, sehingga sebagian besar air tidak tersimpan di tanah melainkan mengalir di permukaan tanah. "Seharusnya air ditahan oleh pohon, mengalir di batangnya, lalu masuk ke dalam akar dan tersimpan di tanah," imbuhnya.

Dengan sebagian besar daerah yang sudah terbuka tersebut, air mengalir di permukaan tanah dan mengalirkan zat-zat humusnya, sehingga menyebabkan air berwarna kuning. Aliran air yang tercampur tanah tersebut bisa menimbulkan sedimentasi atau pengendapan. Pengendapan kemudian membuat sungai lebih dangkal.

Ketiga, di daerah aliran sungai (DAS), banyak yang membangun rumah. Akibatnya tutupan lahannya pun bukan pohon lagi, melainkan rumah. Sehingga apabila hujan air pun tidak lagi terserap ke tanah, melainkan masuk ke rumah atau

pekarangannya. Apa lagi jika di sekitar rumah tidak ada saluran drainase yang memadai.

"Keempat, drainase itu sendiri pun tersumbat oleh sampah. Lihat saja di jalan ke kampus, air drainase tersumbat, sehingga harus dibongkar," sebut akademisi yang juga mengajar sebagai dosen pascasarjana itu.

Alam Takambang Jadi Guru

Berdasarkan empat aspek yang ia utarakan itu, ia menarik sebuah kesimpulan. *"Kesalahan umum yang terjadi adalah kita membangun tidak mengikuti filosofi Alam Takambang Jadi Guru."*

"Misalnya ada daerah namanya *Lubuak Buayo*. Lubuk itu kan artinya daerah tempat menyimpan air. Mengapa dibuat di rumah di situ?"

Ia juga mengingatkan, sebagian wilayah Kota Padang yang sudah terbangun pada mulanya adalah rawa-rawa. "Rawa juga tempat air, kalau ditimbun tentu bermasalah. Boleh membangun di rawa-rawa, tapi cara membangunnya tidak sembarangan. Harusnya bangunan yang dibangun di daerah

rawa punya kaki, semacam rumah panggung. Jadi air tetap bisa tertampung di bawah, kita saja yang naik ke atas.”

Sebagai seorang yang tumbuh dan beraktivitas di lingkungan akademik, ia mengingatkan orang-orang dari latar belakang keilmuan apa pun harus mempelajari perilaku alam.

Menurutnya *civitas academica* kebanyakan selama ini berpikir terlalu tersekat-sekat antara fakultas. Sehingga seolah-olah mendalam di satu sisi, tapi tidak mengetahui yang lain. Menurut Ardinis pola pikir yang benar adalah sebagai satu universitas.

“Universitas itu kan universum, umum, besar. Kita boleh jadi mahasiswa fakultas hukum, tapi kita tetap masuk universitas. Universitas itu berpikirnya harus lintas ilmu,” tegasnya.

“Di Unand saja kelihatan, tempat parkir dicor semen semua. Kalau begitu sudah pasti air tidak bisa masuk ke dalam tanah. Ada alternatif lain, misalnya dengan paving block,” ia mencontohkan.

Sementara itu untuk menghadapi populasi yang bertumbuh Ardinis menilai seharusnya ada wilayah yang tidak boleh dibangun permukiman.

“Jadi ada persoalan teknologi, budaya, hukum, dan ekonomi. Apa persoalan ekonominya? Karena orang secara ekonomi harus memenuhi kebutuhannya, maka ia berdagang di mana-mana atau menebang hutan untuk mendapatkan komoditas kayu,” katanya.

Lantas dia menawarkan suatu ide: pembayaran jasa lingkungan. Langkah tersebut antara lain pernah diterapkan di Baso.

“Jasa pengelolaan hutannya dibayar, karena hutan menyerap CO₂ dan mengeluarkan oksigen. Umumnya orang luar negeri, misalnya perusahaan-perusahaan Belanda yang diwajibkan oleh negaranya untuk menggunakan jasa lingkungan itu. Sampai 2014 masih diterapkan,” tambahnya.

Menurut Ardinis jika ingin menyelamatkan hutan, maka semua yang berkepentingan dengan hutan wajib membayar. “Jangan hanya mau air dan oksigen tapi tidak mau membayar pihak-pihak yang menjaga keberlangsungan hutan,” katanya.

(*)

05

Potret Aksi Damai Masyarakat Air Bangis yang Lahannya Dirampas

Gubernur Tak Peduli dan Polisi Memaksa Pulang (Bagian I)

Oleh: Daffa Benny
Editor: Jaka HB

" Kalau sekiranya bapak gubernur takut untuk menghadapi masyarakat, maka ketahuilah pak gubernur, Nabi Musa disuruh menghadap Firaun itu ada doanya supaya tidak takut, sedangkan Firaun adalah orang yang mengakui dirinya sebagai Tuhan".

Kata-kata tersebut keluar dari seorang perempuan berjilbab cokelat menggunakan pengeras suara. Dia adalah seorang

warga dari Nagari Air Bangis yang menjadi korban perampasan ruang hidup oleh negara.

"Ini doa khusus buat pak gubernur supaya tidak takut menemui kami masyarakatnya," katanya, pada Jumat (4/8) sore.



Jumat yang cerah itu adalah hari kelima masyarakat Jorong Pigogah Patibubur Kecamatan Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat melakukan aksi damai. Beramai-ramai mereka bertahan di Kota Padang dan menginap di Masjid Raya Sumatera Barat.

Mereka ingin menemui Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Namun politisi Partai Keadilan Sejahtera itu tak kunjung menemui warganya.

“Kami adalah masyarakat asli Pigogah Patibubur, hendak memperjuangkan lahan kami yang dirampas oleh pemerintah. Kami mempunyai lahan bukan untuk mencari kaya, hanya untuk menyambung hidup keluarga kami,” ujar seorang pria paruh baya peserta demonstrasi sembari mengepalkan tangan kemudian menunjuk langit.

Matahari sore semakin turun, langit semakin gelap namun masyarakat belum juga lihat harapan mereka menemui gubernur. Muka-muka kelelahan masih menghadap kantor gubernur dengan mata yang masih menyalakan harapan.

Seorang demonstran lainnya kemudian maju mendekati pagar kantor gubernur menghadapi para aparat kepolisian yang berjaga, dengan suara yang lebih pelan dan tempo bicara lebih lambat ia kemudian memohon.

“Apakah ada Kapolda, Pak, Bu? Kalau tidak ada, Wakapoldanya. Kami sudah sehari-hari datang dari Pigogah Patibubur Padang untuk bertemu dengan Gubernur. Niat kami baik-baik, tolong dilindungi. Kami masyarakat petani.”

“Tolong sampaikan pesan kami. Kami adalah bagian dari masyarakat Nagari Aia Bangih. Bukankah Pigogah Patibubur bagian dari negara kita juga? Apakah kami tidak boleh hidup di sana?”



Massa Aksi dari Air Bangis di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat. Foto: Daffa Benny.

“Kami di sana diintimidasi. Bahkan ada anak kita dan adik kita yang sudah tertangkap. Tolong bantu hak kami bu. Saya rasa demikian, terima kasih.”

Sebagian aparat berseragam menjawab salam pria itu. Selang beberapa menit, massa aksi memutuskan kembali ke titik kumpul di Masjid Raya Sumbar, dengan tekad yang masih sama.

Tangis, ratap, amarah, hingga pekik mengandung harap tumpah ruah di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang.



Banyak massa aksi yang pingsan selama aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat. Foto: Uyung Hamdani.

Massa aksi tak hanya terdiri dari bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu dan anak-anaknya. Selama lima hari warga berdonasi membantu massa aksi. Menurut Rafi salah satu elemen yang hadir dalam massa aksi itu banyak pula anak-anak yang kejang-kejang dan ibu-ibu yang pingsan. Sekitar 1000 lebih massa aksi menunggu pemimpin yang dipilih rakyat.

Penangkapan Paksa

Tak sampai berselang 24 jam pasca aksi unjuk rasa yang tidak membuahkan pertemuan dengan gubernur, masyarakat Pigogah Patibubur yang bertahan dan beristirahat di masjid raya lagi-lagi harus menerima kejutan.

Ratusan personel Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar datang berbondong-bondong. Mereka menyiapkan bus untuk mengantarkan massa kembali ke Pasaman Barat.

"Allahu Akbar, Allahu Akbar," teriak masyarakat yang masih bertahan di dalam bangunan masjid raya, terdokumentasi dalam sebuah video amatir dari warga. Mereka menolak perintah polisi untuk meninggalkan lokasi itu, mengingat tuntutan mereka atas lahan kehidupan belum tercapai. Puluhan warga sipil dari berbagai kalangan –masyarakat Pigogah Patibubur, pegiat LSM, relawan, hingga mahasiswa turut diringkus secara paksa.

Salah satu pendamping masyarakat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Adrizal turut terseret. Mulanya digiring oleh sepuluh hingga belasan orang berseragam maupun berpakaian preman. Seorang pria berkaos hitam tampak memukul kepala Adrizal. Selang 2 atau 3 detik, ia

mengumpulkan tenaga dan mengayunkan tangan demi mendaratkan tinju di tengkorak belakang pemuda kurus tinggi tersebut.

Adrizal sontak memegang kepalanya yang berdenyut hebat. Dia melihat ke belakang untuk mengetahui siapa orang yang mendaratkan bogem mentah itu. Namun tak berhasil. Polisi-polisi itu dengan cepat memasukkan paksa pengacara tersebut ke mobil hitam. Seorang warga merekamnya dan video beredar luas.

WALHI, YLBHI, dan PBHI kemudian mengeluarkan siaran pers yang menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap 4 orang masyarakat Air Bangis, 3 orang mahasiswa, dan 7 orang pendamping hukum yang ditangkap kepolisian tersebut. Tiga organisasi tersebut juga menuntut agar hak orang-orang tersebut dipulihkan.

Dalam rilis pers tersebut narahubung YLBHI Zainal Arifin menyampaikan kronologi peristiwa itu. "Masyarakat Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat melakukan aksi damai sejak 5 hari belakangan di Kantor Gubernur Sumbar, kemudian mengalami penangkapan sewenang-wenang dari pihak kepolisian," ungkapnya pada Sabtu 5 Agustus 2023.

“Sebelum tindakan dilakukan oleh Polda Sumbar telah ada kesepakatan bahwa masyarakat akan menentukan sikap setelah adanya hasil audiensi dari Gubernur Sumbar karena perwakilan warga dan mahasiswa sedang melakukan dialog dengan Pemprov Sumbar.

Sembari menunggu berlangsungnya dialog, masyarakat Aia Bangih yang berada di Masjid Raya Sumbar melantunkan sholawat bersama. Di lokasi itu juga ada beberapa pendamping hukum, relawan, dan mahasiswa. Kemudian anggota Polda Sumbar membubarkan secara paksa massa di dalam masjid sekaligus melakukan penangkapan.

“Tindakan kepolisian tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM karena upaya paksa tersebut jelas melanggar jaminan perlindungan dan penghormatan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, DUHAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik, UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan UU HAM.”

Selain itu menurut rilis pers WALHI, YLBHI, dan PBHI, tindakan itu juga melanggar peraturan internal kepolisian, yakni Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkap) Nomor 9 Tahun 2008

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hingga malam 5 Agustus belasan orang yang ditahan tersebut masih belum dibebaskan dari Kantor Polda Sumbar.

Intimidasi Jurnalis

Selain adanya penangkapan, proses pemulangan paksa masyarakat Air Bangis tersebut juga intimidasi kepada jurnalis-jurnalis yang meliput pun terkena.

“Dari data yang didapatkan AJI Padang, terdapat 4 orang jurnalis yang menjadi korban. Jurnalis Tribunnews Nandito Putra dipiting oleh polisi berpakaian bebas saat sedang merekam kondisi sembari live streaming untuk medianya. Sebelumnya ia juga dilarang mengambil gambar dan ponselnya juga hampir direnggut,” ungkap Ketua AJI Padang Aidil Ichlas.

Melihat rekannya sesama wartawan diamankan, Aidil Ichlas dan Fachri Hamzah menyampaikan protes. Namun tindakan mereka malah ditanggapi dengan intimidasi. Peristiwa itu juga terekam dalam sebuah video, menunjukkan seorang polisi berpakaian bebas mengangkat kerah baju Fachri dan membentak mereka. "*Ang elok-elok se lah*" atau bisa diartikan sebagai "kau baik-baik sajalah," begitu bunyi pernyataan polisi tersebut.

Namun setelah perdebatan, sejumlah perwira dari Polresta Padang datang menengahi dan meminta maaf kepada para jurnalis yang mengalami intimidasi itu. Intimidasi dan upaya penghalangan liputan juga dialami oleh Dasril jurnalis Padang TV, anggota polisi menghalangi kameranya untuk merekam. Sementara itu seorang jurnalis Classy FM, Zulia Yandani sempat ditarik hendak dimasukkan ke dalam mobil kendati ia sudah mengaku sebagai wartawan.

Organisasi profesi jurnalis mulai dari AJI Padang, PFI Padang, dan IJTI Sumbar protes keras melalui siaran pers bersama.

Walhi: Pemerintah Harus Kembalikan Lahan Masyarakat

Polemik lahan tersebut pertama kali bermula sejak Gubernur Provinsi Sumatera Barat mengusulkan ke Menteri

Koordinator Maritim dan Investasi RI lahan seluas sekitar 30.000 ha di Nagari Air Bangis untuk menjadi Proyek Strategis Nasional untuk digarap sebuah perusahaan swasta yang berencana akan membangun *industry refinery* dan *petrochemical* serta sarana pendukung lainnya.

“Menurut Gubernur, lahan bekas areal PT Sumber Surya Semesta tersebut berstatus *clean and clear* untuk digunakan,” ungkap Tommy Adam, Kepala Departemen Advokasi Walhi Sumbar yang juga terlibat mengawal isu tersebut.

Tommy menegaskan, pemerintah harus mengembalikan lahan perkebunan masyarakat yang sebelumnya diserahkan masyarakat karena terpaksa atau dalam keadaan tertekan.

“Bagaimana mungkin kebun yang dibangun masyarakat, kemudian diserahkan pemerintah hak kelolanya kepada pihak lain. Jika pemerintah memberikan hak kelola, yang paling berhak adalah masyarakat Air Bangis, terutama yang membangun dan mengelola kebun sejak awal,” katanya.

Apa Kata Kepolisian?

Polda Sumbar menyampaikan video rilis pers mengenai isu pemulangan masyarakat Air Bangis di Masjid Raya Sumbar. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono berbicara mewakili sekitar 600 personil kepolisian yang turun dalam pembubaran massa tersebut.

“Mereka turun ke jalan tidak ada surat pemberitahuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 Prosedur Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kami masih persuasif menghimbau mereka pulang ke Pasaman Barat walaupun seharusnya ada sanksi supaya dibubarkan,” katanya.

“Ternyata yang terjadi mereka malah tidur di Masjid Raya, yang merupakan tempat suci, tempat ibadah, dan tempat belajar agama, yang berdasarkan slogan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang telah disepakati mayoritas masyarakat Muslim di Sumatera Barat,” katanya.

Suharyono mengatakan pihaknya sudah tahu penggerak dan provokatornya. Dia mengatakan beberapa tuntutan sudah mereka pahami dan maklumi. Dirinya juga berterimakasih pada pengunjuk rasa yang perwakolannya

sudah beraudiensi dengan unsur forkompida Sumatera Barat. Untuk diketahui unsur yang beraudiensi setelah ditelusuri bukan bagian dari massa aksi yang lima hari di depan kantor gubernur.

Menurut Kapolda tersebut, sebagian besar tuntutan unjuk rasa masyarakat tidak masuk akal. Salah satunya yaitu pembebasan masyarakat Air Bangis yang ditahan. Menurut para pengunjuk rasa, para tahanan tersebut mengalami kriminalisasi.

“Kalau pencuri ya harus ditahan, siapa yang mengambil barang orang lain ya melanggar Undang-Undang,” katanya.

Namun siapa yang sebenarnya pencuri? (*)

06

Duduk Perkara Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Air Bangis Demi Proyek Strategis Nasional

(Bagian II)

Oleh: Fachri Hamzah

Editor: Jaka HB

K*epolisian Daerah Sumatera Barat memulangkan paksa ribuan Warga Air Bangis yang sudah lima hari berunjuk rasa. Gubernur Sumatera Barat tak mau menemui massa dan menanggapi tuntutan rakyatnya. Bagaimana duduk perkara konflik ini sebenarnya?*

Massa menuntut Mahyeldi Ansharullah selaku Gubernur Sumatera Barat membatalkan proyek strategis nasional (PSN) berupa pabrik petrokimia dan penyulingan beserta fasilitas umum lainnya yang memakan lahan sampai 20.000 hektar di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.



Foto: Dok. Istimewa

Ribuan masyarakat yang memadati Kantor Gubernur Sumbar itu terancam kehilangan tempat tinggalnya karena Mahyeldi menandatangani surat usulan PSN di lokasi itu pada 30 Juli 2021. Ketua Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Barat itu mengirimnya ke Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Surat bernomor 070/774/Balitbang-

2021 tertulis Mahyeldi telah menerima usulan proyek pembangunan pabrik petrokimia dan penyulingan dari Direktur Eksekutif PT Abaco Pasifik Indonesia. Dia juga menjelaskan bahwa proyek itu akan menempati lahan seluas 30 ribu hektare di bekas area milik PT Sumber Surya Semesta.

Pada surat yang sama Mahyeldi juga menyebutkan bahwa lahan tersebut sudah clean and clear. Namun itu tidak sepenuhnya terbukti. Sebab wilayah yang diusulkan sebagai pabrik petrokimia itu ditempati 27.000 masyarakat. Selain itu juga terdapat kebun sawit masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas ada penghuninya sebanyak 27.965 jiwa.

Akar Huru-Hara di Nagari Air Bangis

Gubernur Sumbar juga sudah menyurati Menteri ATR/BPN tentang pengembangan Kawasan Strategis Pengelolaan Minyak Bumi di Sumatera Barat. Surat tersebut bernomor 570/272/IV/DPMPTSP-2021. Pada poin kedua dalam surat itu tertulis PT Abaco Pacific Indonesia akan melaksanakan pembangunan kawasan Industri Refinery seluas 20.000 hektar di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman

Barat. Lahan seluas 20.000 hektar merupakan kawasan HP, HTR dan konsesi sawit milik PT HRN.

Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat Wengki Purwanto ada 10.000 hektar lahan masyarakat di Nagari Air Bangis Sungai Beremas yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP). Data ini berdasarkan pembacaan menggunakan sateli citra.



Foto: Dok. Istimewa

“Luasan rata-rata 4-5 ha per KK. Sebelum perkebunan sawit, sebagian lahan persawahan, palawija, coklat, cengkeh dan lainnya. Sebagiannya lagi merupakan eks pemukiman lama masyarakat,” katanya.

Wengki mengatakan sejak tahun 2000-an, perkebunan sawit mulai masuk ke Nagari Air Bangis yaitu PT Bintara Tani Nusantara. Masuknya perusahaan itu memicu

pertumbuhan kelapa sawit rakyat lebih masif sejak tahun 2008-sekarang.

Selanjutnya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu IUPHHK-HTR Divisi I untuk KSU Air Bangis dengan SK nomor : 188.45/548/BUP-PASBAR/2014 seluas 575 Ha dengan jumlah anggota KSU Air Bangis sebanyak 575 KK membebani wilayah kelola masyarakat.

Selain itu izin lainnya adalah IUPHHK-HTR Divisi II untuk KSU Air Bangis dengan SK nomor : 188.45/549/BUP-PASBAR/2014 seluas 570 Ha dengan jumlah anggota KSU Air Bangis sebanyak 570 KK dan IUPHHK-HTR Divisi III untuk KSU Air Bangis dengan SK nomor : 188.45/550/BUP-PASBAR/2014 seluas 445 Ha dengan jumlah anggota KSU Air Bangis sebanyak 445 KK;

"Pengurus dan anggota KSU Air Bangis pemegang IUPHHK-HTR Divisi I, II, III tidak diketahui secara pasti. Sejak izin terbit hingga saat ini, tidak pernah menguasai dan mengelola lahan sesuai izin. Sebab, izin terbit diatas lahan perkebunan masyarakat yang bukan anggota koperasi," katanya.

Sementara itu pada tanggal 30 September 2021, Koperasi Air Bangis Semesta yang memegang ketiga izin tersebut

mengajukan perluasan HTR seluas 15.250 ha kepada KLHK melalui surat permohonan nomor : 07/KSU/SKD HTR ABS/2021 tertanggal 30 September 2021.

“Berdasarkan analisis serta lahan eksisting yang tersedia, areal seluas 15.250 ha yang dimohonkan sebagai perluasan IUPHHK-HTR oleh KSU Air Bangis Semesta akan tumpang tindih dengan lahan perkebunan masyarakat yang bukan anggota koperasi tersebut, hal ini lah selalu memicu konflik ditengah masyarakat,” katanya.

Wengki mengatakan tumpang tindih ini yang menyebabkan adanya penangkapan dua warga.

“Mereka dituduh memanen di dalam kawasan hutan. Penangkapan ini berujung aksi unjuk rasa pada 31 Juli sampai 4 Agustus 2023 dan dipulangkan secara paksa 5 Agustus 2023,” kata dia.

Tidak hanya itu, pengurus KSU Sekunder Air Bangis Semesta itu juga merupakan orang-orang punya hubungan kekeluargaan satu sama lain. Bendahara KSU Air Bangis Semesta adalah Efif Syahrial dan saudaranya Eril Syahrial sebagai pengawas koperasi. Lalu Titin Suharni yang juga

terdata sebagai Komisaris Utama PT HRN merupakan Ketua KSU Air Bangis Semesta.

Selain itu lahan perkebunan masyarakat tengah disiapkan dan telah diusulkan sebagai lokasi proyek strategis nasional (PSN) untuk PT Abaco Pasifik Indonesia yang akan membangun industri refinery dan lainnya.

Sejak tahun 2017 PT Abaco Pasifik Indonesia telah pernah mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk kebutuhan investasi mereka di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat seluas 26.581 ha ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun saat itu mendapat penolakan keras dari Mentawai.

Keberadaan kantor PT Abaco sampai saat ini juga belum jelas. Mengutip laman Majalah Tempo, mereka menemukan kantornya kosong.

Kementerian Hukum dan HAM mencatat perusahaan ini sebagai perusahaan penanaman modal asing. Pada akta Abaco para pendiri, tercatat menyeter modal sejumlah Rp 22,62 triliun dengan ekuivalen 2 juta lembar saham.

Saham perusahaan tersebut juga dimiliki oleh Pengusaha Emil Abbas. Saham Emil tertulis 200 ribu lembar senilai 2,26 triliun pada akta Abaco yang diterbitkan pada Juni 2021. Indah Permata Sari juga tercatat sebagai Direktur PT Abaco.

Emil Abbas ditengarai memiliki kedekatan dengan Gubernur Sumatera Barat. Sebab di beberapa kesempatan Emil Abbas menemani Mahyeldi untuk menemui investor. Salah satunya saat menemui Duta Besar Qatar, Fauziya Edrees Al-Sulaiti, pada Maret 2022. Hal ini dapat dilihat dalam laman resmi pemerintah Provinsi Sumbar.



Foto: Fachri Hamzah

Terancam Tergusur dan Sering Berkonflik dengan Koperasi Hutan Tanam Rakyat

Masyarakat tidak hanya terancam digusur pembangunan PSN, tapi juga sering berkonflik dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Hutan Tanam Rakyat (HTR) Air Bangis Semesta. Koperasi tersebut punya lahan ribuan hektar yang berdampingan dengan kebun masyarakat. Lahan tersebut berstatus hutan produksi.

Dari keterangan dua sumber Roehana, KSU HTR Air Bangis sering mengintimidasi masyarakat untuk menjual hasil kebunnya. Mereka bekerja sama dengan pihak kepolisian. Di Jorong Pigogah Pati Bubur kepolisian terlihat berdiam di Peron KSU tersebut. Ada satu tenda barak berwarna coklat yang didirikan di belakang peron.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan keberadaan Brigade Mobil (Brimob) guna menjaga agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat.

Guntur (43) selaku salah satu warga setempat mengatakan dirinya berasal dari Rantau Prapat Sumatera Utara. Seseorang teman membawanya pada 1996 untuk masuk ke kawasan

Pigogah. Awalnya dia tinggal di lokasi tersebut penampakan hutan semua, tidak ada masyarakat.

Awal masuk ke sini sekitar 15-20 keluarga di Lubuk Buaya dan ada di Lubuk Buntar sekitar 30 Kepala Keluarga. "Tidak ada kehidupan, semuanya hutan dan itulah yang kami garap, pemerintahan juga tidak ada. tetapi ada bekas-bekas peninggalan masyarakat Air Bangis yang sudah pindah ke pesisir pantai yang kami temukan," katanya.

Selain itu Guntur mengatakan saat pertama kali datang dirinya sudah mencoba mencari pemilik tanah yang bakal jadi garapannya.

"Tidak ada yang bawa kami ke sini. Kami langsung ke sini setelah mendapatkan kabar bahwa tempat ini tanah bukaan. Perihal izin tanah bukaan ini, saat kami pertama kali ke sini memang karena kami belum punya pemerintahan, jadi kami buka sendiri. Namun, setelah berkembang kampung ini, kami cari ninik-mamak, tetapi hingga kini ninik-mamaknya juga tidak jelas," katanya.

Pada 2010 pernah pecah konflik antara masyarakat pesisir pantai dengan Jorong Pigogah.

“Oleh preman di sini, mereka mengira kami sudah senang dengan hasil panen sawit yang menumpuk di depan rumah, sampai ribut juga karena hal tersebut, ini terjadi sekitar tahun 2010. Masa kami yang punya sawit, kita yang mendodos, kita yang mengeluarkan ke TPH, sampai payah, sama orang itu yang menerima, mana ada istilah seperti itu kan, ya ribut,” katanya.

Jawaban Pengurus KSU Air Bangis Semesta

KSU HTR Air Bangis disebut-sebut sebagai salah satu kerusuhan di Nagari Air Bangis. Sebab sejak keberadaan mereka banyak masyarakat yang ditangkap. Tuduhannya mencuri di Hutan Produksi.

Saat dikonfirmasi Bendahara lembaga tersebut Efif Syahrial membantah tuduhan tersebut. Dia mengatakan tujuan mereka membuat koperasi ini untuk membuat hasil panen masyarakat menjadi legal. Sebab menurutnya rata-rata masyarakat di Pigogah Pati Bubur itu berkebun di kawasan Hutan Produksi (HP).



Bendahara KSU HTR Air Bangis Semesta Efif Syahrrial. Foto: Fachri Hamzah.

“Pembentukan KSU Sekunder Air Bangis Semesta ini sudah berizin. Mereka punya anggota sekitar 5000 KK lebih,” katanya.

Efif mengatakan keterlibatan dirinya dalam koperasi karena permintaan pengurus divisi. “Saya diminta oleh pengurus divisi 1,2 dan 3 untuk menjadi pengurus di koperasi sekundernya. Gak ada arti pengurus sekunder ni, yang punya suara pengurus divisi,” katanya

Dia menambahkan isu yang mengatakan Titin Suharni sebagai Ketua KSU Sekunder Air Bangis Semesta juga benar. Keterlibatan Titin juga atas permintaan dari pengurus divisi. “Memang benar ibu Titin ketua KSU, itu atas permintaan dari

pengurus divisi. Mereka ingin orang yang besarlah jadi pemimpin," ujarnya.

"Awalnya ibu Titin menolak, ada 2 hari merenung, tapi akhirnya dia menerima dengan syarat saya harus ikut dan jadi bendahara KSU Sekunder Air Bangis," jelasnya.

Saat itu Titin Suharni sudah menjabat sebagai Komisaris PT Hutan Rakyat Nusantara (HRN) yang mengelola plasma 374. "Ya, PSN mau masuk mungkin pengurus melihat ibu Titin nantinya bisa menjembatani masyarakat dengan PT Abaco. Sangat diplomatik para pengurus divisi ini," katanya.

Dia membenarkan jika keluarganya yang banyak menjabat sebagai pengurus KSU Sekunder Air Bangis Semesta. "Benar adik saya ada yang menjadi pengurus KSU Sekunder Air Bangis," katanya.

Kemudian Efif juga meluruskan jika dirinya tidak pernah menerima dan memetik keuntungan dari mega proyek PT Abaco Pasifik Indonesia di Air Bangis. "Saya tidak pernah menerima apapun. Hal ini murni demi kepentingan Air Bangis," katanya.



Suasana Jorong Pigogah Patiburur Nagari Air Bangis, Provinsi Sumatera Barat. Foto: Fachri Hamzah.

“Saya sangat sedih melihat tanah-tanah ulayat yang di Pigogah itu dikuasai oleh para tuan tanah. Banyak dari mereka yang menguasai banyak lahan, padahal itu tanah nagari tapi anak-anak kami hanya menjadi nelayan,” ujarnya.

Melihat kondisi inilah Efif ketika itu masih menjabat sebagai Wali Nagari Air Bangis untuk menerima kedatangan mega proyek tersebut. “Tanah itu banyak dikuasai tengkulak tanah, sedangkan anak kemenangan bekerja sebagai nelayan. Alangkah bagusnya saya terima PSN dan nantinya bakal banyak lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Selain itu Efif juga menerangkan bahwa Emil Abbas sudah pernah datang ke nagari ini. Emil saat itu datang untuk

mengecek lokasi yang bakal dibangun PSN. "Pak Emil sudah pernah kesini, tiga kali malahan. Juga sudah pernah terbang dengan helikopter melihat kondisi lahan," katanya.

Pertimbangan Efif menerima PSN karena menurutnya akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Sebab sudah ada perjanjian dengan PT Abaco, jika akan melibatkan masyarakat setempat dan menambah lapangan kerja.

Titin Suharni sudah menjabat sebagai Komisaris PT Hutan Rakyat Nusantara hingga berita ini dinaikkan belum merespon panggilan telepon, *chat* WhatsApp dan tak dapat ditemui hingga saat ini. (*)

07

Kesaksian Warga Air Bangis: Kami Dipaksa Pulang dengan Cara Brutal

***(Tulisan / Liputan Khusus
Konflik Agraria Air Bangis)***

**Oleh: Tim Redaksi Langgam.id
Editor: Yose Hendra**

Sejumlah warga Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra yang turut dibubarkan di Masjid Raya Sumatra Barat, dan dipaksa pulang kampung ke Air Bangis, paparkan kronologi pembubaran paksa oleh polisi di lantai dasar Masjid Raya Sumatra Barat, Sabtu (05/08/2023). Berdasarkan pantauan *Langgam.id* dan

wawancara dengan sejumlah warga, mereka menuturkan, pemulangan paksa ini dilakukan dengan cara brutal.



Para warga Air Bangis saat berada dalam bus yang sudah disiapkan untuk membawa mereka pulang ke Pasbar. [foto: Dharma Harisa]

Warga berinisial HL, menceritakan siang hari sebelum pembubaran paksa, ada perwakilan masyarakat yang diminta untuk berdialog di kantor gubernur.

"Komunikasinya, kami menunggu kawan-kawan pulang dari kantor gubernur. Kalau ndak ada keputusan kita ndak pulang. Sekarang kami dipaksa pulang dengan cara brutal," katanya, Sabtu (05/08/2023).

Soal perutusan warga yang berdialog dengan pihak Gubernur itu, sama dengan dengan cerita Wakil Bupati Pasaman Barat, Riswanto dan Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda Sumbar Djadjuli.

Kata Riswanto, dia menjanjikan perwakilan warga untuk berdialog dengan gubernur. Dengan harapan, warga mau balik ke Pasaman Barat. Sementara Djadjuli mengatakan, kala pembubaran itu, sedang ada komunikasi 20 orang (utusan warga) ke gubernuran. Namun menurutnya, tidak mungkin juga ditunggu, karena beberapa tuntutan mereka tidak akan dipenuhi.

"Beberapa tuntutan mereka tidak akan dipenuhi seperti masalah PSN itu kan proyek nasional. Lalu melepaskan 2 tersangka yang ditahan," ujar Djadjuli.

Sampai saat ini HL belum tau hasil pembahasan yang ada di kantor gubernur. Ketika utusan mereka pergi, datanglah sejumlah Brimob beserta polisi yang lain untuk memaksa pulang secara brutal.

Dalam video yang diambil *Langgam.id*, sejumlah polisi berpakaian dinas lengkap dengan sepatu lars, memasuki masjid lantai 1. Pada lantai tersebut menghampar sajadah. Sebagian warga melantunkan zikir dan salawat saat aparat kepolisian memasuki ruangan itu. Warga yang bertahan di dalam ruangan itu, dipaksa keluar, menuju bis. Mereka yang bertahan, diangkat secara paksa.

Selain itu tutur HL, dirinya dan keluarga turut mendapat kekerasan dari polisi. "Anak saya ini dipaksa ditolak-tolak keluar Masjid," ucapnya. Anak HL sendiri masih kecil dan seorang perempuan. Ia melihat saat itu semua masyarakat Air Bangis dipaksa untuk mau keluar dan masuk ke dalam bus.

Kini, HL dan anggota keluarganya, hanya bisa mengikuti apa kata polisi dan terpaksa meminggirkan diri keluar Masjid Raya. Semua warga dari Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis dipaksa pulang oleh polisi.

Sebelumnya diberitakan, polisi memaksa warga Air Bangis yang tengah berunjuk rasa untuk meninggalkan pelataran Masjid Raya Sumbar.

Di antara mereka banyak anak bayi, balita, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Dari pantauan Langgam.id, dimana-mana saat upaya pemulangan paksa, anak-anak dan wanita menjerit-jerit tidak mau dipulangkan.

Mereka hanya tertunduk lemas sambil memeluk anak-anaknya yang menangis. Satu per satu, mereka diarahkan keluar Masjid Raya Sumbar untuk masuk ke dalam bus yang disiapkan pemerintah.

Mereka yang belum mendapat bus, lalu disatukan dalam kelompok-kelompok dan dikelilingi oleh polisi.

Mulanya, sekitar pukul 15.20 WIB, polisi dan sat Brimob Polda Sumbar masuk ke dalam pelataran Masjid Raya Sumbar. Warga saat itu sedang bersholawat mendoakan utusan yang pergi ke kantor Gubernur.

Polisi lalu menyuruh dan memaksa masyarakat untuk pulang dan naik ke atas bus yang telah disediakan. Kurang lebih ada sekitar 18 an yang digunakan untuk membawa masyarakat kembali ke Air Bangis.

Terjadi cekcok antara warga dan polisi. Brimob dengan jumlah banyak lalu membentuk barisan mengepung pelataran masjid tempat masyarakat berkumpul.

Beberapa orang lalu ditangkap polisi dan dibawa ke Polda Sumbar. Di antaranya masyarakat, pendamping, dan mahasiswa.

Kemudian Brimob, polisi, dan polwan masuk untuk mengangkat dan menyuruh warga yang tidak mau pulang. Dengan menentang senjata dan dilengkapi alat anti huru hara (gas air mata, pentungan) warga digiring agar keluar dari ruangan lantai dasar masjid.

Tanpa membuka sepatu, mereka lalu lalang menyudutkan warga yang bertahan disana. Semua warga lalu. dipaksa keluar. Polisi juga menyisir lantai atas Masjid Raya Sumbar.

Warga yang ndak mau naik mobil, akan dipaksa dan diangkat sampai ia kehabisan tenaga.

Selain HL, berikut keterangan saksi mata lain soal pembubaran paksa itu. Kami sengaja menuliskan saksi mata dengan inisial, upaya mitigasi keamanan yang bersangkutan. Berikut petikan keterangan masing-masing saksi mata itu:

1. Inisial E: Ketika Habib sedang memegang kamera untuk merekam kejadian, Habib didatangi oleh sekelompok aparat dan langsung melarang Habib untuk merekam video, lalu Alfi mempertanyakan dasar aparat melarang untuk merekam sehingga terjadi cekcok antara Habib, Alfi dengan aparat kepolisian. Lalu aparat menyeret/memaksa dengan cara menarik lengan Habib dan Alfi untuk dibawa ke dalam mobil.
2. Inisial A: Saya hendak mengambil dokumentasi peristiwa/situasi yang sedang terjadi di lokasi, kemudian polisi mencegat saya untuk tidak mengambil video (merekam) dan mereka memaksa saya untuk menyerahkan hp kepada mereka (aparat).

Kemudian saya melawan Ketika saya di paksa naik ke atas mobil, saya berhasil lolos Ketika saya mencoba mengamankan diri dari kepungan mereka, tiba tiba dari arah samping kiri ada kurang lebih empat orang aparat mencoba merampas Kembali hp dan saya langsung bereaksi memasukkan hp kedalam celana dalam saya. Dalam peristiwa mereka merebut hp saya itu, tangan kiri saya mengalami memar karena ditarik paksa oleh mereka.

3. Inisial I: Saya melihat beberapa teman-teman saya ditarik secara paksa oleh aparat. Teman-teman saya itu diseret masuk kedalam mobil yang telah mereka siapkan. Selain itu saya melihat sekelompok ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya dibentak-bentak oleh aparat, sampai ibu-ibu dan anak-anak itu menjerit, menangis ketakutan. Ketika saya mencoba mendokumentasikan situasi saya dihampiri oleh intel, saya dibentak, ditarik-tarik dan hp saya diambil paksa, saya langsung bereaksi merebut Kembali hp saya, akan tetapi saya di paksa untuk menghapus semua dokumentasi itu. Karena saya dipaksa saya pun menghapus semua dokumentasi itu, tetapi karena mereka tidak percaya mereka Kembali mengambil hp

dan membuka semua privasi saya (wa, ig, galeri, telegram, twitter dll) untuk memastikan video itu terhapus. Selain hp mereka juga menggeledah tas saya.

4. Insial H: Pada awalnya polisi dan brimob datang dari pintu gerbang karna sudah melakukan baris-berbaris. Pada saat polisi memasuki ruangan masjid dan saya sempat ditegur sama bapak polisi karna saya duduk dilantai dan tiba tiba polisi tersebut melarang saya merekam padahal saya tidak ada sama sekali merekam pada saat itu. Setelah polisi masuk kedalam saya melihat ada aktivis yang ditangkap saya berusaha mengejar dan ternyata saya udah di pegang sama pihak kepolisian untuk menghentikan Langkah saya,saya mencoba untuk melepaskan diri dari polisi tersebut. Pada akhirnya saya terlepas dari kepolisian tersebut dan mencoba melarikan diri melalui jalan depan post satpam dengan pura-pura menjadi media dan saya juga melihat polisi menyeret bapak-bapak dari masyarakat kedalam mobil sambil memukul dan menendang bapak tersebut dan saya langsung lari lewat pintu gerbang keluar.

5. Inisial D: Saya melihat sangat banyak polisi berseragam lengkap membawa pentungan, menghampiri masyarakat, mereka menyuruh kami untuk naik ke bus yang telah disiapkan. Kami menolak dan mereka memaksa kami untuk naik ke bus dengan cara menarik-narik kami. Kami pun bereaksi dengan mendorong mereka akan tetapi mereka tetap memaksa kami (terjadilah Tarik menarik antara masyarakat dengan aparat). Akhirnya saya Bersama masyarakat lainnya naik kedalam bus, setelah bus itu penuh bus itu maju kedepan. Bus nya berhenti didepan kedai-kedai sebelah masjid. Karena saya membawa mobil (kendaraan pribadi) akhirnya saya meminta tolong sama supir bus untuk diturunkan. Setelah saya turun Bersama keluarga saya disuruh langsung keluar dari Masjid Raya.
6. Inisial M: Ketika saya sedang di posko bantuan, datang masyarakat melaporkan Bahwa dapur umum masyarakat dipadamkan tungkunya oleh polisi. Ketika masyarakat sedang melakukan doa dan sholawat Bersama datang polisi yang mengambil alih dengan membawa toa (pengeras suara) untuk menginstruksikan agar masyarakat pulang ke Air

Bangis difasilitasi serta dikawal sampai kekampung mereka. Setelah itu saya melihat korlap dari mahasiswa hendak dibawa oleh aparat. Dan saat itu korlap langsung diamankan oleh salah satu teman dan akhirnya teman itu lah yang bawa polisi.

7. Inisial MY: Kami disuruh untuk kumpul didalam masjid, tiba-tiba datang aparat kepolisian masuk kedalam masjid, akan tetapi dihadang oleh bapak-bapak di pintu masjid karena jumlah aparat kepolisian terlalu banyak dan mereka juga menggunakan tameng serta pentungan akhirnya hadangan bapak-bapak berhasil mereka terebos, lalu masuk lah aparat itu kedalam masjid dan kami semua kami lari ke pojokan masjid karena kami ingin bertahan dan tidak mau pulang sampai tuntunan kami dipenuhi. Karena kami ndak mau pulang banyak polisi yang mengepung dan menghadang kami menggunakan senjata (tameng, pistol gas air mata dan pentungan) ruang kami dipersempit sampai kami sesak karena berdempetan, terus beberapa dari kami ditarik lengannya untuk diseret/dipaksa naik ke bus yang telah mereka siapkan. Kami pun mendapatkan ancaman dari mereka "jika kami tidak mau pulang,

maka kami akan ditembak” Kami pun dilarang merekam kejadian. Bahkan ada dari teman kami yang hpnya dihancurkan oleh aparat kepolisian

8. Inisial RH: Ketika masyarakat sedang menunggu hasil negosiasi di Kantor Gubernur, masyarakat melakukan kegiatan bersholawat Bersama dan tiba-tiba pihak aparat dengan kekuatan penuh mendatangi tempat masyarakat bersholawat dan menginstruksikan agar masyarakat segera pulang kekampung masing-masing dengan bus yang telah disediakan namun masyarakat menolak dengan alasan masih menunggu kawan-kawannya yang sedang bernegosiasi. Disi lain pimpinan tertinggi kepolisian saat itu memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk memaksa setiap orang yang merekam agar dihapus rekamannya dan kalau menolak ditangkap.
9. Inisial I: Saya datang ke masjid raya sumbar pada pukul 15.00 WIB, saat saya sampai di lokasi saya melihat aparat kepolisian menginstruksikan kepada masyarakat agar masyarakat segera pulang kekampung mereka dengan bus yang telah difasilitasi aparat itu. Saya melihat ibu-ibu di giring oleh polisi wanita ke mobil, saat itu masyarakat lainnya mencoba

menghalangi dengan manarik ibu itu dan terjadilah dorong-mendorong antara masyarakat dengan aparat kepolisian. Selain itu beberapa mahasiswa juga ditarik/diseret paksa oleh aparat kepolisian untuk masuk ke mobil. Selain itu beberapa masyarakat juga diambil paksa oleh aparat untuk dibawa ke mobil (diseret lengannya, ditarik krah bajunya dan ditarik kepalanya). Melihat situasi itu saya langsung menolang teman-teman saya dan juga masyarakat, saat saya mencoba menarik salah satu masyarakat yang diseret saya mengalami kekerasan fisik berupa krah baju saya ditarik, rusuk saya dihantam (ditinju) dan leher saya di piting sembari menyeret saya untuk masuk kedalam mobil. Sampai di depan pintu mobil saya berhasil ditarik Kembali oleh kawan-kawan lainnya. Akan tetapi kawan yang menarik saya itu berhasil mereka bawa kedalam mobil dan saya pun lolos.

10. Inisial F: Ketika masyarakat sedang menunggu hasil negosiasi di Kantor Gubernur, masyarakat melakukan kegiatan bershollowat Bersama dan tiba-tiba pihak aparat dengan kekuatan penuh mendatangi tempat masyarakat bershollowat mereka membawa pengeras

suara dan langsung mengambil alih untuk menghimbau masyarakat agar pulang hari ini dengan bus yang telah disiapkan, akan tetapi masyarakat menolak tetapi aparat kepolisian mengepung dan mempersempit ruang gerak masyarakat menggunakan tameng. Tidak lama setelah pengepungan itu terjadi chaos penarikan antara salah satu mahasiswa dengan aparat kepolisian lalu mahasiswa itu diseret dan dimasukkan kedalam mobil. Situasi pun kacau dan tidak terkendali, banyak masyarakat yang ditarik paksa, dikejar, diintimidasi dan diancam oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian masuk kedalam masjid dan tidak memperdulikan sajadah untuk sholat yang mereka injak-injak dengan sepatu mereka. **(Tim Laggam.id)**

08

Koperasi, PSN, Konflik Agraria Air Bangis: Mereka yang Terhempas

*(Tulisan II Liputan Khusus
Konflik Agraria Air Bangis)*

**Oleh: Dharma Harisa
Editor: Yose Hendra**

Mentari berada persis di atas ubun-ubun, membiaskan cahaya yang berlimpah ke sekujur kampung Lubuk Bontar, Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Kamis (10/8/2023). Seberkas cahaya pun menerabas ke ruang-ruang rumah semi

permanen, di mana DM, 41, tengah berbaring di tikar rajut plastik, dengan empat orang penunggu duduk di sisinya.



DM (baju hitam) sedang terbaring di tikar rajut plastik di rumah salah seorang tetangganya, Kamis (10/08/2023). DM diduga mengalami trauma dan stres, karena aspirasi yang disuarakan dalam unjuk rasa sehari-hari di Padang, tak sesuai dengan harapan. Foto

Perawakan DM terlihat berantakan, tidak terurus lagi. Tampang wanita itu terlihat stres berat.

Suami DM telah meninggal. Ia sudah menjanda setahun belakangan. Saat ini DM tidak berani pulang ke rumahnya. Entah apa alasannya, namun kata tetangga DM, ia selalu merasa takut berada di sana. "Ada yang memanggil-manggilnya, tapi orangnya tidak ada. Ia

tengok nggak ada," ujar Roma Rambe (42), salah seorang yang senantiasa menunggu DM.

Roma menyebut, karena khawatir dengan keselamatan DM, mereka bergantian menjaga dan mengecek kondisinya.

Alya Meitasya, bidan desa di Jorong Pigogah Patibubur, mengatakan, kondisi DM itu cukup mengagetkannya. Sebab sebelumnya, DM janda beranak satu itu, hidup normal seperti biasa. Sehari-hari berkebun, sebagaimana halnya dengan aktivitas kebanyakan warga Pigogah Patibubur.

Namun, semenjak dipulangkan dari Padang usai berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Barat, Sabtu (05/08/2023), DM berubah, seperti dihantui kecemasan, dan perasaan yang tak keruan.

"Sepulang dari Padang (unjuk rasa sehari-hari), kondisi traumanya masih terus membekas," kata Alya.

DM termasuk satu dari seribuan warga Air Bangis yang menggelar aksi unjuk rasa selama 6 hari di Padang, mulai pengujung bulan Juli, hingga akhir pekan pertama bulan Agustus lalu.

Unjuk rasa beruntun ini buntut usulan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pasaman Barat.

Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menuntut agar Gubernur mencabut usulan PSN yang telah dilayangkan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, sebagaimana tercantum dalam surat No: 070/774/BALITBANG-2021.

Massa juga menuntut gubernur membebaskan lahan masyarakat Air Bangis dari kawasan hutan produksi. Selain itu, massa juga meminta agar masyarakat bisa menjual hasil sawitnya kemana pun dengan bebas.

Demonstran juga menuntut Kapolda Sumbar agar menarik mundur seluruh Brimob yang berada di lahan masyarakat Air Bangis.

Aksi tersebut turut meminta Kapolda membebaskan teman-teman mereka yang ditahan, serta menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat Air Bangis.

Sayang, upaya masyarakat bertemu gubernur tak sesuai dengan yang diharapkan. Gubernur Sumbar Mahyeldi hanya bertemu warga sebentar usai salat subuh di Masjid Raya Sumbar, Kamis (3/8/2023).

Saat meninggalkan masjid, gubernur dikerumuni massa aksi warga Air Bangis yang menuntut hak mereka terkait lahan untuk proyek strategis nasional itu.

Dari video yang beredar, Mahyeldi dikawal Kapolresta Padang Kombes Ferry Harahap beserta jajaran dari kerumunan warga Air Bangis yang sudah tiga hari menggelar aksi damai untuk bertemu gubernur.

Sambil berlalu dari kerumunan warga di Masjid Raya Sumbar, gubernur menyebutkan PSN merupakan kepentingan nasional, kepentingan negara yang harus didukung semua pihak.

"Untuk harga sawit, kerja sama dengan koperasi. Harganya sesuai yang kita putuskan, sekali sepekan akan dicek oleh dinas perkebunan. Masalah yang terkait dengan polisi, itu urusan hukum," katanya dikutip dari akun Polresta Padang, Kamis (3/8/2023).

Di tengah kawalan polisi, Gubernur Mahyeldi berlalu meninggalkan kerumunan warga Air Bangis yang masih mempertanyakan hak-hak mereka

Hampir seminggu bertahan di Padang tanpa hasil, warga Air Bangis itu pulang ke kampung hanya meninggalkan bekas luka yang makin menganga. Baik



Lanskap Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas. Foto: Dharma Harisa/Langgam.id

karena terpikir nasib lahan, ataupun sakit pasca dipulangkan.

Lanskap Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas. Foto: Dharma Harisa/Langgam.id

"Bagaimana nasib lahanku?" tiba-tiba DM terbangun dan langsung berucap, setelah mendengar percakapan jurnalis *Langgam.id* dengan penunggu DM.

DM mengatakan badannya lemas. Pendengarannya selalu dihantui oleh suara berbisik yang tak jelas darimana asalnya. Ia takut keluar rumah. Setiap melihat cahaya di pintu rumah, seolah-olah ia melihat sudah banyak polisi yang ada di depannya. Kadang dia merasa sedang di pukul entah oleh siapa.

Sekarang mau berobat pun tak ada uang. Lahan sawit seluas 2 hektar yang ditinggalkan suaminya juga tak mampu ia panen. Sembari terisak membendung tangis, DM tak tahu lagi bagaimana jalan nasibnya ke depan. Stres dan trauma yang mengguncang terkadang

membuatnya lupa dengan si kecil yang sedang bersekolah. DM mempunyai seorang anak laki-laki yang kini masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar.

Kini, sebut tetangganya, anak DM kehidupannya kurang terurus. Walau si kecil itu masih tetap menunaikan cita-cita dan pergi ke sekolah setiap pagi hari.

Terlebih, cincin emas hadiah pernikahan yang dimilikinya hilang di Masjid Raya Sumbar. Sebagaimana diketahui, Masjid Raya Sumbar menjadi tempat bermukim warga Air Bangis yang berunjuk rasa berhari-hari di Padang.

"Ndak tau lagi aku dimana letaknya. Sehabis sembahyang hilang. Ndak tau sama siapa aku kasih cincin itu," katanya sembari terlihat linglung dan terkulai.

Hopma (33) tetangga DM yang lain menyebut kondisi ini baru ia derita sehabis dipulangkan. "Pas sampai malam itu (Minggu 06/08/2023), di Masjid Lubuk Bontar, udah marah-marah saja dia," tutur Hopma.

Sempai keesokan harinya pada saat itu, DM terus menangis. DM bahkan tidak tidur. Ia hanya tidur jika sudah terlalu lelah untuk menangis.

Hopma mengatakan, di kampung itu banyak ibu-ibu janda yang menjadi tulang punggung keluarga ikut berdemo ke Padang. Bagaimana tidak, sudahlah ditinggal suami, lahan untuk sejengkal perut pun terancam diambil orang. "Mau apa lagi kami kalau tidak mempertahankan lahan? Terlebih ada teman-teman kami yang suaminya di penjara karena masalah ini," ucapnya.

Kondisi Warga Saat Pulang

Alya Meitasya adalah salah satu dari dua orang bidan yang bertugas di Jorong Pigogah Patibubur. Ia ditugaskan oleh Puskesmas Air Bangis untuk mengabdikan diri di sana. Di Pigogah sendiri, ada satu Poli Klinik Desa (Polindes) tempat masyarakat biasa berobat, letaknya di kampung Lubuk Bontar.

Jorong Pigogah Patibubur bernaung 4 kampung yang dihuni kurang lebih 700-an KK. Yakni, Lubuk Buaya, Lubuk Bontar, Gunung Bungkok, dan Sungai Pinang. Karena cakupan pemukiman penduduk yang luas, Alya membuka posko kesehatan sendiri yang terletak di Kampung Gunung Bungkok.

Malam pemulangan paksa masyarakat dari Masjid Raya Sumbar, Minggu (06/08/2023), Alya dan satu bidan lainnya ditugaskan bersiap oleh Kepala Puskesmas untuk menanti kedatangan masyarakat. "Tim kesehatan saat itu sudah *standby* dengan infus dan oksigen," katanya, kepada Langgam.id Jum'at (18/08/2023).

Ia menceritakan, tengah malam itu sekira pukul 02.00 WIB, sewaktu turun dari mobil, warga tampak sangat kelelahan dan lemas. Bahkan ada yang tepar sewaktu berada di dalam mobil.

"Pas mobil pertama datang, ada dua warga yang perlu dirujuk. Hanya saja ambulans kami saat itu belum datang. Baru kami berdua bidan desa yang ada," tutur Alya. Obat-obatan yang diperlukan untuk mengobati

masyarakat juga dibawa oleh ambulans. Mereka yang tepar terpaksa dilarikan dengan mobil seadanya dari Pigogah ke rumah sakit.



Figure 1Bis yang membawa warga Air Bangis yang berunjuk rasa di Padang selama lebih kurang 6 hari, tiba di Air Bangis, Minggu (6/8/2023). Foto: kiriman warga

Kata Alya, salah satu warga yang tepar adalah ibu hamil yang memiliki anak kecil. Ia dan anaknya terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat. "Dia kelelahan. Pas turun dari bus, dia langsung muntah-muntah,

kesadarannya menurun. Anaknya yang kecil, sakit juga sehabis pulang demo," jelas Alya.

Selain ibu hamil tersebut, juga ada satu wanita lagi yang mesti dilarikan ke rumah sakit. Namanya Riyanti. Kakaknya Bata (35) menyebut adiknya itu sesampainya di Masjid Lubuk Buaya tempat warga diberhentikan, sudah sangat kelelahan. Riyanti dirawat dengan slang oksigen selama 3 hari di RSUD Pasman Barat.

Bata juga menyaksikan semua warga yang pulang pada hari itu umumnya sakit. " Masyarakat yang pergi itu pas pulang ndak ada yang sehat. Paling kurang pasti batuk pilek. Mereka seminggu begadang terus," tuturnya kepada Langgam.id, Kamis (10/08/2023).

Alya membenarkan apa yang disampaikan Bata. Ia menjelaskan hampir semua warga yang pulang saat demo kelelahan sekali tampak dari wajahnya. "Padahal sehari-harinya disini, jarang ada masyarakat yang sakit," ucapnya.

Dari informasi yang ia ketahui belakangan, malam itu sangat banyak masyarakat yang tepar. Hanya saja terang Alya, mereka tidak tau kalau ada posko pengobatan. "Ada yang pulang ke rumah langsung. Tapi

kalau kami melihat mobil warga yang tepar, kami turut langsung ke sana."

Seminggu pertama pasca pulang dari demo adalah kondisi paling gawat. Alya mengatakan ada puluhan hingga ratusan masyarakat yang datang berobat. Semua warga kena. Mulai dari bayi, balita, anak sekolah, orang dewasa, hingga lansia.

"Sehabis pulang demo tu banyak sekali yang sakit. Katanya, keluhannya rata-rata mual muntah, nyeri di ulu hati. Selain itu ada yang batuk, sampai ada yang hilang suaranya karena demo. Bahkan ada yang stroke," tutur Cia, sapaan akrab bidan desa itu.

Penyebab sakit itu katanya akibat kelelahan. Selain itu warga juga tidak makan. "Walaupun makanan ada, tapi kami tidak ada kepikiran makan. Kami sering stress kata masyarakat." Diantara mereka, ada 5 orang warga yang ditangani Alya sampai di infus.

Sedangkan untuk anak-anak, ia menangani yang rawat jalan sekitar 10 an anak. Umumnya dengan gejala diare

dan demam. Untuk lansia, paling banyak mengeluh sakit di ulu hati, kelelahan, dan demam.

Stres, Stroke, dan Potret Masyarakat di Pigogah

"Sampai teriak-teriak bebaskan lahan kami! bebaskan lahan kami! Dia juga teriak, Brimob datang Brimob datang!"

Alya menirukan itu sambil mengingat keadaan miris yang menimpa masyarakat kampung di tempat dia mengabdikan. "MH" (51) adalah warga Gunung Bungkok, Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis. Saat ini kondisi pria paruh baya itu sangat memprihatinkan. Ia mengalami stres berat dan tekanan mental.

Sebab stres itu, Alya yang bertugas sebagai bidan desa di Jorong Pigogah harus memeriksa kesehatan MH langsung ke rumahnya. "Sampai sekarang kata istrinya masih suka ngamuk-ngamuk sendiri. Kaca televisinya dirusak, semua dirusak," tutur Alya.

Tetangga MH, Syamsul Bahri (49) menceritakan hal yang sama. Ia kadang tidak tega melihat kondisi MH sehabis bali dari Padang. "Ngamuk, pecah-pecah isi rumahnya semua. Piring kaca, gelas habis semua," ucapnya.

Sampai saat ini katanya, tidak ada gejala sembuh yang ditunjukkan MH. Ia masih ngamuk-ngamuk jika mengingat kejadian demo di depan kantor gubernur yang lalu. *Langgam.id* berencana untuk melihat kondisi MH, tapi kata warga, pria itu saat ini sudah tidak beres lagi kalau diajak ngobrol.

Selain MH, Alya juga mengunjungi DM. Dua warga tersebut terkena tekanan mental akut sehabis dipaksa pulang dari Padang. Dia merasa sangat miris melihat kondisi DM saat ini. Padahal sehari-harinya, DM adalah orang yang semangat.

"Kok bisa kayak gini? Diapain kalian sama orang itu sampai bisa begini kata Cia. Lalu dibilang tetangganya jangan bahas-bahas masalah itu lagi," ungkap Alya.

DM akan kumat tekanan mentalnya kalau sudah membahas kejadian di Padang.

Di luar yang tekanan mental, Rina Melati (53) wanita paruh baya yang tinggal di depan rumah bidan desa itu terkena penyakit yang cukup memprihatinkan. Rina terserang stroke. Setengah dari badannya menjadi kaku dan tidak bisa lagi digerakkan.

Sebelumnya, ia dan 7 orang anggota keluarganya ikut pergi berdemonstrasi ke Padang. Rina termasuk lama tinggal di Jorong Pigogah. Ia telah mengolah lahan seluas 3 hektare bersama keluarganya selama 15 tahun disana.

Langgam.id berkesempatan mengunjungi rumahnya pada Kamis (10/08/2023). Bangunan itu tegak kecil di antara deretan rumah kayu yang ada di kampung Gunung Bungkok, Jorong Pigogah Patibubur. Luasnya hanya berkisar dua buah lebar mobil Toyota Avanza.

Rina sedang duduk dengan suami dan kakak perempuannya di teras rumah untuk berjemur. Tampak

dari perawakan mereka adalah masyarakat pekebun yang hidup dan mencari penghidupan dari berladang sawit. Dua warga lainnya yang menemani Rina terlihat sudah memasuki usia senja pula.

Mereka ke Padang dengan alasan untuk mempertahankan tanah tempat mereka mengais sepiring nasi dan bersolidaritas dengan masyarakat. Saat demo hari ke 5, tepatnya Jum'at (04/08/2023), sakit itu melandanya.

"Sesudah salat Jumat, mau pergi demo. Dilihat sama anakku ndak terangkat lagi badan ku," ucapnya.

"Aku duduk langsung terangkat tangan ini. Habis itu mati rasa badan saya sebelah," sambungnya menjelaskan.

Malamnya, baru ada mobil ambulans yang membawa dia ke Rumah Sakit Bayangkara. Dokter menyebut kepada Rina bahwa ia memiliki tensi yang tinggi. Oleh karena itu tidak boleh terkena stres. Selama 3 hari ia dirawat di Rumah Sakit Bayangkara.

Saat *Langgam.id* berkunjung, Rina dan anaknya baru sampai semalam di Pigogah. Ia pulang dengan menggunakan travel, tak ikut bersama rombongan warga.

Sekarang ia kebingungan tak bisa lagi ke kebun. Selama berdemonstrasi, sawit yang berbuah juga tidak ia panen. "Ndak ada lagi aku ke kebun, akhirnya ndak punya modal untuk bertanam. Kalau demam 3 bulan masih bisa ku tahan, kalau sudah stroke ini gimana mau ke kebun," ucapnya yang tampak telah pasrah menerima nasib.

Biaya Berobat Menambah Pusing

Sakit yang diterima warga Jorong Pigogah Patibubur masih terasa usai dipulangkan paksa oleh kepolisian, Sabtu (05/08/2023) awal bulan lalu. Bidan desa pigogah Alya menyebut mereka tak makan akibat stres, sebab terus kepikiran akan nasib lahan yang kini coba diambil oleh negara.

Bata (35) bangun dari tidur untuk bercerita dengan Langgam.id usai 5 hari sakit sehabis demo, Kamis (10/08/2023).

Salah satunya dirasakan Bata (35) warga kampung Gunung Bungkok, Jorong Pigogah Patibubur. Sudah 5 hari ia hanya bisa tertidur lemas di rumahnya. Semenjak dipulangkan oleh polisi, sudah bolak balik bidan desa menukar infus Bata. Keadaannya lemas, dengan tubuh yang tak kuat lagi, bahkan untuk duduk.

Ia tak sanggup berobat ke rumah sakit. Walau telah berhari-hari dengan kondisi badan yang belum cukup membaik, ia masih bertahan dengan mengonsumsi obat kampung seadanya. Jangankan ke rumah sakit, untuk membayar biaya infus saja, Bata terpaksa berdamai hidup berdampingan dengan sakit.

"Ndak tahan saya biayanya, 200 ribu per impus. Disini ndak ada pakai BPJS, walaupun kita ada BPJS tetap membayar," ucapnya saat Langgam.id berkunjung ke rumahnya, Kamis (10/08/2023).

Selain itu, untuk bisa memakai BPJS, ia harus ke Puskesmas yang terletak di pusat Nagari. "Biarlah berobat di rumah. Pergi ke Air Bangis juga butuh modal besar," ungkap Bata.

Saat *Langgam.id* berkunjung, terlihat sudah habis tiga buah kantong infus di samping tempat tidur Bata. Hari Senin kata bidan, disuruh tambah impus. Tapi kita tidak ada uang. Kini ndak ada impus lagi," ucapnya.

Bata adalah kepala keluarga dengan tiga orang anak. Saat ini ketiga anaknya juga terserang penyakit. Yang paling besar kelas 6 SD dan yang bungsu baru mau sekolah. Ketiganya sering muntah dan menceret.

Sebab masih masih sakit, Bata belum bisa ke ladang untuk mencari nafkah. Sekarang kebutuhan rumah tangganya hanya dibantu oleh istrinya.

Mereka berlima tinggal dalam sebuah rumah seperti gubuk kecil yang dibangun dengan kayu. Rumah itu terdiri dari satu ruangan keluarga lengkap dengan ruang tamu, tempat tidur, lemari, dan ruang makan. Di

belakang ada kamar mandi dan dapur kecil. Isi rumah terasa hampa, tiada televisi dan perabot elektronik canggih lainnya.

Tetangganya Bagindo Ali (38) sangat menyayangkan kalau ada orang yang beranggapan di Pigogah di isi oleh petani kaya. "Kami di sini hanya untuk mencari penghidupan. Hidup dari kebun seluas 2 atau 3 hektare, itu pula yang mau diambil," ucapnya.

Bagaimana pula saat demo, kata Gindo Ali, ada yang menuduh warga di sini punya mobil Pajero, hidup mewah, dan segala macam. Sedangkan untuk berobat saja masyarakat harus memutar otak agar modal berladang tidak kurang.

Menilik Akar Persoalan

Sudah setahun belakangan masyarakat Nagari Air Bangis khususnya Jorong Pegogah Patibubur selalu khawatir, bahkan terkadang stres, karena memikirkan nasib lahan mereka. Tokoh masyarakat Gunung Bungkuk Jorong Pigogah Patibubur Syamsul Bahri (49)

mengatakan, semenjak pemerintah memberikan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) kepada Koperasi Sekunder HTR Air Bangis Semesta mereka selalu mendapat intimidasi.

Terlebih 6 bulan belakangan, sejak ada Brimob yang menjaga peron tempat penampungan dan pembelian buah sawit yang dimiliki koperasi sekunder itu. "Polisi dan Brimob yang berjaga di sana selalu memberhentikan kami ketika hendak membawa sawit. Jual ke peron, jual ke peron," ucap Syamsul.

Sedangkan di satu sisi, Syamsul mengatakan masyarakat sudah krisis kepercayaan dengan koperasi. "Dari dulu kehendak kita ndak pernah dipenuhi, baik harga atau masalah tanah. Kehendak orang itu saja yang selalu dituruti," ujarnya.

Terakhir jelasnya, sekitar setahun yang lewat, masyarakat disuruh dan dipaksa untuk menyerahkan lahan. Pertama oleh Polsek. Tidak berhasil di Polsek, dibawa ke Polres. Tidak berhasil juga, baru dibawa ke Polda. Mereka dipanggil melalui surat resmi.

Syamsul sendiri dapat panggilan terakhir dari Polda. Ia menjelaskan, intinya masyarakat harus menyerahkan tanah dengan tanda tangan di atas materai. Ia masih ingat poin nomor 3 dari surat tersebut. "Bahwa semenjak saya menandatangani surat pernyataan ini, maka saya tidak akan menduduki, menguasai, ataupun memiliki serta melakukan aktivitas apapun di dalam kawasan hutan tersebut," tutur Syamsul sembari mengingat pernyataan yang harus ditanda tangani saat itu.

Syamsul tidak mau menandatangani surat tersebut. Begitu pula dengan tetangganya Bagindo Ali (38). Ia termasuk mereka yang awal meneroka di Jorong Pigogah Patibubur. Gindo Ali dan keluarganya sudah berkebun di sana sejak tahun 1991. Punya tiga orang anak yang masih sekolah, Gindo Ali mengelola lahan seluas 3 hektare.

Ia menjelaskan saat pemanggilan kurang lebih ada sekitar 62 masyarakat yang menandatangani penyerahan lahan tersebut. Umumnya masyarakat dari luar yang

punya kebun luas. "Orang-orang Air Bangis yang kaya-kaya. Mereka tanda tangan, lahannya di atas 10-20 hektare," ucapnya bersama Syamsul Bahri saat menceritakan hal tersebut kepada *Langgam.id*.

Bahkan saat itu ada sejumlah uang yang ditawarkan kepada masyarakat. Mereka menyebutnya uang kerohiman. "Dikasih uang, masyarakat pergi dari lahan. Dulu masyarakat disuruh datang dengan banyak bus ke Simpang Empat. Jumlah yang ditawarkan sekitar 10 juta per hektare," ungkapnya.

Oleh sebab inilah, 2 tahun belakangan dan makin intens 6 bulan ini karena kehadiran Brimob, masyarakat selalu kepikiran. Makin hari dipikirkan, makin stres jadinya.

Di sisi lain Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat Yozawardi, menyatakan kehadiran koperasi tersebut adalah upaya penyelesaian yang dirancang pemerintah. Hal itu berkaitan dengan adanya keterlanjuran penanaman sawit di kawasan hutan.

"Warga diajak bergabung dengan koperasi. Lalu bisa mengkomodasi panen itu. Keterlanjuran itu juga bisa diakomodir," ucap Yozawardi saat menjumpai massa yang berasal dari pengurus Koperasi Serba Usaha Air Bangis Semesta di Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (02/08/2023).

Sementara itu, Ali Nusi (38) salah seorang warga Pigogah Patibubur mengatakan dalam koperasi itu tidak ada satu pun warga kampungnya yang bergabung.

Menjawab hal itu, Bendahara KSU Sekunder HTR Air Bangis Semesta Efif Syahrial mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi. Untuk melegalkan agar jangan tidak terjadi tindakan hukum, kita sosialisasikan itu bagi petani yang ada di sana, mari kita bergabung, jual buah ke peron masuk menjadi anggota koperasi tapi tetap ditolak," ucapnya kepada *Langgam.id*, Kamis (10/08/2023).

Alasan masyarakat menolak kata Efif, karena terprovokasi. "Provokasinya tidak usah bergabung dengan koperasi nanti tanah kalian habis, padahal kita

tidak menyentuh itu. Silahkan mengolah kebunnya tanam, pupuk, juallah, tetapi agar tidak terjadi tindakan hukum jual ke peron koperasi supaya legal," ungkapnya.

Sahrudin (39) salah satu petani sawit di Kampung Lubuk Bontar Jorong Pigogah Patibubur mengatakan, harga sawit yang ditawarkan koperasi sangat jauh di bawah. Selain itu, timbangannya terkadang tidak cocok. Kalau ke pabrik mereka bisa menjual 1.800-1.900 per kilo, di peron hanya dihargai 1.400-1.550 per kilo. Itu pun belum dengan upah muat dan bongkar.

"Bagaimana kita mau menjual ke koperasi jikalau harganya lebih kecil dari modal tanam yang kita keluarkan," ujarnya.

Sementara Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, mengatakan pihaknya bersama-sama dengan Forkopimda terus mengkaji rencana PSN tersebut.

Sedangkan upaya lain yang telah dilakukan oleh Polda Sumbar untuk mengantisipasi konflik di lokasi adalah dengan menaruh pasukan Brimob satu pleton.

Dia menjelaskan kehadiran Brimob untuk mencegah konflik karena adanya potensi penyimpangan kesepakatan pengelolaan lahan.

"Itu termasuk tuntutan mereka agar pasukan Brimob ditarik. Tentu yang menginginkan Brimob ditarik, mereka yang mau menyimpang dari kesepakatan. Padahal Brimob itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi konflik," katanya saat jumpa pers di Mapolda Sumbar, Senin (7/8/2023). (*/Yh)

09

Patgulipat Koperasi Sawit di Air Bangis

*(Tulisan III Liputan Khusus
Konflik Agraria Air Bangis)*

Penulis: Tim Langgam.id
Editor: Yose Hendra



Plang Veron KSU Sekunder HTR. Foto: Dharma Harisa/Langgam.id

Embun masih berjejak di rerumputan, ayam berkokok bertalu-talu, silir mengalun menembus rongga-rongga rumah di Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, membangunkan Syamsul Bahri (49), Kamis (10/08/2023). Seketika ia lekas berwudu untuk salat subuh. Setelah itu, Syamsul menyeduh kopi, sebelum meneguk aktivitas harian sebagai petani sawit.

Syamsul dan keluarganya menggarap lahan seluas 5 hektare di Kampung Gunung Bungkok, Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis. Enam bulan belakangan, menjadi hari yang berat bagi Syamsul dan keluarganya. Ia merasa terkekang, tak leluasa lagi menjual sawit ke mekanisme pasar.

Sejak enam bulan yang lalu, Koperasi Serba Usaha Air Bangis Semesta (KSU ABS) membuka peron (tempat penampungan dan pembelian buah sawit) di kampungnya. Semua warga Jorong Pigogah Patibubur yang punya sawit diwajibkan menjual panen sawit

mereka ke peron koperasi. Jikalau warga tidak menjual panen sawit mereka ke peron koperasi, maka mereka akan ditangkap oleh polisi.

Hal ini mendasari Syamsul bersama ribuan warga Pigogah lainnya, bertolak ke Padang, melakukan demonstrasi sehari-hari di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat di Padang, pengujung bulan Juli hingga akhir pekan pertama bulan Agustus lalu.

Mereka membawa tiga tuntutan untuk Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Barat penuh. Intinya, masyarakat hanya minta dibebaskan dalam menjual hasil sawit mereka. Tidak hanya ke peron milik koperasi yang ditetapkan pemerintah, namun juga ke tempat lain. Serta bebas dari intimidasi anggota Brimob yang saat ini berada di kampung mereka.

Selain itu, ia menuturkan masyarakat juga ingin lahan yang telah mereka kelola puluhan tahun, dengan keringat dan modal sendiri agar bisa terlepas dari klaim pemerintah.



Panen buah tandan sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, teronggok di jalan, beberapa waktu lalu. Enam bulan terakhir, petani sawit di sana diwajibkan menjual sawit ke peron Koperasi Serba Usaha Air Bangis Semesta

Sebelumnya, melalui beberapa sosialisasi dan himbauan, Syamsul dan masyarakat lainnya di Pigogah diminta meninggalkan kawasan tersebut. Sebab pemerintah menyatakan itu sebagai kawasan hutan dan izin pengelolaannya secara sah telah diberikan kepada KSU ABS.

Dalam banyak kesempatan, Gubernur, Kapolda, dan Kepala Dinas Kehutanan Sumatra Barat menyatakan, KSU Air Bangis Semesta dan Koperasi Sekunder HTR adalah pihak yang mendapat izin resmi dalam mengelola kawasan tersebut.

Pemerintah berpendapat lahan dan pemukiman penduduk di Jorong Pigogah Patibubur berada di dalam kawasan hutan produksi.

Gubernur Mahyeldi bahkan berulang kali mengatakan, baik dalam wawancara bersama wartawan, ketika bertemu masyarakat, dan pada acara resmi pemerintahan, meminta masyarakat untuk menjual hasil kebunnya kepada peron milik koperasi.

Ia menjelaskan upaya itu untuk mengakomodasi keterlanjuran penanaman sawit di kawasan hutan. Maka Koperasi Sekunder HTR diberi izin oleh pemerintah agar hasil sawit di sana menjadi legal. Juga agar masyarakat tak berurusan dengan upaya penegakan hukum karena beraktifitas di kawasan hutan tanpa izin.

"Nah masalah sawit bapak ibuk, dijamin koperasi. Karena itu yang sudah diizinkan. Dia yang sudah punya badan hukum yang diizinkan oleh negara," kata Mahyeldi, Jum'at 04/08/2023 saat menemui masyarakat usai salat subuh di Masjid Raya Sumatera Barat.

Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono saat rapat koordinasi upaya penyelesaian konflik Air Bangis di Kantor Bupati Pasaman Barat, Selasa (08/08/2023), ikut menyuruh masyarakat agar menjual sawitnya ke peron koperasi.

"Itu diarahkan saja ke koperasi yang sudah legal. Yang sudah resmi. Yang sudah disiapkan atas nama negara. Karena milik negara," katanya di dampingi gubernur Mahyeldi, Selasa (08/08/2023).

Bagindo Ali (38) tokoh pemuda di Pigogah mengatakan semenjak tanggal 10 Februari 2023, Brimob dari Polda Sumbar datang dan mendirikan barak di kampung mereka. Pada Awalnya kata Ali, Brimob datang dengan jumlah yang cukup besar.

Berdasarkan kesaksian warga dan pantauan lapangan Langgam.id, barak dan tenda Brimob didirikan di sekitar peron milik Koperasi. Mereka sehari-harinya menjaga dan berpatroli dari peron milik KSU ABS.



Syamsul Bahri. Foto: Dharma Harisa/Langgam.id

"Polisi dan Brimob yang berjaga disana selalu memberhentikan kami ketika hendak membawa sawit. Bawa kesini jual ke peron katanya," ucap Syamsul menceritakan intimidasi yang warga alami itu kepada Langgam.id, Kamis (10/08/2023).

Hal ini jugalah yang membuat warga menuntut agar dua orang teman mereka dibebaskan oleh Polda Sumbar saat aksi awal bulan lalu. Sebab kata Syamsul, sekitar tanggal 20 bulan Juli lalu, dengan dalil beraktifitas di

kawasan hutan dan mengadakan jual beli sawit tidak pada peron koperasi, 2 orang warga Pigogah Patibubur ditangkap oleh Polda Sumbar.

Terkait kehadiran Brimob di Pigogah, menurut Suharyono itu adalah upaya pengamanan agar tidak terjadi konflik antara masyarakat dan koperasi di sana.

Pelbagai klaim dan penjelasan pemerintah serta pihak kepolisian mengenai keberadaan Koperasi Sekunder Air Bangis Semesta, itu adalah satu hal. Sementara di sisi lain terdapat krisis kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan koperasi.

Lantas bagaimana sebenarnya peran Koperasi Sekunder HTR ditengah konflik yang terjadi di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis ini?

Cerita di Balik Koperasi dan HTR

Pada tahun 2014, Baharuddin Raaban, Bupati Pasaman Barat saat itu, mengeluarkan tiga Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Rakyat (IUPHHK-HTR). Penerimaanya adalah Koperasi Serba Usaha Air Bangis Semesta (KSU ABS). Luasnya tak tanggung-tanggung, yakni 1.590 hektare. Izin tersebut diperuntukkan untuk tiga penerima. KSU ABS lalu membaginya dalam Divisi I (575 ha), II (570 ha), dan III (445 ha).

Semua itu tertuang dalam Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/548-550/BUP-PASBAR/2014. Semuanya ditandatangani dalam waktu yang sama, 20 Juni 2014. Dengan jangka waktu berlaku selama 60 tahun.



Peta Izin HTR Koperasi di Air Bangis, terletak di atas hutan produksi dan pemukiman warga, serta beberapa Areal Penggunaan Lain.

Peta Izin HTR Koperasi di Air Bangis, terletak di atas hutan produksi dan pemukiman warga, serta beberapa Areal

Penggunaan

Lain.

Sumber: <https://sigap.menlhk.go.id/>

Dalam keputusan tersebut tercantum beberapa kewajiban yang mesti dilakukan oleh KSU ABS. Di antaranya KSU ABS wajib melakukan sistem silvikultur; membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat; melakukan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh selambat-lambatnya setahun setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati.

Melaksanakan kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemasaran hasil sesuai ketentuan yang berlaku; dan Melaksanakan penataan batas areal kerja selambat-lambatnya setahun sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati ini.

Dikatakan juga Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat akan

dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bendahara KSU Sekunder HTR sekaligus mantan Wali Nagari Air Bangis Efif Syahril menceritakan sejarah berdirinya koperasi tersebut kepada Langgam.id. Juga menyangkut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) seluas 1590 hektar yang mereka dapatkan.

Efif menyebut berhasilnya masyarakat Air Bangis mendapatkan izin HTR tidak terlepas dari bantuan Titin Suharni. Ia menyebut sudah mengenal Titin sejak tahun 2014, tatkala adanya rencana PT Abaco Pasifik Indonesia untuk memulai investasi pembangunan kilang minyak di Sumatra Barat.

Pada tahun 2014 itu, Titin dan salah seorang pengusaha lainnya, yakni Emil Abbas datang ke kediamannya. Mereka datang ke Air Bangis untuk melakukan survei tempat untuk dijadikan lokasi pembangunan kilang minyak.

Lalu kata Efif, ditemukan data ada bekas HPH (Hak Pengusahaan Hutan) SSS (Sumber Surya Semesta) seluas 20.000 hektare di atas hutan produksi yang kini menjadi jorong Pigogah Patibubur. Ia menyatakan rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis bermula dari sini.

Efif sempat menyinggung terkait "uang jalan". Entah apa maksudnya, ia dan masyarakat Nagari Air Bangis lalu mencoba mengajukan program HTR (Hutan Tanaman Rakyat) ke kementerian. Untuk mengakomodasi masyarakat yang akan mengajukan program perhutanan sosial HTR, kemudian dibentuklah koperasi.



Bendahara KSU Sekunder HTR Efif Syahril saat diwawancarai Langgam.id. Foto: Dharma Harisa/Langgam.id

"Kenalnya dengan buk Titin karena HTR. Yang membantu HTR ini kan ibuk tu, dia yang bawa masyarakat ke Jakarta," ujarnya, Kamis (10/08/2023).

Lantas Efif mengundang masyarakat di 15 jorong yang ada di Air Bangis. Setelah dokumen lengkap, akhirnya mereka ajukan untuk mendapatkan program HTR.

Efif kemudian menjelaskan, sekitar tahun 2014-2016, ketika akan masuk ke lokasi HTR, aktivitas koperasi terhalang sebab sudah ada masyarakat yang membuka lahan dan berkebun sawit di sana. Efif mengaku tak mau terjadi gesekan nantinya antara anggota koperasi yang

punya izin HTR dan masyarakat atau pemilik lahan, sehingga dirinya menginstruksikan anggota koperasi untuk menarik diri agar tidak terjadi konflik.

Dalam derajat tertentu ia menjelaskan juga ada beberapa tuan tanah yang memiliki lahan lebih dari 10 hektare di lokasi tersebut. Di luar petani kecil penggarap yang hanya memiliki lahan seluas 1-5 hektare.

Waktu terus bergulir, pada tahun 2016 wacana Proyek Strategis Nasional semakin kencang terdengar. Saat itu kata Efif telah ada koperasi sekunder yang akan menaungi tujuh divisi yang tengah berjalan. Hanya saja setelah dibentuk, koperasi sekunder itu tidak jalan.

Efif kemudian merekomendasikan Titin Suharni untuk membimbing jalannya koperasi sekunder tersebut. "Pengurus karena akan ada PSN di sini meminta kepada buk Titin. Buk bimbing kami. Tolong ibuk jadi pengurus. Ibuk itu ndak mau," katanya.

Alasan meminta Titin, kata Efif adalah terkait masalah logistik. Membangun HTR butuh modal dan manajemen yang kuat. Kebetulan Titin berlatar belakang pengusaha.

Akhirnya dengan syarat Efif menjadi Bendahara KSU Sekunder HTR, Titin akhirnya mau menjadi ketua.

"Titin itu sudah beberapa kali turun ke sini. Setiap kedatangannya dikawal ketat aparat kepolisian. Mobil patroli dan pengawalannya dari polisi bisa lebih dari lima setiap datang," kata Paman, salah seorang pemilik kedai di Kampung Lubuk Buaya Jorong Pigogah kepada *Langgam.id*, Kamis (10/08/2023).

Setiap Titin datang, lanjutnya, warga tak boleh mendekat. Apalagi mengeluarkan *handphone* dan mengambil foto. Polisi melarang masyarakat untuk mengambilnya. Sampai saat ini, ungkap Paman, tidak ada satupun warga Jorong Pigogah yang pernah berhasil melihat wajah dan rupa Titin dari dekat.

"Setiap kali ibuk itu datang, baru keluar dari mobil Alphardnya, langsung dipayungi wajahnya dan

dikelilingi aparat. Kami untuk mendekat saja tak bisa," ucapnya.

Titin hanya pernah ditemui oleh pengurus koperasi dari Air Bangis. Paman menyebut Efif Syahrial mantan Wali Nagari Air Bangis sering menemaninya. Di kampung Lubuk Buaya sendiri, Titin bisa ke sana sampai tiga kali dalam setahun. Terakhir Paman menyebut, Titin berkunjung sekitar dua bulan yang lalu.

Langgam.id, berkali mencoba mengkonfirmasi ke Titin melalui nomor ponselnya yang didapatkan dari beberapa pihak. Namun, upaya tersebut belum berhasil hingga tulisan ini diturunkan. Pesan melalui aplikasi pesan pendek pun tak dibalas.

Gonjang Ganjing HTR

Langgam.id telah melihat secara langsung kawasan HTR yang izinnya dipegang oleh KSU ABS. Dalam observasi, tidak tampak sama sekali ada usaha-usaha silvikultur atau peremajaan hutan yang dilakukan KSU ABS di lokasi.

Ketika bertanya ke warga setempat di Jorong Pigogah Patibubur, dari belasan warga yang kami tanyai, semuanya menjawab hal yang sama. KSU ABS tidak pernah melakukan kegiatan silvikultur di sana. Atau melakukan kegiatan berkaitan dengan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Sarana dan prasarana dalam melaksanakan usaha pun, sejauh observasi *Langgam.id*, tidak tampak sama sekali. Hal itu dikuatkan berdasarkan pemantauan Komnas HAM perwakilan Sumatra Barat. Pada tahun 2022, dalam surat permohonan keterangan yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komnas HAM perwakilan Sumbar menyampaikan bahwasannya tidak ditemukan kawasan dan hutan yang dimaksud.

Adapun soal penetapan batas-batas, Syamsul Bahri warga Jorong Pigogah Patibubur mengatakan, sekitar 4 tahun yang lalu KSU ABS pernah menancapkan patok-patok di sekitaran kampung itu. Namun sekarang patok itu sudah habis dicabut oleh masyarakat.

"Masyarakat lebih dulu berkebun dari izin HTR. Lebih banyak tanah masyarakat di luar HTR. Tidak ada kegiatan Koperasi itu berkaitan dengan HTR. Izinnya kan diberi di atas kebun masyarakat. Terlebih, tidak semua lahan masyarakat yang kena Izin HTR koperasi." ucap Syamsul.

Ia menyebut sampai saat ini tidak jelas dimana saja batas-batas HTR yang dimiliki koperasi tersebut. Di sisi lain, *Langgam.id* juga mendapat surat tugas bernomor: No. ST 08.01/KSU/SKD-HTR/ABS/01/2023 tertanda atas nama Ketua Koperasi Sekunder HTR Air Bangis Semesta yang diteken oleh Jeffry Z.C Nelwan. Surat itu ditujukan pada seseorang bernama Joni Halyan dengan jabatan pemeta kawasan.

Ia diperintah untuk melaksanakan Penataan Batas Dalam (Batas Sendiri) Areal Persetujuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK- HTR) atas nama Koperasi Serba Usaha Air Bangis Semesta pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat,

sepanjang + 20,81 KM. Dengan waktu 24 hari sejak tanggal 10 Januari sampai dengan 4 Februari 2023.

Terkait izin HTR ini, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat (Sumbar) Wengki Purwanto, mengatakan pemerintah patut mempertimbangkan untuk mengkaji ulang izin tersebut. Sebab kata Wengki, izin itu tumpang tindih dengan perkebunan masyarakat yang bukan bagian dari anggota KSU ABS. Sehingga kedua belah pihak bisa mendapat perlakuan yang adil.



Figure 2 **Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat (Sumbar) Wengki Purwanto**

Selain itu, berdasarkan data koperasi yang dapat diakses pada laman <https://nik.depkop.go.id/> milik Kementerian Koperasi dan UMKM, ada 2.005 anggota yang bergabung dalam tiga divisi tersebut. Jika kegiatan diatas izin HTR dibagikan merata pada masing-masing anggota, tiap-tiap orang akan mengelola 0,79 hektar usaha pemanfaatan hutan kayu.

Hanya saja, berdasarkan keterangan masyarakat sekitar, sampai saat ini tidak ada satupun dari mereka yang melihat dan mengetahui ada anggota koperasi yang melakukan pengelolaan. Terlebih kata masyarakat, mereka tidak tau sebenarnya siapa saja anggota-anggota koperasi ini.

Jika merujuk website Kementerian Koperasi dan UMKM, terdapat beberapa nama pengurus dari tiga divisi koperasi KSU ABS yang melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumatra Barat pada Selasa (02/08/2023) yang lalu. Mereka melakukan demo tandingan dengan membawa narasi berbeda dari yang diaspirasikan oleh warga jorong Pigogah Patibubur.

Divisi III KSU ABS diketuai oleh Zaniarlis yang juga Kepala Jorong Pigogah Patibubur. Ada juga Gusri Fendra, Bendahara Divisi II KSU ABS. Selain itu ditataran pengurus Koperasi Sekunder, ada Nama Efif Syahrial dan Erhamsyah. Mereka semua diterima oleh gubernur saat melakukan upaya demo tandingan pada awal bulan Agustus lalu. Secara tidak langsung, massa demo tandingan ini terdiri dari pengurus Koperasi Serba Usaha Air Bangis Semesta.

Selain itu ada beberapa Kepala Jorong dan pegawai kantor Wali Nagari di Air Bangis yang menjadi pengurus KSU ABS Divisi I-III. Di antaranya Ketua Divisi II Suherman (Kepala Jorong Pasar Dua Suak), Sekretaris Divisi II Afrina wati (Pegawai Kantor Wali Nagari Air Bangis). Pengawas Divisi III Fitri Wazir Ahmad (Kepala Jorong Pasar Baru Barat) dan Doni Darmawan (Kepala Jorong Pasar Satu).

Menurut Keterangan warga Jorong Pigogah Patibubur, tidak ada satupun dari nama di atas yang merupakan masyarakat penggarap lahan di sana.

Berdasarkan keterangan lainnya di situs Kementerian Koperasi dan UMKM, tiga Divisi KSU ABS di atas, sejak tahun 2014 (hampir sepuluh tahun berdiri), baru melaporkan satu kali Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sehingga pada situs tersebut, tiga Divisi Koperasi di atas diberi grade/penilaian C2. Hanya satu tingkat di atas grade D, yakni penilaian terburuk.

Pengajuan Perluasan Izin dan Tanda Tanya Koperasi Sekunder

Selain tiga Divisi yang telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Koperasi Serba Usaha Air Bangis Semesta (KSU ABS) mempunyai 4 divisi lainnya. Yakni Divisi IV-VII. Total keseluruhan ada tujuh Divisi dibawah bendera satu Koperasi Sekunder. Yaitu Koperasi Produsen Serba Usaha Sekunder Hutan Tanaman Rakyat Air Bangis Semesta. Ke depan kita sebut saja KSU Sekunder HTR.

Sama dengan 3 divisi sebelumnya, 4 divisi ini juga telah berdiri sejak tahun 2014. Namun, jika Divisi I-III berdiri

dalam ruang lingkup Kabupaten, dimana anggotanya hanya terbatas warga Pasaman Barat saja. Divisi IV-VII berbentuk primer nasional dengan keanggotan lintas provinsi.

Di website Kementerian Koperasi dan UMKM, 4 divisi ini bergerak pada sektor usaha aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu. Bukan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan seperti 3 tiga divisi sebelumnya. Anggotanya juga hanya sedikit. Semuanya masing-masing kurang dari seratus orang.

Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021, KSU ABS mengajukan perluasan izin perhutanan sosial seluas 15.250 hektar melalui surat permohonan nomor : 07/KSU/SKD HTR ABS/2021 tertanggal 30 September 2021.

Bupati Pasaman Barat Hamsuardi merestui dan memberikan rekomendasi terkait usulan ini. Dalam surat yang diteken Hamsuardi pada 09 April 2022, ia

mendukung KSU Sekunder HTR beserta Divisi IV-VII sebagai pengelola hutan dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKM).

Walhi Sumbar berdasarkan analisisnya mengatakan, areal seluas 15.250 hektar yang dimohonkan sebagai perluasan IUPHHK-HTR oleh KSU ABS akan tumpang tindih dengan lahan perkebunan masyarakat yang bukan anggota koperasi tersebut.

Kemudian terkait KSU Sekunder HTR, Langgam.id menemukan beberapa catatan terkait pengelolaannya. Pertama, status sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) sudah kadaluarsa atau tidak berlaku lagi sejak tanggal 01/06/2023. Artinya Koperasi ini belum melaporkan berita acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) terbaru.

Pada website pencacatan NIK koperasi, KSU Sekunder HTR terakhir kali melaporkan RAT pada tanggal 01/02/2021. Dengan status grade/penilaian C2, diketahui koperasi tersebut baru sekali melaporkan RAT-nya.

Catatan kedua berdasarkan website yang sama, sebagai koperasi sekunder harusnya KSU Sekunder HTR melaporkan atau mendaftarkan jumlah koperasi yang tergabung dalam kelembagaannya. Namun pada situs resmi tersebut terpampang jelas bahwa tidak ada sama sekali anggota KSU Sekunder HTR. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang koperasi, sebuah koperasi sekunder harus memiliki minimal 3 koperasi sebagai anggota di dalamnya.

Lalu yang ketiga, dari struktur pengurus koperasi mulai dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris berdasarkan keterangan yang Langgam.id dapatkan dari warga dan informan lainnya, tidak ada satupun diantara mereka yang menjadi warga Air Bangis dan masyarakat penggarap.

Padahal koperasi ini memiliki bentuk sekunder Kabupaten. Artinya, anggota yang berada di dalamnya haruslah warga Pasaman Barat. Ketuanya sendiri bernama Titin Suharni. Ia juga menjadi Komisaris Utama di PT. Hutan Tanaman Rakyat. Dalam akta pengesahan

PT, Titin mencantumkan alamat di Jl. Pasir Putih Raya No.5 Tabing Kota Padang.

Selain itu ada 4 orang pengurus yang terikat hubungan keluarga kandung dalam struktur KSU Sekunder. Yakni, Efif Syahrial (Bendahara), Erhamsyah (Wakil Sekretaris), dan Eriil Syahrial (Ketua Pengawas). Mereka bertiga adalah saudara kandung. Salah seorang pengawas lainnya yaitu Paksi Gautama adalah anak kandung dari Efif Syahrial.

Langgam.id sudah mengkonfirmasi terkait status kepengurusan ini kepada bendahara KSU Sekunder HTR Efif Syahrial. Ia mengatakan, sebelumnya baik dia dan keluarganya tidak tergabung sebagai pengurus koperasi. Apakah itu yang primer maupun yang sekunder.

Namun setelah ia selesai menjabat sebagai Wali Nagari Air Bangis, pengurus dari Koperasi memintanya untuk menjadi pengurus Koperasi Sekunder bersama Titin Suharni.

"Awalnya saya ndak termasuk, ibuk tu ndak termasuk, maka rapatlah pengurus sekunder. Akhirnya ibuk tu telpon saya. Pak efif, saya mau jadi pengurus, syaratnya cuma satu. Dampingi saya sebagai bendahara sekunder. Baru satu tahun ini," kata Efif kepada *Langgam.id* Kamis (10/08/2023).

Tapi anehnya berdasarkan Akta Pendirian KSU Sekunder HTR yang *Langgam.id* dapatkan, tertanggal 27/05/2015 tidak diperbolehkan ada hubungan keluarga di antara pengurus. Hal itu tercantum di BAB VI tentang Pengurus Pasal 20 angka 2 huruf D. Di sana diatur, antara pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga.

Pada huruf C juga dinyatakan, bahwa syarat menjadi pengurus salah satunya adalah sudah menjadi pengurus koperasi primer sekurang-kurangnya dua tahun.

Jika selama ini Efif dan keluarganya, begitu pula Titin tidak pernah menjadi pengurus koperasi Primer, kemudian langsung tiba-tiba menjadi pengurus KSU Sekunder, ada aturan di AD/ART yang dilewatkan.

Peron Sawit KSU Tak Miliki Nomor Induk Berusaha

Selain mendapatkan izin Hutan Tanaman Rakyat, KSU Sekunder HTR juga menjalankan suatu usaha perdagangan sawit. Mereka mendirikan sebuah peron/veron sawit di Kampung Lubuk Buaya Jorong Pigogah Patibubur.

Bendahara KSU Sekunder Efif Syahrial mengatakan kehadiran peron itu untuk melegalkan keterlanjuran penanaman sawit di kawasan hutan. Ia mendalilkan pendirian peron itu sebab pihaknya di koperasi belum bisa memulai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, karena masyarakat masih menanam sawit.

"Maka pemerintah mengambil kebijakan agar keterlanjuran sawit ini legal, karena izin resmi ada di koperasi, maka ditampung lah buah itu peron kita," kata Efif saat diwawancarai *Langgam.id* dikediamannya, Kamis (10/08/2023).

Peron itu sendiri sebelumnya kata Efif adalah milik seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat, yakni Heri Miheldi dari fraksi Partai Gerindra.

KSU Sekunder HTR lalu menyewa peron tersebut. Tujuannya ungkap Efif, agar tidak terjadi tindakan hukum sebab masyarakat berkebun di kawasan hutan. "Maka harus dijual ke koperasi supaya legal," tuturnya.

KOPERASI, PERON SAWIT, DAN MASYARAKAT

Ilmuwan Beranda Koperasi Hutan dan Industri Keluaran Hutan (KOH) Air Bangas Sementa (ABS) Adu 7 Divisi KSU ABS yang berlokasi Sumatera Barat pada tahun 2014

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 8843/Sel-90/2014 tanggal 20 Mei tahun 2014 Koperasi Berda Adu Bangas Sementa (KSU ABS) mendapat dan Usaha Percontohan Hutan Keluaran Hutan Tanaman Kelapa (KUH-Kel).

Luasnya 1.990 Hektar

Dibagi atas 3 Divisi

- Divisi 1 670 hektar = 100 anggota
- Divisi 2 670 hektar = 650 anggota
- Divisi 3 650 hektar = 650 anggota

Divisi IV-VI merupakan lahan tambahan seluas 6.290 hektar dalam nama Hutan Kemasyarakatan (HKM).

Percontohan masyarakat lokal yang dipertentikan untuk HTK tersebut merupakan kawasan hutan.

Menurut Wakil Sumbar ten tersebut, tumpang tindih dengan lahan dan pemukiman masyarakat di Jorong Pijigang Pabuhar.

Peron di HTK Koperasi di Air Bangas, terletak di atas hutan produksi dan penanaman kelapa yang seluas 600 hektar.

● Hutan produksi ● Lahan Hutan Tanaman Rakyat yang dipertentikan untuk Usaha Percontohan (KSU ABS)
● Hutan lindung

Peron Sawit

- Koperasi sekunder HTR melaksanakan usaha penanaman/panen sawit, dimana peron tersebut tidak memiliki honor induk berwujud (HS) sebagai penanggung jawab.
- Masyarakat lokal dan diwajibkan menjual panen sawit mereka ke peron KSU sekunder HTR.
- Masyarakat panen sendiri berjualan/panen sendiri pada sumber.
- Gubernur dan Koperasi dalam berbagai kesempatan menghimbau masyarakat menjual hasil sawit ke Peron Tersebut.

Kesaksian Masyarakat

- Masyarakat Jorong Pijigang Pabuhar tidak mengetahui siapa saja anggota koperasi.
- Tidak ada orang masyarakat Pijigang yang bergabung dengan KSU ABS.
- Masyarakat lokal pernah melihat adanya kegiatan penanaman sawit namun tidak yang dilakukan KSU ABS.
- Masyarakat telah dahulu tinggal dan bekerja di Jorong Pijigang Pabuhar sebelum lahan HTK diberikan.

KSU ABS Divisi I-III

- Pengurus dan anggota KSU ABS Divisi I-III dibantu dalam mempersiapkan pengajuan lahan.
- Banyak kepala desa dan pejabat karwas Wai Bangas Air Bangas yang menjadi Pengurus KSU ABS.
- Divisi I-III memiliki lahan 6000 hektaran C2 oleh Kementerian Koperasi dan UKM, hanya satu tingkat di atas grade C1 yang disediakan berwujud.

KSU Sekunder HTR

- Bertindak honor induk Koperasi (KUI) KSU Sekunder HTR sudah melaksanakan legal tanggal 05/04/2023.
- Dalam proses ream-konfirmasi, KSU Sekunder HTR sudah ada Koperasi yang terganggu oleh penanggungjawab.
- Menurut masyarakat Ketua, Wakil ketua, dan Sekretaris KSU Sekunder HTR sudah terdapat Air Bangas dan Pabuhar pengantar.
- Ketua KSU Sekunder HTR adalah Tim Nuklun, seorang pengantar dan Direktur Executive PT Abaco.

Faktanya

- Satu keluarga menjadi pengurus dan pengawas KSU Sekunder HTR, EIB Sumbar (pendukung), tim pengantar (tidak berwujud), dan 16 orang di (Mula Mula) hubungan melalui kontak Pabuhar Galantia (Pengantar) adalah anak dari Heri Fyhadhi.
- Berdasarkan data transaksi KSU Sekunder HTR tahun 2018, tidak ada pembelian antara pengurus maupun penjual hubungan keluarga.

Ditulis: Langgeng

Tak hanya Efif, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam banyak kesempatan juga menyuruh masyarakat agar menjual hasil sawitnya ke peron KSU Sekunder. Mahyeldi beralasan, koperasi itulah yang sah dan legal serta direstui negara untuk mengolah hasil di kawasan hutan tersebut.

Dalam rapat koordinasi di kantor Bupati Pasaman Barat, Selasa (08/08/2023), Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono juga menyampaikan hal senada didampingi Gubernur di sampingnya.

"Itu diarahkan saja ke koperasi yang sudah legal. Yang sudah resmi. Sehingga itupun 70% untuk masyarakat yang panen. 30% masuk ke koperasi yang sudah disiapkan atas nama negara. Karena milik negara. Ini yang menghambat kan pengepul," kata Suharyono seperti dikutip dalam postingan instagram @humaspoldasumbar.

Langgam.id kemudian menelusuri klaim gubernur dan Kapolda tersebut. Apakah KSU Sekunder HTR ini telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dibidang perdagangan sawit.

Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, NIB (Nomor Induk Berusaha) diperuntukkan untuk semua perusahaan, baik perorangan, UMKM, non UMKM maupun badan usaha seperti Koperasi.

Selain itu, menurut staf seksi pelayanan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar Asrul, harus di cek terlebih apakah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sudah ada.

"Setiap Badan Usaha itu harus memiliki NIB yang terdaftar di OSS (Online Single Submission). Di OSS ada KBLI, itu menunjukkan izin usahanya. Saat ini kita tidak tau apakah koperasi itu memiliki NIB atau tidak. Sudah terdaftar di OSS atau tidak. Tapi idealnya seperti itu, kalau dia berdagang sawit, dia harus memiliki kode klasifikasi di KBLI Perdagangan," katanya kepada *Langgam.id*, Kamis (24/08/2023)

Untuk peron atau perdagangan sawit sendiri diklasifikan dengan kode 46202. Yaitu perdagangan besar buah yang mengandung minyak.

Kepala Dinas DPMPTSP Pasaman Barat Fadlus Sabi melalui pengecekan oleh petugas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single

Submission/OSS) mengatakan, tidak menemukan NIB bagi usaha peron sawit milik KSU Sekunder HTR.

"NIB koperasi ini belum ada tampak. Kapan dia mendaftarkan NIB atau kegiatan lainnya tidak ada juga," kata Erik staf dinas DPMPTSP Pasbar.

Terpisah, Kadis DPMPTSP Sumbar Adib Alfikri saat dihubungi via *WhatsApp* mengatakan izin Koperasi tersebut adalah Hutan Tanaman Rakyat dan dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

Sedangkan dalam surat keputusan HTR yang dikeluarkan Bupati Pasbar, tidak ada menyinggung sedikitpun soal perdagangan, peron, atau hal lainnya berkaitan dengan sawit.

Jika merujuk Akta Pendirian KSU Sekunder HTR yang *Langgam.id* dapatkan, tertanggal 27/05/2015, tidak ada pencantuman usaha di bidang perdagangan atau yang berkaitan dengan sawit.

Pada plang yang tertancap di depan veron pun, tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tercantum. Hanya ada Nomor Induk Koperasi (NIK) dan nomor Badan Hukum.

Padahal jika merujuk pernyataan Gubernur dan Kapolda sebelumnya, izin berusaha Koperasi Sekunder HTR berkaitan dengan peron sawit harusnya telah lengkap dan benar-benar resmi.

Diduga Mengkhianati Prinsip dan Nilai Koperasi

Akademisi Universitas Andalas sekaligus tokoh penggerak koperasi di Sumatra Barat Virtuous Setyaka menilai pemerintah harus mengawasi ulang keberadaan KSU Sekunder HTR. Virtuous mengatakan dirinya sebelumnya sudah mempelajari persoalan yang terjadi di Air Bangis ini. Baik berkaitan dengan konflik, serta kehadiran koperasi di tengah prahara tersebut.

"Sudah banyak di Indonesia koperasi-koperasi yang bermasalah. Dan mungkin salah satunya adalah koperasi yang ada di Pasaman Barat ini, yang akhirnya

terkait langsung dengan kasus di Air Bangis," kata Virtuous kepada *Langgam.id*, Jum'at (25/08/2023).

Dari yang ia pelajari, patut disinyalir KSU Sekunder HTR merupakan koperasi abal-abal. Sebab kata Virtuous, ia menilai dalam praktiknya kemungkinan besar KSU Sekunder HTR ini tidak menjalankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi.

"Ada praktik seperti rentenir, pemaksaan, dan monopoli yang ddiduga dilakukan koperasi ini," tuturnya. Itu semua tidak berjalan lurus dengan nilai-nilai koperasi yang ada.

Terlebih KSU Sekunder HTR kata Virtuous, saat ini digunakan atau menjadi bagian dari proses pembangunan dan pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand itu mengambil contoh dari Nomor Induk Koperasi (NIK) dan status grade penilaian dari KSU Sekunder HTR.

Didapati NIK Koperasi tersebut sudah kedaluarsa. Ditambah KSU Sekunder HTR hanya mendapat penilaian C2 dari pemerintah.

"NIK itu kan pemerintah yang keluarkan, tapi ketika koperasinya melanggar itu, kok malah pemerintah juga yang jor-joran mengedepankan mereka sebagai bagian dari instrumen pembangunan," ujar Virtuous, salah satu pendiri Koperasi Mandiri dan Merdeka (KMDM) Universitas Andalas ini.

Grade C2 yang dimiliki KSU Sekunder HTR kata Virtuous menunjukkan bahwa koperasi itu kurang kredibel. "Pemerintah kalau mau, bahkan menjadikan koperasi itu tulang punggung dalam kebijakan mereka, harusnya gradenya yang tinggi," katanya.

"Sebab konteksnya koperasi ini digunakan sebagai bagian dalam melaksanakan pembangunan. Kecuali konteksnya pemerintah itu mau membina koperasi itu untuk meningkatkan grade nya," katanya melanjutkan.

la meminta pemerintah agar bisa menelusuri dan memverifikasi ulang secara formal dan legal KSU Sekunder HTR dan pengurusnya. Virtuoso menjelaskan harusnya harusnya unsur-unsur pemerintah itu membantu untuk memperbaiki perilaku koperasi yang tidak benar. Kalau memang mempercayakan bahwa koperasi itu bisa diandalkan bekerja dalam membantu pembangunan.

Bukan sebaliknya, ketika didapati ada pelanggaran terkait peraturan, prinsip, dan nilai-nilai tentang koperasi, pemerintah malah bekerja sama.

"Koperasi abal-abal harus dihabisi. Itu mencoreng nama baik koperasi sebenarnya. Jangan sampai ada pihak yang mengatasnamakan dirinya koperasi, tapi sebenarnya tidak menjalankan prinsip prinsip dan nilai-nilai koperasi," katanya. (DH)

Editor: Yose Hendra

10

Pemulihan Tanah Ulayat, Harapan dari Banyak Korban Konflik Agraria di Sumatera Barat

**Teks/Foto-foto: Uyung Hamdani & Jaka HB
Editor: Jaka HB**

Aakhirman tak perlu lagi pergi jauh dari kampungnya untuk mencari kerja. Di luar kampungnya Akhirman bekerja apa saja. Pekerjaan yang tidak tetap itu membuat ia depresi. Begitu pekerjaan selesai ia harus pontang panting mencari pekerjaan baru yang rata-rata berdurasi singkat. "Dulu saya kerja apa saja sebab tak punya lahan untuk ditanam" ucap pria yang kumisnya diselengi uban ini.



Sekarang ia berkebun jagung di dekat rumah. Hasil panen jagungnya bisa menghidupi istri dan enam orang anaknya yang rata-rata masih sekolah. Bagi Akhirman tanah seluas lebih kurang seratus meter persegi itu sedikit demi sedikit mewujudkan mimpi-mimpinya yang tertunda sejak lama.

Sekitar dua menit perjalanan dari tempat Akhirman berada, Nurani, perempuan berusia 75 tahun sedang merajut asa bersama tiga anak perempuannya; Safrianis (56), Ratmayeni (47) dan Amrina rasyiada (38). Mereka anak beranak menanam jagung sekaligus pisang sebagai komoditas utama. Dulu mereka cuma buruh tani perusahaan sawit dengan upah lima tiga puluh ribu rupiah sehari.

“Jangankan membayangkan membeli motor, beli makan saja sudah susah,” kata Amrina, anak bungsu Nurani. Dua tahun Nurani dan anak-anaknya menggarap lahan, mereka bisa meningkatkan ekonomi keluarga mereka masing-masing.



Potret Akhirman, petani Kapa

Akhirman, Nurani dan anak-anaknya adalah warga Nagari Kapa kabupaten Pasaman Barat yang terlibat sengketa lahan dengan sebuah perusahaan sawit di Pasaman Barat. Bagi masyarakat Kapa, perusahaan itu telah melanggar batas tanah ulayat saat perusahaan melakukan penanaman bibit sawit. Sengketa ini menjadi permulaan masyarakat Kapa

memblokade jalan masuk perusahaan untuk panen di wilayah yang mereka tanam dalam tanah ulayat Nagari Kapa.

“Dalam dokumen Hak Guna Usaha perusahaan hanya tercantum Nagari Sasak, tidak ada Nagari Kapa,” kata Syafiruddin (65).

Syafiruddin adalah tokoh masyarakat Kapa yang ikut dibawa bersama tiga orang lainnya ke kantor Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) untuk dimintai keterangan saat terjadi bentrokan dengan pihak perusahaan. Bagi Syafiruddin, tanah ulayat Kapa sudah ada batas-batasnya yang diketahui oleh niniak mamak dan pemangku adat setempat.

“Sekarang batas-batas itu berupa parit-parit besar, jalan dan kebun jagung yang sengaja kami tanam untuk mempertegas batas tanah ulayat kami dengan area kebun sawit PT,” ujar Syafiruddin. Hari ini lahan sengketa antara masyarakat Kapa dengan korporasi itu masih dalam penyidikan ulang sebab masyarakat Kapa kembali melayangkan gugatan kepada perusahaan.

“Kami akan tetap berkebun dan menanam tanaman di tanah ulayat kami, karena ini adalah hak masyarakat Nagari Kapa untuk hidup di tanahnya sendiri” ucap Syafiruddin.

Persoalan sengketa lahan yang mereka alami di wilayah Pasaman Barat banyak terjadi antara perusahaan swasta dengan masyarakat. Birokrasi yang tumpang tindih saling berpulun dan lambatnya penyelesaian menambah daftar sengketa agraria di Indonesia kian hari kian kusut dan menebal.

Konflik Tanah Ulayat Berlarut-larut, Ini Catatan Walhi



Bekas bak truk sawit PT PHP ditinggalkan di Kapa

Walhi Sumatera Barat dan beberapa lembaga mencatat sebagai sampel ada 25 kasus konflik sawit yang berkepanjangan. Riset ini dilakukan bersama Universitas Andalas, KITLV Leiden, Universitas Wageningen, Lembaga Gemawan, Perkumpulan Scale Up, Walhi Kalimantan Tengah, Epistema Institute dan Huma.

Dalam 25 kasus itu terkadang satu kasus mengalami beberapa jenis konflik seperti penyerobotan lahan, permasalahan skema plasma, perkebunan melanggar peraturan, kompensasi tidak memadai, kondisi ketenagakerjaan dan lain-lain.

Persentasenya 16 kasus atau 64 persen kasus penyerobotan lahan, 20 persen perkebunan melanggar peraturan, 12 persen kompensasi tidak memadai, 8 persen masalah ketenagakerjaan, 4 persen lain-lain.

Walhi mencatat persentase tuntutan masyarakat secara umum. Ada 14 kasus atau 56 persen kasus masyarakat meminta sebagian tanah mereka dikembalikan.

Selanjutnya ada 13 kasus atau 52 persen masyarakat menginginkan timbal balik lebih baik dari perkebunan seperti pembagian keuntungan yang lebih dari skema plasma.

Selanjutnya ada 20 persen kasus yang meminta kompensasi lebih baik di atas tanah mereka yang hilang.

Penolakan atas izin HGU dan non-HGU 20 persen, meminta pengukuran ulang batas perkebunan 16 persen dan 4 persen kasus masyarakat meminta kontribusi lebih banyak dari perusahaan seperti peluang kerja.

Beberapa kasus berlarut-larut seperti yang dialami Nagari Simpang Tigo Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat dengan PT PMJ yang tak sudah-sudah sejak 1996. Syahrul Ramadhan Tanjung selaku ketua adat nagari tersebut betul-betul lelah dan juga sempat dikriminalisasi. Dia hanya ingin mendapatkan hak tanah untuk nagarinya agar masyarakatnya dapat memanfaatkan untuk kehidupan mereka.

Selain itu juga yang dialami Akhirman, Nurani dan anak-anaknya yang merupakan warga Nagari Kapa Kabupaten Pasaman Barat. Mereka berkonflik dengan perusahaan yang menurut mereka melanggar batas tanah ulayat mereka saat menanam sawit.

Ada banyak lagi daftar kasus yang berlarut-larut. Kasus-kasus ini terjadi kebanyakan di Pasaman Barat dan Kabupaten Agam.

Kepemilikan tanah ulayat komunal menjadi rentan. Pemerintah Sumatera Barat mencoba membuat regulasinya, bagaimana kelanjutannya?



Seorang perempuan membersihkan jagung hasil panen

Pengesahan Perda Tanah Ulayat Masih Menunggu Kementerian Dalam Negeri

Sejak awal tahun 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggodok rancangan

peraturan daerah atau ranperda tentang tanah ulayat. Setelah dikonfirmasi ke salah satu timnya ternyata pengerjaan masih menunggu finalisasi dari kementerian dalam negeri.

"Masih ada kemungkinan ada pasal yang perlu disempurnakan atau diubah dari kementerian," kata Desrio Putra, Tim Pembahas rancangan perda ini dari Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Kamis (17/8) lalu.

Dia bilang prioritas dalam peraturan ini adalah ulayat nagari "Bukan ulayat kaum atau suku. Ulayat nagari bisa digunakan oleh pelbagai suku dalam nagari tersebut," katanya. Karena menurutnya ulayat kaum atau suku punya aturan masing-masing dan untuk kaum masing-masing.

Selain itu dia mengatakan tujuan ranperda ini salah satunya memperjelas perjanjian inti plasma perusahaan dan masyarakat adat. Menurut politisi Gerindra ini kuncinya untuk melindungi hak masyarakat dalam ulayat nagari sehingga berdampak positif terhadap ekonomi dan kesejahteraan.

Dia mengatakan ulayat nagari di Sumatera Barat tersisa 8,4 persen. Kondisi itu menjadi dasar Komisi I DPRD Sumbar menginisiasi ranperda ini.

Pola Penguasaan Tanah Ulayat

Masnaidi selaku perwakilan masyarakat adat dari Nagari Malalo Tigo Jurai Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat mengatakan kepemilikan tanah ulayat mereka terbagi tiga sesuai statusnya.

Dia mengatakan secara umum penguasaan ulayat nagari dan struktur adatnya ada beberapa kesamaan.

Pertama tingkat kekerabatan suku dan status adatnya suku. Kedua status ulayat kaum dan terakhir tingkat kekerabatan nagari.

Tingkat kekerabatan nagari, statusnya ulayat nagari, struktur adatnya penghulu-penghulu suku yang ada di nagari atau penghulu pucuk.

Pola penguasaannya belum terbagi pada sebelas suku, berdimensi publik dan dikuasai oleh nagari. Pengaturan pengelolaan atas persetujuan penghulu-penghulu suku yang ada di nagari dan memperhatikan pertimbangan penghulu pucuk.

Bagaimana Menyelamatkan Tanah Ulayat?



Profesor Kurniawarman pakar agraria Universitas Andalas Padang.

Guru Besar Hukum Agraria Universitas Andalas Sumatera Barat Prof. Kurniawarman mengatakan kondisi tanah ulayat di Sumatera Barat ada dua. Tanah yang statusnya masih penuh di tangan masyarakat adat dan ada yang sudah beralih ke tangan investor atau perusahaan secara hukum.

"Tanah ulayat yang masih utuh adalah yang belum diserahkan atau diusahakan atau dimanfaatkan oleh pihak luar utamanya perusahaan," kata pria berkacamata ini.

Dia mengatakan pada umumnya tanah yang masih utuh ini umumnya tidak dimanfaatkan dengan optimal. "Daerah-

daerah yang kondisinya seperti ini umumnya daerah-daerah marjinal dan tidak menjadi sasaran investasi atau aktivitas ekonominya kurang tapi secara fisiknya juga mungkin kurang subur atau masuk dalam kawasan hutan," katanya.

Meskipun kondisinya seperti itu Kurniawarman mengatakan tidak bisa dianggap aman-aman saja.

"Jadi kita tidak bisa menganggap aman-aman saja. Yang utuh ni di Sumatera Barat dari hasil inventarisasi indikatif tahun 2021 di Sumatera Barat, dikecualikan luasan Mentawai karena isu ulayatnya lebih khas, masih 10 persen yang utuh," katanya.

Dia mengatakan para pemiliknya harus lebih waspada karena pergerakan korporasi yang sudah menghabiskan tanah ulayat di tempat lain, sekarang menyasar lokasi ini.

Kelompok pertama menurut Kurniawarman pemulihannya yaitu melakukan pendaftaran tanah ulayatnya atas nama kelompok masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan keamanan status tanah.

Dia mengatakan tanah ulayat yang diupayakan ATR BPN yaitu khusus tanah ulayat yang dalam artian memiliki fungsi

publik. Yaitu tanah ulayat nagari, bukan suku. "Kalau suku lebih dari 80 persen dan sudah diamankan oleh kaum dan suku-sukunya. Sedangkan nagari yang posisinya rentan," katanya.

Dia mengatakan ada 10 persen yang sudah mereka inventarisasi.

Dia mengatakan masyarakat harus mendaftarkannya. Sebab faktanya penyebab hilangnya tanah ulayat karena tidak didaftarkan sehingga gampang dicaplok baik dari luar maupun oknum warga nagarinya sendiri.

Selanjutnya ada kondisi tanah ulayat yang sudah beralih penguasaannya. Alias yang sudah terlanjur berkonflik dengan perusahaan.

"Jadi pertanyaannya kalau di kelompok kedua ini kita bicara konteks pemulihan tentu tidak serta merta, karena secara hukum tanah itu tidak lagi milik masyarakat hukum adat, dia sudah menjadi hak keperdataan berdasarkan jenis haknya, umumnya hgu, pertanyaannya siapa yang memegang otoritas HGU itu? Apakah pemegang otoritas HGU itu berkenan untuk mengembalikan ke masyarakat hukum adat,

oleh karena itu tidak serta merta dia bisa dipulihkan," kata pria berkacamata ini.

"Di sinilah arti penting adanya pengaturan," katanya.

Dia mengatakan pemulihan tanah-tanah seperti ini hanya bisa dilakukan atas perintah putusan hakim. Masyarakat bisa menggugat karena bersengketa dan menang, selanjutnya hakimlah yang kemudian memerintahkan para pihak menyerahkan tanah itu ke masyarakat hukum adat. "Kalau ternyata proses HGU itu melawan hukum," katanya.

Ada Proses Non-Yudisial yang Dapat Ditempuh

Kurniawarman mengatakan pemerintah dapat menempuh beberapa proses non-yudisial untuk pemulihan ini. Pertama melalui pelbagai macam program pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya.

"Salah satunya mungkin reforma agraria. Kalau dia dinyatakan tanah tersebut sebagai reforma agraria maka tentu pemerintah sudah punya kebijakan tidak memperpanjang HGU-nya sehingga bisa habis. Jadi kalau pemerintah punya niat mengembalikan dan memulihkan maka pemerintah bisa menetapkan tanah negara bekas HGU

menjadi tanah objek reforma agraria atau TORA. Nanti melalui jalur itu bisa dianggap sebagai pemulihan,” katanya.

Meskipun begitu menurutnya harus jelas kepada siapa subjek dari pemulihan ini. Kurniawarman menekankan pada tanah ulayat nagari, bukan tanah ulayat suku atau kaum.

“Kalau diserahkan ke masyarakat hukum adat, saya rasa dia tidak membicarakan pemulihan yang sesungguhnya karena tanah ulayat itu kan aset nagari. Sumber nagari dalam memperoleh uang untuk mengurus rakyatnya,” katanya.

Melalui jalur non-yudisial lainnya, Kurniawarman mengatakan ada mekanisme kedua yang bisa pemerintah tempuh untuk pemulihan hak ini.

“Yaitu melalui mekanisme pendelegasian kewenangan hak menguasai negara yang sejatinya dipegang oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), itu diserahkan pelaksanaannya. Didelegasikan pada masyarakat hukum adat. Jadi dia dipulihkan bukan untuk dibagi-bagikan ke orang perorang tapi didelegasikan negara pada masyarakat hukum adat,” katanya.

“Dasar hukumnya adalah pasal 2 ayat 4 UUPA. Itu yang selama ini jarang dibaca atau dipromosikan peluang ini oleh banyak kalangan termasuk pemerintah sendiri. Jadi dengan menggunakan perintah pasal 2 ini hak menguasai negara atas tanah negara bisa didelegasikan ke masyarakat hukum adat,” katanya.

Dalam pasal 2 ayat 4 itu tertulis dua subjek hak yang bisa menerima pendelegasian itu. “Satu masyarakat hukum adat, dua daerah-daerah swatantra atau pemerintah daerah,” katanya.

Posisi KAN dan LAN harus Jelas

“Apa yang dimaksud dengan pemulihan tanah ulayat itu?” kata Guru Besar Sosiologi Universitas Andalas Profesor Afrizal.

Dia mengatakan yang harus didudukkan adalah definisi tentang pemulihan. Ulayat milik bersama yaitu komunitas nagari. “Berarti kalau tanah itu dipulihkan dia menjadi milik bersama,” katanya.

“Tapi kalau tanah itu kembali tapi kemudian dikuasai oleh masyarakat adat, sementara warga masyarakat lain tidak

dapat akses, bagi saya itu bukan pemulihan tanah ulayat, kalau kemudian itu dibagi-bagi dan disertifikatkan jadi milik pribadi. Itu bukan pemulihan tanah ulayat,” katanya.

Selain itu menurut Afrizal negara perlu mendudukkan tentang siapa yang dapat mengelola tanah ulayat itu. Sebab kini juga terjadi persaingan antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan Lembaga Adat Nagari (LAN). “Kalau menurut perda lama pemegang otoritas tanah ulayat nagari adalah KAN dan LAN. Pemanfaatannya pemerintah nagari. Klausul ini berpotensi menyebabkan gesekan antara pemerintah nagari dan KAN. Dalam banyak (kasus) yang saya temukan pemerintah nagari banyak mengabaikan KAN karena pemerintah nagari melihat pemanfaatan. Kalau pemanfaatan KAN tidak berwenang,” katanya.

Dia mengatakan harus ada klausul yang lebih jelas ketika tanah ulayat akan dimanfaatkan. Selain itu perlu dipikirkan juga bagaimana relasi antara KAN dan pemerintah nagari.

Zulkifli Legal Consultant Yayasan Ulayat Nagari Indonesia mengatakan pemulihan hak ulayat itu sesuatu yang mungkin terjadi. Pemulihan menurut Zulkifli konkretnya ada recognition atau pengakuan. “Ini selaras dengan Permen

ATR/BPN nomor 10 tahun 2021 tentang penatausahaan tanah ulayat," katanya.

Selain itu Yayasan UNI mencatat bahwa Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan atau hak pakai atas tanah itu ada syarat materiil perolehannya dan hal tersebut tidak ada yang dipenuhi perusahaan-perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat di Sumatera Barat.

Dia menyebut dalam PP 24 tahun 1996 perolehan hak atas tanah itu dapat dilakukan dengan jual beli atau akta jual beli, pelepasan hak tanah oleh negara untuk kepentingan umum, hibah dan tukar guling.

"Lalu kalau kita tinjau perolehan hak atas tanah oleh perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat itu tidak merujuk pada ketentuan-ketentuan tad. Contoh misalnya di Sumatera Barat perolehan hak atas tanah oleh perkebunan kelapa sawit hanya berdasarkan surat penyerahan tanah ulayat oleh ninik mamak pemangku adat, ini tidak dikenal dalam uu agraria kita sebelum uu ciptaker ada, itu tidak memenuhi syarat materiil atas tanah dan tidak ada dikenal oleh undang-undang kita," katanya.

“Jadi tidak ada proses FPIC apa akibat hukumnya, di dalam hukum agraria kita tidak dikenal perolehan hak dari penyerahan, yang ada pelepasan hak atas tanah dan itu diatur untuk kepentingan umum boleh oleh negara,” katanya.

Dia menegaskan HGU perusahaan sawit di Sumbar melanggar syarat materiil perolehan hak atas tanah. “Maka secara hukum HGU-nya wajib gugur sehingga alasan pemulihan hak ulayat dapat dilakukan,” katanya.

Perda harus mampu memulihkan tanah ulayat

Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) Rifai Lubis mengatakan, peraturan daerah tentang tanah ulayat perlu melihat secara utuh kondisi atau fakta sosial dari tanah ulayat di Sumatera Barat. Tujuannya agar substansi perda bisa menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan tanah ulayat.

Rifai mengatakan persoalan yang harusnya jadi perhatian adalah tanah-tanah ulayat yang sudah beralih jadi HGU (hak Guna Usaha) untuk perkebunan. Cerita-cerita masyarakat yang terkumpul mengatakan peralihan dari tanah ulayat ke HGU ini yang banyak sekali tipu muslihat, intimidasi, kekerasan, pelanggaran hukum dan HAM. Karena itu perda

ini harus mampu memulihkan tanah ulayat tersebut kepada masyarakat adat pemangku haknya.

“Ada penelitian yang menyebutkan eksistensi tanah ulayat di Sumbar tinggal 18%. Itu terjadi karena proses negaraisasi tanah ulayat menjadi HGU melalui proses yang penuh dg pelanggaran. Jika perda ini hanya mengatur yang 18% tanah Ulayat yang tersisa tersebut, perda ini memberikan impunitas atas berbagai pelanggaran dalam proses peralihan tanah Ulayat menjadi HGU di masa lalu.

Karena itu perda ini harus memulihkan tanah-tanah Ulayat yang terlanjur menjadi HGU melalui proses yang sarat dengan pelanggaran, juga memulihkan hak-hal Ulayat di dalam kawasan hutan. “Agar minangkabau tetap punya hutan adat sebagai salah satu harta kekayaan nagari,” katanya.

Terkait dengan ada peraturan daerah kabupaten Kepulauan Mentawai tentang pengakuan dan penetapan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, perlu ditindak lanjuti dengan pendaftaran tanah-tanah adat oleh BPN. (*)

11

Negara Belum Penuhi Hak Atas Air Bersih Masyarakat Sumatera Barat

(Editorial)

Oleh: Jaka HB



“ Air itu penting bagi kehidupan,” kata Nopri, salah satu warga Mentawai saat saya tanya soal kondisi air yang kabarnya sulit di kepulauan paling selatan Mentawai itu.

Lokasinya berhadapan langsung dengan samudera. Hutan masih banyak. Namun untuk air masyarakat kesusahan. Tak hanya di pulau jauh itu, tapi juga di ibukota kabupaten kepulauan Mentawai pun air susah. Baik rumah warga hingga perkantoran berharap dari air hujan dan sungai yang semakin hari semakin terancam oleh penebangan baik legal atau pun ilegal.

Perlu diingat bahwa Indonesia ikut meratifikasi Kovenan Hak Ekosob (Ekonomi Sosial dan BUdaya) dalam forum Hak Asasi Manusia di Persatuan Bangsa-Bangsa.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 2010 PBB menetapkan hak atas air bersih dan sanitasi oleh majelis umum PBB melalui resolusi Nomor 64/292 tanggal 28 Juli 2010. Artinya Indonesia turut menyatakan berjanji untuk mengambil langkah baik individual atau kerjasama internasional sebagai perwujudan penuh hak-hak yang diakui oleh kovenan dan negara pihak pada kovenan berjanji

menjamin hak-hak yang diatur dalam kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apa pun.

Indonesia wajib tunduk dan terikat pada kewajiban-kewajiban yang diberikan kovenan hak Ekosob yang masuk dalam rangkaian Sebagaimana pasal 2 ayat (1) kovenan hak ekosob maka setiap negara wajib secara progresif mewujudkan penuh dari hak atas air dan aman dan sanitasi.

Roehana Project memotret sebagian kondisi di Sumatera Barat. Mulai dari Sumatera Barat di daratan dan Kepulauan Mentawai yang merupakan surga para peselancar itu.

Kami melihat bertahun-tahun krisis air karena pengelolaan yang kacau masih terjadi di Sumatera Barat, terutama di Kepulauan Mentawai yang masuk dalam kategori daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan).

Tak hanya di kepulauan, Jorong Lurah Ingu di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat juga mengalami krisis air akibat pengelolaan yang salah. Lokasi tersebut bukan tidak ada air, tapi tidak semua warga dapat mengakses air bersih secara mudah. Mereka juga harus menghabiskan berapa rupiah untuk memenuhi kebutuhan airnya saat kemarau.

Topografi yang berbukit-bukit membuat mereka harus ke dasar lembah untuk mengambil air.

Dua lokasi ini menjadi sampel di Sumatera Barat bagaimana hak atas air bersih baik terkait akses dan pemenuhan kebutuhan kcau. Ada banyak nagari, kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Namun yang tidak tertulis bukan berarti tidak mengalami krisis air. Sementara krisis iklim semakin nyata.

Sumber-sumber air di lokasi yang Roehana datangi terancam oleh lingkungan yang rusak. Pemetaan daerah tangkapan air juga tidak ada. Pembangunan kabupaten atau kota ugalkan. Seperti pembangunan perumahan di sempadan sungai atau pemberian izin konsesi di hutan adat atau hulu sungai.

Alasan-alasan anggaran menurut kami hanyalah satu dari ribuan alasan tidak kreatifnya pemerintah dalam menangani permasalahan publik seperti air. Saya bertanya pada ahli ada beberapa cara untuk merekayasa alam agar dapat menyimpan air dan menjadi mata air untuk digunakan secara publik. Selain itu juga menjaga kebersihan sungai serta mengurangi bukaan-bukaan di sempadan sungai.

Selain itu sungai yang berada di sebelah PLTU Ombilin di Sawahlunto pun menjadi keruh. Kejernihan dan ikan-ikan yang berenang kesana-kemari hanya tinggal di ingatan warganya. Alasan pemenuhan kebutuhan listrik dan perputaran uang dari tambang batubara menjadi dasar dari alasan rusaknya sumber air yang juga digunakan perusahaan air minum setempat.

Publik harus mendesak pemenuhan hak atas air. Sebab negara wajib memenuhinya bersama perangkat canggihnya dalam struktur pemerintahan! Kalau tidak buat apa mereka digaji dari pajak kita?

Lalu bagaimana dengan janji pemerintah untuk memenuhi hak atas air bersih oleh warganya ini ditepati? Apakah negara tak menganggap penting pemenuhan hak atas air warga? (*)

12

Keanekaragaman Hayati Mentawai yang Pelan-Pelan Senyap

Oleh: Febrianti



"Kalaupun hutan ditebang tanaman obat akan hilang, susah kita mencarinya lagi, ada obat untuk membantu perempuan yang melahirkan, sakit pinggang, kena ular. Nggak bisa pohon ditebang, di bawahnya ada tanaman obat"-Aman Salomo.

Aman Godai menebas ruas-ruas bambu dengan parang tajamnya. Lalu memetik daun ailelepet berwarna merah muda yang baru tertanam di sebuah kebun obat.

"Ini untuk pendingin, supaya jiwa kita tenang," kata Aman Godai kepada saya yang mengikutinya dari belakang. Dia menyangkutkan daun itu pada ujung kalung manik sikerei di dadanya. Setiap kali akan ritual, seorang sikerei selalu menggunakan daun ailelepet.

Aman Godai adalah sikerei dari Butui, Pulau Siberut. Dia mengumpulkan daun-daun dan berbagai jenis tanaman di hutan Dusun Boleleu, Sipora Utara, Kepulauan Mentawai.

Pagi itu dia bersama lima sikerei dari Siberut sedang mempersiapkan ritual punen tanah. Ritual ini untuk memberkati tempat mereka mengambil obat, sebab Dinas Kesehatan Mentawai menggagas dan akan menjadikan lokasi itu sebagai kebun tanaman obat.

Aman Godai juga memetik daun pilok, sejenis daun dari keluarga jahe-jahean. "Untuk usir roh jahat," katanya.

Aman Lepon, kakak Aman Godai mendatangi saya dan memperlihatkan satu jenis tanaman dengan akarnya.

"Ini daun mumunen, senang kita kalau memakainya, tidur juga bisa nyenyak, daun ini bisa digantung di dalam rumah, supaya kita bahagia," kata Aman Lepon.



Aman Godai seorang sikerei ahli tanaman obat sedang memetik tanaman obat di hutan Pulau Sipora Kepulauan Mentawai 25 Oktober 2023/roehanaproject/ Febrianti.

Pencarian Tanaman Obat Lebih Lama Karena Ini

Kedua *kerei* ini sudah saya kenal dengan baik. Dua tahun lalu saya juga pernah bermalam dan berkunjung ke uma besar

mereka di Butui. Kelima *kerei* dari Butui itu menyebar berjalan di dalam hutan. Mereka mencarinya selama satu jam dalam areal seluas dua hektare. Waktu ini terhitung lama untuk mencari tanaman yang mereka butuh untuk ritual. Sebab jenis tanaman untuk ritual di hutan itu tak lagi banyak.

“Sudah banyak tanaman yang hilang, untuk *muturuk* (menari) saat punen laggai yang kemarin kami membawa semua tanamannya dari Butui, seperti daun surak, aillepet, dan sikaunauk,” kata Aman Godai.

Tanaman penting itu ia bawa dalam karung, naik perahu dari Sungai Sarereireket dan melanjutkan perjalanan dengan naik kapal dari Dermaga Maileppet di Siberut ke Tuapeijat, Pulau Sipora. Pelayaran menghabiskan waktu enam jam.

Ia mengatakan hanya di hutan di kampungnya tanaman obat dan tanaman untuk ritual itu masih lengkap tumbuh. Tanaman itu tumbuh sendiri di bawah pohon, tidak ada yang menanam.

Penebangan Membuat Sikerei Khawatir

Ia mengkhawatirkan banyaknya penebangan hutan di beberapa tempat di Kepulauan Mentawai akan menghilangkan banyak tanaman obat.



Aman Salomo dan Aman Lepon sedang mencari tanaman obat di hutan Sipora/roehanaproject/Febrianti.

“Tanaman obat banyak tumbuh di bawah lindungan pohon di hutan, begitu pohon ditebang, tanaman di bawahnya ikut mati. Jadi hutan jangan dihabiskan oleh perusahaan,” kata dia.

Tidak hanya Aman Godai, sikerei yang lebih tua Aman Salomo yang ada di sebelah Aman Godai ikut menimpali.

“Semua tanaman di hutan itu obat. Tidak beberapa jenis saja, tapi ratusan, kalau mau ditanam harus ditanam semuanya, karena yang diambil untuk ramuan obat itu sedikit-sedikit, tapi dari banyak jenis tanaman,” katanya.

Menurut Aman Salomo lebih bagus tidak merusak hutan, karena mereka dapat menggunakan semua tanaman untuk ramuan obat.

“Kalau hutan ditebang akan hilang, susah kita mencarinya lagi, ada obat untuk membantu perempuan yang melahirkan, sakit pinggang, kena ular. Nggak bisa pohon ditebang, di bawahnya ada tanaman obat,” katanya.

Ia memetik setangkai daun sikukuet sambil berkata kepada saya. “Ini untuk mengobati ibu yang baru melahirkan.”

Sebelum pengobatan modern masuk ke Mentawai, sikerei menjadi andalan masyarakat untuk pengobatan, karena tidak ada pilihan lain. Bahkan hingga sekarang masyarakat pedalaman di Pulau Siberut masih berobat kepada sikerei, selain ke poliklinik desa atau puskesmas. Karena itu sikerei memiliki ratusan ramuan untuk mengobati aneka penyakit.

Saat ini sikerei hanya ada di Pulau Siberut, sedangkan di Pulau Pagai dan Sipora tidak ada lagi seiring dengan habisnya hutan alam. Namun di Sipora dan Pagai Utara dan Pagai Selatan masih ada siagailagek, orang yang bisa meramu tanaman obat, tetapi tidak menggunakan ritual magis seperti sikerei.

Mentawai Punya Kekayaan Apotek Hidup

Pada 2000 Pusat Studi Tumbuhan Obat Universitas Andalas melakukan penelitian tumbuhan obat di Dusun Rokdok, Siberut Selatan.

Tim Pusat Studi itu mencatat ada 209 jenis tumbuhan berguna sebagai obat-obatan tradisional oleh sikerei di dusun itu. Dari 209 koleksi terdapat 154 jenis tumbuhan yang tergabung dalam 53 famili. Sebanyak 85 persen atau 176 koleksi tercatat memiliki khasiat dan penggunaannya secara tradisional dan hanya 33 koleksi atau 15 persen tak diketahui khasiat dan penggunaannya.

Pusat studi itu kemudian meneliti kembali pada 2012 pada empat titik di Sumatera Barat, dua titik di antaranya di Pulau Siberut. Pada dua titik itu penelitian ini berhasil mengumpulkan 151 jenis tumbuhan obat dan

mengidentifikasi 135 jenis taksonomi tanaman yang bermanfaat dalam 79 ramuan obat.

Hutan Mentawai tidak hanya kaya dengan tanaman obat, tapi juga memiliki keragaman yang tinggi. Keragaman ini tercipta karena Kepulauan Mentawai mempunyai sejarah geologis yang unik.

Selama zaman Pleistocene atau Zaman Es, kira-kira satu juta hingga 10 ribu tahun silam, permukaan laut di kawasan Asia Tenggara lebih rendah 200 meter dari sekarang. Hanya Kepulauan Mentawai yang terpisah dari daratan Pulau Sumatera saat pulau lainnya masih menyatu dengan Sumatera.



Joja (Presbytis potenziani) primata endemik Mentawai di Hutan Berkat Sipora Utara pada September 2021/roehanaproject/Mateus Sakaliau.

Keterpisahan itu menyebabkan flora-fauna di Mentawai terpelihara dari perubahan evolusi dinamis dan memiliki endemisitas yang tinggi. Sekitar 65 persen dari 31 spesies hewan dan 15 persen dari 896 spesies tumbuhan di Kepulauan Mentawai adalah endemik. Teristimewa adalah empat primata endemik, yaitu bokkoi (*Macaca siberu*), joja atau lutung mentawai (*Presbytis potenziani siberu*), bilou (*Hylobates closii*), dan simakobu (*Nasalis concolor siberu*).

Namun kekayaan keragaman hayati itu semakin terancam. Penebangan hutan skala besar terus terjadi, melenyapkan biodiversitas hutan Mentawai dalam senyap.

SIPUHH sebagai Modus Baru

Penebangan hutan alam di Kepulauan Mentawai dalam dua tahun terakhir kembali marak akibat Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III (BPHP) Pekanbaru mengeluarkan 31 hak akses SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) di Areal Penggunaan Lain atau APL dengan rata-rata seluas 50 ha.

Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kayu yang sudah ditebang melalui hak akses SIPUHH pada Januari hingga 18 September 2023 di Pulau Sipora dan Pulau Pagai

Selatan sebanyak 15.177 batang atau 29.938 kubik. Pada 2022 penebangan hutan alam di areal penggunaan lain di Pulau Sipora sebanyak 8.388 batang pohon atau 20.237 kubik kayu.

Penebangan di APL melalui PHAT (Pemegang Hak Atas Tanah) milik warga lokal yang penyokongnya adalah investor. Mereka melakukan penebangan dengan alat berat dan memanen ribuan kubik kayu dari kawasan hutan alam di kawasan APL itu.

Penebangan hutan besar-besaran di Pulau Sipora sejak dua tahun lalu telah menghancurkan habitat penting primata Sipora di Hutan Berkat hingga pantai Puakarayat di Desa Tuapeijat.



Pohon habitat primata di Hutan Berkat Sipora Utara yang ditebang pada Juni 2022/roehanaproject.com/Febrianti.

Melihat Gergaji Mesin Habiskan Hutan

Sepanjang hari gergaji mesin meraung memabat pohon-pohon di Pulau Sipora. Batang pohon besar hingga yang kecil rebah terbelah.

Orang-orang yang memegang kendali gergaji mesin itu menebang pohon-pohon keruing, meranti dan semua pohon yang penting bagi primata endemik. Mereka menjadikan Kayu-kayu itu gelondongan. Mengupas Kulitnya, selanjutnya menumpuk kayunya ke logpon di tepi Pantai Pukarayat. Menunggu kapal ponton mengangkutnya keluar Mentawai.

Dalam sekejap habitat penting primata endemik Mentawai, Joja, Simakobu, Bilou, dan Bokou hilang. Penebangan terus berlanjut ke Pantai Pukarayat di sebelah hutan Berkat hingga 2023.

Tahun lalu saya dan dua rekan saya Gerson Merari dan Rus Akbar melakukan liputan saat penebangan mulai berlangsung. Kami bersama Mateus Sakaliau, pegiat primata endemik Mentawai dari “Malinggai Uma” yang sering memotret primata di lokasi itu.

"Ini sangat menyedihkan, habitat primata di sana tak tersisa lagi, primatanya juga tidak terlihat lagi, kita dengan cepat kehilangan primata penting itu," kata Mateus kepada saya 5 Oktober lalu melalui telepon.

Ia mengkhawatirkan nasib keempat primata endemik Mentawai di Pulau Sipora, karena sama sekali tidak ada kawasan konservasi untuk mereka.

Primata Endemik Mentawai Terancam



Simakobu (*Simias concolor*) salah satu primata endemik Mentawai di hutan Berkat Sipora Utara pada September 2021/roehanaproject/Mateus Sakaliau.

Ahli primata dari Universitas Andalas Rizaldi mengatakan ancaman primata endemik Mentawai semakin meningkat dengan terjadinya deforestasi hutan akibat penebangan hutan yang masif.

“Yang paling *urgent* sekarang adalah primata-primata yang ada di Pulau Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan. Karena tidak ada kawasan perlindungan. Sepanjang tidak ada hutan konservasi habitat, primata itu akan hilang,” kata pria berkacamata ini.

Rizaldi mengatakan selama ini banyak yang menganggap kawasan perlindungan primata endemik Mentawai sudah cukup di Taman Nasional Siberut sehingga tiga pulau lainnya seperti Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sipora hampir tidak ada kawasan konservasi.

Padahal menurutnya para ahli taksonomi sudah membedakan dua jenis primata antara Siberut dan tiga pulau lainnya. Sehingga primata endemik di Mentawai kini menjadi enam jenis.

Ada enam spesies primata dari empat genus di Mentawai. Rizaldi menyebutkan primata endemik itu adalah Owa Mentawai atau Bilou (*Hylobates klossii*), Simakobu Pagai

(*Simias concolor concolor*), Joja Mentawai (*Presbytis potenziani*), Joja Siberut (*Presbytis siberu*), Beruk Pagai (*Macaca pagensis*), dan Beruk Siberut (*Macaca siberu*). Keenamnya berstatus terancam punah.

“Yang paling kita khawatirkan primata akan kehilangan habitat, degradasi hutan atau gangguan terhadap habitatnya saja sudah bisa menurunkan jumlah populasi primata, apalagi kalau hutannya di-*clearing*, itu akibatnya akan sangat parah,” ujarnya.



Dua ekor Bokoi (*Macaca pagensis*) di hutan Berkat pada September 2021/roehanaproject/Mateus Sakaliau.

Para Pemegang Izin Membabat Hutan

Penebangan hutan yang berlangsung di Mentawai saat ini tidak hanya melalui hak akses SIPUHH, tetapi juga Hak Pengusahaan Hutan. Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menginformasikan ada dua pemegang HPH yang beroperasi di Mentawai, yaitu PT Minas Pagai Lumber dan PT Salaki Suma Sejahtera.

PT Minas Pagai Lumber mengantongi izin HPH seluas 78 ribu hectare di Pulau Pagai Selatan dan Pulau Pagai Utara, sedangkan PT Salaki Suma Sejahtera mengantongi izin HPH seluas 49.440 hektare di Pulau Siberut.

Dari reportase saya di Dusun Matobat, Desa Sinaka di lokasi rencana kerja tahunan PT Minas Pagai Lumber pada awal September 2023, mereka menumpuk ratusan kayu gelondong di pinggir hutan kanan kiri Sinaka KM 51.

Tumpukan gelondong itu dibawa ke kapal ponton di logpon Aban Baga. Pohon-pohon penting primata seperti keruing dan meranti yang besar dan tinggi menjadi sasaran utama penebangan. Padahal menurut penduduk setempat, primata di sana masih cukup banyak karena masih ada hutan primer.

Rizaldi mengingatkan ketika alat berat mulai beroperasi dan masuk ke kawasan primata-primata tersebut, kemudian menebangi pohon-pohon yang besar, dalam kurun yang singkat primata tersebut akan kehilangan potensi makanan. Dampaknya di sana tidak satupun primata yang bisa hidup.

“Kepulauan Mentawai adalah daerah terkecil dan terendemik di dunia, karena untuk ukuran pulau-pulau yang kecil memiliki enam primata endemik. Sekali mereka punah, selamanya kita akan kehilangan primata itu karena hanya ada di Mentawai,” ujar Rizaldi.

Dengan banyaknya izin penebangan yang pemerintah keluarkan di Kepulauan Mentawai, masa depan keragaman hayati di Kepulauan Mentawai, termasuk tumbuhan obat dan primata-primata endemiknya semakin suram. Tanpa kita sadari, diam-diam semuanya akan tinggal kenangan.

**Febrianti adalah Jurnalis lepas Tempo penerima hibah Rainforest Journalism Fund dari Pulitzer Center. Tulisan Febrianti juga tersebar di berbagai media seperti BBC, Ekuatorial dan Jurnalistravel.*

13

Air Mata Ridwan dan Upaya Mitigasi Infrastruktur Gempa Padang

Oleh: Fachri Hamzah



Korban berjatuh saat gempa Kota Padang 2009 karena desain bangunan kota tidak berdasarkan kondisi bencana. Pemerintah harus memberi rekomendasi pembangunan di kota dengan syarat tahan gempa.

Mata Ridwan berair saat menaruh dua lilin merah di dekat prasasti yang ada di Tugu Gempa Kota Padang. Pria berusia 73 tahun ini tak pernah akan bisa melupakan peristiwa tahun 2009 yang merenggut nyawa kakaknya. Saudara yang paling dibanggakannya: Edi Hermanto.

Cuaca hari itu memang cerah. Namun jantungnya tiba-tiba berdegup kencang karena keterkejutan yang luar biasa. Tanah tempatnya berdiri hari itu terguncang hebat. Keseimbangan badannya hilang saat berdiri di depan Kantor Kepolisian Sektor Padang Selatan.

“Segala sesuatu di sekitar saya mulai runtuh. Saya merasa panik dan cemas, semuanya menjadi berantakan. Tanpa pikir panjang, saya langsung menuju ke rumah kakak di Kampung Nias,” kenangnya.

Ketakutan terburuk Ridwan menjadi kenyataan saat ia sampai di rumah kakaknya, yang telah luluh lantak oleh gempa

tersebut. Sontak dia berlari dan berteriak memanggil nama kakaknya. Tak ada balasan.

“Seluruh lingkungan hancur, tidak hanya rumahnya. Kakak saya akhirnya dievakuasi keesokan paginya, namun dia pergi selamanya,” katanya dengan suara yang melemah. Badannya lemas. Namun Ridwan harus mengikhhlaskannya. Berhari-hari hingga bertahun-tahun kemudian dia merasakan kesedihan yang sama.

Sejak gempa besar itu Ridwan datang ke tugu gempa. Bertahun-tahun sudah lewat tapi matanya tetap basah oleh air mata mengingatnya. Dia menyalakan lilin-lilin tadi, berharap do’a-do’a baik untuk kakaknya sampai. Asap tipis lilin itu melayang melewati nama kakaknya yang terukir di prasasti tugu gempa itu.

“Sudah 9 medalinya, dan yang paling membanggakan adalah kejuaraan dunia. Sebagai adik, saya merasa sangat bangga. Kakak saya pernah menjadi kebanggaan Padang, Sumatera Barat, bahkan bangsa ini,” ujarnya sambil sesekali tersenyum dengan bibir bergetar.

“Setiap hari, saya selalu mengingatnya. Tetapi pada tanggal 30 September ini, selagi saya masih hidup saya ingin berdoa

di Tugu Gempa yang terukir namanya,” katanya sembari melihat tugu gempa.

Pemerintah Baru Sadar Konstruksi Mitigasi Gempa Pasca 2009

Febrin Anas pakar konstruksi dan struktur Fakultas Teknik Universitas Andalas mengatakan banyaknya kerusakan pasca gempa 2009 karena bangunan Kota Padang tidak siap. Sebab, banyak bangunan bekas Belanda tidak sesuai standar ketahanan gempa.

Selain itu sebelum gempa 2009 Kota Padang masih menggunakan aturan pembebanan tahun 1987.

“Jadi kalau sumber gempa Sumatera Barat ini diperkirakan tidak ada gempa itu terlihat dari peraturan kita, jadi kita punya peraturan dulu sebelum tahun 1987 saya masih ingat peraturan gempa 1987 itu itu beban gempa kita itu sangat kecil untuk kota Padang,” ujarnya.

Febrin melihat bangunan yang rusak pada gempa 2009 rata-rata struktur bangunannya memang desainnya belum tahan gempa. Salah satunya Hotel Ambacang yang pembangunannya untuk hotel pada 2005, kemudian

penambahan jumlah lantainya oleh pemilik. “Saya rasa bangunan itu saat ditambah tingkat apakah disusun ulang, tentu harus dipertanyakan,” ujarnya.

Dia mengingatkan jika mendirikan bangunan itu harus melihat sejauh mana jaraknya dengan pusat gempa. Barulah kemudian ada rekomendasi tentang pendirian bangunan tersebut agar lebih tahan gempa.

Selain itu menurutnya juga tergantung kepada bahan untuk mendirikan bangunan.

Semuanya sudah ada pada Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 693/Kep/BSN/12/2019 tentang SNI 1726-2019 Tata Cara Perencanaan Bangunan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan.

“Setiap bahan yang digunakan juga memiliki perilaku yang berbeda jika diguncang gempa,” katanya.

Dia juga menerangkan dalam pendirian bangunan itu, kolomnya harus lebih kuat dari baloknya. Sehingga saat gempa terjadi bangunan tersebut tidak mengalami patah di bagian baloknya.

"Kalau gempa terjadi, kolomnya akan tetap bertahan dan tidak patah, sehingga masih aman," katanya.

"Bagi kawasan yang rawan gempa, desainya harus dipastikan jika tiang harus lebih kuat dari kolom. Caranya dengan membuat kekuatan tiangnya 20 persen lebih kuat dari kolom. Intinya tiangnya jangan sampai hancur," tambahnya.

Febrin mengatakan penyebab banyaknya bangunan hancur waktu itu karena struktur desain yang tidak sesuai standar bangunan. "Saya melihat rata-rata bangunan yang hancur itu karena kolomnya patah, katanya.

"Wajib hukumnya membangun bangunan yang tahan gempa, apalagi di wilayah Kota Padang yang sangat rawan gempa," ucapnya.

Namun untuk membangun bangunan yang tahan gempa itu biayanya mahal. Sehingga ada beberapa bangunan penting yang sangat wajib memenuhi standar gempa, seperti rumah sakit dan gedung-gedung berbahaya.

Walaupun demikian, pasca gempa di Kota Padang semua gedung yang di bangun rata-rata sudah menerapkan desain *strong column weak beam*. Selain desain tersebut juga

ada inovasi baru yang disebut *base isolation*. Kegunaannya untuk meredam pondasi bangunan dari getaran gempa. Alat ini sangat mahal sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya.

"Kalau gunakan *base isolation* getaran gempa akan diredam sehingga tidak akan tergoncang oleh gempa," katanya.

Febrin mengatakan hanya ada tiga bangunan di Kota Padang yang menggunakan konsep itu. Tempatnya adalah Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sumatera Barat, Hotel Ibis, dan Gedung Shelter di Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Roehanaproject.com sempat mengunjungi salah satu bangunan tahan gempa. Bangunan berlantai 4 itu terlihat sepi pada Jumat 29 September 2023. Bangunan tersebut berada di kompleks Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Peruntukkan gedung dengan cat putih itu adalah shelter tsunami. Jaraknya sekitar 4 kilometer dari bibir pantai. Bangunan menggunakan teknologi *base isolation* di dalam pondasinya.

Melihat Upaya Mitigasi Pemerintah Dari Sisi Infrastruktur

Gempa 2009 bukanlah akhir dari ancaman gempa di Kota Padang. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) memprediksi jika ada ancaman yang lebih besar lagi. Ancaman tersebut yaitu gempa Megathrust Mentawai dengan magnitudo 8.9. Ancaman tersebut menjadi dasar Pemerintah Kota (Pemko) Padang melakukan mitigasi bencana, salah satunya di segi bangunan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang Tri Hadiyanto menjelaskan pihaknya menerbitkan beberapa aturan agar hal tersebut terwujud.

“Kami masuknya dari Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG), dulunya bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bedanya jika IMB hanya sampai administrasi saja, PBG lebih kepada struktur bangunan,” katanya.

Tri mengatakan pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada pemilik bangunan untuk mendirikan bangunannya ramah gempa, terutama dari struktur bangunan. Misalnya perihal komposisi kolom dan baloknya.

Selain itu untuk pendirian pabrik Dinas PUPR Kota Padang akan mendatangkan tenaga ahli yang terdiri dari akademisi. Tenaga ahli tersebut juga terdiri dari beberapa bagian yakni bagian bawah dan atas. "Dari hasil kajian tenaga ahli tersebut, Dinas PUPR akan menyarankan kepada pemilik dalam mendirikan bangunan, agar lebih tahan gempa," ucapnya.

Tri menjelaskan pembangunan gedung pemerintah sudah ada upaya memaksimalkan agar tanah gempa. Salah satu contohnya gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.

"Gedung pemerintah jelas, salah satunya gedung DPRD Kota Padang yang masih dalam tahap pembangunan sudah kami terapkan mekanisme tersebut," ujarnya.

Selain itu Pemko Padang juga melakukan antisipasi dengan mengatur ketinggian sebuah bangunan yang akan berdiri. Hal itu bergantung kepada kawasan dan zonanya. Contohnya kawasan rawan tsunami direkomendasi untuk mendirikan shelter di bagian atas.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030 Kota Padang. (*)

14

Ambisi Pembangunan Wisata Ulakan Tapakis Usir Warga dari Rumahnya Tanpa Ganti Rugi Bertahun- tahun

Oleh: Muhammad Afdal Afrianto



Puing-puing bangunan di pinggir jalan aspal Pasar Raba'a Ulakan Tapakis masih terlihat. Rerumputan liar tumbuh di sela-selanya. Bagi orang-orang lama setempat ada ingatan yang melayang dan menguap dari batu-batu itu. Itu adalah puing-puing rumah toko lama dan salah satu pemiliknya adalah Kartini.

Perempuan 46 tahun ini kini hidup bersama anaknya. Suaminya sudah pergi menikah lagi. Dia harus puas dengan nasibnya sekarang.

Suhu panas siang Oktober lalu, saya duduk di rumah Kartini yang berada di pesisir pantai kawasan administrasi Padang Pariaman. Tak ada pendingin udara di rumah itu. Angin masuk dari pintu dan sela-sela jendela yang tertutup seng.

Perempuan berkulit cokelat itu berurai air mata mengenang rumah yang warisan amak atau ibunya itu. Mimpi dan kenangan juga harus pupus dari bentuk gagah ruko hingga kini rata jadi tanah dan sudah penuh rumput liar.

Sepetak warisan ingatan berbentuk ruko itu digusur oleh ambisi pengembangan kawasan wisata religi yang dicanangkan di kawasan makam Syekh Burhanuddin, tepatnya di Pasar Balai Rabaa, Nagari Manggopoh Palak

Gadang Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman. Tepatnya oleh sekumpulan orang *cadiak pandai* (orang yang ditinggikan) setempat.

Kawasan religi yang dicanangkan itu lebih kurang 1 hektar. Dalam 1 hektar itu, ruko Kartini dan empat ruko warga yang lainnya juga kena imbas dari mega proyek yang sekarang mangkrak itu.

Dengan suara yang kian melemah, diikuti ritme nafas yang susah diatur, Kartini terus mengingat ruko tempat ia dan tujuh orang kakaknya besar telah lenyap. Ruko itu menurut Kartini juga sudah beberapa kali ia pugarkan untuk bisa dia dan dua anaknya nyaman dalam beristirahat sekaligus mengais rezeki di sana. Namun seiring berjalannya waktu, petaka itu muncul.

Awal Mula Kabar Buruk

Saat Kartini berada di Bengkulu, dan kedua orang anaknya memutuskan merantau ke Jakarta, Sebuah nomor yang tak dikenal menghubunginya beberapa kali. Saat dia angkat, orang dalam sambungan telepon itu mengatakan rumah tempat dia mengais rezeki dalam waktu dekat akan dirobohkan. Keputusan itu berkaitan dengan hasil rapat

rancangan pelebaran kawasan religi di Ulakan. Namun dalam rapat itu, Kartini mengaku tidak diberi tahu sama sekali.

Hatinya gundah dan memutuskan pergi kembali ke kampung dengan niat tak ingin melepas rumah atau ruko itu. Sebab dalam hidupnya hanya itu tempat tinggal dan tempat dia mengais rezeki.

“Dihati hanya satu, jangan sampai ruko itu roboh. Karena kenangan saya dan anak saya kecil ada disana. Jadi saya berjuang untuk cepat sampai dari Bengkulu, untuk menemui mereka agar membatalkan rencana itu. Tapi dia tidak mau, dan hanya mengasih janji untuk diganti dengan rumah yang baru,” Katanya.

Kabar rukonya akan diruntuhkan saat itu, Kartini memutuskan tidak memberitahu kedua orang anaknya. Dia terus mengusap air mata, dengan sekali-sekali menatap ke atas seng rumahnya yang telah keropos dengan nada suara yang samar-samar.

Alasan kuat Kartini tidak memberitahu anaknya karena itu akan menakutkan jiwa dan beban pikiran anaknya. Kartini takut mereka akan terguncang di pulau seberang. Namun saat hari eksekusi tiba, satu alat ekskavator yang didatangkan

untuk merobohkan lima ruko yang telah disulap menjadi rumah itu. Banyak masyarakat setempat melakukan siaran langsung melalui kanal media sosial Facebook. Siaran langsung ini berseliweran di beberapa grup rantau yang diikuti oleh kedua orang anaknya, sehingga kedua anaknya mengetahui kabar tersebut.

Anaknya Terkejut Bukan Kepalang Hingga Sakit

Satu hari setelah eksekusi itu anak Kartini yang bernama Nia (25) jatuh sakit karena memikirkan rumahnya telah rata dengan tanah. Dan Nia saat itu terus memikirkan, dimana keluarganya akan tinggal lagi. Tempat satu pekan usai kejadian Nia memutuskan pulang ke Ulakan dengan kondisi kesehatan yang terus menurun. Saat pulang itu, Nia dan Kartini berulang kali masuk ke rumah sakit dampak pikiran dan jiwa yang terguncang usai rumah tempat dia mengais rezeki sudah rata dengan tanah. Nia pada akhir tahun 2019 lalu juga diagnosis dokter mengalami sakit katup jantung.

“Usai rumah roboh, Nia terus sakit. beberapa kali Nia dirawat disana. Sampai saat ini anak bungsu saya ini mengalami sakit katup jantung. Sebelumnya dia tidak ada riwayat sakit itu.

Kalau dia memikirkan rumah kembali, pasti kesehatannya menurun,” ungkap Kartini yang terus berlinang air mata.

Saat tempat tinggalnya sudah begitu, Kartini tidak tau arah lagi, mata pencaharian dan tempat dia beristirahat sudah tidak ada lagi. Kakak Kartini yang saat itu sudah membangun rumah yang jaraknya hanya tujuh menit berjalan dari ruko roboh itu, menyuruhnya mendiami rumah itu.

Saat Kartini menginjakkan kaki di rumah itu, rumah itu menurut Kartini tidak layak tinggal. Karena kakaknya juga belum pernah tinggal disana. Mulai dari pintu, jendela, lantai, kamar mandi belum ada. Namun Kartini saat itu tidak ambil pusing, ia memanfaatkan pintu, jendela dari ruko lama dia bisa digunakan di rumah kakaknya yang telah ia diami hampir 4 tahun belakangan ini.

“Untung kakak saya yang dirantau kasihan melihat adiknya tidak ada tempat tinggal lagi, lalu menyuruh saya untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Sampai bantuan yang dijanjikan ke kami siap. Walau rumah itu seadanya, tapi sudah sangat membantu kami bisa bertahan selama ini,”ungkapnya.

Rumah yang ditinggalkan Kartini saat ini juga sudah mulai diperbaiki, mulai dipasang pintu, teralis besi, sampai lantainya dikeramik berkat bantuan sanak famili Kartini yang di rantau.

Surat Perjanjian Ganti Rugi Tak Berguna



Figure 3 Surat Perjanjian yang didapat Kartini/roehanaproject/M Afdal Afrianto

Berbekal surat seperti piagam atau perjanjian ganti rugi dari pemerintah nagari yang ditandatangani oleh Wali Korong, Kapalo Mudo, Alim Ulama, Bamus, dan dibasahi tanda tangan materai 6000 oleh Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, Kartini optimis akan ada ganti rugi.

Bayangannya merujuk ke rumah siap huni seperti janji para petinggi kampung. Namun hingga kini rumah yang dijanjikan pada Kartini tidak kunjung ada, tanah sebelumnya yang direncanakan akan dibangun rumah Kartini juga tidak kunjung dibeli oleh perangkat daerah setempat. Saat itu Kartini juga sudah mulai curiga, tentang adanya permasalahan dalam janji itu.

Sebelumnya perangkat Nagari beserta Korong Keramat Jaya hanya mengganti rugi dua rumah dari lima yang telah mereka robohkan. Menurut Kartini, penggantian ini diberikan pada rumah yang selama ini memang dihuni, ketiga ruko lainnya sebelumnya sering kosong karena pemiliknya sering merantau keluar daerah. Sedangkan ruko Kartini dan Aciak Zakir selalu diisi.

Saat memasuki satu tahun usai eksekusi ruko itu, Kartini mencoba menanyakan kabar rumah yang dijanjikan padanya,

namun jawaban dari pada *cadiak pandai* itu menyuruh Kartini menanyakan pada perangkat nagari yang lain. Di tengah suasana hati yang masih sedih, Kartini terus mengusap air mata yang mengalir di pipinya, menurut Kartini dia sudah menemui semua *cadiak pandai* yang menjanjikan rumah padanya, namun semuanya tidak memberikan jawaban seperti yang diinginkan Kartini.

“Saya seolah-olah kayak bola dibuat orang itu. Suruh tanya sini-situ. Tapi sama saja, tidak ada jawaban yang mereka berikan,” bebernya.

Kartini Tak Sendiri

Sama dengan Kartini, ahli waris Aciak Zakir, Zul (43) menyebut dia mendapatkan mandat dari mertuanya untuk menanyakan kabar rumah pengganti yang dijanjikan perangkat nagari pada mereka, namun jawaban dari mereka tidak kunjung didapatkan Zul. Diketahui Aciak Zakir usai rumahnya kena relokasi mengalami penurunan kesehatan dan beberapa tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Usai ruko aciak Zakir rata dengan tanah, Zul dan istri memutuskan membangun rumah ditanah yang sebelumnya mereka beli. Di Rumah baru itu juga, Zul menyebut mertuanya

menghembuskan nafas terakhir. Saat ini, Zul menyebut masih menunggu jawaban dari perangkat nagari apakah rumah yang dijanjikan pada mertuanya akan diganti atau tidak.



“Saya karena sebagai menantu hanya menanyakan kabar, apakah akan diganti atau tidak. Kalau tidak, bisa saya jelaskan sama istri. Tugas ahli waris hanya itu, memperjuangkan apa yang diminta oleh mertua saya,”ungkap Zul.

Sebelum meninggal dunia, menurut Zul ayahnya yang bernama Aciak Zakir juga sudah menemui beberapa orang yang menjanjikan mereka rumah. Namun menurutnya para cadiak pandai itu meminta Aciak Zakir untuk bersabar menunggu rumah itu. Zul ayah dua orang anak itu,

menurutnya satu tahun lalu juga sudah kembali menanyakan kabar perkembangan penggantian rumah mertuanya itu pada Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan. Namun ia menyebut Wali Nagari mengungkapkan pengembangan pembangunan kawasan religi di Ulakan dibatalkan. Pembatalan itu karena tidak ada uang yang sebelumnya akan diberikan pemerintah untuk perkembangan kawasan religi itu.

“Kabar yang saya peroleh terbaru dari wali nagari, tidak jadi perkembangan makam Syekh Burhanuddin. Karena uang tidak ada,” jelas Zul.

Mendengar kabar dari Wali Nagari itu, Zul mengaku meminta surat pada Wali Nagari untuk menjelaskan tidak jadinya pengganti rumah yang sebelumnya dijanjikan pada Aciak Zakir. Namun menurut Zul, Wali Nagari tidak mau mengeluarkan surat tersebut.

Matinya Mata Pencaharian Usai Relokasi



Kartini sebelum rukonya hancur, mengaku hidup dari penghasilan berjualan di kawasan Pasar Balai Rabaa. Di ruko itu, Kartini biasanya berjualan sarapan pagi sampai minuman. Usai tidak adanya tempat ia berjualan, Kartini mengaku kesulitan secara finansial.

“Selama puluhan tahun, saya hidup berjualan disana. Apapun yang saya buat, biasanya laku. Namun usai tidak adanya ruko itu, memang tidak ada lagi penghasilan saya,” Kata Kartini.

Selama empat tahun kebelakangan ini, Kartini mengaku hidup dari penghasilan ia merajut peci. Dari peci itu, menurut Kartini ia bisa menyambung hidup bersama Nia walau uang yang ia peroleh tidak sebanding dengan berjualan sebelumnya.

“Peci itu bikinnya lama, untuk penghasilan tidak terlalu banyak. Tidak sebanding dengan penghasilan sebelum berjualan,” jelasnya.

Selain membuat Peci, Kartini mengaku juga sudah mencoba kembali berjualan Pasar Balai Rabaa, namun menurutnya tetap tidak laku. Karena menurutnya masyarakat banyak tidak mengetahui lokasi ia berjualan pada saat itu.

“Sudah dua kali basapa saya jualan, namun memang tidak laku. Karena langganan saya tidak tahu lagi lokasi saya jualan. Memang hancur ekonomi saya sejak tidak ada ruko itu,” ungkapnya.

Sama dengan Kartini, Zul menyebut dulu ia berjualan ikan di ruko mertuanya. Sejak relokasi yang dilakukan di kawasan makam Syekh Burhanuddin dia tidak dapat lagi berjualan ikan. Penghasilan dia sebagai pedagang ikan tidak ada lagi.

“Biasanya saya jualan ikan, namun usai tidak adanya ruko itu, saya tidak ada lagi jualan,” jelasnya.

Selama empat tahun kebelakangan ini, Zul mengaku beralih profesi sebagai tukang rumah. Dari tukang ini, Zul bisa kembali menghidupi istri dan dua orang anaknya. Namun menurutnya gaji sebagai tukang tidak tetap.

“Kadang kerja, kadang tidak. Kadang kerjanya 5 hari dan di rumah juga 6 hari. Tidak tetap penghasilan saya sebagai tukang,”ungkapnya.

Zul mengaku lebih nyaman bekerja sebagai pedagang ikan, daripada ia menjadi tukang rumah seperti yang dia geluti saat ini.

“Lebih nyaman berjualan ikan, penghasilan tetap. Tukang ini tidak tetap,” tutur Zul.

Kartini dan Zul berharap kedepan ada secuil harapan bagi mereka berdua agar memperoleh ganti rugi yang dijanjikan sebelumnya. Walau profesi yang dia geluti dulu tidak bisa kembali lagi.

Tanah Ulayat Sampai Batalnya Rencana Pembangunan

Uwin salah seorang warga di sekitaran makam Syekh Burhanuddin menuturkan, area dan rumah yang saat ini menjadi rumah tinggal masyarakat sekitar Korong Keramat Jaya tidak memiliki sertifikat tanah. Menurutnya tanah tersebut murni tanah ulayat.

"Iya memang tanah Ulayat, tapi mereka semua sudah sangat lama tinggal disana. Sudah banyak keturunan mereka lahir di situ," katanya.

Walau disana tanah ulayat menurutnya pemerintah tidak bisa asal gusur masyarakat yang telah mendiami lokasi itu. Dia mengatakan pemerintah janji merelokasi masyarakat yang telah disediakan namun hal tersebut tak kunjung jadi.

Kabar tanah di area itu tidak memiliki sertifikat tanah juga dibenarkan oleh Kartini dan Zul. Namun rumah mereka yang masuk pelaksanaan relokasi yang tak selesai itu.

Dalih Perangkat Pemerintahan Nagari

Roehana Project menemui Wali Nagari Manggopoh Parak Gadang Syofyan usai salat zuhur di teras Masjid Agung Syekh

Burhanuddin. Dia mengatakan perangkat Nagari dan Pemda Padang Pariaman sebelumnya ingin mengembangkan makam Syekh Burhanuddin menjadi kawasan religi.

Dalam pengembangan kawasan religi itu ada rencana perbaikan tata letak. Termasuk rumah masyarakat sekitar yang kemudian akan ada relokasi atau pemindahan ke tempat yang sudah disediakan. Dia mengatakan pemerintah pusat juga telah menyediakan dana sebesar Rp 140 Miliar, namun menurutnya dana tambahan dari kas makam dan Pemda Padang Pariaman tidak ada, sehingga rencana pengembangan makam dibatalkan.

“Uang untuk pengembangan (makam) dari pemerintah pusat ada. Kemarin itu ada dana sebesar Rp 140 miliar dari pemerintah pusat. Tapi uang kas surau habis dan uang dari Pemda juga tidak ada. Sehingga uang negara kembali, karena tidak jadi dipakai,” katanya mengungkapkan.

Menurut Syofyan uang yang akan diberikan pemerintah pusat untuk pengembangan makam Syekh Burhanuddin masih kurang, sehingga menurutnya masih membutuhkan tambahan uang lain baik dari kas sampai Pemda Padang Pariaman. Uang tambahan itu kata Syofyan akan digunakan

dalam membeli tanah untuk memindahkan semua warga yang terdampak relokasi.

“Uang yang akan diberi pemerintah pusat itu hanya bisa pengembangan secara fisik, namun untuk pemindahan warga sebanyak 100 KK tidak ada. Selain warga juga ada pemindahan ruangan sekolah SD sampai kantor wali nagari. Sedangkan tanah yang akan dibeli juga sudah ada kami sedikan, namun uang tidak cukup,”kata Syofyan.

Sedangkan area yang sebelumnya akan terdampak relokasi, menurut Syofyan dimulai dari jembatan Masjid Agung sampai di Pasar Balai Rabaa. Mengenai pengembangan makam ini, menurutnya dia masih menjalin komunikasi dengan Pemda Padang Pariaman agar relokasi ini kembali akan berjalan.

Terkait lima rumah yang dirobohkan saat pengembangan makam ini, Syofyan membenarkan. Menurutnya bangunan-bangunan itu sebelumnya adalah pasar yang lama kelamaan dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat setempat.

"Itu dulu adalah pasar, namun lama-kelamaan dijadikan rumah. Sedangkan tanah mereka itu adalah tanah ulayat tanpa ada sedikitpun surat. Jadi karena ada rencana pengembangan makam, maka dimulai dari perobohan lokasi itu dulu," bebernya.

Sebelumnya, menurutnya perangkat Nagari juga telah menyediakan lokasi baru untuk 5 KK masyarakat yang terdampak relokasi untuk berjualan kembali. Namun menurutnya masyarakat tersebut tidak mau menempati lokasi itu.

Terkait nasib pengantian 5 ruko yang telah roboh, Syofyan hening. (*)

15

Kegetiran PKL Pantai Padang: Terapung Kepapaan, Terdesak Ombak Kebijakan

Oleh: Lisa Septri Melina
Editor: Yose Hendra



*Figure 4*Lismarita (45), salah seorang PKL yang di relokasi di Pantai (Purus) Padang sedang melipat payung yang sebelumnya sudah terpasang rapi, karena mendapatkan informasi bahwa petugas keamanan (Satpol PP) akan datana. Minaau. (22/10/2023) sore. Foto:

Sang surya masih memantikkan terik tatkala berarak menuju ke peraduan. Terik yang begitu menyengat terasa betul di Pantai Padang, Minggu (22/10/2023). Sehingga para pedagang kecil yang menggalas di Pusat Kuliner Pantai Padang pun mengembangkan payung untuk memastikan kenyamanan pengunjung.

Tak berselang lama, payung-payung yang dibuka beberapa pedagang, buru-buru dipasang kembali. Padahal, di sampingnya ada pembeli yang sedang menyantap makanan. Bongkar pasang ini terpantau dua kali, ketika *langgam.id* berada di sana kurang lebih dalam waktu 30 menit.

Salah seorang Pedagang Kaki Lima (PKL) Lismarita (45), mengatakan, payung yang sudah dipasang terpaksa ditarik dan dilipat kembali, lantaran mendapat kabar bahwa petugas akan datang. Yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja ((Satpol PP) yang selalu bersiaga untuk penertiban aktivitas berdagang di Pantai Padang.

"Payung ini dibuka karena ada info petugas akan datang. Pembeli senang pakai payung agar terhindar dari panas, tetapi di bibir pantai tidak boleh dipasang payung sama sekali," tuturnya.

Sejak berjualan diharuskan di Pusat Pasar Kuliner, omset yang didapatkan Lismarita terjun bebas dibanding saat berdagang di dekat Tugu IORA (Indian Ocean Rim Association). Sabtu-Minggu, seyogianya menjadi hari yang dinanti, hari yang mendatangkan rezeki berlebih seiring ramainya orang-orang ke pantai Padang.

Namun, apa dikata, di lokasi berjualan baru ini, pendatapan pada Sabtu dan Minggu begitu landai, tak ubahnya hari biasa saat berjualan di Tugu IORA. "Sore ini sudah Rp125.000 yang terkumpul, namun ada beberapa pembeli yang belum membayar. Hari-hari biasanya 150 sudah susah didapat. Itu belum lagi dikeluarkan modal," katanya.

"Uang untuk membeli alat-alat jualan hari besok dicarikan hari ini," sebutnya lagi.

Lismarita mengingat kembali pendapatan saat berjualan di Tugu IORA. Kalau di dekat Tugu IORA, jelasnya, hari Minggu itu sampai Rp900.000, dan hari-hari biasanya bisa Rp500.000. "Tetapi itu belum dikeluarkan modal. Sejak di sini pendapatan jauh menurun," tukasnya.

Minggu cerah itu, dari pintu masuk Pusat Kuliner Padang, lapak-lapak PKL terlihat lebih banyak dari sebelumnya, terlihat juga kursi serta warna-warni payung PKL sudah berada di bibir pantai, tepatnya di depan di lokasi itu.

Pusat Kuliner Padang itu terletak di sebelah Jembatan Muaro Lasak atau persisnya di parkiran Panggung Pantai Purus. Lokasi ini berjarak 300 meter dari Tugu IORA, lokasi jualan Lismarita sebelumnya.



Pusat Kuliner Padang adalah solusi dari polemik PKL di Pantai Padang (Taplau-- Tepian Laut) terutama di Pantai Purus. Pedagang yang berjualan di bibir pantai direlokasi ke Pusat Kuliner Padang sejak bulan September lalu.

Pantai Padang merupakan salah satu objek wisata favorit di Kota Padang. Sehingga Pemko Padang melakukan penataan dan penertiban di kawasan Pantai Padang.

Kebijakan ini kemudian , memastikan tidak ada lagi tenda ceper yang berjejeran di sepanjang bibir pantai, sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan pantai dengan leluasa.

Wali Kota Padang Hendri Septa menjelaskan, Pemko Padang telah melakukan penataan Pantai Padang sejak September lalu dengan merelokasi para pedagang ke lokasi baru"Alhamdulillah, Pantai Padang yang tadinya agak semrawut sekarang sudah mulai tertata," ucap Hendri Septa, sebagaimana dicuplik dari *InfoPublik Padang*.

Menurutnya, penataan Pantai Padang merupakan langkah positif yang dilakukan Pemko Padang. Hal ini menunjukkan komitmen Pemko Padang untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Kota Padang.

Pasca relokasi PKL ke pusat kuliner Pantai Padang di samping Panggung Pantai Purus, Pemerintah Kota Padang kini berupaya meramaikan.

Hendri Septa mengatakan untuk meramaikan lokasi relokasi, Aparatur Sipil Negeri (ASN) Pemko Padang diharuskan berbelanja di sana.

"Kebijakan ini upaya pemerintah untuk meramaikan Pusat Kuliner Pantai Padang," kata Hendri Septa.

Hendri Septa memperkirakan dengan ramainya ASN berbelanja di sana, seiring berjalan waktu diharapkan dapat diikuti masyarakat.

Teriakan Tolak Relokasi

"Tolak!!! Relokasi Pantai Padang, PKL Butuh Makan, Perempuan PKL Pantai Padang Butuh Hidup, Walikota

Padang Ciptakan Pantai Padang yang Indah dan Manusiawi," begitulah tulisan di spanduk aksi unjuk rasa PKL Pantai Padang beberapa waktu lalu di depan Tugu IORA. Umumnya, aksi tersebut didominasi kaum perempuan.

Kalimat itu hanyalah sekian dari beberapa spanduk yang mereka bawa pada aksi unjuk rasa tersebut. Tulisan itu



menegaskan mereka menolak relokasi yang disediakan pemerintah Kota Padang, karena tempat yang disediakan dianggap tak strategis.

Foto: Ist

Namun, aksi itu hanyalah sebatas aksi. Faktanya, keputusan pemerintah tidak dapat diganggu gugat, dengan tetap menyetok palu relokasi. Aturan tentang relokasi itu disandarkan Pemerintah Kota Padang pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kini, relokasi itupun akhirnya berlangsung dengan menawarkan konsep yang dinamakan Pasar Kuliner Pantai Padang. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang awalnya digunakan untuk parkir kendaraan bermotor wisatawan di samping Panggung Pantai Purus. Luasnya sekitar 3.600 meter. Di sanalah kurang lebih 100 PKL dikumpulkan untuk menjual dagangan mereka.

Umumnya dagangan mereka hampir sama, mulai dari kerupuk mie kuah, pop mie, kelapa muda hingga *langkitang cucuik*. Sebelumnya, mereka pun berjualan di bibir pantai dekat Tugu IORA.

Saling Rebutan Pembeli; Pendapatan Rendah, Hidup Semakin Getir

Rabu, 18 Oktober 2023 siang, kabut asap menyelimuti langit Padang. Para PKL yang berjualan di Pasar Kuliner Padang masih banyak bermenung, ketimbang sibuk melayani pembeli. Pembeli yang mengisi kursi-kursi yang disediakan pedagang masih bisa dihitung dengan jari. Sesekali mereka menyapa sembari menawarkan dangangan mereka dengan ramah.

'Duduklah! Ayia ado, langkitang ado (duduklah. air ada, lengkitang ada),' ujar mereka kepada pengunjung Pantai Purus yang lewat.

Salah satu pedagang Pantai Padang, Novi (43), dirinya tidak mengira serta tidak bisa menerima keputusan relokasi tersebut. Tetapi karena tidak ada pilihan lain, ia terpaksa berjualan di tempat relokasi yang disediakan itu. Ia sudah tak ingat lagi berapa kali pengusuran oleh aparat terjadi selama berjualan di Pantai Padang di dekat Tugu IORA.

“Kali ini paling parah, kami harus berjualan di tempat relokasi ini. Kadang hanya bawa uang Rp50.000 dalam sehari setelah dikeluarkan modal,” tuturnya kepada *langgam.id*, Selasa, (18/10/2023) siang.

Untungnya, lapak Novi berada di dekat pintu masuk pasar kuliner, tak begitu banyak kursi yang terpajang, begitu juga dengan dagangannya yang diletakkannya di dalam gerobak persegi panjang. Sejak pindah sekitar 20 hari yang lalu, pendapatannya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Kita berjualan berharap mencari untung malah berujung buntung. Di siko indak mangaleh wak disuruahnyo, jadi pajangan wak deknyo (di sini tidak berjualan pasnya, lebih jadi pajangan saja),” ujarnya.

Tidak hanya soal pendapatan yang rendah, dirinya juga mengaku harus merasakan perkelahian dan emosi antara pedagang di pagi hari terkait masalah tempat. Pangkalnya, kata Novi, aturan yang tidak jelas, hingga berebut pembeli yang datang.

“Tadi pagi antara sesama pedagang sudah adu mulut terkait peletakan kursi. Tempat untuk satu orang itu hanya dua meter, itu terlalu sempit,” tuturnya.



Suasana berjualan para PKL di tempat relokasi, parkir Panggung Pantai Purus, Minggu (22/10/2023). Foto: Lisa Septri Melina/Langgam.id

“Sebagian pedagang sudah ada yang tidak berjualan karena tidak ada tempat untuk meletakkan kursi, mereka berjualan hanya Sabtu dan Minggu saja. Jika bisa, kami ingin kembali lagi sana,” dia menambahkan.

Katanya, berjualan di Pantai Padang adalah satu-satunya mata pencariannya untuk menghidupi empat orang anaknya. Yang satunya duduk di bangku SMA, SMP, SLB dan satu lagi tidak menempuh pendidikan.

“Penghasilan yang kami dapat di sini tidak untuk mencari kaya, tetapi untuk mencukupi biaya sekolah anak, sewa kontrakan dan makan sehari-hari,” sebutnya.

Novi merupakan warga asli Pantai Purus yang memilih mengontrak di Siteba, Kecamatan Nanggalo. Hal itu dilakukannya karena rumah yang dihuninya di Pantai Puruh adalah milik orang tuanya dan tidak bisa ditempati bersama empat orang anaknya.

Ia menghidupi empat orang anaknya dari pencarian yang bergantung kepada pendapatan berjualan sehari-hari di Pantai Padang.

“Tambah lagi suami tidak ada, kontrakan Rp650.000 satu bulan, belum lagi listrik dan air. Uang sekolah anak, satu di SLB. Sajak berjualan di sini saya stres, tidak terlihat penghasilan sama sekali, malah setiap hari menambah hutang untuk keperluan sekolah anak,” katanya.

Kendati demikian, ia tidak punya pilihan lain selain bertahan karena modal untuk membuka usaha baru

tidak ada. Pekerjaan lain juga tidak ada yang menerimanya.

“Kalau tidak di sini dimana lagi? Cari tempat di luar semua berbayar dan itu membutuhkan modal. Sedangkan sekarang uang untuk makan saja susah,” ujarnya.

Lanjutnya, seminggu lagi adalah jatuh tempo untuk membayar kontrakan, tetapi hingga kini belum ada tanda-tanda uangnya dari mana. Biasanya jika berjualan di tempat semula, Novi mengaku menjelang satu minggu uang untuk bayar kontrakan rumah sudah terkumpul. “Sekarang belum tampak lagi dari mana uang untuk bayar kontrakan itu,” tuturnya.

Dia mengutarakan, pengeluaran yang wajib sehari-sehari ketika berdagang mulai dari uang ronda Rp.10.000 untuk pengamanan barang-barang yang ditinggalkan pada malam hari, sampah Rp5.000 serta lampu Rp5.000.

"Barang-barang kita tinggalkan di sini, ada yang menjaganya, kita tinggal bayar barang aman. Setidaknya ada 130 pedagang di lokasi yang sempit ini dan sudah banyak yang tidak berjualan," sebutnya.

Hal yang sama juga dirasakan pedagang lainnya, Lismarita (45). Ia mengatakan, ketika berjualan di dekat Tugu IORA banyak pembeli, namun selama di tempat relokasi pendapatan jauh merosot. Ditambah lagi, aturan untuk posisi pedagang berjualan dibagi dengan cara cabut lot. Mekanisme untung-untungan ini, ia mendapatkan nomor urut 44 dan berada di bagian paling belakang dari pintu masuk.

"Saya dapat tempat paling ujung dari belakang, jarang pembeli yang sampai ke sini. Saya buka jam 08.00 WIB, kadang siap Magrib sudah pulang karena tidak ada pembeli," katanya.

Imbas dari relokasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang, ia mengaku terlilit hutang hingga tidak mampu membayar tunggakan motor yang sudah menunggak selama tiga bulan. Ia juga mengatakan, di tempat

relokasi ini juga sering berkelahi sesama pedagang terkait tempat meletakkan kursi hingga pelanggan yang datang.

"Pendapatan di sini rendah sekali, belum lagi hutang yang akan dibayar sekali seminggu Rp.150.000, motor Rp1.000.000 setiap bulan serta biaya sekolah anak untuk 3 orang. Kadang pendapatan hanya Rp100.000 sehari," tuturnya.

"Anak saya yang kecil sekarang di SD, yang dua lagi di SMK. Semuanya butuh biaya, tapi mata pencarian kita dirampas. Uang sekolah anak saja sekarang sudah menunggak," sebutnya.

Sementara itu, penghasilan suaminya juga tidak berketetapan usai berhenti bekerja sebagai sopir sejak pandemi Covid-19. "Bisa dikatakan kami berlima beranak menggantungkan hidup dari berjualan ini. Namun sejak di relokasi ini pendapatan tidak mencukupi," katanya.

"Mau pindah juga tidak ada tempat, di sini bertahan juga tidak menguntungkan. Mau kembali ke lokasi awal juga dikejar-kejar aparat," sebutnya sembari tak kuasa menahan tanggis.

Lismarita mengaku, di depan anak-anaknya ia selalu terlihat ceria dan tidak mellihatkan kesedihan sama sekali dengan tujuan pendidikan anak-anaknya tidak terganggu. "Kalau mereka tahu Ibuk (saya) tidak ada uang, mereka sering bilang berhenti saja kami sekolah. Saya tidak ingin itu terjadi, saya ingin mereka dapat menempuh pendidikan seperti anak-anak yang lainnya," katanya yang juga tinggal di rumah kontrakan di Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tanggah.

"Kontrakan Rp3.000.000 setahun, tetapi kalau sudah hujan air masuk. Penghasilan di sini sehari tidak sampai Rp200.000," ujarnya lagi.

Lanjutnya, jika tidak mencukupi dirinya meminjam uang kepada adiknya hingga tetangga untuk kebutuhan sekolah anaknya tetapi itu juga tidak selalu berhasil.

"Kadang pinjam Rp100.000 saya sudah dikatai-katai dengan kata- kata yang menyakitkan hati," ujarnya.

"Kami dipindahkan ke sini dengan iming-iming akan ditata dan diberikan tempat yang bagus. Tetapi lihatkan sekarang, hanya seperti ini," tukasnya.

Awal Mula Perseteruan Pemko dan PKL

"Berdasarkan data kita, dari Tugu IORA hingga ke Lapau Panjang Cimpago (LPC) setidaknya ada 84 pedagang," kata Staf bidang Litbang LBH Padang, Alfi Syukri, Sabtu, (21/10/2023).

Ia mengatakan, perseteruan antara Pemko Padang dan PKL sebenarnya sudah lama terjadi. Namun yang mengerikan itu penertiban pada saat momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia. Di mana waktu itu diwarnai keributan lempar batu, dan pada saat itu kedua belah pihak saling melapor.

"Pada saat itu Pemko mengatakan tidak boleh berdagang di bibir pantai karena sudah disediakan LPC.

Lalu dilakukan penertiban dan akhirnya terjadilah keributan," katanya.

Sementara itu PKL di Pantai Padang terbagi ke dalam tiga kategori. Pertama ada yang diberikan LPC tetapi tidak mampu mengolahnya karena Covid-19, kedua PKL yang tidak pernah dapat LPC sama sekali, kemudian ada PKL yang baru datang. Dari 3 kelompok tersebut, PKL meminta Pemko memberikan ruang untuk berjualan di bibir pantai dekat Tugu IORA itu.

Namun di sana sering terjadi bentrok dan pihaknya dari LBH Padang mendampingi persoalan PKL tersebut ke Komnas HAM. Alhasil disepakati bahwa PKL dibolehkan berdagang dengan syarat jam 3 sore mulai mengangkut barang dan mulai berjualan pukul 4 sore, hingga tutup pada pukul 21.00 WIB.

"Itu aturan yang disepakati pada Agustus 2022," sebutnya.

Katanya, setelah itu baru-baru ini Pemko mengatakan akan melakukan penertiban dengan menggunakan tim gabungan.

Terkait hal itu, bilang Alfi, LBH membantu PKL untuk bertemu Pemko Padang. "Awalnya tidak digubris, kemudian Pemko mengadakan audiensi dengan pedagang namun perwakilan dari LBH tidak boleh masuk dan mendampingi mereka," jelasnya.

Ketika PKL beraudiensi dengan Pemko, menurut Alfi, Pemko tidak mendengarkan pendapat pedagang dan memutuskan merelokasi ke tempat sekarang. Para pedagang, sambung Alfi, menolak tempat relokasi tersebut karena ditempatkan di lahan yang semulanya adalah tempat parkir dan di sana juga sudah ada PKL yang berjualan.

Katanya, atas dasar itu mereka ingin kembali ke tempat semula. Hingga melakukan boikot jalan di depan Tugu IORA pada 21 September 2023. Namun Pemko tidak turun. Kemudian lanjut aksi di hari berikutnya sehingga terjadilah bentrok dengan aparat.

"Mereka meminta lagi untuk beraudiesi dengan Pemko, tetapi tidak diindahkan. Dan akhirnya malah ada

keputusan di relokasi dan tidak boleh berdagang di tempat semula," sebutnya.

Pemantauan yang dilakukan LBH Padang, pendapatan para PKL yang di relokasi itu menurun dan LBH Padang mencoba untuk membantu agar hak ekonomi mereka terpenuhi.

"Sangat disayangkan Pemko hanya melakukan penertiban tetapi tidak melakukan pemberdayaan. Padahal Perda Nomor 3 tahun 2014 sudah mengatur tentang pembangunan pariwisata dan juga terdapat penataan serta memberdayakan PKL," kata Alfi.

Aturan Akan Tetap Berjalan dan Tidak Dicabut

Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota Padang memastikan relokasi akan tetap berjalan dan aturan tidak akan dicabut. Relokasi itu bertujuan agar mereka berjualan dengan nyaman, karena di tempat sebelumnya adalah tempat yang ilegal.

"Aturan ini akan tetap berjalan, sembari kita melakukan pembenahan," kata Kepala Dinas Pariwisata, Kota Padang, Yudi Indra Sani, Sabtu, (21/10/2023).

Sebenarnya, dahulu PKL ini sudah kita relokasi ke LPC, akan tetapi karena Covid-19 dan faktor ekonomi yang menurun mereka kembali lagi berjualan di bibir pantai.

"Ini permasalahan baru lagi. Dan kita carikan solusinya lagi, akhirnya kita legalkan berjualan di tempat pusat kuliner sekarang. Di sana mereka bebas berjualan dari jam berapa saja," katanya.

Lanjutnya, Pemko Padang mengajak semua masyarakat untuk lebih tertib ketika berdagang dan sejauh ini respons wisatawan juga baik dengan adanya bibir pantai yang luas. "Sekarang tinggal lagi bagaimana pedagangnya menerima relokasi itu. Kita bukan mengusur, kita bukan membunuh, tapi merelokasi," katanya.

Terkait keluhan pedagang mulai dari lokasi yang disediakan sempit hingga tempat yang tidak strategis,

Yudi mengatakan, itu adalah persepsi mereka karena ingin pindah ke lokasi semula. Menurutnya, terkait pedapatan yang tidak seperti semula itu disebabkan karena harus beradaptasi terlebih dahulu.

"Maunya mereka berdagang di tempat biasa. Kalau mereka kembali ke tempat semula itu mengganggu hak-hak orang lain juga. Kurang apa lagi pemerintah, biasanya mereka berjualan di tempat yang ilegal, sekarang sudah kita legalkan tempat itu," sebutnya.

Lanjutnya, kendala di Pemko Padang untuk membenahi mereka adalah keengganan mereka untuk berada di lokasi relokasi yang telah disediakan. "Sudah berapa kali saya berkomunikasi dengan mereka, intinya mereka itu tidak mau pindah. Itu yang menjadi kendalanya kita saat ini," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kota Padang Raju Minropa mengatakan, dalam melakukan penertiban pihaknya tidak melakukannya dengan sendiri, namun

juga dibantu oleh TNI, Polri, Dishub serta Dinas Pariwisata yang diberi nama dengan Satgas Pam.

Katanya, tujuan dari menertibkan kawasan wisata Pantai Padang mulai dari Masjid Al-Hakim hingga ke Masjid Mujahidin untuk mengawasi pedagang berjualan di trotoar, penertiban lalu lintas, serta parkir yang rapi dengan tujuan terciptanya suasana pantai yang nyaman.

"Pedoman penertiban itu disandarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat," katanya, Sabtu (21/10/2023).



***Pelaksana
Tugas (Plt)
Kepala Satuan
Polisi (Satpol)
Pamong Praja
(PP) Kota
Padang Raju
Minropa***

Raju menegaskan, pihaknya selalu berusaha melakukan penertiban secara humanis kepada PKL. "Dua kali kejadian terakhir mereka tidak melawan dengan PKL. Bahkan pada saat penertiban 19 Oktober 2023 anggota kita dilarikan ke rumah sakit karena pedagang tidak mau ditertibkan sehingga mereka melempari petugas dengan kelapa, batu hingga kayu. Tiga orang dari personel Satpol PP dan satu lagi dari Dinas Pariwisata terluka," tandasnya.

Menang Jadi Abu, Kalah Jadi Arang

Sementara itu, pengamat sosial Virtuoso Setyaka mengatakan, apa yang terjadi di Pantai Padang terhadap penertiban PKL itu sama-sama tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. "Jika kebijakan tidak diambil dengan cara demokrasi dan tidak membuat semua pihak lega dengan kebijakan yang ditetapkan bisa dibilang menang jadi abu, kalah jadi arang," sebutnya.

Lanjutnya, pemerintah menang karena berhasil memindahkan ketempat relokasi saat ini, tetapi

sebenarnya mereka itu juga kalah karena citra mereka dimata publik menjadi buruk karena tidak bisa menyelesaikan masalah secara damai.

"Banyak terjadi bentrokan antara pedagang dan aparat. Itu sudah diketahui publik," kata Virtuous yang juga dosen Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Andalas itu.



Virtuous Setyaka

Virtuous menambahkan, untuk mencapai solusi yang baik, pemerintah seharusnya mengajak pedagang berdialog dengan mendengarkan apa yang mereka

inginkan. Jika masing-masing sudah saling mengetahui dan memahami keinginannya baru dicari solusinya secara bersama-sama.

"Kepentingan Pemko terpenuhi dan PKL juga terpenuhi. Ada dialog dan musyawarah, mestinya seperti itu," tuturnya.

Menurut Virtuoso lagi, jika memang pertemuan kedua pihak ini tidak memungkinkan maka bisa mencari mediator agar tidak menimbulkan konflik. Dengan begitu akan meminimalisir konflik yang menjadi kekerasan, seperti mengangkut dengan paksa lapak-lapak mereka.

"Dari keputusan itu kita bisa melihat bahwa PKL menjadi pihak yang dirugikan karena mereka pihak yang lebih lemah ketimbang Pemko Padang. Secara kekuasaan, Pemko Padang lebih kuat dari pada PKL," sebutnya.

Dialog Budaya Berkelanjutan Demi Industri Wisata

Salah satu wisatawan, Arin (21) mengatakan sebenarnya ada PKL di Pantai Padang itu tidak masalah, hanya saja

perlu aturan yang jelas serta tertata dengan rapi. "Kalau seperti sekarang ini pantai menjadi sepi," sebutnya.

Katanya, sebenarnya adanya PKL pantai tidak akan menjadi buruk asalkan kedua belah pihak antara pemerintah dan pedagang berada pada satu keputusan bersama, yang sama-sama menguntungkan.

"Adanya pedagang di pantai itu tidak buruk, asalkan ditata menjadi lebih rapi. Seperti ada batasan waktu berjualan misalnya, akan tetapi pedagangnya juga harus mau ditertibkan," tukasnya.



Lanskap Pantai Padang dengan nuansa jejeran PKL untuk kebutuhan para pelancong akan kuliner, Minggu (22/10/2023). Lisa Septri Melina/Langgam.id

Wakil Direktur Pusat Studi Pariwisata Universitas Andalas Donny Eros menilai akar persoalan ini mestinya dilihat dari sudut pandang kolaborasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan industri pariwisata Pantai Padang.

"Pantai perlu bersih dan indah, tapi pedagang diperlukan untuk mendukung kebutuhan pengunjung akan kuliner dan suvenir," ujar dosen Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas ini.

Eros mendorong solusinya berupa kesepakatan dan komitmen untuk membangun zonasi wilayah pengunjung, pedagang dan parkir dengan pendekatan dialog budaya berkelanjutan, bukan represif.

"Karena tujuan ekonomi pariwisata berkelanjutan adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di sekitar destinasi pariwisata tersebut," pungkasnya. (*)

16

Konflik Bidar Alam: Berharap Sepatu Mengkilat, Penjara yang Didapat Masyarakat

Oleh: Fachri Hamzah



Konflik Bidar Alam menjadi cermin kemerdekaan yang diperjuangkan saat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dahulu tidak benar-benar dirasakan. Hak warga atas ruang hidupnya terancam terus menerus bertahun-tahun.

“Matipun saya tidak akan takut, karena ini hak saya,” kata Apri Gamal.

Apri Gamal merupakan satu dari 300 masyarakat Bidar Alam, Solok Selatan yang tanahnya dimanfaatkan PT Ranah Andalas Plantation (RAP) untuk dijadikan perkebunan sawit pada 2005. Sudah puluhan tahun Gamal menanti tetapi janji perusahaan tidak kunjung direalisasikan.

Akhirnya Gamal bersama puluhan masyarakat melakukan perlawanan. Namun 2020 Gamal bersama 5 orang kawannya mendapatkan surat pemanggilan dari Polres Solok Selatan dengan tuduhan pencurian.

“Saya merasa tidak bersalah dengan apa yang saya lakukan, karena ini adalah saya,” katanya.

Suasana seketika hening, Gamal mengingat kembali perjuangannya dalam merebut tanahnya. Perusahaan sudah menguasainya sejak 2005. Seketika air mata Gamal tak bisa

dibendung. "Begitu mengharukan jika dikenang," kata Gamal sambil mengusap air mata.

Awalnya dia terbuai dengan rayuan perusahaan untuk mengelola tanahnya menjadi kebun kelapa sawit. Sebab ketika datang perusahaan membangun kerja sama dengan tokoh masyarakat dengan skema bagi hasil. Jika sudah panen perusahaan akan memberikan hasilnya sebesar 40 persen kepada masyarakat.

Perusahaan tak kunjung merealisasikan perjanjian tersebut sejak 2005 atau umur perusahaan masih empat tahun, Masyarakat Bidar Alam, kata Gamal sudah mulai bertanya-tanya. Sehingga ada perwakilan dari masyarakat menanyakan hal tersebut.

"Ambo kiro ka pakai sepatu bakilek se kalau maagiah tanah ka perusahaan. Kironyo kanai kicuah ambo," kata Gamal dalam bahasa Minangkabau. Artinya Gamal mengira akan mendapat sepatu berkilat jika memberikan tanah ke perusahaan, ternyata perusahaan mengicuh dirinya.

Beberapa kali Gamal sudah mencoba mempertanyakan haknya kepada perusahaan. Namun hasilnya nihil alias tidak ada hasil. Perusahaan terus berkilah dan mengumbar

janjinya. "Kami pernah beberapa kali menanyakan hak yang sesuai perjanjian, tapi tak kunjung ada hasil," tuturnya.

Sementara itu Zulkanaini alias Tanjak yang juga menjadi korban mengatakan pada 2014 perusahaan membuat kesepakatan lagi dengan masyarakat. Isi perjanjiannya adalah masyarakat memberikan waktu tenggat pembinaan kepada perusahaan untuk mengelola kebun sawitnya.

Dua tahun kemudian mereka membuat perjanjian lagi dengan perusahaan yaitu pembagian hasil 60 per 40. Namun hal tersebut tidak juga terealisasi dengan sebagaimana mestinya. Lalu perusahaan merealisasikan atas nama pinjaman masyarakat sebesar 100 sekali 3 bulan.

"Perjanjian ini sempat berjalan selama 8 bulan, kalau perusahaan masih ingkar, sebab pinjaman tersebut diberikan hanya sekali 5 bulan," katanya.

Akhirnya masyarakat tidak menerima hal demikian. Sebab perusahaan yang sudah berjalan 15 tahun lebih itu tidak kunjung memberikan labanya sesuai perjanjian. Masyarakat terus memprotes hal tersebut dan meminta kejelasan.

“Saya sebagai anggota tim 9 yang menjadi mediator antara perusahaan dan masyarakat, mencoba melaporkan keluhan masyarakat tersebut. Namun tidak ada respon perusahaan,” katanya.

LBH: Perusahaanlah yang Harusnya Diadili!

Koordinator Divisi Advokasi LBH Padang Diki Rafiqi memandang kasus yang terjadi di Bidar Alam Solok Selatan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Secara terus-menerus masyarakat dilanggar haknya dan tidak pernah dipulihkan. “Ini tentu perlu pemulihan hak masyarakat yang telah menderita puluhan tahun, karena izin dari pemerintah,” katanya.

Setelah hak masyarakat tidak kunjung diberikan. Masyarakat malah dikriminalisasi dengan tuduhan mencuri. Padahal masyarakat hanya memanen sawit di atas tanah mereka. “Ada 6 masyarakat Bidar Alam saat ini yang ditahan Polres Solok Selatan, kan lucu. Masyarakat hanya menuntut hak nya,” kata Diki.

Menurut Diki perusahaanlah yang harus diadili bukan masyarakat. Karena ada banyak pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat. Pertama perusahaan tidak menepati janji dengan masyarakat dengan skema bagi hasil 60 per 40 persen. "Tentunya ini merupakan wanprestasi dalam perdata. Dan ada indikasi penggelapan juga dari kerja sama ini dengan perusahaan,": katanya.

Lalu Perusahaan tidak melakukan pembangunan perkebunan dengan baik, merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. PT RAP sudah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, tetapi pelaksanaan IUP ini tidak pernah terlaksana, dengan beberapa persoalan seperti pembebasan tanah. Sehingga perusahaan harus mendapatkan SP3.

"Jika merujuk kepada Permentan pada pasal 48 ayat (4), perusahaan harusnya sudah dicabut IUPnya, tapi sampai saat ini belum ada. Sp 3 ini dikeluarkan disaat masa plt jasman Rizal transisi ke bupati terpilih sekarang Khairunnas, tapi setelah menjabat bupati tidak ada keberanian bupati untuk

mencabut. Oleh akibat itu masyarakat terabaikan dan di kriminalisasi. Sudah tepat menyatakan pemkab Solok Selatan melakukan pelanggaran HAM," katanya.

Kronologi Kasus Bidar Alam

PT RAP memulai pengambilalihan tanah masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit seluas \pm 4.000 Ha setelah mendapatkan izin lokasi dari Bupati Solok Selatan pada 2005. Pada tahun yang sama Bupati Solok Selatan memberikan izin lokasi seluas 14.600 hektar yang berada di dua kecamatan, Sangir Jujan dan Sangir Batang Hari.

Setahun kemudian, Bupati Solok Selatan mengeluarkan Surat Keputusan pada Februari 2006 tentang pemberian izin usaha perkebunan kepada PT. RAP.

Sehingga pada Mei 2006 PT RAP membuat Memorandum of Understanding (MOU) dengan masyarakat Nagari Bidar Alam dan PT. RAP. MOU ini mencakup pemberian tanah ulayat kaum kepada PT. RAP selama 30 tahun dengan pembagian hasil 40% untuk masyarakat dan 60% untuk perusahaan.

Pada Januari 2007, terjadi kesepakatan penyerahan lahan seluas 5.76 Ha kepada PT. RAP untuk kebun kelapa sawit. Maret 2007, perjanjian kerjasama antara PT. RAP dan masyarakat pemilik lahan yang diwakili oleh 13 orang Ninik Mamak, Pemangku Adat, dan Penguasa Tanah Ulayat kaum di Nagari Bidar Alam dibuat melalui notaris. Perjanjian ini tidak mencantumkan luas tanah yang diserahkan oleh masyarakat, hanya izin lokasi seluas 14.600 Ha.

Pada September 2009, PT. RAP sudah mulai panen, namun masyarakat menuntut pembagian hasil 40% yang tidak dipenuhi oleh PT. RAP. Mei 2011, Bupati Solok Selatan memberikan surat peringatan I kepada PT. RAP atas dugaan pelanggaran hak atas tanah.

Pada November 2011, Bupati memberikan surat peringatan II kepada PT. RAP atas dugaan pelanggaran hak atas tanah. Juli 2014, masyarakat melaporkan permasalahan ini kepada Komnas Perwakilan Sumatera Barat.

Desember 2014, kesepakatan terkait pembangunan kebun kelapa sawit dibuat antara PT. RAP dan masyarakat Nagari Bidar Alam yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Bupati Solok Selatan membentuk tim terpadu

penyelesaian permasalahan PT. RAP dengan masyarakat pada November 2016 dan Juli 2020.

Agustus 2020, Bupati Solok Selatan mengeluarkan surat permohonan sertifikat masyarakat yang menyatakan bahwa izin lokasi PT. RAP tidak berlaku lagi sejak Juli 2008. Oktober 2020, Bupati melarang panen sawit oleh PT. RAP dan pemilik lahan, tetapi PT. RAP tetap melanjutkan panen.

Oktober 2020, masyarakat dikirimkan surat klarifikasi terkait dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) di PT. RAP.

Pada 2023 sebanyak 6 orang masyarakat Bidar Alam ditahan di Polres Solok Selatan. Masyarakat ditahan atas tuduhan mencuri sawit di kawasan milik PT RAP. Data ini berdasarkan kronologi kasus LBH Padang. (*)

17

Menilik Konflik Agraria di Nagari Ibu Kota Republik

Oleh: Dharma Harisa
Editor: Yose Hendra



Ilustrasi konflik agraria di perkebunan sawit. Sumber: Al Bing

Mata pria tua itu jauh menengadah ke langit-langit atap rumahnya. Seakan terjatuh dalam bayang-bayang ingatan masa lalu, ia sering termenung kala mengingat cikal bakal peristiwa yang kini menjadi konflik di nagarinya. Datuak Payuang Putih (70) adalah pamuncak adat di Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujan, Kabupaten Solok Selatan.

Sebuah nagari damai yang pernah jadi basis perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 75 tahun yang lalu. Walau telah lewat lebih dari setengah abad, tampaknya saat ini nagari Bidar Alam masih bergejolak. Bukan dari serangan pasukan sekutu, melainkan menghadapi konflik dengan sebuah perusahaan.

PT Ranah Andalas Plantation (RAP), sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit pimpinan Haji Bakhrial, masuk ke Solok Selatan pada tahun 2005 lalu. Mereka kemudian menjajaki kerja sama

dengan banyak nagari di Solok Selatan, membangun kebun dan menanam kelapa sawit di Bidar Alam.

Sayang, pada tahun 2020 lalu, PT RAP melaporkan enam orang anak nagari Bidar Alam ke kepolisian atas dalil pencurian.

Datuk Payuang Putihah sangat menyesali adanya laporan tersebut. Ia hanya bisa menghembuskan nafas panjang, mengingat, enam orang anak kemenakan Bidar Alam itu mendekam di balik sel tahanan.

Segala peristiwa yang terjadi di Bidar Alam dalam 18 tahun terakhir katanya, tidak sesuai harapan masyarakat nagari di awal rencana pembangun perkebunan kelapa sawit.

Persisnya kata Datuak Payuang Putihah, semua bermula pada tahun 2004. Saat itu Kabupaten Solok Selatan baru akan berpisah dari wilayah administrasi Kabupaten Solok. Mulanya kata Inyiak (sapaan lain Datuak Payuang Putihah), belum banyak nagari di Solok Selatan yang menanam kelapa sawit.

Sungai Kunyik adalah salah satu nagari yang mula-mula menanam sawit. Berdasarkan penuturan Inyiak Payuang, sungai kunyik adalah nagari yang miskin. Masyarakatnya sebelum kehadiran sawit hanya bekerja sebagai penganyam Niru. Sebuah tampah atau wadah pembersih padi yang terbuat dari pohon bambu.

Kemudian pada tahun 90-an, sawit mulai ditanam di Sungai Kunyit. Dari hasil sawit, masyarakat Sungai Kunyik mendapat hasil yang cukup memuaskan. Mengubah nagari yang semula miskin itu menjadi tempat yang layak untuk berbuat dan mencari penghidupan.

"Dari situlah timbul keinginan anak kemenakan Bidar Alam untuk menanam sawit dan mencari investor," ucap Inyiak Payuang kepada Langgam.id saat bercerita di Jorong Batikan tempat kediamannya, Sabtu (09/09/2023).

Kebetulan saat itu ada urang sumando (menantu laki-laki) Bidar Alam yang bekerja di dinas kehutanan provinsi Sumatera Barat. Namanya Fauzi. Dialah kata

Inyik Payuang, yang membawa beberapa calon investor untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit di Bidar Alam. Tak elak, salah satunya adalah PT RAP yang kala itu dipimpin oleh Arkadius (kini anggota DPRD Sumbar).

"Iyo ka baniat ndak mendirikan PT kata Arkadius. Masyarakat berharap melihat perubahan," tuturnya. Seiring terjadinya pertemuan dan kesepakatan, akhirnya diambil kesepakatan dengan pola bagi hasil antara masyarakat Bidar Alam dan PT RAP. Bukan dengan skema inti-plasma yang juga biasa diterapkan dalam pola kerja sama pembangunan kebun kelapa sawit.

Pada saat ini belum tampak ada kejanggalan dari kerja sama yang dijajaki tersebut. Hanya saja untuk memudahkan perumusan nota perjanjian kerja sama dengan masyarakat, dari ratusan keluarga yang memiliki tanah garapan di Bidar Alam, dibentuk lah sebuah tim.

Inyik Payuang mengatakan awalnya tim itu di isi oleh tujuh (7) orang. Terdiri dari dua orang Niniak Mamak dari sepuluh suku yang ada di Bidar Alam, dua alim

ulama, dan tiga orang cadiak pandai. Kemudian ada tambahan dari pihak luar (pemerintah) dua orang. Jadilah tim sembilan (9) sebagai perumus nota kerja sama antara PT RAP dan masyarakat nagari Bidar Alam.

"Alasan pembentukan ini (tim 9 -red) karena PT ndak bisa langsung berhubungan dengan Niniak Mamak atau Kerapatan Adat Nagari karena itu hal adat," ucap Inyiak Payuang.

Lalu disepakati, keuntungan dari hasil penanaman sawit akan dibagi sebanyak 60% untuk PT dan 40% untuk masyarakat. Klausul perjanjian ini lah yang dikemudian hari akan menyebabkan konflik hingga pelaporan anak kemenakan nagari Bidar Alam ke kepolisian.

Sebelum membahas upaya yang disebut masyarakat Bidar Alam sebagai bentuk kriminalisasi petani oleh PT RAP ini, sebenarnya bagaimana lanskap peristiwa dari konflik panjang di tanah perjuangan PDRI tersebut?

Izin Lokasi, Perkebunan, dan MoU Pertama

Seperti ditulis di atas, PT RAP pada awalnya tidak hanya menjanging kerja sama dengan nagari Bidar Alam. Tetapi dengan beberapa nagari. Pada tanggal 29 Juli 2005, Penjabat (Pj) Bupati Solok Selatan Marzuki Onmar saat itu menandatangani surat keputusan bernomor 121/BUP-2005. Prihal Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Ranah Andalas Plantation.

Luas izin yang diberikan tak tanggung-tanggung. Yakni menghampar 14.600 hektar di enam nagari. Detailnya, 10.000 Hektar areal berstatus bebas di Nagari Lubuk Malako dan Bidar Alam di Kecamatan Sangir Jujan. Serta di Nagari Abai dan Dusun Tengah di Kecamatan Sangir Batang Hari.

4.600 hektar lainnya izin diberikan di areal bekas plasma karet PT. Perkebunan Nusantara VI di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Jujan.

Dengan catatan, perolehan tanah dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, keputusan izin lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam izin sebelum

tanah tersebut dibebaskan. Keputusan itu juga tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada di lokasi.

Berselang enam bulan, tepatnya pada 27 Februari 2006, Bupati Syahrizal mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT RAP di atas izin lokasi tersebut. PT RAP melalui keputusan itu berkewajiban melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 14.600 hektar paling lambat tahun keempat sejak IUP dikeluarkan.

PT RAP juga diharuskan mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna, dan berhasil guna.

Setelah mengantongi beberapa izin untuk melakukan usaha perkebunan, PT RAP lewat direkturnya Arkadius, saat itu mulai menjajaki MoU atau perjanjian dengan beberapa nagari. Khususnya nagari Bidar Alam.

Pada Senin 01 Mei 2006, disepakati sebuah MoU pembangunan perkebunan kelapa sawit di kanagarian

Bidar Alam. Masyarakat Bidar Alam dalam hal ini sebagai pihak pertama, diwakili oleh niniak mamak, pemangku adat, tokoh masyarakat dan pemuda.

Dalam berita acara penandatanganan MoU, beberapa diantaranya adalah Amril Baharuddin Camat Sangir Jujuan, Chaidir B Wali Nagari, ST.R. I Payung Putih Ketua KAN, Asmar Ketua Badan Pemusyawaratan/Bamus, Dedi Arisandi Ketua Pemuda, Yudhi Wahyudi dan Sudirman dari PT RAP, Syamsurizaldi Kasubag Perangkat Daerah Pemda Solok Selatan. MoU itu turut diketahui oleh Bupati Solok Selatan Syafrizal.

Jika mengacu kepada keputusan izin lokasi, perjanjian perolehan tanah harus dilakukan antara pihak yang berkepentingan. Dedi Arisandi ketua pemuda saat itu kepada Langgam.id mengatakan, pembentukan tim perumusan MoU ini sudah seizin dari anak kemenakan kepada niniak mamak.

"Bagaimana penyerahan lahan dengan hitungan 60% 40%, ndak mungkin berurusan dengan semua masyarakat. Setelah itu, lalu ada surat penyerahan dari

individu kepada mamak masing-masing," katanya, Selasa (12/09/2023).

Sebab tanah yang akan dibangun kebun kelapa sawit itu adalah tanah garapan masyarakat. Bukan tanah ulayat kaum atau nagari.

Hapison salah seorang masyarakat Bidar Alam yang juga tim penyelesaian konflik menjelaskan, sistem bagi hasil dalam MoU tersebut mencontoh pada pola Sapatigaan. Dimana pihak A atau yang mempunyai tanah tidak mengeluarkan biaya, biasanya dalam pembangunan sawah. Tapi, dalam MoU pembangunan kebun ditanggung oleh kedua belah pihak.

Tanah masyarakat itu sendiri sebelumnya ditanami durian, petai, jaring, karet, kopi, dan jenis tanaman lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Awalnya masyarakat merasa diuntungkan, karena 40%. Bagi hasil 40% itu dirasa masyarakat akan terjadi peningkatan ekonomi," kata Hapison kepada Langgam.id, Selasa (12/09/2023).

Tetapi ada hal yang janggal. Dalam MoU yang dibuat tersebut, dibunyikan isi perjanjian yang menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun adalah ulayat kaum dan garapan masyarakat. Ada klaim ulayat disana.

Tak hanya itu, isi perjanjian juga menyatakan bahwasannya akan mendaftarkan Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah masyarakat tersebut.

"Disitu masyarakat merasa tertipu, kok di HGU kan. Kita bagi hasil, kenapa disertifikatkan tanah masyarakat," ujar Hapison.

Ia menjelaskan, saat pembuatan MoU masyarakat memang tak dilibatkan. Yang dilibatkan hanya niniak mamak, tokoh masyarakat, dan perusahaan. Masyarakat juga mewakili perumusan MoU kepada niniak mamak.

Namun kata Hapison, niniak mamak mengakui itu sebagai tanah kemenakannya. Bukan ulayat, melainkan tanah garapan.

Persoalan HGU ini juga merupakan pemicu dari konflik panjang di Bidar Alam. Syahdan, pada tahun 2006 itu jelas Hapison belum terjadi gejolak. "Tapi sudah ada semacam protes," katanya.

Risalah Pengajuan HGU

Mulailah PT RAP melakukan penanaman sawit pada tahun 2006. MoU sebelumnya yang sudah dibahas juga disepakati untuk menjadi perjanjian melalui notaris Rizal Rivai di Padang.

Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat kemudian melakukan pemeriksaan tanah yang diajukan oleh PT RAP untuk mendapat HGU. Risalah pemeriksaan kemudian keluar pada tahun 2007 dengan nomor: 01/RSL-PAN.B/BPN-2007.

Dalam perjalanan sesudah penanaman, dalam notasi sebelumnya diajukan 14.000 hektar lahan di enam nagari untuk di HGU kan. Dengan lama izin 30 tahun. Namun setelah dilakukan pengukuran oleh Kanwil BPN

Sumber lewat panitia B, hanya 8.237,3 hektar lahan yang bisa dilaksanakan perkebunan.

Dari total 8.237,3 hektar itu, dalam risalah BPN baru 2.088 hektar lahan yang ditanami bibit kelapa sawit. Tepatnya di wilayah Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin (RPC).

Masyarakat di enam nagari kemudian tak setuju, lalu mengirimkan surat penolakan ke berbagai pihak. Hapison mengatakan masyarakat sebenarnya menginginkan perusahaan transparan.

"Kalau disampaikan kepada masyarakat tanahnya akan disertifikatkan, masyarakat pasti akan menolak," ujarnya.

Seseorang yang mengaku dekat dengan Haji Bakhrial (pemilik PT RAP) yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, pembangunan kebun sempat mengalami stagnasi.

"Setelah berjalan, terjadi stag, pak haji kurang fokus ke kebun. Dia kan banyak usaha lain," ungkapnya kepada Langgam.id, Selasa (12/09/2023).

Ia juga mengatakan dalam perjalanannya, terdapat beberapa hal yang merugikan PT RAP. "Kata orang, salah manganyam di muko di ujuangnyo salah juo," tuturnya.

Misal soal pergantian tanaman. Ia mengatakan tanah masyarakat yang diserahkan itu setengah produktif. Sehingga belum atau tidak banyak yang ditanami. Sedangkan seluruh tanaman yang ada di atas lahan mesti diberikan ganti rugi.

"Perusahaan berkata, ini tanaman tidak produktif, kenapa banyak sekali tanamannya (di laporan -red)? dari 200 menjadi 300. ada juga penambahan luas lahan. Karena mengimbangi ganti rugi tanaman. Misal dari 1 ke 2 hektar," ucapnya.

Semua permasalahan berkaitan dengan pengajuan HGU itu lalu diselesaikan dalam rentang waktu April hingga

Juli 2007. Mulai dari pertemuan PT RAP dengan masyarakat dan tokoh adat. Hearing bersama DPRD Solsel.

Hingga pernyataan oleh bersama Bupati, Camat, dan Wali Nagari di enam nagari bahwa tidak ada lagi masyarakat pemilik/penggarap lahan yang keberatan menyerahkan lahan kepada PT RAP. Setelah itu perkebunan terus berjalan sembari PT RAP mengajukan HGU.

Surat Peringatan I dan II

Pada September 2009, PT RAP sudah mulai melakukan panen pertama. Melihat panen perdana tersebut, kemudian masyarakat khususnya di Bidar Alam menuntut janji bagi hasil 40%. Tetapi tidak diberikan oleh PT RAP.

Narasumber Langgam.id yang tidak mau disebutkan namanya tadi menyebutkan, lahan yang telah ditanami oleh PT RAP itu kemudian dilepas saja oleh Haji Bakhrial. Hal itu terjadi katanya karena kesibukan Haji Bakhrial.

Pengelolaan kebun menurutnya kemudian diambil alih oleh Ali Sabri, Wali Nagari Bidar Alam saat itu. "Pegawai PT RAP dibawah naungan Ali Sabri, kondisinya tidak terurus. Karena sebab itu, terjadi ketidakpuasan masyarakat dengan RAP," katanya, Selasa (12/09/2023). Terjadiah demonstrasi.

Langgam.id telah melakukan konfirmasi kepada Ali Sabri. Namun ia enggan untuk dikutip dalam berita. Ali Sabri hanya menyebutkan bahwa dia sudah tak ada urusan lagi soal masalah masyarakat dan PT RAP.

"Sekitar tahun 2011, kami pemerintah daerah turun, karena telah terjadi demonstrasi. Bagi hasil itu belum ada," ucap Hapison yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Bupati Solsel saat itu Muzni Zakaria lalu menjatuhkan dua kali Surat Peringatan kepada PT RAP. Pertama pada tanggal 09 Mei 2011 dan yang kedua 14 November 2011. Hal itu kata Hapison setelah menimbang pendapat dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) terkait. Bahwasannya perusahaan tak taat azas dalam pembangunan perkebunan.

Dalam SP yang dikeluarkannya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyatakan PT RAP baru melakukan penanaman seluas 1.320 hektar dari total luas 14.600 hektar izin lokasi yang diberikan. Yang wilayahnya Bidar Alam dan RPC.

"Sedangkan di Lubuak Malako, Abai, Dusun Tengah, Sitapuih tak ditanami. Kan ada penelantaran disitu. Tapi dimasukkan dalam rencana HGU-nya. Dan masyarakat juga tak bisa mengurus sertifikat tanahnya. penelantaran tanah itukan pelanggaran hukum," ujar Hapison

Sesuai dengan izin lokasi dan perkebunan yang diberikan, PT RAP belum atau tidak dapat memenuhi beberapa hal yang diamanatkan dalam diktum surat keputusan. Pertama, Segera meyelesaikan hak atas tanah dan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Izin Usaha Perkebunan (IUP) dikeluarkan sudah harus selesai.

Kedua, segera melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit seluas ±14.600 Ha paling lambat tahun keempat sejak izin Usaha Perkebunan (IUP) dikeluarkan.

Selain itu semua, ada beberapa faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah Solok Selatan ungkap Hapison. Seperti perusahaan tak bayar pajak, pelaksanaan pembangunan kebun tidak benar, bagi hasil tak terealisasi, tidak dilakukannya pembangunan pabrik, dan terjadi konflik di masyarakat.

"Perusahaan hanya memanam untuk kepentingannya. Alasannya (bagi hasil -red) tidak dibayarkan kepada masyarakat karena biaya operasional tinggi," ucap Hapison.

Langgam.id sudah beberapa kali mencoba melakukan konfirmasi kepada manajemen PT RAP. Terutama kepada Haji Bakhrial. Upaya konfirmasi ini dilakukan untuk memverifikasi semua temuan reportasi yang Langgam.id lakukan.

Selasa (12/09/2023) Haji Bakhrial sempat mengangkat telpon dari Langgam.id. "Maaf pak saya lagi meeting di hotel Grand Hyatt, nanti saya hubungi kembali," ucapnya.

Keesokan harina, Haji Bakhrial mengajak Langgam.id untuk bertemu di Padang via pesan WhatsApp. "Besok saya ke Padang, kita ngopi sambil cerita pak," tulisnya, Rabu (13/09/2023).

Setelah itu, selama empat hari berturut-turut dihubungi, Haji Bakhrial tidak menanggapi pesan konfirmasi dari Langgam.id lagi. Pesan terakhir yang Langgam.id sampaikan hanya dibaca tanpa balasan.

Naik Turun Pengajuan HGU

Perjalanan konflik masyarakat Bidar Alam dan PT RAP dalam beberapa tahun mengalami pasang surut. Mulai dari masyarakat dan pemerintah daerah yang kembali memberikan dan mendukung penerbitan HGU. Kemudian surut kembali dan melakukan penolakan.

Dalam beberapa dokumen dan hasil wawancara yang Langgam.id himpun, Kanwil BPN Sumbar dan Solok Selatan berulang kali mengembalikan berkas permohonan HGU yang dikirimkan PT RAP.

Sedangkan masalah dengan masyarakat diselesaikan dengan metode inclave. Yakni pengeluaran tanah masyarakat yang tidak mencapai kesepakatan kerja sama dari areal izin lokasi PT RAP.

Direktur Utama PT RAP Bakhrial pun meluapkan kekecewaannya atas terhalangnya penerbitan HGU tersebut. Lewat surat PT RAP kepada Bupati Solok Selatan nomor: 601/Dir-Ut/RAP/VI/2014 Bakhrial menceritakan harapannya.

"Berkali-kali HGU ini sudah akan terbit, tetapi ada saja masalah yang muncul atau dimunculkan. Yang kalau ditelaah dengan jernih dan benar sebenarnya semua hal tersebut telah diselesaikan sebelumnya.

Pernyataan demi pernyataan yang diminta telah dibuat, namun timbul lagi hal baru, yang sepertinya telah

mencari-cari alasan untuk terhalangnya penerbitan HGU tersebut, betul-betul hal ini telah membuat lelah dalam pengurusannya," tulis Bakhrial dalam surat yang ditandatangani 12 Juni 2014 itu.

Ia juga menyatakan bahwa permintaan inclave hampir tidak mungkin dilakukan. Sebab disamping prosedur inclave yang tidak sederhana, biaya yang tidak kecil, tidak ada juga instansi yang punya otoritas untuk bisa menjamin kepastian hukumnya.

Karena itu jelasny, PT RAP telah membuat pernyataan bahwa Inclave akan dilakukan mana kala HGU telah terbit. Sehingga diatas peta HGU itu jelas mana-mana areal yang perlu di inclave.

Namun belum lagi BPN memproses HGU tersebut, ada lagi surat-surat Wali Nagari yang kata Bakhrial tidak jelas persoalan dan aspirasi yang dibawa. "Kesepakatan yang telah dibuat, serta pernyataan-pernyataan yang telah ditanda tangani seperti tidak ada arti dan gunanya," tulisnya.

Ia mengatakan, tidak ada sedikitpun niatan PT RAP untuk mendominasi lahan masyarakat. Yang diinginkan hanyalah bagaimana ketentuan dan aturan yang ada dapat berjalan. Dan investasi tidak menjadi sia-sia.

Sekretaris Nagari Bidar Alam Refrizal Edi Putra (saat wawancara Wali Nagari sedang sakit), mengatakan kepada Langgam.id, bahwa HGU PT RAP tidak ada karena dari dulu sampai sekarang berkasnya tidak ditandatangani oleh Wali Nagari.

Alasannya, pola bagi hasil 40% 60% antara PT RAP dengan masyarakat tidak pernah terwujud.

"Pak Gefriadi Wali Nagari sekarang menjabat sejak 2013. Sejak itu juga tidak pernah ditandatangani permohonan HGU nya," ucap Refrizal, Sabtu (09/09/2023).

Perjanjian Baru

Di penghujung 2014, masyarakat Bidar Alam kembali melakukan demonstrasi ke DPRD Solsel. Tuntutannya masih sama, yakni bagi 40% 60%. Tahun itu juga muncul

sebuah perjanjian baru yang dibuat dihadapan notaris Suci Asri Hastuti.

Diantara isinya, PT. RAP dan Masyarakat pemilik lahan menyetujui tenggang waktu 2 tahun untuk menyempurnakan pembangunan perkebunan. Dan setelah 2 tahun perusahaan harus melakukan pembagian hasil.

Seandainya dalam 2 tahun tersebut tidak dilaksanakan, maka lahan masyarakat akan di kembalikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat pemilik lahan sepakat untuk di lakukan pengukuran ulang.

Lahan yang tidak di serahkan oleh pemilik akan di Inclave (mengeluarkan tanah dari HGU) terlebih dahulu. Perjanjian itu ditanda tangani oleh pemerintah daerah dan pimpinan PT RAP (Haji Bakhrial).

Tahun 2014 itu juga dibentuk koperasi sebagai penghubung antara masyarakat dan perusahaan. Sesuai

dengan isi pada MoU pertama. Koperasi itu diketuai oleh Dedi Arisandi.

Fungsinya untuk membenahi dan mengevaluasi kerja perusahaan supaya tak ada penipuan jumlah panen. Juga menata ulang keluasan lahan, sebab kata Dedi terdapat jumlah tanam yang tak sesuai. Hal ini mengakibatkan hasil panen tidak akan maksimal.

"Kesalahan perusahaan, tidak mau mencukupkan pokok tanaman. Alasannya, karena tidak ada jaminan dari pemerintah nagari untuk menertibkan ternak yang ada disana," tuturnya.

Hal ini mengakibatkan isi dari perjanjian baru sebelumnya juga tidak terwujud. Koperasi pun tak berjalan mulus, Dedi sempat di demo dan terjerat kasus hukum.

Pada tahun 2016 diadakan, rapat koordinasi PT RAP dengan tim 9 yang dibentuk pada perjanjian sebelumnya, bersama ninik mamak, dan tokoh masyarakat nagari Bidar Alam dan RPC.

Disana dinyatakan, Pembagian hasil tetap dilakukan Januari 2017, dananya dapat dititip pada rekening khusus. Pelaksanaan pengukuran ulang dimulai pada tanggal 15 Desember 2016 hingga 15 Maret 2017

Selain itu, berdasarkan keterangan masyarakat PT RAP menetapkan standar biaya sepihak dalam pembangunan kebun. Yaitu per tanggal konversi sebesar Rp 70 juta per hektar. Dengan jangka waktu cicilan hutang 10 tahun dengan tingkat bunga 12% per tahun.

Masyarakat saat itu tak terima dengan biaya tersebut. Mereka selama belasan tahun belum menerima hasil dari panen sawit di nagarinya. Malah ketiban hutang dengan diberi pinjaman Rp. 100.000 per bulan dan diterima per tiga bulan.

Indra Wirdana (37) salah seorang Pemuda Bidar Alam kepada Langgam.id menjelaskan alasan keberatan masyarakat. "Masalahnya waktu itu, masyarakat dikasih pinjaman, itu kan utang. Sebab masyarakat menuntut 40%, ndak pernah keluar. Orang perusahaan dengan

berbagai alasan, akhirnya cuma keluar pinjaman, 100 ribu per hektar," ucapnya Sabtu (09/09/2023).

Jika dihitung kata Indra, dengan harga sawit terendah semisal Rp. 1500 per kilo, kira-kira cuma setandan sawit untuk masyarakat. "Padahal ada ratusan sawit dalam se hektar lahan disana," katanya.

Oleh sebab itu, pada 3 April 2017, seluruh pemilik lahan yang terlibat dalam perjanjian dengan PT RAP menyatakan sebuah pernyataan sikap. Yang pada intinya, mencabut dan menarik kembali surat penyerahan lahan individu terhadap ninik mamak dan tokoh masyarakat yang ber MoU dngan PT RAP. Dan menolak dikeluarkannya HGU atas tanah garapan masyarakat.

Muara Kriminalisasi

Beranjak dari penarikan surat penyerahan lahan yang dilakukan masyarakat Bidar Alam, konflik kemudian makin meruncing. Puncaknya pada tahun 2020. Pada 28 Agustus 2020 Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Solok Selatan

Abdul Rahman mengeluarkan surat penegasan izin lokasi PT RAP.

Surat itu ditujukan kepada BPN yang pada intinya menerangkan bahwa Izin Lokasi PT RAP tidak berlaku lagi. Sehingga diminta BPN untuk melayani proses sertifikat masyarakat.

Bupati Solsel sat itu juga telah membentuk tim terpadu penyelesaian permasalahan RAP dengan masyarakat. Hapison adalah bagian dari tim itu.

"Saat itu izin lokasi PT RAP telah mati. Yang dimilikinya hanya Izin Usaha Perkebunan (IUP). Kemudian menurut dinas perkebunan, IUP itu juga tidak bisa juga dibenarkan. Karena pembangunan ndak sesuai dengan peraturan perkebunan, sebab minimal kan harus setengah dari total lahan yang ditanam," kata Hapison menjelaskan.

"Akhirnya kami dari pemerintah daerah mengirimkan surat ke masyarakat, camat, nagari, kegiatan RAP itu

tidak sesuai aturan (ilegal). Surat itu menyampaikan bahwa izin lokasi mati, dan hgu tak ada," lanjutnya.

Berdasarkan hal itu, masyarakat yang dipimpin oleh Supri Gamal atau Gamal cs melakukan panen. Kondisinya saat itu, posisi masyarakat juga terdesak secara ekonomi karena pandemi Covid-19.

"Begitu lama masyarakat menderita. sejak 2006 menanam sampai 2020, masyarakat merasa perlu haknya juga," tutur Hapison. Selain itu alasan kuat Gamal cs memanen adalah karena selama ini tak pernah ada bagi hasil dari PT RAP.

Melihat makin menjurusnya konflik di Bidar Alam, sampai dijaga oleh brimob, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Solsel saat itu Jasman, mengeluarkan surat larangan panen. Sampai adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan.

Beriringan pada bulan itu Pjs Bupati juga mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 3. Meninjau PT. RAP dari sisi

kepatuhan perpajakan juga tidak menunjukkan etika baik dengan tidak membayar (menunggak) ketetapan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan (PBB P3). Hal itu telah terjadi semenjak tahun 2016 sampai dengan 2019 dan juga belum membayar ketetapan 2020 saat surat itu dikeluarkan.

Oleh karena itu Pjs Bupati SolseL menyatakan PT RAP dengan keluarnya peringatan tiga ini, segala aktifitas PT. RAP harus dihentikan sementara.

Sayang, pada September 2020, Supri Gamal dan lima orang lainnya dilaporkan atas dalil pencurian oleh PT RAP. Peristiwa yang disebut masyarakat sebagai kriminalisasi petani ini masih berlangsung hingga hari ini dan pada tahap persidangan.

18

Nestapa Pekerja Kebun Sawit, Hidup di Tengah Hampanan Lahan Maha Luas

Oleh: Yose Hendra



Pemandangan kamp pekerja perkebunan sawit Incasi Raya Group di SJAL 2 Divisi 2 Blok D, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Foto: Yose Hendra/Langgam.id

ekan kedua bulan September 2023, mentari
P melimpahi kawasan perkebunan PT Incasi Raya di selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Sinarnya menelanjangi tempat tinggal pekerja berupa bedeng yang saling berhimpitan secara horizontal.

Dalam keadaan terang itu, dengan kentara jurnalis *Langgam.id* melihat sisi memprihatinkan hunian kaum pekerja yang notabene berjibaku untuk lini bisnis PT Incasi Raya.

Pemandangan itu dengan kasatmata tampak di beberapa kamp— penyebutan tempat tinggal pekerja seperti di Blok D SJAL 2, kamp yang berdekatan dengan SJAL 2 Divisi 2, dan kamp lainnya yang tak jauh dari lokasi tersebut.

Untuk kamp di SJAL 2 misalnya, ukurannya 3 meter lebar, 4 meter panjang. Sementara di Blok M Sodetan atau Kamp H17, rata-rata 3x6 meter. Tiap kamp itu dihuni oleh keluarga pekerja sawit, dengan jumlah beragam. Tergantung banyak anak. Tiap kamp, biasanya dibikin kamar dengan pembatas kelambu atau triplek.

Sementara dapurnya pun disambungkan dengan terpal, atau bedeng yang kondisinya agak buruk. Sebagian besar kamp itu tak memiliki kloset yang standar.

“Di belakang campur dapur dan tempat mandi. Buang air kecil bisa, tapi buang air besar kerap di parak saja, atau di semak-semak dekat kebun,” kata seorang penghuni kamp yang tak mau disebutkan namanya.

Temaram mulai merangsek ke area perkebunan Incasi Raya Group itu. Gelap lalu datang menandakan malam menggantikan siang. Tak begitu jauh dari kantor SJAL 2 Estate Silaut, persisnya Blok D, seonggok kamp pekerja tampak gulita. Seberkas sinar hanya terpancar dari lilin atau lampu togok yang dinyalakan.

“Pakai lilin pada malam sudah berlangsung 7 tahun,” kata penghuninya, yang punya satu anak.

Kondisi puluhan kamp pekerja sawit di Incasi Raya Group memang beragam. Ada sebagian boleh dikatakan tinggal di kamp atau rumah yang layak seperti Kamp Tengah.

PT Incasi Raya memiliki areal perkebunan sekitar 120 ribu Ha di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan data

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Selatan, PT Incasi Raya mengoperasikan 6 anak usaha di sektor perkebunan sawit di Kawasan tersebut. Keenamnya adalah PT. Incasi Raya Sodetan Estate, PT. Incasi Raya Sodetan POM, PT. SAK, PT. SJAL Estate, PT. SJAL POM, dan PT. Incasi Raya Lunang.

Tercatat 4.140 orang bekerja di semua anak usaha milik Incasi Raya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pimpinan PT SJAL 2 Estate Silaut Gunardi mengakui kondisi kamp demikian. Namun, dia mengatakan pihak perusahaan tengah melaksanakan tahap pembangunan kamp atau hunian lebih layak.

“Jadi kita dalam program pembangunan terus di sini. Yang di sini permanen. Rata-rata dalam setahun ada pembangunan, tergantung dari rencana anggaran,” kata Gunardi.

Salah satu sebaran area perkebunan sawit Incasi Raya Group masuk wilayah Nagari Silaut, Kecamatan Silaut. Wali Nagari Silaut Syapril Dani mengatakan, sebelum bulan Juli 2023, pihaknya mendapat laporan masyarakat atas kondisi pekerja Incasi Raya yang berasal dari Nias

atau Mentawai. Laporan masyarakat itu, sambung Syapril, sesuai dengan kondisi tahun 2021 yakni tinggal di tempat yang tidak layak.

Sehingga bulan Juli 2023, diadakanlah rapat Muspika Kecamatan Silaut membahas persoalan itu. "Saya selaku wali nagari, atas desakan, atau informasi pak Camat, dan kemudian ajakan Pak Camat, Kapolsek, Babinsa mendatangi Kantor SJAL, Incasi Raya Group di Silaut," terangnya.

Tahun 2021 itu, Pemerintahan Nagari Silaut dan Camat Silaut mengadakan pertemuan dengan manajer Incasi Raya rapat di Gedung Unit DKP, Gedung pertemuan Kecamatan Silaut.

Syapril menjelaskan, hal yang disigihinya antara lain, pekerja yang datang dari Nias tidak selayaknya tinggal di tempat tinggal yang tak layak. Mereka tinggal di barak yang disebut kamp. Ukurannya ada 2x3 meter. Dalam 1 barak itu, ungkap Syapril, tinggal 1 hingga 3 KK.

"Dasar temuan ini kami memanggil manajer atau staf Incasi Raya untuk menindaklanjuti temuan kami. Kemudian mereka berjanji akan memperbaiki tenda

yang kami buat tadi akan dibuatkan kamp. Setelah rapat, kami menindaklanjuti, 3 bulan setelah itu, masih tahun 2021, kami masuk ke dalam, pantau lagi, ternyata ada perbaikan-perbaikan, misal dibikin 3 kamp,” jelasnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Indira Suryani mengatakan, dalam UU terkait ketenagakerjaan, pekerja itu sebenarnya dilindungi karena situasinya rentan, berhadapan dengan pemodal, punya kuasa uang, punya kuasa keberlangsungan ekonomi pekerja. “Kita lihat kasus buruh perkebunan sawit seringkali mereka menjadi-jadi atas pelanggaran hak-hak normative. Seharusnya mereka diangkat pekerja tetap, tapi hanya dilakukan pekerja harian lepas. Padahal mereka bekerja pada pekerjaan inti atau pokok,” tukas Indira.

Menurut Indira, dalam UU sendiri sebenarnya tidak dibolehkan pekerjaan inti pokok perusahaan, bisnis yang menopang perusahaan dan berlangsung terus menerus, jika itu tak dikerjakan, ekonomi perusahaan mandek, itu seringkali dipekerjakan penunjang, dan

mereka statusnya biasa buruh harian lepas, buruh kontrak," kata Indira.

Ia mencontohkan di perkebunan sawit, yang menyodok sawit. Mereka bergaji per minggu atau dua mingguan. Mereka dikontrak, bersifat buruh harian lepas.

"Kalau kita lihat di aturan UU Ketenagakerjaan, mereka seharusnya dijadikan tenaga kerja tetap, karena mereka bekerja dalam alur produksi terus menerus dan tidak ada jangka waktu dalam pekerjaan mereka. Jika mereka tak bekerja, perusahaan tak bisa beraktivitas secara ekonomi," imbuhnya.

Menurut Indira, kendala buruh sawit selama ini jauh dari sorotan tenaga kerja. Seringkali mereka didatangkan dari wilayah lain, dengan hak-hak mereka direnggut. Terutama status pekerjaan, hak mereka untuk tempat tinggal tak layak, tak memenuhi hak-hak dasar.

"Ini mesti jadi perhatian serius dinas ketenagakerjaan untuk mendorong segera pengawasan dan pemulihan hak-hak pekerja di perkebunan sawit," tukas Indira.

Sementara Kepala Kantor Perwakilan *Komnas HAM* RI Sumatera Barat *Sultanul Arifin* menilai, soal tempat tinggal pekerja yang tak layak, pihak perusahaan secara bertahap tentunya harus bisa memperbaiki menjadi tempat tinggal yang layak.

Namun, sambungnya, hal ini masih bisa dimaklumi karena hak atas tempat tinggal yang layak itu sifatnya *progresif realization* atau kelompok hak yang masuk dalam kelompok *derogable rights* (hak yang masih bisa dimaklumi kekurangannya).

"Pemenuhannya bisa secara bertahap. Tapi kalau larangan beribadah dan pembubaran beribadah itu masuk dalam kelompok hak yang disebut dengan *Non Derogable Rights* (hak yang tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun), perusahaan tidak boleh merintangi, melarang dan membubarkan orang beribadah, itu bertentangan dengan pasal 4 UU no 39 tahun 1999 tentang HAM," tandas *Sultanul*. (*)

19

Kisah Pilu Disabilitas Korban Rudapaksa di Solok: Asa Menghidupkan Rasa Keadilan

**Oleh: Lisa Septri Melina
Editor: Yose Hendra**



Ilustrasi Pelecehan dan kekerasan seksual (Ridho)

Wangi-bukan nama sebenarnya, seorang perempuan penyandang disabilitas (tuna grahita) berusia 25 tahun, bergelut dengan kepiluan beberapa tahun terakhir. Ia korban rudapaksa di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), yang diduga dilakukan oleh sanak saudaranya. Rumah korban dan pelaku saling berdekatan, sekitar 15 langkah orang dewasa.

Ia diperkosa berulang kali, dimana salah satunya sewaktu bulan Ramadan tahun 2022. Pelecehan yang dialami korban terjadi di rumah pelaku dengan meraba-raba tubuh korban pada siang hari. Aksi lebih bejat dialaminya, dimana pelaku menyetubuhi 3 kali berturut-turut di dekat kuburan pada malam hari.

"Pertama saya dilecehkan, kemudian saya diperkosa 3 kali di dekat kuburan," katanya lirih.

Meskipun kekerasan seksual itu sudah lama terjadi, ingatan korban akan kejadian pilu itu masih membekas. Korban dengan runut menceritakan kekerasan seksual

yang dialaminya ketika ditemui *langgam.id* dikediamannya di Kabupaten Solok, Selasa, (14/11/2023) siang. Dalam wawancara ini, ia didampingi ibunya.

Pelecehan yang dialami korban terjadi di rumah pelaku pada siang hari, disaat istri dan anak pelaku sedang tidak berada di rumah. Wangi yang juga dibantu ibunya dalam mengisahkan peristiwa itu, mengungkapkan, pelecehan itu bermula ketika pelaku ingin membeli rokok ke warung, dan saat bersamaan korban sedang menuju ke rumah tetangganya di dekat warung.

Lalu, pelaku melihat korban dan tiba-tiba menarik Wangi dengan paksa menuju rumah pelaku. Di sana pelaku meraba tubuh korban.

"Ketika di rumah dia (dia-pelaku), istrinya tidak ada," tuturnya yang memiliki keterbatasan mengingat hari dengan jelas,

ia mengatakan, setelah dilecehkan, pada keesokan harinya, persis di malam hari, pelaku melakukan

pemeriksaan di dekat kuburan. Pada saat itu, pelaku menakut-nakuti Wangi, bahwa mamak pelaku seorang polisi. Hal ini bertujuan agar Wangi tak melawan.

Dengan segala keterbatasannya, korban menuruti apa yang dikatakan pelaku. Di bawah ancaman dan diliputi ketakutan, pelaku memperkosa Wangi tanpa perlawanan.

“Kejadiannya malam di dekat kuburan, ketika orang sedang salat tarawih. Dia (dia-pelaku) bilang mamak adalah seorang polisi, sehingga jangan dikasih tau kepada siapapun. Takut dengan polisi, jadi tidak dikasih tahu,” ujarnya ia yang duduk duduk bersimpuh.

Ia melanjutkan, setelah kejadian kekerasan seksual tersebut, tubuhnya sering terasa sakit.

“Setelah kejadian itu saya sering sakit perut,” sebutnya.

Ibu korban, Mita-bukan nama sebenarnya mengatakan, awalnya ia tidak mengetahui kekerasan seksual yang

menimpa anaknya. Kejadian itu diketahuinya setelah ia mendapatkan informasi dari tetangganya.

Ia melanjutkan, kejadian tersebut diketahui bermula pada saat anaknya bercerita kepada tetangganya yang sering menghabiskan kesehariannya di rumah itu. Posisi rumah tetangganya juga bersebelahan dengan rumahnya dan rumah pelaku.

Alhasil, pada ruas jalan yang sempit menuju rumah pelaku, sang tetangga ingin membantu mengangkat barang yang dibawa oleh pelaku. Wangi yang melihat hal itu, lekas mendekati sang tetangga, dan melarangnya menolong membawakan barang pelaku.

Sehingga uni- sapaan tetangganya itu, tidak jadi membantu membawakan barang pelaku.

"Pada malam harinya uni itu bertanya kepada anak saya dan anak saya menceritakan apa yang dilakukan pelaku," tutur Mita.

Ia menambahkan, keesokan harinya, uni tersebut menceritakan apa yang diceritakan korban kepadanya. Usai dapat penceritaan itu, ia kemudian membawa Wangi langsung ke bidan untuk pemeriksaan

“Dari keterangannya (korban) kejadian pemerkosaan itu terjadi pada malam hari,” kata Mita yang duduk dekat Wangi.

Mita mengatakan, setelah kejadian itu, keseharian korban berbeda dari pada hari-hari sebelumnya, begitu juga dengan kesehatan korban yang juga kian menurun.

“Dia sering melamun dekat pintu dan kursi, dan sering deman, sering mengeluh kedinginan,” sebutnya.

Ia melanjutkan, korban merupakan anaknya yang pertama dari empat bersaudara, dengan keterbatasan mental.

“Anak saya memang ada kekuarangan dari anak-anak pada umumnya,” tuturnya.

la mengatakan, setelah kabar tersebut menyebar di lingkungan tetangganya, istri pelaku mendatangi rumahnya, dan melontarkan pertayaan kepada korban, serta berdalih suaminya tidak melakukan kekerasan seksual tersebut.

“Jika tidak terbukti suami saya bersalah, saya tidak segan-segan memasukkan kamu ke penjara, tapi jika terbukti bersalah saya siap jadi janda dan mengantarkan dia ke penjara. Itu yang dikatakan istri pelaku waktu itu kepada anak saya,” tuturnya.

Hingga kini, pihak keluarga menuntut keadilan untuk anaknya dan melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian. Pihak korban didampingi LBH Padang, WCC Nurani Perempuan Sumatera Barat dengan harapan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

“Dengan adanya laporan ini kami berharap tidak ada lagi kejadian serupa terjadi kepada anak kami dan juga anak-anak yang lainnya,” harapnya.

Memulihkan Trauma Korban Sembari Menuntut Keadilan

Pendamping korban dari WCC Nurani Perempuan Feni Mardian mengatakan, pihaknya saat ini fokus pada pemulihan dan pemberdayaan kepada korban.

"Korban berumur 25 tahun, korban disabilitas tunagrahita. Hal itu berdasarkan pemeriksaan kami dengan psikolog sebelum melapor ke polisi," tuturnya, Senin, (20/11/2022).

Ia mengatakan, sebelum melapor ke polisi Nurani Perempuan sudah melakukan visum terhadap korban dan memang ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Namun bagian forensik merasa kebingungan apakah kejadian tersebut benar kejadian yang dilakukan oleh pelaku.

"Meskipun umurnya 25 tahun, namun *Intelligence Quotient* (IQ) sama dengan anak-anak. Namun dia ragu dengan warna baju dan hari," kata Feni.

Ia melanjutkan, sejauh ini kami melihat korban merasa takut dengan pelaku. Ia sering bicara meminta tolong kepada orang-orang yang dia rasa dapat dipercaya untuk selalu mengawasi keluarganya agar tidak mendapat kejadian serupa .

"Saat ini korban jarang keluar rumah. Kami ingin keadilan untuk korban dan sejauh ini korban juga mendapatkan intimidasi dari keluarga pelaku," jelasnya.

Dian mengatakan, apabila tidak terbukti bersalah keluarga pelaku mengancam untuk melaporkan balik. Dan hal itu membuat ketidaknyamanan kepada keluarga korban.

Menurut Feni, keterangan dari korban hingga komunikasi terakhir dengan WCC Nurani Perempuan beberapa waktu lalu terkait kekerasan seksual yang dialaminya tidak ada yang berubah.

"Korban dilecehkan satu kali dirumah pelaku, diperkosa sebanyak 3 kali di dekat kuburan," ujarnya.

Ia mengatakan, polisi sebenarnya meminta saksi pada waktu kejadian atau yang melihat korban pergi dengan pelaku. Namun itu tidak ada, karena yang ada hanyalah saksi yang pertama kali mendengar cerita korban.

"Kita juga sudah menggambarkan kepada polisi, bahwa tidak mungkin ada orang yang melihat pada saat kejadian tersebut. Kata polisi, kita tidak mungkin mengatakan bahwa korban itu masih usia anak, itu yang pertama," terang Feni.

Terkait dengan penerapan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 polisi juga tidak membahas hal itu. Ia mengatakan, kendala yang dihadapi saat ini adalah visum psiatrikum (keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum).

Akan tetapi visum ini ada alurnya dan penyidik membuat surat dinas kepada dinas pemberdayaan anak di Solok dan kemudian diteruskan kepada dinas di provinsi agar tidak membayar.

Selanjutnya, visum yang digunakan untuk kepentingan peradilan ini ada dua, yang pertama itu Visum et repertum dan itu tidak membayar.

"Visum ini nantinya akan dilakukan pada 21 November 2023," terangnya.

Ia melanjutkan, perlindungan terhadap korban yang satu dengan korban yang lainnya baik tidak disabilitas ataupun disabilitas itu berbeda tergantung bagaimana kondisi korban ketika datang menemui WCC Nurani Perempuan.

"Kalau disabilitas lihat kondisinya seperti apa. Perlindungan yang diberikan tergantung kondisi korban," tukasnya.

LBH Padang, Kami Ingin Keadilan untuk Korban

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Indira Suryani mengatakan, kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan oleh di Polres Solok. Selain LBH, korban juga

didampingi oleh WCC Nurani Perempuan untuk mendapatkan keadilan.

"Korban penyandang disabilitas tunagrahita," tuturnya kepada *langgam.id*, Rabu, (15/11/2023).

Ia melanjutkan, ketika menangani kasus perempuan yang diperkosa dengan umur dewasa dan dia penyandang disabilitas tunagrahita sering kali mendapatkan hambatan di tingkat kepolisian, seperti stigma polisi yang menganggap bahwa korban sudah dewasa dan kenapa korban tidak mampu melindungi dirinya.

Kemudian hambatan selanjutnya, terjadi pada situasi dimana kekerasan seksual terhadap korban bukan kejadian pertama yang mereka alami.



Direktur Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) Padang Indira Suryani. Foto: Ist

“Kalau polisinya punya perspektif terhadap teman-teman disabilitas tunagrahita maka bisa mereka bersimpati dan berempati kepada korban,” tutur Indira.

Indira mengatakan, LBH gigih memperjuangkan kasus tersebut, karena tidak ingin orang-orang disabilitas menjadi target oleh predator seksual dan ia berharap

polisi serius dalam menangani kasus tersebut menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 tahun 2022 serta UU Penyandang Disabilitas 8 tahun 2018.

Ia mengatakan, di dalam UU TPKS Nomor 12 tahun 2022, kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas akan diberikan pemberatan atau ditambah 1/3 dari ancaman hukum sesuai pasal 15 ayat 1 huruf h.

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan terhadap penyandang disabilitas:- begitulah bunyi pasal UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 pasal 15 ayat 1 huruf h.

Terkait pasal pelindung disabilitas yang berhadapan dengan hukum tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Bagian Kedua tentang Keadilan dan Perlindungan Hukum pasal 28, 29 ayat 1 huruf a,b serta c. Berikut bunyi pasal tersebut:

Pasal 28: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 29: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum. dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30:

(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:

a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;

b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau

c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

“Kita ingin keadilan pada korban dan kita mau polisi memproses kasus ini secara adil, ini bukan kasus pertama yang kami dampingi dalam konteks korban penyandang disabilitas,” ujarnya.

Keterangan dari Disabilitas Dapat Dipercaya, Tergantung Pemeriksaan yang Dilakukan

Neny Andriani, psikolog yang juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Putra Indonesia (UPI) mengatakan, disabilitas tunagrahita atau disabilitas intelektual adalah orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata, mulai dari ringan, sedang hingga berat. Kategori ringan berada pada 60-69, sedang 50-59, serta berat 50 ke bawah.

“Bukan berarti kemampuan intelektual di bawah rata-rata keterangan yang didapat dari mereka tidak bisa dipercaya, itu salah. Intinya tergantung bagaimana instrumen dan pendekatan yang digunakan terhadap pemeriksaan mereka,” tuturnya Sabtu, (18/11/2023).

la melanjutkan, terkait ketahanan ingatan pada disabilitas tunagrahita tidak bisa dikaitkan dengan kemampuan intelektual mereka. Dijelaskan Neny, ingatan itu berhubungan dengan kemampuan kognitif. Pada tunagrahita, kemampuan intelektual dan kemampuan kognitif itu berbeda. Kognitif ini memori termasuk jangka panjang dan jangka pendek.

“Apabila tunagrahita ini mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, maka secara tidak langsung otak atau kognitifnya berkeinginan mempertahankan kejadian itu dan akhirnya menjadi memori jangka panjang. Kejadian itu pada disabilitas tunagrahita juga menimbulkan trauma,” jelasnya.



Psikolog yang juga Dosen Fakultas Psikologi Universitas Putra Indonesia (UPI), Neny Andriani. Foto: Ist

Neny melanjutkan, orang-orang dengan disabilitas tunagrahita memaparkan trauma dengan sikap dan perilaku mereka. Dan bisa juga dengan perubahan seperti, tempramen, agresif serta emosional dan ada juga yang mengalami depresi.

“Kejadian yang terjadi pada disabilitas tunagrahita juga dapat berdampak baik pada diri mereka, namun hal itu butuh dukungan dari lingkungan tempat tinggal dan orang-orang disekitarnya,” katanya.

la mengatakan, ketika ditemukan penyandang disabilitas tunagrahita, ada yang lebih mudah bercerita

apa yang mereka alami kepada siapapun. Hal itu dipengaruhi karena intelektual serta kepribadian mereka.

“Dari beberapa pemeriksaan yang Ibuk lakukan, hampir selalu bertemu penyandang disabilitas tunagrahita yang mudah bercerita tentang apa yang mereka alami kepada orang lain, bahkan orang yang tidak kenalnya,” tuturnya.

Ia melanjutkan, kemampuan intelektual di bawah rata-rata kurang memahami informasi yang mereka sampaikan kepada orang lain, apakah akan berpengaruh kepada dirinya atau tidak. “Mereka tidak bisa menelaah, apakah informasi yang mereka sampaikan itu baik atau berpengaruh buruk terhadap dirinya, ataupun bagi orang yang menerima informasi yang mereka sampaikan,” jelasnya.

Pelaku Terancam 12 Tahun Bui

Kasat Reskrim Polres Solok, Iptu Hedi Permana Putra mengatakan, kasus tersebut sejauh ini masih dalam tahap penyidikan dan pemeriksaan saksi.

"Saksi yang kitaperiksa sudah 5 orang. Selain saksi, kita juga telah memeriksa korban," ujarnya, Senin, (21/11/2023).

la melanjutkan, terkait dengan pemeriksaan kepada terduga pelaku, pihaknya belum bisa memberikan kepastian.

"Kalau sudah kuat alat bukti baru kita periksa pelaku. Kalau sekarang kita periksa nanti terduga pelaku berkilah-kilah," tuturnya.



Situasi Kantor Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Solok pada Selasa, (14/11/2023). Foto: Lisa Septri Melina

Pasal yang disangkakan terhadap pelaku itu Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun," bunyi Pasal 285 KUHP.

Hedi menyampaikan, kasus tersebut mungkin saja diterapkan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022.

"Mungkin saja bisa diterapkan," lanjutnya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas sosial dan psikiater untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi korban.

"Kalau sekarang proses hukumnya masih sama seperti orang biasanya, karena dia sudah dikategorikan dewasa berumur 25 tahun," tuturnya.

Ia melanjutkan, kendalanya dalam kasus ini sebenarnya ada pada korban, waktu itu pada saat mau diperiksa dan divisum yang bersangkutan tidak hadir sampai dua

bulan setelahnya baru bisa hadir dan memenuhi panggilan polisi.

"Kita sudah menghubungi namun tidak bisa. Dua bulan kemudian baru korban bisa hadir memenuhi panggilan polisi," pungkasnya. (*)

20

Disabilitas, Mereka yang Kerap Terabaikan dalam Urusan Bencana

**Oleh: Lisa Septri Melina
Editor: Yose Hendra**



Silvia atau yang dikenal dengan nama Silvia Piobang merupakan perempuan berusia 43 tahun asal Sumatera Barat (Sumbar). Dalam 23 tahun terakhir, ia hidup bergantung pada kursi roda setelah mengalami kecelakaan tunggal.

Saat ini, Silvia tinggal bersama ibunya di rumah kontrakan di Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Ketika bencana datang, hambatan menyelamatkan diri sering kali menjadi tantangan bagi Silvia.

Meskipun rumah di tempat tinggalnya berada di kompleks, dengan tetangga kiri kanan, namun ketika terjadi bencana orang-orang sekitarnya sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Hal ini dirasakan oleh Silvia, terutama pada saat banjir melanda.

Persoalan semakin kompleks, karena rumah yang ditempatinya adalah rumah tua yang posisinya lebih rendah dari pada rumah-rumah warga yang lainnya. Sehingga rumahnya selalu terendam banjir lebih dalam dibanding rumah lain di kawasan itu.

Ketika terjadi banjir, rasa panik sering menghampiri dirinya untuk meminta pertolongan.

"Satu tahun ini ada 3 kali banjir, yang terakhir itu Juli 2023," tuturnya ditemui *langgam.id*, Jumat, (24/11/2023).

Kala curah hujan tinggi, Silvia bersama Ibunya sudah mulai mempersiapkan diri seperti memindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi.

"Barang yang bisa saya angkat saya pindahkan. Dan lainnya dipindahkan Amak (Amak-panggilan Silvia kepada Ibunya)," lanjut Silvia yang juga salah satu atlet tolak peluru pada lomba Peparnas XVI Papua tahun 2021.



Sivia bercerita, rumah warga di tempat tinggalnya banyak, hanya saja tetangga yang bisa diandalkan itu tetangganya yang di depan dan samping. Sebab, ketika banjir datang, tetangganya yang lain juga sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing.

Ia mengatakan, seharusnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga memprioritaskan masyarakat disabilitas ketika terjadi bencana.

"Setidaknya pemerintah ada mendata kita yang disabilitas atau lansia yang tinggal di suatu kelurahan dan ketika terjadi bencana kami yang disabilitas juga

merasa terbantu," tuturnya yang kini tengah menggeluti usaha rajutan dengan nama brand Silvia Piobang.

Ia melanjutkan, ketika banjir sudah tinggi masuk ke rumah, dirinya harus digendong untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Hal itu, ia butuh bantuan karena tidak bisa dilakukan oleh ibunya sendiri.

"Ketika banjir saya harus digendong karena lantainya lebih rendah dari pada jalan. Kursi roda tidak bisa didorong, banjir yang Juli 2023 kemarin saya panik," ujarnya.

Silvia mengatakan, sejauh ini mitigasi bencana dari pemerintah terutama BPBD yang fokus terhadap disabilitas tidak ada. Yang ada hanya perwakilan dari organisasi-organisasi disabilitas yang dilibatkan dalam kegiatan mitigasi bencana tersebut.

"Paling tidak dalam setiap acara ada 3 perwakilan. Akan tetapi yang khusus untuk disabilitas sejauh ini belum saya temukan," terangnya.

Mitigasi Kebencanaan di Sumbar Belum Ramah Disabilitas

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDI) Sumbar Ebnovrio Hanesty mengatakan, sejauh ini penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, melainkan hanya menginkluskikan diri dengan melibatkan beberapa perwakilan dari organisasi teman-teman disabilitas untuk mengikuti pelatihan kebencanaan.

“Pelatihan khusus disabilitas untuk kecakapan dalam menghadapi bencana sejauh ini belum ada, hanya mengundang beberapa perwakilan saja,” ujarnya, Sabtu (24/11/2023).

Ia melanjutkan, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan teman-teman disabilitas untuk mendapatkan pelatihan.

“Keberpihakan pemerintah terhadap teman-teman disabilitas masih kurang, mitigasi kebencanaan di

Sumatera Barat sejauh ini belum bisa dikatakan ramah terhadap disabilitas," tuturnya.



Ia mengatakan, berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) disabilitas yang berumur 17 tahun ke atas ada 32 ribu orang. Untuk dan secara keseluruhan usia

berdasarkan data 2022 dari Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) ada disabilitas di Sumbar 84 ribu.

“Ke depannya kami berharap pemerintah punya kepedulian dan nurani untuk kawan-kawan disabilitas dan dapat terfasilitas sehingga bisa cakap dalam menghadapi bencana, mencegah jumlah disabilitas bertambah serta mencegah terjadinya disabilitas ganda akibat bencana,” sebutnya.

Ia mengatakan, tidak hanya minimnya mitigasi terhadap disabilitas, namun juga kesadaran masyarakat yang masih kurang. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya jalur evakuasi untuk disabilitas yang digunakan masyarakat untuk berjalan.

“Pemahaman masyarakat juga harus ditingkatkan, jangan sampai ketika terjadi masalah saling menyalahkan. Ketika dibuat tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya,” sebutnya.

BPBD Sumbar: Tahap Awal Penyelamatan Tangung Jawab Keluarga

Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Rudy Rinaldy mengatakan hampir semua daerah kabupaten dan kota rawan banjir di Sumatera Barat. Ketika bencana, BPBD datang untuk semua orang termasuk disabilitas,

"Daerah rawan banjir hampir semuanya. Ketika bencana ada, BPBD datang untuk semua orang termasuk untuk orang disabilitas," lanjutnya.

"Semua sama, kita bantu. Tetapi pada saat mereka (disabilitas) terkena bencana di tahap awal maka orang terdekatnya yang terlebih dahulu harus membantu atau keluarga mereka," ujarnya menambahkan, Sabtu, (24/11/2023).

Ia mengatakan, mereka bertempat tinggal diberbagai daerah, bukan mengumpul di suatu tempat. Ketika bencana terjadi pada saat mereka kerja, maka orang di tempat kerjalah yang harus membantu mereka. Dan ketika di rumah maka keluarganya yang bertanggung jawab membantu mereka pada tahap awal bencana.

"Itu Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pemerintah yang harus dipatuhi oleh semua kalangan ketika disabilitas terkena bencana ditahap awal," kata Rudy.



la mengatakan, disabilitas di Sumatera Barat pada umumnya memiliki komunitas sendiri-sendiri tergantung dari jenis disabilitasnya. Ketika ada yang bisa berjalan tetapi tidak bisa mendengar maka dia akan dipandu orang berlarian, dan itu adalah sebuah peringatan bagi mereka bahwa sedang terjadi peringatan bencana.

Kemudian, jika yang tidak bisa melihat akan dipandu oleh saudara terdekatnya serta dipandu oleh bunyi sirene dari BPBD yang saat ini diupayakan rampung 2024. Rudy melanjutkan, pihaknya telah mewacanakan untuk menjadikan lampu rotary warna merah yang sudah disepakati bersama dengan komunitas disabilitas, untuk membantu disabilitas yang tidak bisa mendengar tetapi bisa melihat.

Jika nanti misalnya gempa bumi berpotensi tsunami, maka lampu merah itu akan menyala dan menjadi *early warning sistem* bagi mereka untuk segera evaluasi diri.

"Hal ini belum terlaksana, baru rancangan kita yang nantinya akan kita coba di 2024 jika Insyaallah tidak ada halangan. Mudah-mudahan rampung," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Sumatera Barat Hidayatul Irwan mengatakan, mitigasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai kegiatan kebencanaan.

"Kita ikutkan mereka sebagai pelatih, peserta maupun fasilitator. Pelatihan itu dilaksanakan oleh BPBD. Kita memberdayakan kaum difabel untuk setara dengan orang yang tidak difabel," tuturnya, Sabtu, (28/11/2023).



la melanjutkan, difabel adalah orang-orang yang perlu diprioritaskan dan memfasilitasi terhadap apa yang mereka inginkan dan September 2022 sudah *dilaunching* bersama BPBD *early warning*

system gempa dan tsunami khusus untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan tidak bisa mendengar dengan menggunakan cahaya lampu.

"Untuk pemilihan model lampu dan pencahayaanya kita rapat dengan kawan-kawan difabel. Semoga dengan adanya donatur alat ini bisa kita kembangkan," tuturnya.

Undang-undang Mengatur Hak Disabilitas dalam Kebencanaan

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Indira Suryani mengatakan, hak-hak disabilitas terhadap kebencanaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Dalam UU tersebut dijelaskan pada bagaian Ketigabelas Perlindungan tentang Perlindungan dari Bencana yang tertuang dalam pasal 109 ayat 1,2 da 3.

la melanjutkan, kemudian dalam pasal 143 juga memuat setiap orang dilarang menghalang-halangi pemenuhan hak disabilitas terkait perlindungan dari bencana.

"Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 juga mengatur tentang pidana bagi orang yang menghalangi serta melarang untuk mendapatkan hak-hak mereka. Dendanya bisa 200 juta atau penjara paling lama 2 tahun," tuturnya, Minggu, (26/11/2023).

"Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)," begitu bunyi pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu.

Namun menurut Indira, yang sering dilihat saat ini dalam pencegahan dan penangulan bencana kawan-kawan disabilitas tidak diberikan akses disabilitasnya yang sesuai dengan kurnia dan keistimewaan yang mereka miliki.

"Dalam proses itu mereka sering kali tertinggal sehingga menjadi korban ketidakadilan," tukasnya.



Misalnya dalam proses pemberitahuan bencana lewat tulisan, bagaimana dengan disabilitas netra yang membutuhkan suara untuk menjamin akses

disabilitasnya dalam pencegahan dan penanggulangan bencana tersebut?

“Dalam hal ini pemerintah seharusnya menggunakan berbagai metode untuk pencegahan, pemberitahuan serta penanggulangan bencana terhadap kelompok disabilitas. Kawan-kawan disabilitas adalah orang yang rentan terhadap bencana, namun sering kali hal itu belum berjalan dengan serius terutama dalam mengimplementasikan hak-hak disabilitas terkait kebencanaan itu,” tuturnya.

Ia mengatakan, pada kondisi tertentu kawan-kawan disabilitas seharusnya lebih diprioritaskan oleh negara, karena mereka butuh perlindungan lebih dari pada orang yang nondisabilitas dalam proses evakuasi, begitu juga dengan anak-anak dan lansia.

“Mengikutsertakan kawan-kawan disabilitas dalam proses kebencanaan memang sudah ada dibangun oleh pemerintah, tetapi pelatihan khusus untuk disabilitas saja sesuai dengan pengelompokan disabilitasnya saya lihat itu belum ada,” pungkasnya.

21

Perjalanan Melelahkan Tiap Minggu Demi Bersua Tuhan

Oleh: Yose Hendra



Jennis Simarmata (43) dan istrinya Megawati Manulang, bergegas membangunkan 4 orang anaknya pada suatu Minggu. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 05.00 WIB, sehingga tak bisa lagi berleha-leha. Perjalanan 100 km terbentang di depan mata, dari kediaman mereka di Jorong Koto Nan Duo, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan menuju Kota Padang.

Berangkat dari Batang Kapas pukul jam 6.00 WIB, Jennis dan istrinya sampai di Padang pukul 9.00 WIB. Sejam lebih awal dari mulainya waktu ibadah Minggu pada pukul 10.00 WIB. Jennis adalah Majelis Gereja atau Penatua di HKBP TB. Perdede, tepian Muara Batang Arau, Kota Padang.

Sebagai Penatua, ia 2 kali dalam sepekan ke Padang, hanya untuk urusan ibadah di gereja HKBP TB. Perdede. Hari selain Minggu adalah hari Jumat. "2 kali seminggu ibadah karena saya pelayan / mejelis gereja / Penatua," kata Jennis.

Sebelum berkutbah Minggu, Jennis pun bertolak sendirian ke Padang di hari Jumat untuk membahas *sermon* (suatu sesi pertemuan para majelis gereja atau parhalado yang dilaksanakan sebelum hari Minggu). Sementara untuk hari Minggu, ia membawa serta istri dan anak-anaknya.

Untuk bersentuhan dengan Tuhan di gereja Kota Padang, Jennis senantiasa berkendara dengan mobil pribadi selama 2 tahun terakhir. Kocek yang dikeluarkan lebih kurang Rp.500 ribu bolak balik Padang – Batang Kapas untuk sekali bepergian.

Jalan panjang dan melelahkan yang ia lahap dari Batangkapas ke Padang, tak terlepas dari kerinduan untuk beribadat ke gereja. Di kampung ia tinggal, gereja jelas tak ada. Begitu pun di kota terdekat Painan, gereja juga tak ada tegak.

Jadi gereja paling dekat diakses dari Batang Kapas, adanya hanya di Padang. "Sebagai terpanggil untuk menjadi bagian melayani gereja, mengendarai mobil selama 2 tahun terakhir," ujarnya.

Beribadat Minggu di gereja sangat berbeda dengan ibadat di rumah atau pun Pos Pekabaran Injil (PI). Di gereja, semua rangkaian ibadat Minggu bisa didapatkan seperti nyanyi rohani (lagu pujian), fotum (eskporsurya) - doa - lagu pujian, doa lagi – evangelium.

Setali tiga uang dengan Jennis, Lasmar Sinaga, 47, juga mesti menempuh perjalanan jauh beribadat Minggu. Ia tinggal di Sago, Painan, 20 km dari Batang Kapas. Sama-sama kawasan yang masuk Pesisir Selatan. Ia satu dari 34 kk penganut Kristen yang tinggal di Painan, ibukota Kabupaten Pesisir Selatan.

Di kota bertepian Samudera Hindia ini, tak ada gereja yang berdiri tegak. Sehingga penganut Kristen harus ke Padang bila ingin beribadah Minggu.

“Saya sudah 21 tahun tinggal di Painan. Pernah beberapa kali kita perjuangkan pendirian gereja di Painan. Tapi tak pernah bisa,” tukas Lasmar.

Tekanan Beribadah di Lingkungan Tinggal

Jennis punya pengalaman pahit saat menjalani ibadah Patanakhon Hata Ni Debata (PHD) di rumah. Suatu waktu, keluarganya berkumpul dengan 8 orang sesama penganut Kristen, melakukan PHD di rumahnya. Kala itu, didatangkan pendeta dari Padang. Aktivitas di rumah relative singkat dibandingkan di gereja. Namun durasi tersebut tak mempengaruhi sejumlah oknum untuk melakukan tindakan anarkis.

Saat ibadah berlangsung, tiba-tiba rumahnya dilempari batu. "Aktivitas ibadah singkat. Namun rumah kami dilempar. Info tetangga yang melempar itu anak-anak, pakai batu. Maka aku kejar hingga ke rumahnya. Anak-anak itu sudah aku jumpai. Kata orang tua laki-laki, tak tahu. Namun istrinya mengakui langsung," papar Jennis.

"Sebenarnya kami aktif PHD tiap bulan, tapi takut menerima di rumahnya masing-masing. Rumah saya dilempar saat PHD itu. Yang hadir Pendeta dari Padang, bersama majelis, dan jemaat. Kadang kumpul 8 orang," ungkap Jennis.

Ketua PGI Wilayah Sumbar Pdt. Daniel Marpaung juga punya cerita tersendiri tatkala berkutbah di Lubuk Alung. Saat sesi bernyanyi, ada lemparan batu ke rumah tempat ibadah. Ditengarai ada yang tidak nyaman dengan nyanyian yang begitu lepas.

“Bernyanyi setengah lepas hati saja. padahal bagi orang Kristen, bernyanyi lepas, itu lebih meresapi kedetan Tuhan, lebih sampai, kok bisa sampai menangis,” cerita Amang panggilan Pendeta Daniel.

Imbas kejadian itu, umat Kristen yang tinggal di Sicincin dan Lubuk Alung, tak mau mendatangkan lagi pendeta untuk ibadah di rumah. Semua takut situasi seperti itu terulang lagi.

Tak begitu jauh dari Lubuk Alung, persisnya di Kota Pariaman, bermukim 78 kk jemaat Kristen. Di Pariaman tak ada gereja. Menurut Amang, penelitian yang dilakukan pihaknya, dari 78 kk itu, rata-rata hanya 30 kk yang biasa datang ke gereja di Padang tiap Minggu. Hal ini disebabkan, jauhnya jarak tempuh.

Sehingga gereja HKBP Padang menjadikan Pariaman Wijk 11. Wijk Artinya sector. Saat ini ada 12 Wijk gereja HKBP.

Nah, kesulitan jemaat HKBP seperti di Kota Pariaman mengakses gereja HKBP di Padang, dibikinlah kebaktian pada minggu kelima.(dalam kalender, ada hari minggu ke 5). Hingga bulan Oktober lalu, sudah 3-4 kali Amang memimpin ibadah di sana. Ibadat di rumah jemaat yang menampung kebaktian, paling banyak 125 orang (rata-rata 100 orang).

SKB 2 Menteri Sulit Diwujudkan di Lapangan

Beribadah adalah wujud kebebasan beragama yang dijamin UUD 1945. Hal lain kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Peraturan bersama ini kemudian lazim disebut SKB 2 Menteri. Dalam SKB 2 Menteri ini, ada sejumlah persyaratan khusus yang harus dipenuhi terkait pendirian rumah ibadah, yaitu: daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat; dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Jika persyaratan pertama terpenuhi sedangkan persyaratan kedua belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Persyaratan ini diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah. Dalam peraturan, bupati/walikota wajib memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan.

Jika terdapat rumah ibadah yang memiliki IMB namun harus dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah, pemerintah daerah akan memfasilitasi penyediaan lokasi baru. Perselisihan yang terjadi akibat pendirian rumah ibadah harus diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.

Jika tidak ada hasil yang dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat FKUB. Apabila perselisihan masih belum selesai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat.

Jika SKB 2 Mentri mengharuskan tanda tangan 60 orang masyarakat sekitar untuk pendirian gereja, aturan HKBP secara internasional, cukup 25 kk di kawasan yang sama sudah bisa mendirikan gereja HKBP.

“Bagi kami 25 kk saja layak mendirikan organisasi gereja. Ternyata dengan adanya peraturan itu harus mencari tanda tangan lingkungan sekitar kurang lebih 60 orang

warga setempat, berarti bagian dari mempersulit kami. Walaupun itu katanya bagian dari penertiban,” jelas Lesmar.

Aturan yang berlaku di HKBP, harusnya di Painan dengan populasi 34 kk Kristen sudah selayaknya berdiri satu gereja.

“Kondisi sekarang banyak tak rutin beribadah karena harus menempuh perjalanan jauh ke Padang. Itu wajar. Tapi iman, kepercayaan, keyakinan tergantung masing-masing orang. Memang capek sih ke Padang, tapi ikhlas di hati tak ada rasa capek,” ungkap Lesmar.

Dia berharap selaku orang Kristen, tolong dibantu, dipermudah, diberi izin beribadah, dengan Pemda memfasilitasinya.

PGI memperkirakan ada sekitar 200 ribu jiwa umat Kristen di Sumbar. Namun PGI hingga saat ini belum punya angka pasti total gereja Kristen di Sumbar. Untuk Kota Padang, menurut Amang, ada 34 gereja di bawah naungan PGI.

Mengapa Penting Ibadah di Gereja?

Bagi umat Kristen, kata Amang, gereja adalah tempat persekutuan orang-orang yang terpanggil dari dunia kegelapan ke terang. Menurut Amang, maksudnya orang terpanggil yaitu orang yang belum percaya ke Tuhan dan sekarang sudah percaya kepada Tuhan.

“Artinya gereja itu adalah perkumpulan orang-orang yang percaya. Gereja itu merangkap dari pengertiannya tadi, dalam gereja itu banyak aktivitas yang dilakukan, banyak kegiatan-kegiatan terutama adalah melakukan pujian syukur kepada Tuhan melalui ibadah yang dilakukan setiap Minggu atau setiap kegiatan yang ada atau yang dilakukan di tengah-tengah gereja itu itu namanya ibadah umum yang dilakukan pada hari Minggu,” terang Aman.

Dia menambahkan, kegiatan di tengah pelayanan di gereja bisa dikembangkan lagi, seperti kegiatan hari tahun ibu, tahun bapa, tahun pemuda, ada juga tahun anak. “Nah di samping itu juga dikembangkan kegiatan, kalau di muslim namanya wirid, kalau di gereja kegiatan

itu disebut ibadah kebaktian rumah tangga atau *partangiangan*. Itu dilakukan di setiap sector, dan terdapat di berbagai gereja yang ada di Padang. Itu dilakukan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Semua pelayanan dilakukan di bawah naungan gereja," bebernya

Amang lantas menjelaskan, 2 tahun ini tidak ada terjadi masalah, karena dari mereka tidak ada pergerakan untuk mendirikan gereja. Contoh jemaat Kristen dari Pariaman atau pun Batang Kapas, alih-alih rebut menuntut pendirian gereja di sekitar mereka, lebih memilih beribadah Minggu ke Padang.

"Maka masalah perizinan untuk mendirikan gereja tidak terdengar. Sebenarnya mereka butuh, tapi menahan diri untuk tidak mendirikan gereja dari pada ribut, dibayangi masalah. Maka, lebih bagus mereka pergi jauh-jauh, seperti Pariaman ada 100 lebih kk, mereka jauh ke sini untuk ke gereja," imbasnya.

Di Painan, mereka juga jauh mengayuh semangat ke Padang demi bersua dengan Tuhan di hari Minggu.

Suara nyaring untuk bisa mendirikan gereja ditahan, karena mereka trauma dari beberapa kasus. Sehingga tidak pernah berpikir untuk mencoba kembali memperjuangkan berdirinya gereja.

Di wilayah yang jauh dari Padang atau tempat gereja berdiri seperti Dharmasraya, jemaat Kristen di sana beribadah Minggu di aula atau ruangan yang tak ada sedikitpun merepresentasikan gereja. Begitu juga halnya di wilayah selatan Pesisir Selatan, jemaat Kristen yang umumnya kaum pekerja sawit, menggelar ibadah Minggu di barak tempat tinggal. Itu pun ada yang dibubarkan pihak perusahaan.

“Dalam suatu kasus, pernah turun tim advokasi PGI dari pusat, yang akhirnya bisa berdiri bangunan balairung yang difungsikan seperti gereja. Bentuknya sama tapi mereka tidak bikin salib, kayak bangunan belerong gitu,” ujar Amang.

Kehadiran bangunan yang mungkin pas dibilang Gedung pertemuan, menurut Amang, karena mereka hanya dapat izin sebatas untuk tempat pertemuan

umum. Makanya, Gedung itu disebut GPU yakni gedung pertemuan umum.

“Mereka tidak sebut itu gereja. Sama juga dengan yang di Sijunjung yakni di Sungai Tambang, mereka tidak sebut itu gereja, tapi tempat itu disebut GPU,” katanya.

Dikatakan Amang lagi, sekali kebaktian di GPU Dharmasraya, ada 200 hingga 300 orang jemaat setiap hari Minggu. Artinya GPU itu mampu menampung jemaat hingga 300 orang. Tapi yang amat membedakan tentu saja, rangkaian ibadah tak bisa seperti di gereja. Lokasi GPU di tengah hamparan kebun sawit dan karet, mengurangi sumarak ibadah Minggu.

Selain menyulap gereja ala GPU, jemaat Kristen di belahan kota lain di Sumatra Barat mengandalkan bangunan-bangunan di Kodim untuk bersua Tuhan di hari Minggu. Atau paling sederhana ibadah di rumah masing-masing.

Ibadat Minggu di Kodim ini berkat inisiatif dari komunitas jemaat di masing-masing kota yang tak

memiliki gereja. Adapun fasilitas yang dipakai di Kodim antara lain, aula, perumahan yang di kosong di area Makodim.

Salah satu peribadatan Minggu di Makodim adalah jemaat Kristen di Kota Solok. Di Solok ada 244 kk orang Batak yang notabene memeluk Kristen. "Di Kota Solok akhirnya mereka bermohon lah kepada Kodim, dan akhirnya pihak Kodim memberi 3 perumahan. Dimodifikasilah, bentuknya dari depan sama aja, tapi di dalamnya udah di modif seperti gereja," ungkap Amang.

Beribadah salah suasana keterbatasan dan tak bisa leluasa, bagaimana pun dilandasi kerinduan untuk 'bersentuhan' dengan Tuhan. Sehingga mereka menjalaninya sebagaimana mestinya.

"Karena kerinduan itu memang betul, bukan karena masalah tempat kita pikirkan. Urusan saya yang di atas dimana pun tempatnya sebenarnya biasa aja. Nah akhirnya tidak masalah tempat apapun kondisinya, pokoknya ada tempat," kata Amang.

Pembimbing Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat Yesri Elfis Hasugian mengatakan, gereja punya makna yang sangat penting bagi umat Kristen, karena secara umum menjadi ruang khusus beribadah. "Konsep di Kristen, rumah ibadah itu ya gereja," ujar Yesri.

Gereja kemudian berfungsi membawahi rumah doa atau pos pelayanan. Polanya, jemaat melapor kepada pendeta agar datang melayani mereka yang akan berkumpul sekian orang di suatu rumah. "Sifatnya Pos Pelayanan di rumah. Dalam bentuk tempat, seperti langar bagi umat Islam," kata Yesri.

Yesri memperkirakan, pemeluk Kristen di Sumatra Barat berjumlah 84 ribu orang. Bagi yang tak punya gereja di kota atau tempat tinggal mereka, kata Yesri mereka beribadah Minggu di Markas Kodim atau Pos Pekabaran Injil (PI).

"Untuk jemaat Kristen di Limapuluh Kota sama Payakumbuh, difasilitasi oleh Kodim. Solok juga di

Kodim. Di Agam juga. Kebanyakan seperti itu,” tukas Yesri.

Sementara Kepala Kemenag Pesisir Selatan Abrar mengakui di Pesisir Selatan belum ada satu pun gereja berdiri, meski ada komunitas Nasrani.

“Rasanya belum ada sampai sekarang. Yang untuk mengusul mendirikan gereja juga belum ada,” ujarnya.

Untuk mendirikan gereja, katanya, harus memenuhi persyaratan seperti mematuhi regulasi, kemudian adaptasi dengan kearifan lokal di daerah tersebut. “Kita sebenarnya bukan keseragaman tapi keberagaman. Kita kan beragam, di Indonesia tidak hanya satu agama dan keyakinan tapi beragam. Baik beragam dari suku bangsa, beragam dari latar belakang daerah masing-masing dan juga beragam tentang agama dan keyakinan, dan itu semua di atur dalam undang-undang tentang kebebasan melaksanakan agama dan kepercayaan,” terangnya.

Pihaknya juga mencoba mensosialisasikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, pimpinan perusahaan bersama pemerintah bagaimana langkah agar kerukunan umat beribadah bisa lancar.

"Yang ada kita dapat laporan itu, dari Lunang dan Silaut dan kita coba meminta kawan di lapangan untuk mencari informasi ke pemerintahan nagari dan kecamatan misalnya, tentang mereka di sana itu. Maksudnya tentang pelaksanaan ibadah mereka. Itu tentu tidak akan melarang mereka ibadah, tapi sebagian besar bagi daerah selatan itu, kan diarahkan ke Muko-muko untuk ibadah mereka. Itu informasi yang bisa kita dapatkan," jelas Abrar.

Harusnya Minoritas Difasilitasi

Direktur LBH Padang Indira Suryani mengatakan di Sumbar memang untuk akses ibadah untuk minoritas selain muslim memang sulit, karena pelbagai halangan. "Masyarakat yang merasa elite, elite yang membenturkan kepentingan mayoritas dan minoritas," tukasnya.

la mengisahkan, pengalaman LBH Padang selama ini, regulasi pendirian rumah ibadah, soal SKB 2 Menteri itu sulit, terutama izin itu harus sesuai dari FKUB.

Menurut Indira, FKUB tidak menempatkan diri sebagai pihak yang melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan, sering dikooptasi kepentingan mayoritas.

“Situasi ini semakin memperparah situasi sulitnya izin pendirian rumah ibadah, termasuk pemerintah yang lalai dalam persoalan ini, karena tidak berusaha memberi solusi, tidak berusaha menjembatani perlindungan kebebasan beragama khususnya minoritas. Umat Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, akhirnya kerap harus jauh pergi untuk beribadah, jauh dari domisilinya, waktu panjang, uang yang lebih banyak dikeluarkan, hanya untuk melaksanakan ekspresi keyakinan dalam beribadah,” beber Indira.

la prihatin, beribadah kaum minoritas dalam skala kecil pun kerap mendapat pertentangan dari tingkat akar rumput. Misal tidak disetujui, lalu dianggap

menganggu. "Ini sering muncul dalam hak-hak kebebasan beragama di Sumbar," kata Indira.

Dalam situasi seperti itu, menurut Indira, pemerintah mestinya mendorong perlindungan kebebasan beragama terutama untuk kehadiran rumah ibadah bagi agama dan kepercayaan apa pun.

"Harus difasilitasi dengan baik, dan mendorong masyarakat menerima perbedaan itu. Kalau ada tindakan yang merongrong keyakinan, harus ada penegakan hukum yang jelas," kata Indira.

"Bayangkan saja, kita Muslim beribadah, Hari Raya, salat Jumat, beribadah jauh-jauh, satu jam dua jam, itu kan tidak efektif, tidak manusiawi, tidak beradab. Ini melanggar hak asasi ketika pemerintah dan masyarakat mayoritas tidak memfasilitasi ini, menghambat, tidak menghormati, tidak melindungi kebebasan beragama itu sendiri," pungkas Indira. (*)

22

Membaca Ulang Tragedi Marapi

Oleh: Yose Hendra



Salah satu dari 24 korban meninggal erupsi Marapi, Minggu (3/12/2023), dibawa pulang keluarga, usai menjalani pengecekan data oleh tim DVI Polda Sumbar, serta pemulasaran di Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi. Foto: Yose Hendra

Tita Cahyani, 25, terbaring di dipan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang, Rabu (6/12/2023). Muka, tangan, kakinya berjejak luka bakar. Sekujur tubuhnya merintih kesakitan.

Tita satu di antara 75 pendaki yang tercatat mendaftar online pada saat Gunung Marapi erupsi, Minggu (3/12) lalu. Tita termasuk, 51 orang yang selamat. Sisanya 24 orang bernasib naas, dimana menjadi korban meninggal dunia.

Tita tetap mengerang kesakitan, kerap dibayangi trauma ketika secara sadar ia melewati detik demi detik tragedi itu.

"Saya pergi naik ke puncak jam setengah 12 siang (Minggu 3 Desember 2023). Sekitar jam 2 siang, kami dan sebagian pendaki lainnya sudah turun dari puncak. Dalam perjalanan turun itu, hujan batu dan asap pekat muncul tiba tiba," terangnya saat diwawancarai di tengah perawatan di RSUD Padang Panjang, beberapa waktu lalu.

Lantas, ia bersama sejumlah orang berlindung di balik batu untuk menghindari geyuran batu yang dimuntahkan kawah. Begitu sulit dihindari, hingga beberapa batu yang begitu panas pun menimpa kepalanya.

“Kepala saya kena batu, sakit dan berdenging. Rasanya mau pingsan. Asap hitam belerang pekat gelap kemudian muncul, saya sesak napas, hilang akal tidak tahu mau apa. Seluruh kulit tangan dan kaki saya habis terkelupas,” bebarnya.

Dengan tenaga tersisa, tangan yang mati rasa, ia mengayuhkan jiwanya, raganya dipaksakan turun ke bawah gunung. “Kaki sakit semua. jalan licin gelap. saya terus menggelindingkan diri ke bawah setiap jalanan turun,” imbuhnya.

Disaat bersamaan, ia melihat banyak pendaki lain sudah patah kaki, minta tolong teriak-teriak. “Saya gak bisa tolong mereka,” katanya.

Tita berasal dari Nagari Pakandangan, Kecamatan VI Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Ia mendaki ke Gunung Marapi hari Sabtu, bersama 4 orang kawannya. Mereka sekampung.



Tita Cahyani salah seorang penyintas erupsi Marapi saat menjalani perawatan di RSUD Padang Panjang, Rabu (6/12/2023). Foto: Yose Hendra

Selain Tita, empat orang lainnya adalah Widya Azhamul Fadillah, Nurva Afitri, Divo Suhandra, Afranda Junaidi. Ketiga nama terakhir yakni Nurva, Divo, Afranda, berujung naas. Ketiganya termasuk di antara 24 pendaki yang meninggal.

Di RSUD Padang Panjang, ada 4 orang pendaki yang dirawat. Termasuk Widya, kawannya Tita. Keduanya

sekamar. Kondisi mereka pun nyaris sama yakni dibekap luka bakar di mana-mana.

Widya mengingat kembali detik-detik yang mencekam itu. Sama halnya Tita, ia juga terselamatkan karena menyuruk di batu besar sebelum puncak.

Tangan mereka semua terbakar. Dalam kondisi itu, Afranda teman seperjalanannya, mengalami luka parah. Darah yang mengucur deras coba dihentikan dengan mengikatkan jaket. Namun itu tak banyak membantu.

Kondisi baik Widya dan Tita pun sudah parah. Kebulatan tekad keduanya untuk coba berjalan ke bawah, menjadi energi tersendiri untuk bisa bertahan.

“Saya dan teman saya berjuang memaksakan diri bergerak turun ke bawah gunung. Tak tahu dari mana kekuatannya soalnya tangan kami sudah kebakar semua, punggung memar memar dan kepala berdarah,” ungkap Widya yang juga berusia 25 tahun.

“Kami hampir hipotermia semua. Ada juga yang tulang patah, jari putus, kepala bocor,” ujarnya lagi.

Widya sendiri merupakan pendaki pemula. Pendakian Marapi di tanggal 2 Desember itu, debutnya mendaki gunung. Seyogianya itu menjadi hari bersejarah, dan pengalaman yang mungkin akan selalu ingin diulangnya. Tapi semuanya berakhir kepahitan, trauma yang tak berkesudahan.

Sehingga ia pun memutuskan tak akan mendaki gunung lagi di lain hari.

“Saya tidak mau naik gunung lagi. Ini naik gunung pertama dan terakhir saya,” tukasnya.

Erupsi Marapi yang terletak di antara Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Minggu (3/12) siang, terjadi disaat ada 75 orang tercatat sebagai pendaki yang mendaftar online atau daring. Kepergian selamanya Zhafirah Zahrim Febrina alias Ife, Minggu (17/12/2023) sore, menjadikan korban meninggal erupsi Marapi 24 orang. Artinya, 52 orang yang masuk deretan selamat pun berkurang menjadi 51 orang. Ife

sendiri meninggal di RSUP M Djamil Padang setelah menjalani perawatan selama 13 hari.

Jalur Pendakian Diresmikan Melibatkan Banyak Pihak

BKSDA Sumbar kembali membuka pendakian ke Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Marapi pada 24 Juli 2023. kali ini pendaki bisa melakukan pendakian dengan lebih mudah melalui sistem E-Booking yaitu bisa mengakses melalui link:

<https://booking.bksdasumbar.org/>

Alkisah, Senin, 24 Juli 2023, BKSDA Sumbar meresmikan pendakian TWA Gunung Marapi berbasis daring. Para pendaki mesti mengakses e-booking (<https://booking.bksdasumbar.org/>), untuk bisa mendaki Marapi.

Di halaman ini calon pendaki bisa melihat sisa kuota yang tersedia. Ketika Pendaki sudah menentukan tanggal, calon pendaki dapat mengklik tombol buka untuk melanjutkan pembookingan.

Setelah calon pendaki memilih tanggal pendakian, calon pendaki akan dialihkan ke halaman pemilihan kategori pendaki. Setelah mengisi data, selanjutnya calon pendaki mengklik tombol *Book Now*.

Di halaman ini, calon pendaki mengisi data diri dan data semua tim yang akan ikut mendaki. Setelah mengisi semua data diri, calon pendaki dapat melanjutkan proses pemesanan, dan mengisi data seperti mengisi jumlah barang bawaan baik secara pribadi maupun secara kelompok. Setelah mengisi semua data perlengkapan, calon pendaki dapat melanjutkan ke proses konfirmasi. Dan akan muncul di halaman konfirmasi. Untuk melanjutkan ke pembayaran.

Dikutip dari postingan BKSDA Sumbar di akun Instagramnya @bksda_sumbar pada Jumat (20/7/2023), bahwa apabila pendaki datang dan belum melakukan booking online, maka harus melakukan pemesanan terlebih dahulu.

"Kemudian, apabila kuota sudah penuh maka dapat memilih pada hari yang lain," tulis BKSDA Sumbar.

BKSDA Sumbar menyebutkan, pendaki dapat memilih pintu masuk melalui Nagari Batu Palano, Nagari Koto Baru dan Nagari Aie Angek. Sistem pendakian ini melibatkan pemegang izin jasa perjalanan wisata di tiap pintu pendakian di 3 nagari.

"Pelibatan masyarakat ini dari mulai pelayanan di Nagari Batu Palano, Koto Baru dan Aie Angek, evakuasi kecelakaan hingga pengelolaan sampah," ucap BKSDA Sumbar.

Dalam postingannya, BKSDA Sumbar juga merinci biaya tiket PNBP/orang, yaitu: kategori pendaki yaitu pendakian umum 2 hari 1 malam (hari biasa), tiket PNBP Rp5.000/hari, total Rp10.000; kategori pendaki yaitu pendakian umum 2 hari 1 malam (hari libur), tiket PNBP Rp7.500/hari, total Rp15.000.

Selanjutnya, kategori pendaki yaitu rombongan pelajar minimal 10 orang, 2 hari 1 malam (hari biasa), tiket

PNBP Rp3.000/hari, total Rp6.000; kategori pendaki yaitu rombongan pelajar minimal 10 orang, 2 hari 1 malam (hari libur), tiket PNBPN Rp4.500/hari, total Rp9.000.

Kemudian, wisatawan mancanegara 2 hari 1 malam (hari biasa), tiket PNBPN Rp100.000/hari, total Rp200.000/hari; wisatawan mancanegara 2 hari 1 malam (hari libur), tiket PNBPN Rp150.000/hari, total Rp300.000/hari.

BKSDA juga menyebutkan bahwa biaya jasa perjalanan wisata Rp25.000, asuransi Rp2.500. Biaya ini terang BKSDA Sumbar, diluar PNBPN dan akan dipungut di pintu pendakian tiap nagari. Kemudian biaya itu dikenakan perorangan.



Erupsi Marapi yang terpantau di lapangan bola Nagari Batu Palano, Kabupaten Agam. Foto: Yose Hendra

Dian Indriati dari BKSDA Sumbar keberatan jika hanya BKSDA dipojokkan dalam tragedi erupsi Marapi. Kendati BKSDA Sumbar sebagai pengelola TWA Gunung Marapi, menurutnya pembukaan jalur pendakian ini deklarasi semua pihak.

“Pembukaan ini setelah proses Panjang. Sebelum dibuka, ada beberapa kali rapat melibatkan kabupaten, Wali Nagari Batu Palano, Aia Angek, Koto Baru,

PVMBG, BPBD, kita undang terus. Akhirnya disepakai dibuka jalur pendakian ini, dengan penandatanganan deklarasi bersama," ungkap Dian yang saat diwawancarai pada 9 Desember 2023, menjabat Plh Kepala BKSDA Sumbar.

Pra pengelolaan secara resmi Marapi dimulai dari Agustus 2022 dengan melibatkan banyak pihak untuk mendudukkannya. Dalam notulen rapat yang tersimpan dalam dokumen BKSDA berbentuk soft file, sekurangnya ada 15 kali jalinan rapat antara BKSDA dengan stakeholder termasuk tokoh adat, pemuda.

Dalam dokumen seperti notulensi atau pun undangan sebelum jalur pendakian diresmikan secara formal, ada banyak Lembaga yang mendukung dan turut aktif dalam ekosistem pendakian. Di level instansi seperti PVMBG, BPBD, PMI, pemerintah daerah, ninik mamak, pemuda, pemerintah nagari, Muspika, Basarnas, BPBD dan juga vulkanolog.

Sementara untuk pemerintah lokal, ada 3 pemerintahan nagari yang merupakan pintu gerbang

pendakian yakni Nagari Batu Palano, Aia Angek, dan Koto Baru, juga berandil dalam ekosistem pendakian ini.

BKSDA juga mengklaim giat melakukan sosialisasi dari desa ke desa (nagari maksudnya) untuk menyatukan pandangan. Intinya, semua sepakat untuk di buka.

“Dokumentasi dan notulensi lengkap. Dimulai sejak Agustus 2022,” jelas pihak BKSDA yang berperan besar dalam pembukaan jalur resmi itu.

“Tujuan untuk peningkatan wisata di Sumbar, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan 3 pintu itu, peningkatan fungsi kawasan TWA Gunung Marapi,” beber Dian.

la juga menjelaskan, tujuan booking online adalah untuk pembatasan pengunjung. “Sebelumnya membludak banyak. Adanya booking online ini, jumlah pengunjung bisa dibatasi dengan jumlah maksimal 100 orang hari biasa, hari libur 150 orang,”

Di samping itu, untuk mengetahui identitas pengunjung keluar masuk pengunjung. "Booking online 75 orang, 75 ini ada datanya semua. Ini menjadi pegangan pendaki yang ada di kawasan gunung saat erupsi terjadi," imbuhnya.

SOP Pendakian Tak Memuat Rekomendasi PVMBG

Berjatuhannya korban meninggal atau pun cedera di kala Marapi erupsi patut disesali. Kala Marapi erupsi mereka semua ada di radius 3 km dari kawah Verbeek, area yang oleh PVMBG direkomendasikan tak boleh diakses sehubungan dengan status Marapi Level II atau Waspada.

Diktum ini mestinya berlaku mutlak bagi pendaki, terlebih sejak bulan Juli 2023 Marapi dikelola secara resmi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatra Barat (Sumbar) sebagai sebuah Taman Wisata Alam (TWA) Marapi.

Meski para pendaki dibekali SOP pendakian TWA Gunung Marapi, namun tak tertera soal larangan memasuki radius 3 km dari kawah.

“Waktu mau naik ada yang memberi penjelasan, tapi Tita tidak ingat lagi apa yang dijelaskan,” ujar Tita.

Ada pun SOP hanya memuat hal-hal berupa, pendaki harus melengkapi urusan administrasi; lama pendakian hanya diperbolehkan 2 hari 1 malam; waktu pendakian hanya dilakukan pada siang hari dari pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB; 1 regu minimal 3 orang maksimum 10 orang. Sedangkan kuota per harinya 100 orang untuk hari biasa dan 150 untuk hari libur.

Lalu, untuk pendaki umur di bawah 17 tahun wajib menyertai surat izin yang ditandatangani orang tua; pendaki harus mempersiapkan fisik sebelum melakukan pendakian; pastikan kondisi kesehatan baik; dan segera lakukan evakuasi mandiri ketika terdapat anggota yang sakit.

SOP itu dicantumkan dalam website, dan bisa diakses oleh siapa pun untuk memahaminya. Namun, dalam SOP itu, tak ada diktum rekomendasi PVMBG yakni rekomendasi tak boleh masuk area radius 3 km dari kawah.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Hendra Gunawan mengakui PVMBG terlibat dalam diskusi-diskusi menuju pembukaan secara resmi pendakian 'Proklamator' Gunung Marapi.

Dalam tiap pertemuan itu, sambunginya selalu ditekankan soal rekomendasi dari Level II yakni tak boleh memasuki radius 3 km.

"Dan kita selalu tegas untuk tidak memasuki radius 3 km. Selalu disampaikan. Itu yang disampaikan pengamat (perwakilan PVMBG) di rapat koordinasi," tukasnya.

"Kita tegas, agar tidak memasuki radius 3 km karena berbahaya, dan masalah izin itu terkait tugas fungsi masing-masing. Dalam setiap kesempatan, baik

koordinasai, pengiriman surat rekomendasi ke semua stakeholder selalu ditekankan secara rutin untuk bahaya 3 km,” terang Hendra.

la juga mengemukakan, untuk gunung lain dengan status level II, pihaknya konsisten, terus menginformasikan dan mengingatkan soal bahaya radius 3 km dari kawah.

“Jadi PVMBG tidak pilih-pilih gunung, begitu status sama maka SOP-nya sama,” tukasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 15 Tahun 2011, ada empat level status gunung yakni Level I (Normal), Level II (Waspada), Level III (Siaga), dan Level IV (Awat).

Untuk Level II, penekanannya masyarakat masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari, hanya saja kewaspadaannya perlu ditingkatkan. Sementara itu, dalam beberapa situasi tertentu biasanya masyarakat bisa direkomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar kawah.

Dian mengatakan, SOP yang dibuat sesuai prosedur jalur pendakian, dimana ada mitigasi adaptasi bencana yang dilakukan.

SOP yang dibuat, salah satunya tidak boleh berkemah di kawah. Dan juga sudah memasang rambu di atas lengkap.

“Nah dengan begitu kita melakukan pemasangan peringatan atau himbauan tak boleh di cadas. Ada juga himbauan hati-hati terhadap lontaran batu. SOP juga menyebutkan, menetapkan pendakian di malam hari, pukul 08 pagi sampai 4 sore. 4 sore harus turun semua ke bawah,” jelas Dian.

Menurutnya, himbauan itu sudah sangat jelas. “Yang jelas kita sudah menyusun SOP. SOP itu sudah sesuai aturan yang ada,” tukasnya.

Dugaan Maladministrasi dan Kelalaian

Ombudsman Perwakilan Sumatra Barat menilai ada maladministrasi atau kelalaian Balai Konservasi Sumbar

Daya Alam (BKSDA) Sumatra Barat terhadap pembukaan jalur pendakian Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Marapi Sumatera Barat

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi menyebutkan, ada potensi maladministrasi yang dilakukan BKSDA Sumbar disaat pembukaan jalur secara resmi, disaat Marapi berstatus level II (Waspada).

Pihaknya menelusuri, SOP yang dibuat BKSDA Sumbar tidak sesuai dengan level waspada yang sudah ditentukan oleh PVMBG. Salah satunya tidak boleh berkegiatan atau mendekati kawah dalam radius 3 km.

"Sangat disayangkan, BKSDA dalam menyusun SOP pendakian ini tidak dimasukan bahwa status Gunung Marapi berstatus level II dan tidak boleh mendekati kawah radius 3km meter. Pada SOP itu hanya ada larangan untuk tidak berkemah di sekitar kawah atau

puncak, bukan larangan untuk mendekat," ungkapnya.

Ia mengatakan, dari awal memang terlihat tidak ada ketentuan yang dibuat oleh BKSDA tentang itu, begitu juga dengan website dan akun media sosial BKSDA Sumbar.

Karena itu kami menduga ada maladministrasi BKSDA yang tidak memasukkan ketentuan sesuai dengan himbauan PVMBG tidak boleh mendekati radius 3km dari puncak," tuturnya.

Ia melanjutkan, dalam hal ini pihaknya juga akan menelusuri lebih dalam SOP pendaki di posko pendakian, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaki seperti peralatan.

"Jangan-jangan BKSDA Sumbar mengizinkan pendaki untuk mendaki padahal sudah jelas tidak memenuhi syarat untuk mendaki," katanya.

Ade mengatakan, ketika pendakian sistem booking online TWA Gunung Marapi yang dibuka pada Juli 2023 juga luput dari perhatian pemerintah dan pihak terkait yang terlibat.

Seharusnya pihak tersebut juga memperhatikan aspek keselamatan bagi pendaki.

"Sayangnya kejadian ini juga luput dari perhatian orang-orang yang diajak rapat sama BKSDA seperti Basarnas, Dinas Pariwisata, Bupati Agam dan Tanah Datar serta Pemerintah Provinsi Sumbar," terangnya, Jumat (8/12).

Adel mengaku, beberapa kelompok masyarakat telah berkonsultasi dengan Ombudsman guna melaporkan masalah ini.

"Tapi dalam masalah ini, kami tidak menunggu kelengkapan laporan masyarakat. Dalam Pasal 7 UU 37/2008 tentang Ombudsman, kami diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi atas prakarsa

sendiri," tandasnya.

Sehingga tanpa menunggu laporan, apalagi masalah ini berkaitan dengan nyawa, masyarakat mengalami kerugian, bahkan nyawa, 24 orang meninggal dunia, pihaknya akan memanggil BKSDA.

Sementara BKSDA Sumatra Barat enggan dipersalahkan dalam persoalan ini.

Pih Kepala BKSDA Sumbar, Dian Indriati mengatakan awal pembukaan pada Juli 2023, atas permintaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan sektor pariwisata di Sumbar.

"Pendakian ke Gunung Marapi baru dibuka pada Juli 2023. Sebelumnya sempat ditutup selama 7 bulan karena aktivitas erupsi. Pendakian dibuka setelah mendapat dukungan dari seluruh stakeholder, karena banyaknya keingingan masyarakat," ujarnya.

Stakeholder itu, jelasnya, terdiri atas Pemda Agam, Pemda Tanah Datar, Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, BPBD Tanah Datar, Basarnas, wali nagari Batu Palano, Aia Angek, dan Koto Baru.

Dian menilai BKSDA Sumbar juga memiliki SOP tentang pendakian. SOP itu seperti jumlah pendaki gunung yang dibatasi.

"Kami memiliki SOP dalam pendakian. Misal dalam mendaki, minimal jumlah pendaki tiga orang. Selain itu, dalam SOP itu menjelaskan pada siang hari semua pendaki tidak boleh mendekati kawah Gunung Marapi," jelas Dian.

Ia juga mengungkapkan, bukan hanya Gunung Marapi yang berstatus level II (waspada), melainkan seluruh gunung berapi yang ada di Indonesia. Dian mencontohkan Gunung Bromo, Kerinci, dan Rinjani. Oleh karena itu, pendakian dibolehkan asal ada mitigasi bencana.

Sementara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang melihat BKSDA Sumbar dan pejabat yang membuka jalur pendakian di Merapi tanpa menjamin keselamatan hak atas hidup pendaki.

“Akibat erupsi gunung merapi sebanyak 24 orang meninggal dunia dan banyak pendaki yang luka-luka akibat lalainya pemerintah untuk menjamin keselamatan hak atas hidup rakyat di zona bencana,” ujar Direktur LBH Padang Indira Suryani.



Direktur LBH Padang Indira Suryani.

LBH Padang menilai adanya dugaan kelalaian berupa tak ada pengawasan yang ketat untuk menjamin

keselamatan pendaki menjadi masalah krusial yang menyebabnya 24 hak atas hidup terenggut.

“Saat ini tak satupun kata maaf diucapkan untuk korban dan keluarga korban dari otoritas terkait yakni BKSDA Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan jajaran lainnya yang membuka posko pendakian dalam situasi gunung Marapi waspada dua tanpa adanya pengawasan yang ketat untuk menjamin keselamatan hidup pendaki,” kata Indira.

LBH Padang menilai, uang yang dipungut kepada pendaki semestinya juga dibarengi dengan pertanggungjawaban mutlak dan penuh bagi BKSDA untuk menjamin keselamatan hak atas hidup.

“Kami memastikan wajib ada pertanggungjawaban atas meninggalnya 24 orang pendaki. Bagi korban yang masih hidup dan memerlukan pengobatan wajib dipenuhi hak atas pengobatan dan pemulihannya oleh otoritas berwenang terutama yang setuju dalam pembukaan jalur pendakian tersebut,” bilang Indira.

Akhir tahun 2023, Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar menghentikan penyelidikan dugaan pidana dalam tragedi Marapi, karena tak menemukan unsur pidana di dalamnya.

Menurut Indira, kalau pihak kepolisian serius, ada sejumlah pasal yang bisa disangkakan seperti 359 KUHP, Pasal 56 atau 75 UU Kebencanaan, dan UU ITE.

“Proses hukum izin itu salah. Instansi yang memiliki kewenangan izin, harus bertanggungjawab penuh di sana terutama keselamatan, lingkungan, manusia, ekosistem,” kata Indira.

Dia menambahkan, dalam tragedi Marapi yang membuat 24 pendaki meninggal, sudah jelas ada kelalaian formal. Sebab, mereka yang meninggal maupun cedera mendaki Marapi melalui sistem yang dibangun BKSDA atau secara formal.

Dalam hal ini, sambung Indira, UU ITE bisa disangkakan, kalau BKSDA tak memberi informasi yang tuntas. “Ini bisa diuraikan,” tukasnya.

Lalu, lanjut Indira, KUHP secara umum karena kealpaan, alpa menulis di SOP, alpa menjelaskan.

Menurutnya, UU KIP juga bisa, karena tidak memberikan informasi menyebabkan kerugian, dimana UU umum dan UU sektoral bisa diimplementasikan

“Kami membuka pintu memberikan bantuan hukum gratis bagi penyintas Marapi,” pungkas Indira.